



SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa agar pelaksanaan pembangunan Daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan terarah sesuai visi dan misi pembangunan Daerah, diperlukan arah kebijakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Wonogiri.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai arahan dan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan stakeholder dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah sesuai visi dan misi.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk :

- a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, proporsional, efektif dan efisien dalam melaksanakan pembangunan;
- b. menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
- c. pedoman bagi calon Bupati dalam menyusun visi dan misi kepala daerah; dan

- d. pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB II SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 4

- (1) RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

BAB VI PENUTUP

- (2) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 98), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 16 Agustus 2024
BUPATI WONOGIRI,
Ttd.
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 16 Agustus 2024

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,

Ttd.

FX. PRANATA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Frc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum.
NIP. 19740519 199903 2 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH: (2-209/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

I. UMUM.

Kabupaten Wonogiri merupakan daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, daerah diberi kewenangan mengatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada tanggal 10 Januari 2024, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dalam rangka mendukung terwujudnya efektivitas, efisiensi, dan sinergitas penyelenggaraan pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang merupakan implikasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

RPJPD mendesak untuk dibuat guna menjadi acuan bagi penyusunan rencana daerah dengan hierarki dan skala lebih sempit serta mengacu pada rencana nasional dan daerah dengan hierarki yang lebih tinggi dan skala lebih luas. Dalam tata perencanaan pembangunan daerah, RPJPD Kabupaten Wonogiri akan menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Wonogiri.

Peraturan Daerah ini mengatur substansi yang terkait dengan ruang lingkup RPJPD yang meliputi visi pembangunan, misi pembangunan, arah kebijakan pembangunan, sasaran pokok pembangunan, sistematika RPJPD, serta pengendalian dan evaluasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 206



PEMERINTAH
KABUPATEN WONOGIRI

RPJPD

RENCANA
PEMBANGUNAN
JANGKA
PANJANG
DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah

DAFTAR ISI

Perda RPJPD

Daftar Isi i

Daftar Tabel v

Daftar Gambar x

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 LATAR BELAKANG..... I-1

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN..... I-3

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN..... I-5

1.3.1. Hubungan Antara RPJPN Tahun 2025-2045 dengan
RPJPD I-5

1.3.2. Hubungan Antara RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun
2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-
2045 I-5

1.3.3. Hubungan Antara RPJPD Kabupaten Wonogiri tahun
2025-2045 dengan dokumen RTRW Kabupaten Wonogiri Tahun
2011-2031 I-6

1.3.4. Hubungan Antara RPJPD Kabupaten Wonogiri tahun
2025-2045 dengan Dokumen Perencanaan Sektor
Lainnya..... I-6

1.3.5. Hubungan Antara RPJPD Kabupaten Wonogiri tahun
2025-2045 dengan RPPLH Kabupaten Wonogiri Tahun
2023-2053 I-6

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN I-7

1.5 SISTEMATIKA I-7

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI..... II-1

2.1.1 Kondisi Geografis..... II-1

2.1.2 Topografi..... II-2

2.1.3 Geologi..... II-3

2.1.4 Hidrologi..... II-4

2.1.5 Klimatologi..... II-4

2.1.6 Kualitas Lingkungan Hidup II-5

2.1.7	Kondisi Demografi	II-7
2.1.8	Penggunaan Lahan	II-8
2.1.9	Wilayah Rawan Bencana.....	II-8
2.1.10	Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Bencana..	II-10
2.2	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II-11
2.2.1	Kesejahteraan Ekonomi	II-11
A.	Pertumbuhan Ekonomi	II-11
B.	Pangan	II-18
C.	Laju Inflasi	II-22
D.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	II-23
E.	Indeks Williamson	II-27
F.	Rasio Gini	II-28
G.	Penduduk Miskin	II-29
H.	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	II-31
I.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	II-32
2.2.2	Kesejahteraan Sosial Budaya.....	II-32
A.	Indeks Pembangunan Manusia	II-32
B.	Angka Harapan Hidup (AHH).....	II-36
C.	Harapan Lama Sekolah (HLS).....	II-39
D.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS).....	II-42
E.	Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan	II-45
F.	Kasus Gizi Buruk dan Stunting.....	II-51
G.	Persentase Desa Mandiri	II-56
H.	Sosial Budaya	II-57
2.3	ASPEK DAYA SAING DAERAH	II-59
2.3.1	Daya Saing Ekonomi Daerah	II-59
2.3.2	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)	II-62
2.3.3	Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah.....	II-64
A.	Jalan Dan Jembatan	II-64
B.	Sumber Daya Air	II-68
C.	Air Minum dan Sanitasi	II-70
2.3.4	Daya Saing Iklim Investasi.....	II-72
2.3.5	Indeks Desa Membangun (IDM)	II-75
2.4	ASPEK PELAYANAN UMUM	II-76
2.5	HASIL EVALUASI RPJPD TAHUN 2005 – 2025.....	II-82

2.6 TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA
PELAYANAN PUBLIK..... II-91
2.6.1. Trend Demografi II-91
2.6.2. Kebutuhan Saran dan Prasarana..... II-92
2.7 PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH..... II-97
2.7.1. Pusat Pertumbuhan Wilayah II-97
2.7.2. Pengembangan Wilayah Kota II-100
2.7.3 Pengembangan Kawasan Startegis..... II-102

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS..... III-1

3.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH III-1
3.1.1. Aspek Geografis dan Demografi III-1
3.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat III-4
3.1.3. Aspek Daya Saing..... III-7
3.1.4. Aspek Pelayanan Umum III-13
3.2. TANTANGAN PEMBANGUNAN DAERAH III-14
3.2.1. Megatren III-14
3.2.2. Perubahan Iklim, Daya Dukung dan Daya Tampung III-16
3.3. ISU STRATEGIS DAERAH III-25
3.3.1. Kualitas Hidup Masyarakat yang Berdayasaing III-25
3.3.2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah..... III-26
3.3.3. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas
dan ramah lingkungan III-27
3.3.4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan..... III-27
3.3.5. Keberlanjutan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup
dan Penanggulangan Bencana..... III-27
3.3.6. Pemerataan Pembangunan III-28

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH IV-1

4.1 LOGFRAME PEMBANGUNAN KABUPATEN WONOGIRI
2025-2045 IV-1
4.2 VISI DAERAH..... IV-3
4.3 MISI DAERAH IV-7

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK V-1

5.1. ARAH KEBIJAKAN V-1

5.1.1 Arah Kebijakan Periode 2025-2029..... V-1

5.1.2 Arah Kebijakan Periode 2030-2034..... V-2

5.1.3 Arah Kebijakan Periode 2035-2039..... V-3

5.1.4 Arah Kebijakan Periode 2040-2045..... V-4

5.2. SASARAN POKOK V-6

5.2.1 Sasaran 1. Terwujudnya Kualitas Hidup Masyarakat
Didukung Lingkungan Sosial dan Berbudaya Maju V-6

5.2.2 Sasaran 2. Terwujudnya Ekonomi yang berdaya saing
dan berkelanjutan. V-11

5.2.3 Sasaran 3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan
yang Baik V-19

5.2.4 Sasaran 4. Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam,
Lingkungan Hidup, dan Bencana Alam..... V-20

BAB VI PENUTUP..... VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)Kabupaten Wonogiri Tahun 2018-2023	II-5
Tabel 2. 2	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	II-6
Tabel 2. 3.	Indeks Rawan Bencana Kabupaten Wonogiri Tahun 2013-2022	II-9
Tabel 2. 4	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2023	II-12
Tabel 2. 5	Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Wonogiri Tahun 2014-2023	II-13
Tabel 2. 6	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Wonogiri Tahun 2014-2023.....	II-14
Tabel 2. 7	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Wonogiri 2014-2023	II-16
Tabel 2. 8	Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Wonogiri	II-16
Tabel 2. 9	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Wonogiri 2014-2023	II-17
Tabel 2. 12	Ketersediaan dan Kebutuhan Beras di Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2023	II-18
Tabel 2. 13	Ketersediaan dan Kebutuhan Jagung di Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2022	II-19
Tabel 2. 14	Ketersediaan dan Kebutuhan Kedelai di Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 – 2023.....	II-20
Tabel 2. 15	Ketersediaan dan Kebutuhan Kacang Tanah di Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 – 2023	II-20
Tabel 2. 16	Ketersediaan dan Kebutuhan Ubi Kayu di Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 – 2023.....	II-21
Tabel 2. 17	Perkembangan Stabilitas Harga Pangan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2023	II-21
Tabel 2. 18	Jumlah Penganggur dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Wonogiri Tahun 2014-2023	II-24
Tabel 2. 19	Perbandingan TPT (%) Kabupaten Wonogiri terhadap TPT Nasional, Propinsi Jawa Tengah dan Rata-Rata TPT Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2016-2023.....	II-24
Tabel 2. 20	Perbandingan Jumlah Dan Pertumbuhan Penganggur Antar Kab Wonogiri Dengan Nasional, Propinsi Jateng	

	Dan Kab/Kota Se Eks Karisidenan Surakarta Tahun 2016-2023	II-26
Tabel 2. 21	Indeks Williamson Kabupaten Wonogiri dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2023	II-28
Tabel 2. 22	Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Wonogiri dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah 2014-2023	II-28
Tabel 2. 23	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Wonogiri Tahun 2014-2023	II-30
Tabel 2. 10	Perkembangan IPM Kabupaten Wonogiri Tahun 2013-2022	II-33
Tabel 2. 11	Perbandingan IPM dan Pertumbuhan IPM Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten / Kota Sewilayah Subosukowonosraten, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2014-2023	II-34
Tabel 2. 24	Pembandingan AHH dengan target daerah Tahun 2023 dan akhir RPJMD 2021-2026 Kabupaten Wonogiri.....	II-37
Tabel 2. 25	Perbandingan AHH dan Pertumbuhan AHH Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten / Kota Sewilayah Subosukowonosraten, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2013-2022	II-37
Tabel 2. 27	HLS Kabupaten / Kota wilayah Subosukowonosraten, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2013-2023	II-40
Tabel 2. 28	Pertumbuhan HLS Kabupaten / Kota Wilayah Subosukowonosraten, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2014-2023	II-41
Tabel 2. 29	Perbandingan RLS dengan target daerah Tahun 2022 dan akhir RPJMD 2021-2026 Kabupaten Wonogiri	II-43
Tabel 2. 30	Capaian RLS Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten / Kota se-Subosukowonosraten, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2014-2023	II-43
Tabel 2. 31	Pertumbuhan RLS Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten / Kota se wilayah Subosukowonosraten, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2014-2023	II-44
Tabel 2. 32	Perbandingan Pengeluaran per Kapita (d disesuaikan) dengan target daerah Tahun 2023 dan akhir RPJMD 2021-2026 Kabupaten Wonogiri	II-46
Tabel 2. 33	Perbandingan PPP Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten / Kota Sewilayah Subosukowonosraten, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2014-2023	II-46
Tabel 2. 34	Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang) kabupaten Wonogiri tahun 2021 sampai 2023	II-48

Tabel 2. 35	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi tahun 2014-2023	II-50
Tabel 2. 36	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 tahun Kabupaten Wonogiri Tahun 2014-2023.....	II-51
Tabel 2. 37	Persentase Satuan Pendidikan Yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya Dan Mengarusutamakan Kebudayaan Tahun 2014-2023	II-51
Tabel 2. 38	Balita dan penderita gizi buruk Kabupaten Wonogiri tahun 2018-2023.....	II-52
Tabel 2. 39	Kasus Kematian Ibu dan Tuberkulosis Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 s.d. 2023.....	II-55
Tabel 2. 40	Indeks Pembangunan Keluarga 2014-2023	II-56
Tabel 2. 41	Indeks Ketimpangan Gender 2014-2023.....	II-56
Tabel 2. 42	Jumlah Desa Mandiri, Maju, Berkembang dan Tertinggal di Kabupaten Wonogiri di Tahun 2019 s.d 2023	II-57
Tabel 2. 55	Perkembangan Seni dan Budaya Kabupaten Wonogiri..	II-57
Tabel 2. 43	Pengeluaran Rata – Rata Per Kapit Tiap Bulan Penduduk Wonogiri Tahun 2016-2022	II-59
Tabel 2. 44	Rasio Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang bekerja Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan (orang)	II-63
Tabel 2. 45	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama	II-64
Tabel 2. 46	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota tahun 2014-2023	II-65
Tabel 2. 47	Kondisi Terminal Tipe C di Kabupaten Wonogiri Tahun 2023	II-66
Tabel 2. 48	Indeks Keselamatan dan Layanan Angkutan Darat tahun 2021-2023	II-67
Tabel 2. 49	Ketersediaan Air Waduk Tahun 2023	II-68
Tabel 2. 50	Volume Ketersediaan Air Waduk Gajah Mungkur Tahun 2017- 2020	II-69
Tabel 2. 51	Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi di Kabupaten Wonogiri	II-69
Tabel 2. 52	Kondisi Fisik Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten di Wonogiri	II-70
Tabel 2. 53	Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Wonogiri tahun 2016-2022	II-71
Tabel 2. 54	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Tahun 2014-2023	II-71
Tabel 2. 56.	Jumlah Investor di Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2023	II-72

Tabel 2. 57.	Pertumbuhan Nilai Investasi di Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2023.....	II-74
Tabel 2. 58	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 - 2023.....	II-75
Tabel 2. 59	Jumlah Desa Mandiri, Maju, Berkembang dan Tertinggal di Kabupaten Wonogiri di Tahun 2019 s.d 2024	II-76
Tabel 2. 60	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 - 2022.....	II-77
Tabel 2. 61	Indeks Sistem Pembangunan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 - 2023	II-78
Tabel 2. 62	Perkembangan Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Wonogiri	II-79
Tabel 2. 63	Perkembangan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018-2023	II-80
Tabel 2. 64	Indeks Integritas Nasional Tahun 2018 s.d. 2023.....	II-80
Tabel 2. 65	Jumlah ASN Kabupaten Wonogiri Tahun 2014-2023....	II-81
Tabel 2. 66	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2023	II-82
Tabel 2. 67	Proyeksi Penduduk Wonogiri Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2025-2045	II-91
Tabel 2. 68	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Tahun 2014-2023.....	II-92
Tabel 2. 69	Proyeksi Kebutuhan Rumah di Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045.....	II-92
Tabel 2. 70	Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Kabupaten Wonogiri 2025-2045.....	II-93
Tabel 2. 71	Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045.....	II-93
Tabel 2. 72	Proyeksi Timbulan Sampah di Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045.....	II-95
Tabel 2. 73	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045	II-95
Tabel 2. 74	Pembakuan Tipe SD/MI, SLTP/MTs, SMU.....	II-96
Tabel 2. 75	Proyeksi Kebutuhan Sekolah di Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045.....	II-97
Tabel 2. 76	Perkembangan Jumlah Emisi CO2 (TonCO2e) Berdasarkan Sektor Kabupaten Wonogiri	II-18
Tabel 4. 1.	Sasaran Utama Visi.....	IV-6
Tabel 5. 1	Sasaran Pokok, Arah Kebijakan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Kualitas Hidup	

	Masyarakat Didukung Lingkungan Sosial dan Berbudaya Maju Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045	V-10
Tabel 5. 2	Sasaran Pokok, Arah Kebijakan, Indikator Utama Pembangunan Dan Target Terwujudnya Ekonomi Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045.....	V-18
Tabel 5. 3	Sasaran Pokok,Arah Kebijakan,Indikator Utama Pembangunan Dan Target Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045	V-20
Tabel 5. 4	Sasaran Pokok, Arah Kebijakan, Indikator Utama Pembangunan Dan Target Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam,Lingkungan Hidup,dan Bencana Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045	V-21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah.....	I-5
Gambar 2. 1	Peta Wilayah Kabupaten Wonogiri	II-2
Gambar 2. 2	Piramida Penduduk Kabupaten Wonogiri Tahun 2022..	II-7
Gambar 2. 3	Peta Pola Ruang Kabupaten Wonogiri	II-8
Gambar 2. 8	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2023	II-12
Gambar 2. 9	Data Inflasi Kabupaten Wonogiri Tahun 2014-2023 berdasarkan Data Inflasi Kota Surakarta.....	II-23
Gambar 2. 10	Indeks Williamson Kabupaten Wonogiri Tahun 2014-2023	II-27
Gambar 2. 11	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Tahun 2023	II-31
Gambar 2. 12	Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (Indeks P2) Kabupaten Wonogiri dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023.....	II-32
Gambar 2. 13	Perbandingan IPM Kabupaten Wonogiri dengan Subosukawonosraten Tahun 2023	II-35
Gambar 2. 14	Perbandingan Pertumbuhan IPM Kabupaten Wonogiri dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	II-35
Gambar 2. 15	Perbandingan Pertumbuhan IPM Kabupaten Wonogiri dengan Nasional Tahun 2023	II-36
Gambar 2. 16	Pembandingan AHH dengan target daerah Tahun 2022 dan akhir RPJMD 2021-2026 Kabupaten Wonogiri.....	II-37
Gambar 2. 17	Perbandingan Pertumbuhan AHH Kabupaten Wonogiri dengan Subosukawonosraten Tahun 2023	II-38
Gambar 2. 18	Perbandingan Pertumbuhan AHH Kabupaten Wonogiri dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023	II-39
Gambar 2. 19	Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 s.d. 2023.....	II-40
Gambar 2. 20	Perbandingan Pertumbuhan HLS Kabupaten Wonogiri dengan Subosukawonosraten Tahun 2023	II-41
Gambar 2. 21	Perbandingan Pertumbuhan HLS Kabupaten Wonogiri dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023	II-42
Gambar 2. 22	Perbandingan RLS dengan target daerah Tahun 2023 dan akhir RPJMD 2021-2026 Kabupaten Wonogiri	II-43

Gambar 2. 23 Perbandingan Pertumbuhan RLS Kabupaten Wonogiri dengan Subosukawonosraten Tahun 2023	II-44
Gambar 2. 24 Perbandingan Pertumbuhan RLS Kabupaten Wonogiri dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023	II-45
Gambar 2. 25 Perbandingan Pengeluaran per Kapita (d disesuaikan) dengan target daerah Tahun 2023 dan akhir RPJMD 2021-2026 Kabupaten Wonogiri	II-46
Gambar 2. 26 Perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan Kabupaten Wonogiri dengan Subosukawonosraten Tahun 2023	II-47
Gambar 2. 27 Perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan Kabupaten Wonogiri dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023	II-47
Gambar 2. 28 Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang) kabupaten Wonogiri tahun 2021 sampai 2023	II-49
Gambar 2. 29 Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi tahun 2013-2023	II-50
Gambar 2. 30 Kasus Gizi Buruk di Subosukawonosraten Tahun 2019-2023	II-52
Gambar 2. 31 Target Capaian penurunan Prevalensi Stunting 2018-2024	II-54
Gambar 2. 32 Perkembangan Nilai Tukar Petani Kabupaten Wonogiri	II-61
Gambar 2. 33 Pertumbuhan PDRB per Kapita Harga Berlaku dan Harga Konstan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2022	II-61
Gambar 2. 34 Perkembangan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2015-2022	II-62
Gambar 2. 35 Jumlah Investor tahun 2016-2022	II-73
Gambar 2. 36 Perkembangan SPBE darti tahun 2018 - 2022	II-78
Gambar 2. 37 Peta Rencana Pengembangan Wilayah Perkotaan	II-102
Gambar 3. 1 Perkembangan Jumlah Emisi CO2 (TonCO2e) Berdasarkan Sektor Kabupaten Wonogiri	III-18
Gambar 3. 2 Kontribusi Penurunan Emisi Berdasarkan Sektor di Kabupaten Wonogiri	III-18
Gambar 3. 3 Peta Potensi Bencana Gerakan Tanah	III-20
Gambar 3. 4 Peta Potensi Bencana Banjir	III-21
Gambar 3. 5 Peta Potensi Bencana Kekeringan	III-22
Gambar 3. 6 Peta Potensi Bencana Gempa Bumi Kabupaten Wonogiri	III-23
Gambar 3. 7 Lokasi Prioritas Aksi Ketahanan Iklim Jawa Tengah	III-24

Gambar 4. 1 Logframe Pembangunan Kabupaten Wonogiri
2025-2045..... IV-3

Gambar 4. 2 Visi Pembangunan Kabupaten Wonogiri 2025-2045 IV-4

Gambar 4. 3 Misi Pembangunan Wonogiri 2025-2045 IV-7

Gambar 5. 1 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Wonogiri 2025-
2045..... V-6



BAB
I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan Jangka Panjang merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi Kabupaten Wonogiri untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga Kabupaten Wonogiri dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta mempunyai daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat global.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025 berakhir pada tahun 2025. Seiring dengan berakhirnya RPJPD periode sebelumnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah untuk menyusun RPJPD untuk periode tahun 2025-2045.

RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok Pembangunan Daerah Jangka Panjang untuk 20 tahun yang disusun selaras dan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonogiri, dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Wonogiri Tahun 2023-2053, serta memperhatikan rekomendasi KLHS RPJPD Kabupaten Wonogiri.

RPJPD Tahun 2025-2045 memiliki kedudukan dan fungsi strategis dalam Pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan RPJPD merupakan acuan dan panduan dalam penyusunan RPJMD setiap periode kepemimpinan Kepala Daerah. RPJPD juga memberikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun.

Arah pembangunan dalam RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan memperhatikan isu-isu daerah, regional, nasional, maupun global, antara lain megatren dan perubahan iklim yang dapat berdampak pada pembangunan

daerah.

RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045 merupakan perencanaan jangka panjang yang mencerminkan cita-cita masyarakat Wonogiri yang terkandung dalam Visi mewujudkan **Wonogiri Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Yang Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan** dan memiliki komitmen yang kuat dan berintegrasi dengan kepentingan lingkungan hidup dengan berpedoman kepada Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2023-2053 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk jangka waktu 20 tahun mendatang.

Kepentingan lingkungan ini termuat dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu konsep yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan memenuhi kebutuhan mereka. Oleh sebab itu, konsep pembangunan berkelanjutan ini yang meliputi aspek lingkungan, sosial, ekonomi serta hukum dan tata kelola akan termuat dalam dokumen RPJPD Kabupaten Wonogiri 2025-2045.

Dalam menjaga keberlanjutan pembangunan Kabupaten Wonogiri dengan berakhirnya periode RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025 maka Pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu menyusun RPJPD kabupaten Wonogiri tahun 2025-2045 dan juga untuk mendukung dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 seperti yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dengan visi pembangunan Indonesia tahun 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

Arah pembangunan dalam mewujudkan visi tersebut adalah mewujudkan kualitas hidup masyarakat, ekonomi yang berdayasaing dan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik serta ketahanan sumber daya alam, lingkungan hidup dan bencana alam.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045 dilaksanakan melalui tahapan: 1) persiapan rancangan awal rencana Pembangunan jangka panjang daerah; 2) konsultasi publik ranwal RPJPD; 3) konsultasi ranwal RPJPD ke Gubernur; 4) musyawarah perencanaan pembangunan daerah; 5) penyusunan rancangan akhir rencana Pembangunan jangka Panjang daerah; 6) pembahasan Rancangan Perda RPJPD bersama DPRD; 7) evaluasi Rancangan Perda RPJPD ke Gubernur; 8) penetapan perda RPJPD

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

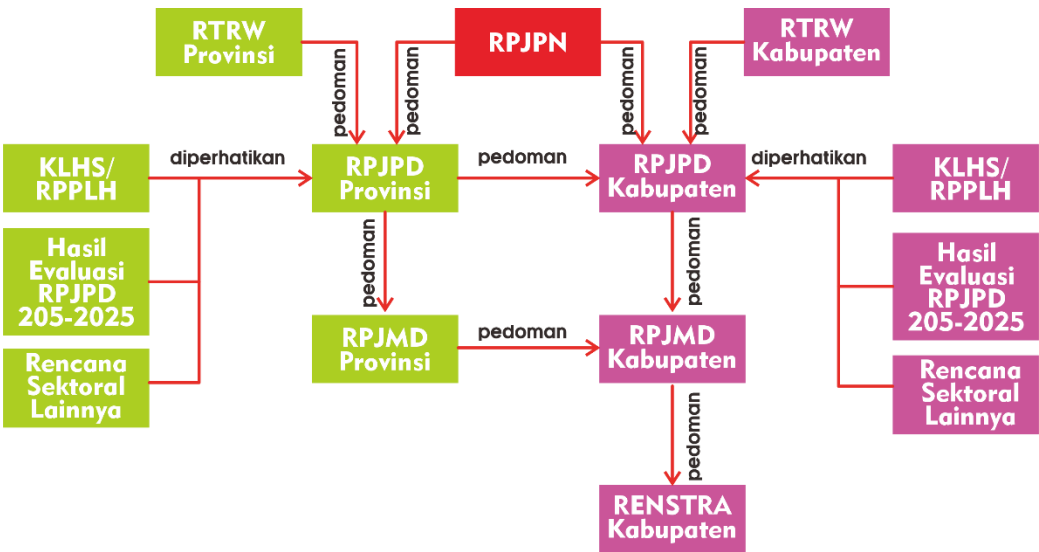
Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 tahun 2020 tentang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 2).
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2023-2053;
 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Penyusunan RPJPD Kabupaten Wonogiri wajib memperhatikan berbagai kesepakatan dan dokumen perencanaan multi sektor di tingkat nasional, antara lain: Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 - 2045, RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2045, RTRW Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2040, Perda RPPLH Kabupaten Wonogiri Tahun 2023-2053, KLHS RPJPD, dan hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025, Secara skematik dapat dikemukakan sebagai berikut.



Gambar 1. 1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah

1.3.1. Hubungan Antara RPJPN Tahun 2025-2045 dengan RPJPD

Dokumen RPJPD Kabupaten Wonogiri tahun 2025-2045 disusun dengan selaras dan berpedoman pada dokumen RPJPN Tahun 2025 - 2045. Hal ini dimaksudkan supaya pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional sesuai dengan pendekatan keterpaduan dan integrasi perencanaan pembangunan nasional dengan daerah.

1.3.2. Hubungan Antara RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, sehingga dokumen RPJPD Kabupaten Wonogiri selaras dan berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045. Dengan demikian akan terwujud keterpaduan dan integrasi perencanaan pembangunan di daerah. Secara sinergis daerah turut serta menyelesaikan isu strategis dalam pembangunan secara nasional.

1.3.3. Hubungan Antara RPJPD Kabupaten Wonogiri tahun 2025-2045 dengan dokumen RTRW Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2031

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keselarasan Pembangunan jangka panjang daerah wajib memperhatikan dokumen perencanaan tata ruang dan wilayah tentang pola ruang dan struktur ruang. Dalam pemanfaatan lahan dan sumberdaya alam sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2031, terutama tentang struktur ruang dan pola ruang serta arah kebijakan pembangunan berkelanjutan.

1.3.4. Hubungan Antara RPJPD Kabupaten Wonogiri tahun 2025-2045 dengan Dokumen Perencanaan Sektor lainnya

Penyusunan RPJPD Kabupaten Wonogiri harus berpedoman pada Permendagri 86 Tahun 2017 serta Inmendagri Pedum RPJPD dan SEB Kemendagri serta arahan Bappenas terkait penyelarasan RPJPN dan RPJPD pada sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Penyusunan RPJPD Kabupaten Wonogiri juga memperhatikan berbagai dinamika perubahan dan kesepakatan internasional dan dokumen perencanaan multi sektor, antara lain Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kabupaten Wonogiri dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan serta pengurangan risiko bencana, juga mempertimbangkan Peraturan Daerah kabupaten Wonogiri nomor 32 tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPJPD) tahun 2023-2053.

1.3.5. Hubungan Antara RPJPD Kabupaten Wonogiri tahun 2025-2045 dengan RPPLH Kabupaten Wonogiri Tahun 2023-2053

Dalam konsep pembangunan yang berkelanjutan yang merupakan visi dari RPJPD Kabupaten Wonogiri tahun 2025-2045 perlu adanya jaminan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang serius, konsisten, dan konsekuen. Sehubungan dengan hal tersebut maka dibuat kebijakan yang mampu menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan yaitu dengan perda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Wonogiri Tahun 2023-2053.

Maka seluruh kebijakan yang tercantum dalam dokumen RPPLH harus menjadi dasar dan dimuat dalam RPJPD Kabupaten Wonogiri tahun 2025-2045

sebagai dokumen perencanaan Daerah, bahkan secara fungsional RPPLH sangat bermanfaat dan mendukung penyusunan RTRW dan analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045 adalah merumuskan cita-cita pembangunan kabupaten Wonogiri dua puluh tahun ke depan dengan memasukkan ke dalam visi, misi, arah kebijakan, sasaran pokok, indikator dan target capaian setiap periode pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2025-2045 dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2045, RTRW Provinsi Jawa Tengah, dan RTRW Kabupaten Wonogiri

Adapun tujuan penyusunan dokumen RPJPD Tahun 2025- 2045 adalah:

1. Sebagai pedoman penyusunan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Wonogiri selama 20 tahun ke depan
2. Menjaga keselarasan visi, misi, dan arah kebijakan antara Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pusat
3. Pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan lima tahunan yaitu RPJMD dan satu tahunan RKPD

1.5 SISTEMATIKA

Sistematika RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045 secara ringkas sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan secara ringkas mengenai isi dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang secara keseluruhan meliputi: latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen perencanaan, serta sistematika penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menjelaskan gambaran umum tentang kondisi daerah sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJPD yang meliputi : aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis

Hasil perumusan pada bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah dengan memperhatikan permasalahan regional dan nasional untuk merumuskan isu strategis pembangunan jangka panjang dengan memperhatikan tantangan perubahan internasional, regional yang mempengaruhi perubahan dan dinamika di Kabupaten Wonogiri.

Bab IV Visi dan Misi Daerah

Pada bab ini dikemukakan dan dijabarkan tentang visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah dengan berdasarkan pada permasalahan dan isu strategis yang dikemukakan pada bab sebelumnya.

Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

Uraian pada bab ini mengemukakan tentang arah kebijakan pembangunan jangka panjang dan sasaran pokok serta indikator sasaran pokok beserta target setiap periode perencanaan jangka menengah daerah.

Bab VI Penutup

Bab ini menjelaskan tentang kaidah pelaksanaan RPJPD Kabupaten Wonogiri tahun 2025-2045 dan transisi dalam pelaksanaannya.

BAB II

GAMBARAN UMUM

KONDISI DAERAH





GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

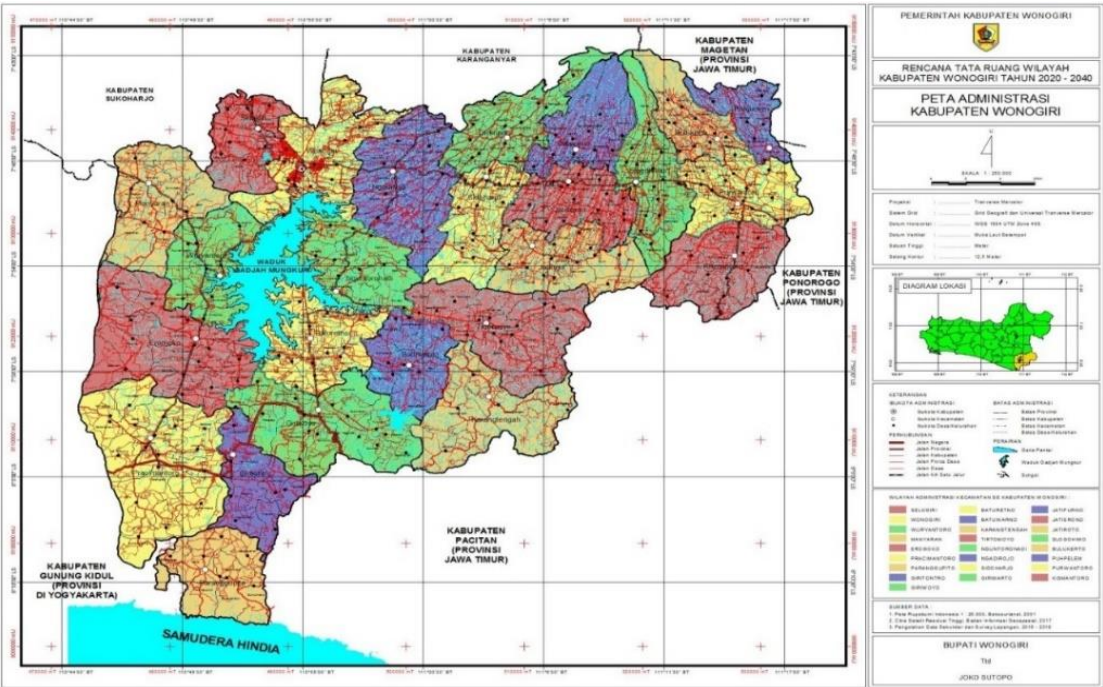
Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan Masyarakat, aspek infrastruktur, aspek sumber daya alam, lingkungan hidup dan bencana, aspek kualitas lingkungan hidup dan sumber daya manusia, aspek sosial budaya, aspek tata kelola pemerintahan, aspek demografi dan kebutuhan prasarana sarana pelayanan publik. Di samping banyak kemajuan yang telah dicapai, masih banyak pula tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Untuk itu, masih diperlukan upaya mengatasinya dalam pembangunan daerah 20 tahun ke depan

2.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Wonogiri secara astronomis terletak antara 7°45’ dan 8°15’ Lintang Selatan (LS) dan antara 110°45’ dan 111°18’ Bujur Timur (BT), dengan luas wilayah 190.432 Ha atau 5,85% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Wonogiri merupakan kabupaten di wilayah selatan Provinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas wilayah administrasi wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar;
- Sebelah Timur : Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ponorogo (Provinsi Jawa Timur);
- Sebelah Tenggara : Kabupaten Pacitan (Provinsi Jawa Timur);
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia;
- Sebelah Barat : Kabupaten Gunung Kidul (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Kabupaten Wonogiri terbagi menjadi 25 kecamatan yang terdiri dari 251 desa dan 43 kelurahan, serta 2.306 dusun/lingkungan.



Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kabupaten Wonogiri

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan, **Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)** merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa kecamatan, dan **Pusat Permukiman (PPL)** yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

PKL berupa Kawasan Perkotaan Wonogiri di Kecamatan Wonogiri, **PPK** meliputi 1) PPK Pada Perkotaan Kecamatan Pracimantoro, (2) PPK Pada Perkotaan Kecamatan Baturetno, (3) PPK Pada Perkotaan Kecamatan Purwantoro, (4) PPK Pada Perkotaan Kecamatan Jatisrono, dan (5) PPK Pada Perkotaan Kecamatan Wuryantoro. Sedangkan **PPL** meliputi (1) Kecamatan Paranggupito, (2) Kecamatan Karantengah, dan (3) Kecamatan Puhpelem.

2.1.2 Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Wonogiri sebagian besar berupa perbukitan, dengan 20% bagian wilayah merupakan perbukitan kapur, terutama yang berada di wilayah selatan Kabupaten Wonogiri. Sebagian topografi tidak rata dengan kemiringan lereng rata – rata 30⁰, sehingga terdapat perbedaan antara kawasan yang satu dengan kawasan lainnya yang membuat kondisi sumber daya alam berbeda.

Berikut penjelasan secara rinci Kabupaten Wonogiri terbagi menjadi dalam 4 wilayah topografi, antara lain:

- a. Wilayah dengan topografi datar (kemiringan lereng 0-2%) memiliki luas wilayah 423 hektare. Wilayah dengan topografi datar ini berada di sebagian wilayah Kecamatan Ngadirojo, Sidoharjo, Jatisrono, Jatiroto, Eromoko, Wuryantoro.
- b. Wilayah dengan topografi bergelombang (kemiringan lereng 2-15 %) memiliki luas wilayah 7.865 hektare. Wilayah dengan topografi bergelombang ini berada di semua wilayah Kabupaten Wonogiri.
- c. Wilayah dengan topografi curam (kemiringan lereng 15-40%) memiliki luas wilayah 237 hektare. Wilayah dengan kondisi topografi seperti ini terletak di Kecamatan Giriwoyo, Batuwarno, Karangtengah, Tirtomoyo, Jatiroto, Girimarto, Jatipurno, Slogohimo, Bulukerto, Puhpelem, Purwantoro, dan Kismantoro.
- d. Wilayah dengan topografi sangat curam (kemiringan lereng >40%) memiliki luas wilayah 96 hektare wilayah dengan kondisi topografi seperti ini terletak di Kecamatan Karangtengah, Tirtomoyo, Jatiroto, Jatipurno, Slogohimo, Puhpelem, Purwantoro, dan Kismantoro.

2.1.3 Geologi

Kondisi geologi di Kabupaten Wonogiri yakni singkapan batuan berumur dari oligosen hingga holosen, terdiri atas batuan sedimen, batuan gunung berapi, batuan teribisan, dan endapan permukaan. Struktur geologi yang dijumpai di Kabupaten Wonogiri berupa lipatan sesar dan kekar yang terletak di barat – timur dan barat laut – tenggara. Satuan perbukitan Karst atau batu gamping terletak di bagian barat daya dan selatan Kabupaten Wonogiri, morfologi ini dicirikan dengan lembah dan bukit agak terjal, sempit, berelief agak kasar, memiliki kemiringan lereng sekitar 15-30%. Pada bagian selatan Kabupaten Wonogiri dicirikan dengan adanya gua dan sungai bawah tanah. Penggunaan lahan di bagian selatan merupakan hutan jati, kebun campuran semak belukar, dan permukiman.

Kabupaten Wonogiri mempunyai kawasan bentang alam Kars, yang berada di wilayah selatan yang meliputi kecamatan Pracimantoro, Giritontro, Giriwoyo, Paranggupito. Kawasan Kars ini termasuk salah satu kawasan *Global Geopark* Gunungsewu yang memiliki potensi dan nilai strategis untuk dikembangkan yaitu : nilai keilmuan, nilai Ekonomi, dan nilai kemanusiaan. Potensi untuk mengembangkan wilayah selatan Kabupaten Wonogiri, sehingga bisa meningkatkan perkembangan ekonomi dan potensi wisata.

2.1.4 Hidrologi

Wilayah Kabupaten Wonogiri dilalui oleh Sungai Bengawan Solo yang merupakan salah satu sungai terbesar di Provinsi Jawa Tengah dengan anak sungai Keduang, Wiroko, Solo Hulu, Temon, Kali Alang, Kali Wuryantoro, Ngunggahan, Kresek, Buyuk dan Walikan. Adapun sungai tersebut mengalir ke Waduk Serbaguna Wonogiri yang merupakan hulu Bengawan Solo kecuali untuk sungai Walikan, alirannya tidak masuk ke Waduk Gajah Mungkur karena berada di bawah waduk.

Di Kabupaten Wonogiri selain Waduk Serbaguna Wonogiri juga telah dibangun Bendungan Pidekso yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 28 Desember tahun 2021. Bendungan Pidekso merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Bidang SDA yang memiliki kapasitas 25 juta meter kubik dengan luas Genangan 232 hektar yang berfungsi sebagai pengendali banjir dan konservasi lahan juga diharapkan mampu mengairi area irigasi seluas 1500 hektar, dan menjadi salah satu penyedia sumber air baku sebesar 300 liter/detik, di Wilayah Kabupaten Wonogiri. Bendungan Pidekso berada pada desa Pidekso Kecamatan Giriwoyo dan pada aliran Sub DAS Solo Hulu.

2.1.5 Klimatologi

Kabupaten Wonogiri memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau yang silih berganti sepanjang tahun. Berdasarkan data yang dikutip dari website id.weatherspark.com, rata-rata kecepatan angin per jam di Wonogiri mengalami variasi musiman signifikan sepanjang tahun. Masa yang lebih berangin dalam setahun berlangsung selama 4,7 bulan, dari 10 Juni sampai 1 November, dengan kecepatan angin rata-rata lebih dari 6,1 knot. Bulan paling Berangin dalam setahun di Wonogiri adalah Agustus dengan kecepatan angin rata-rata 7,9 knot. Masa angin lebih tenang dalam setahun berlangsung selama 7,3 bulan, dari 1 November sampai 10 Juni bulan paling tidak berangin dalam setahun di Wonogiri adalah Maret, dengan kecepatan angin rata-rata 4,4 knot. Menurut data yang dirilis BPS Kabupaten Wonogiri tahun 2023 suhu udara di Wonogiri pada musim kemarau maupun di musim penghujan maksimal 35° C dan minimal 21° C. Adapun suhu rata-rata di Wonogiri berkisar antara 25° C sampai 28,5° C. Jumlah hari hujan di musim kemarau 26 hari hujan dan di musim penghujan 117 hari hujan. Adapun pada tahun 2022 curah hujan tertinggi tercatat di bulan Nopember yaitu 486 mm, dan curah hujan terendah tercatat di bulan Juli sebesar 33 mm, sedangkan jumlah intensitas hujannya adalah 1 mm/tahun.

2.1.6 Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Wonogiri dapat ditunjukkan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terdiri dari informasi status mutu air, informasi status mutu udara, persampahan, kerentanan perubahan iklim, dan emisi gas rumah kaca. Kemampuan lahan di Kabupaten Wonogiri diketahui dari hasil *overlay* peta dengan menggunakan peta sekunder skala 1:250.000. Adapun informasi yang tersedia dan digunakan untuk mengetahui daya dukung lahan meliputi bentuk lahan, hidrogeologi (produktivitas akuifer), satuan batuan, bencana, dan penggunaan lahan. Hasil analisis yang dilakukan dalam pembuatan daya dukung dan daya tampung lahan di Kabupaten Wonogiri maka dapat dibagi menjadi 5 kelas, yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah.

Tabel 2. 1 Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)Kabupaten Wonogiri Tahun 2018-2023

No	Keterangan	Tahun											
		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	IKA	80	78,2	85	85,7	85	77,5	72	55,45	78,5	58,42	79	80
2	IKU	80	78,78	85	82,71	85	84,18	90	88	85	87,79	85,5	88,33
3	IKTL	40	41,57	40	41,57	41	41,81	41	33,34	42,5	33,73	43	42,63
4	IKLH	64	63,72	67	57,1	72	72,4	72,5	63,79	72,6	64,91	72,70	75,19

Sumber:Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri, 2023

Kab. Wonogiri berupaya untuk mempertahankan kategori BAIK pada Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Program dan kegiatan untuk keberlanjutan kualitas lingkungan hidup yang sudah ada akan tetap dipertahankan. Adapun program tersebut melalui kegiatan: 1) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, 2) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, 3) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

Penghitungan IKLH Kabupaten Wonogiri pada tahun 2018-2020 masih menggunakan pedoman penghitungan Permen LHK Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016. Adapun mulai tahun 2021-2022 penghitungan IKLH Kabupaten Wonogiri sudah menggunakan perhitungan berdasarkan Permen LHK 27 Tahun 2021 sehingga nilai IKLH belum mampu mencapai target yang telah di tetapkan (penetapan target masih menggunakan

pedoman Permen LHK yang lama). Kabupaten Wonogiri juga tengah berupaya untuk ikut andil dalam pelestarian lingkungan. Hal ini diwujudkan dalam keikutsertaan Kabupaten Wonogiri dalam kegiatan *Green Infrastructure Initiative* (GII). Rencana pengembangan *Green Infrastructure Initiative* yang akan dikembangkan di Kabupaten Wonogiri meliputi sektor transportasi, pengadaan air bersih dan pengelolaan air limbah. Kemudian untuk mendukung ketersediaan air bersih di Kabupaten Wonogiri, pemerintah daerah setiap tahunnya melakukan inventarisasi kegiatan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) yang secara tidak langsung juga ikut andil dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berdasarkan data Kabupaten Wonogiri tahun 2023, pada tahun 2023 menunjukkan bahwa angka IKLH bernilai 75,19 dimana nilai tersebut termasuk dalam kategori baik. IKLH terdiri dari tiga indeks penyusun yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) bernilai 80, Indeks Kualitas Udara (IKU) bernilai 88,33 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) bernilai 42,63. Berdasarkan surat Sekditjen PPKL KLHK Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024 Tentang penyampaian Hasil Pertemuan Ekspose IKLH 2023 (capaian tahun 2023 Kabupaten Wonogiri sebesar 64,65 dengan angka setelah konversi menjadi 75,19).

Kualitas lingkungan hidup juga dipengaruhi oleh timbunan sampah, besarnya timbunan sampah yang terolah dengan fasilitas pengolahan sampah yang dimiliki sangat berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Data timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah kabupaten Wonogiri tersedia mulai tahun 2018 s.d. 2023, dan berikut data dalam tabel :

Tabel 2. 2 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Tahun 2018-2023

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	SATUAN	REALISASI 2014-2023					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	0,422	0,403	0,448	0,372	0,383	0,198

Sumber:Dinas Lingkungan Hidup Kab. Wonogiri, 2024

Berdasarkan data diatas, timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah tahun mulai tahun 2018 sampai 2023. Dari data diatas mengalami penurunan yang cukup baik.

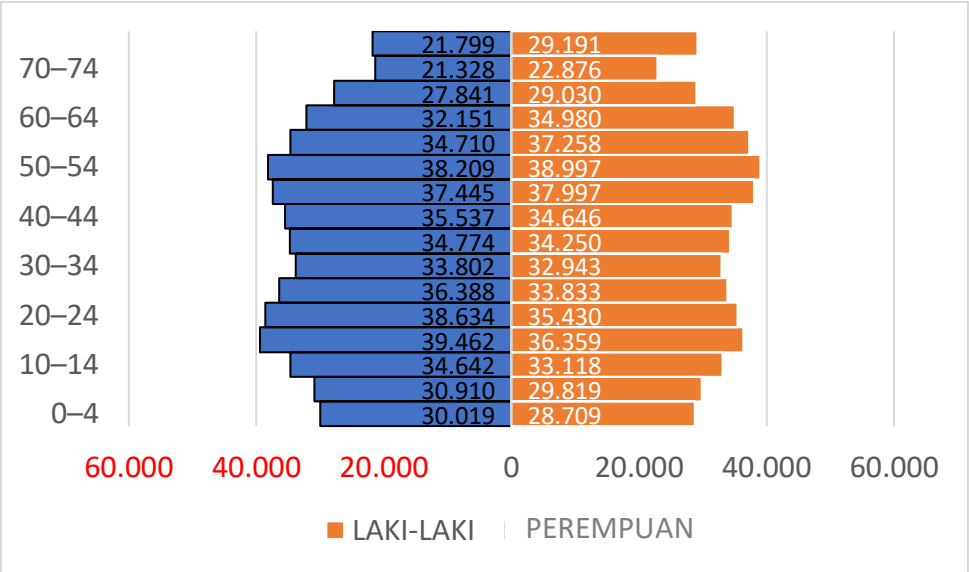
2.1.7 Kondisi Demografi

Kondisi demografi suatu wilayah digambarkan dari karakteristik penduduk yang dilihat dari jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, dan komposisi penduduk. Di Kabupaten Wonogiri juga terbentuk masyarakat adat yang pada tahun 2024 sebanyak 5 kelompok masyarakat adat, dengan jumlah anggota 1040 orang

Kondisi demografi suatu wilayah digambarkan dari karakteristik penduduk yang dilihat dari jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, dan komposisi penduduk. Pada tahun 2014, jumlah penduduk di Kabupaten Wonogiri adalah 945.817 jiwa. Jumlah penduduk tahun 2023 mengalami peningkatan yang menjadi 1.051.085 jiwa.

Jika dilihat dari sisi pertumbuhannya, dalam periode tahun 2018 sampai tahun 2022 rata-rata laju pertumbuhan penduduk adalah 0,62 %, angka ini masih berada di bawah rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebesar 0,81%. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan penduduk di Kabupaten Wonogiri termasuk yang pertumbuhannya paling rendah dan relatif menurun dari tahun ke tahun.

Berdasarkan piramida penduduk tahun 2022, dapat dilihat pula bahwa penduduk dengan usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak, yaitu 717.294 jiwa, daripada penduduk usia non produktif (0-14 dan 65 tahun ke atas), yaitu 335.891 jiwa. Dari penduduk usia produktif dan non produktif diketahui bahwa angka ketergantungan di Kabupaten Wonogiri tahun 2022 adalah 46,82 %. Angka ini masih berada pada kategori tinggi karena diatas 41 %.



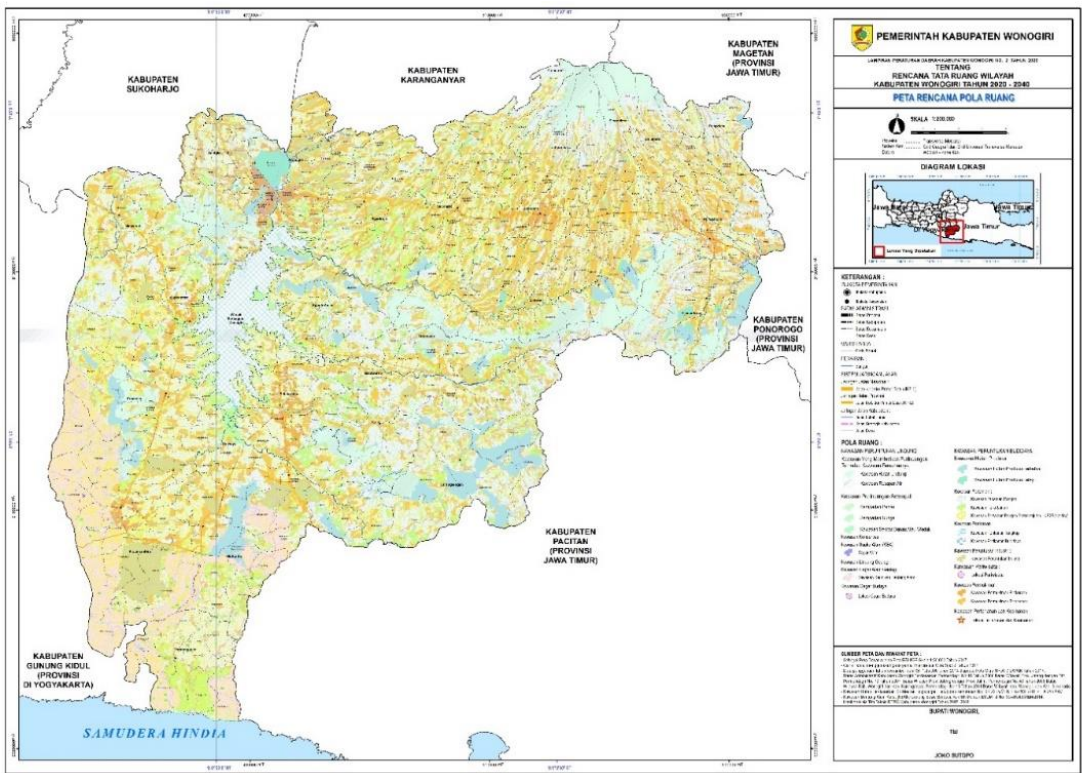
Sumber: BPS Kabupaten Wonogiri, 2022

Gambar 2. 2 Piramida Penduduk Kabupaten Wonogiri Tahun 2022

2.1.8 Penggunaan Lahan

Kabupaten Wonogiri memiliki luas wilayah 190.432 hektare. Sepanjang tahun 2013-2022 terjadi perubahan komposisi penggunaan lahan di Wonogiri. Meskipun begitu, secara umum terkait dengan penggunaan lahan sawah dan bukan sawah tidak terjadi perubahan.

Penambahan luas wilayah dari 182,236 ha menjadi 190,432 ha berpedoman pada Perda no 2 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Wonogiri tahun 2020-2040, dimana penambahan luas wilayah tersebut setelah memasukan luasan Waduk Gajah Mungkur yang sebelumnya belum dihitung. Penggunaan lahan di Kabupaten Wonogiri bisa dilihat pada Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Wonogiri.



Sumber: RTRW Kabupaten Wonogiri 2020 – 2040

Gambar 2. 3 Peta Pola Ruang Kabupaten Wonogiri

2.1.9 Wilayah Rawan Bencana

Kondisi topografis, geologis, hidrologis, dan geografis wilayah Kabupaten Wonogiri menyebabkan adanya kawasan-kawasan yang berpotensi terdampak peristiwa yang mengancam atau mengganggu keberlangsungan hidup masyarakat yang dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, serta kerugian harta benda dan dampak psikologis. Terdapat beberapa daerah di wilayah Kabupaten Wonogiri yang masuk kawasan rawan bencana.

Berdasarkan data dari BPBD kabupaten Wonogiri, sejak tahun 2015 s.d. 2022, Kabupaten Wonogiri mengalami beberapa kali bencana, maka ditetapkan Indeks Rawan Bencana Kabupaten Wonogiri sesuai dengan tabel berikut ini :

Tabel 2. 3. Indeks Rawan Bencana Kabupaten Wonogiri Tahun 2013-2022

INDIKATOR INDEKS RESIKO BENCANA (IRB)	TAHUN									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
NILAI	NA	NA	145,6	145,6	145,6	145,6	145,6	124,77	124,77	108,91

Sumber : BPDB Kabupaten Wonogiri, 2023

Penilaian Indeks Resiko Bencana dimulai pada tahun 2015. Berdasarkan perkembangan data IRB diatas, tahun 2015 sampai 2019, Kabupaten Wonogiri berada dalam status dengan kalas resiko bencana “tinggi”, namun data menunjukkan tahun 2020 sampai 2022 menunjukan penurunan status ke “sedang”.

Sedangkan berdasarkan RT RW Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2040, terdapat 5 kawasan rawan bencana, yaitu: Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah, Kawasan Rawan Bencana Banjir, Kawasan Rawan Bencana Kekeringan, Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi, dan Kawasan Rawan Bencana Tsunami.

A. Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah

Kawasan rawan bencana gerakan tanah, merupakan kawasan yang kondisi tanahnya mudah longsor karena terdapat zona yang bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah. Mengingat kondisi topografi Kabupaten Wonogiri yang sebagian besar berupa perbukitan maka banyak wilayah di Kabupaten Wonogiri merupakan kawasan rawan bencana gerakan tanah, meliputi Kecamatan Karangtengah, Batuwarno, Tirtomoyo, Jatiroto, Kismantoro, Puhpelem, Bulukerto, Slogohimo, Jatipurno, Girimarto, dan Nguntoronadi.

B. Kawasan Rawan Bencana Banjir

Kawasan Rawan Bencana Banjir, merupakan tempat-tempat yang secara rutin setiap musim hujan mengalami genangan lebih dari 6 (enam) jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim normal. Kawasan rawan bencana banjir meliputi Kecamatan Tirtomoyo dan Nguntoronadi.

C. Kawasan Rawan Bencana Kekeringan

Kawasan Rawan Bencana Kekeringan, merupakan kawasan yang berpotensi atau pernah mengalami kekeringan baik untuk kebutuhan pertanian maupun air minum. Pembangunan Bendungan Pidekso di Kecamatan Giriwoyo merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Bidang SDA. Kapasitas bendungan mencapai 25 juta meter kubik dengan luas genangan 232 hektar yang berfungsi sebagai pengendali banjir dan konservasi lahan, juga mampu menghasilkan potensi air bersih dengan debit yang cukup besar mencapai 300 liter/detik. Potensi air bersih yang dihasilkan diharapkan bisa menjadi solusi permanen untuk mengatasi kekeringan di wilayah Wonogiri selatan. Selain untuk keperluan air bersih, Bendungan Pidekso direncanakan mampu mensuplai kebutuhan air irigasi untuk lahan pertanian seluas 1.500 hektar.

D. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami

Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Wonogiri dipengaruhi adanya sesar atau patahan, yaitu Sesar Opak di sepanjang aliran Sungai Oyo di Kecamatan Manyaran. Sedangkan untuk potensi bencana tsunami ada di wilayah pesisir Samudera Hindia di Kecamatan Paranggupito.

2.1.10 Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Bencana

Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi bencana. Hal ini kemudian mendorong pemerintah dan seluruh stakeholder dan masyarakat untuk melaksanakan upaya pra bencana yang mencakup pencegahan, mitigasi, kesiapiagaan, serta peringatan dini mengingat bencana alam dapat terjadi secara tiba-tiba. Risiko bencana dapat terjadi karena kurangnya kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Oleh karena itu, kesiapsiagaan merupakan tahapan yang strategis untuk mewujudkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Desa tangguh bencana merupakan salah satu upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana, dengan membentuk desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Indikator kunci desa tangguh bencana, yaitu penguatan kualitas layanan dasar, penguatan pengelolaan risiko bencana termasuk di

dalamnya adaptasi perubahan iklim melalui proses pemberdayaan masyarakat, sistem koordinasi dalam pengelolaan risiko bencana, penguatan sistem kesiapsiagaan untuk mendukung kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Perkembangan pembentukan desa tangguh bencana (destana) di Kabupaten Wonogiri dalam kurun waktu 2018-2022 cenderung mengalami penambahan jumlah desa tangguh bencana tiap tahunnya dengan rinciannya adalah sebagai berikut.

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

A. Pertumbuhan Ekonomi

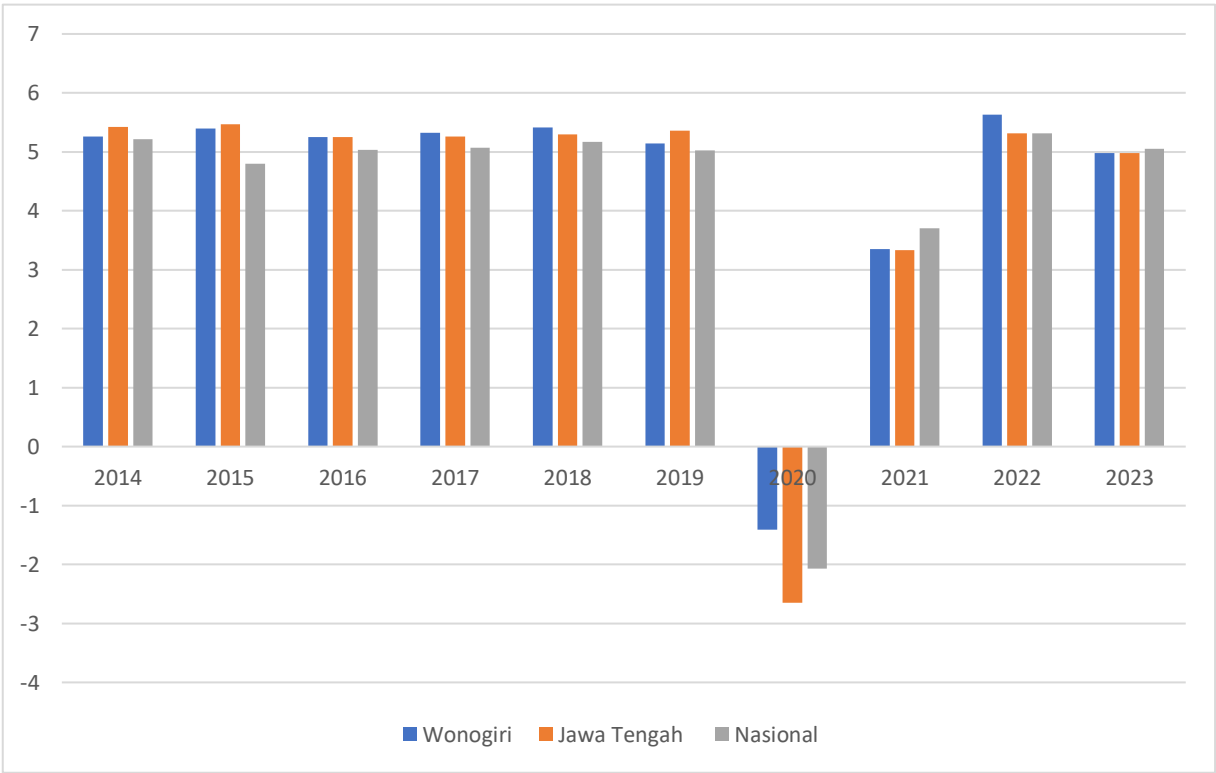
Perekonomian Kabupaten Wonogiri selama sepuluh tahun terakhir mengalami fluktuatif (naik turun) yang terjadi pada tahun 2014 – 2023. Kurun waktu tahun 2014 sampai 2015, pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan namun dalam tahun 2016 turun menjadi 5,25 %. Terjadi peningkatan dalam kurun waktu 2017 sampai 2019, namun tahun 2019 mengalami penurunan karena diakibatkan oleh isu covid-19.

Perekonomian Wonogiri pada tahun 2023 tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 4,98% %, lebih tinggi dibandingkan capaian pada tahun 2022 yang tumbuh 3,35%. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonogiri pada tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun 2018 yaitu dari 5,41% menjadi 5,14%, sementara pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah pada tahun tersebut mengalami kenaikan dari 5,30% menjadi 5,36%. Seperti halnya Kabupaten Wonogiri, pertumbuhan ekonomi nasional juga mengalami penurunan dari 5,17% menjadi 5,02%. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonogiri -1,41%, lebih baik dibanding pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar -2,65% dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar -2,07%. Pertumbuhan minus tahun 2020 disebabkan karena melemahnya seluruh kegiatan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2021 terjadi pertumbuhan ekonomi yang naik signifikan yakni sebesar 3,35 % angka ini lebih tinggi dari angka Provinsi Jawa Tengah. Dilanjutkan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 4,98% telah sama pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan dibawah nasional yaitu sebesar 5,05%, hal ini menandakan bahwa pemulihan ekonomi cukup baik di Kabupaten Wonogiri. Berikut perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonogiri dan Jawa Tengah serta Nasional tahun 2014 sampai 2023.

Tabel 2. 4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2023

Wonogiri		Jawa Tengah		Nasional	
Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
2014	5,26	2014	5,42	2014	5,21
2015	5,40	2015	5,47	2015	4,8
2016	5,25	2016	5,25	2016	5,03
2017	5,32	2017	5,26	2017	5,07
2018	5,41	2018	5,30	2018	5,17
2019	5,14	2019	5,36	2019	5,02
2020	-1,41	2020	-2,65	2020	-2,07
2021	3,35	2021	3,33	2021	3,70
2022	5,63	2022	5,31	2022	5,31
2023	4,98	2023	4,98	2023	5,05

Sumber : BPS Pusat, Prov. Jawa Tengah dan Kab. Wonogiri 2023



Sumber: BPS Pusat, BPS data BPS Kabupaten Wonogiri, 2023.

Gambar 2. 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2023

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri relatif setara dengan wilayah sekitar yakni daerah Subosukawonosraten (Surakarta 5,57; Boyolali 5,63; Sukoharjo 5,06; Karanganyar 5,53; Wonogiri 4,98; Sragen 5,23; Klaten 5,70), hal ini berdampak positif dalam keberlangsungan progam upaya pemulihan ekonomi kawasan setara. Walaupun dari segi nilai laju pertumbuhan Kabupaten Wonogiri masih pada peringkat 7 dari 7 kabupaten/kota.

Rata-rata penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2018-2022 terletak pada 3 (tiga) sektor paling dominan yang dapat dilihat pada distribusi persentase rata-rata lima tahun PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Wonogiri, antara lain:

- 1. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (26,16%);
- 2. Sektor Industri Pengolahan (18,61%); dan
- 3. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor (15,92%).

Tabel 2. 5 Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Wonogiri Tahun 2014-2023

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	34,23	33,63	32,82	31,47	30,2	28,57	30,12	29,38	29,10	28,16
B	Pertambangan dan Penggalian	3,24	3,44	3,41	3,30	3,31	3,15	3,13	3,14	2,80	2,73
C	Industri Pengolahan	15,22	15,50	16,00	16,29	16,58	16,85	17,55	18,13	18,08	18,61
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,06	0,06
F	Konstruksi	6,40	6,52	6,52	6,86	7,23	7,6	7,39	7,67	7,37	7,47
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,80	15,61	15,56	15,66	15,91	16,37	16,18	16,39	16,15	15,92
H	Transportasi dan Pergudangan	5,84	5,98	5,90	6,12	6,29	6,58	4,48	4,63	6,66	7,22
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,27	2,29	2,34	2,36	2,34	2,42	2,39	2,4	2,53	2,64
J	Informasi dan Komunikasi	0,75	0,73	0,74	0,84	0,89	0,94	1,1	1,15	1,07	1,09
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,97	3,01	3,16	3,20	3,24	3,22	3,23	3,23	3,14	3,01
L	Real Estate	0,73	0,74	0,74	0,75	0,75	0,74	0,74	0,73	0,69	0,67
M,N	Jasa Perusahaan	0,37	0,38	0,41	0,43	0,44	0,46	0,45	0,45	0,45	0,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	3,04	3,06	3,04	3,05	2,93	2,9	2,89	2,71	2,53	2,46

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	dan Jaminan Sosial Wajib										
P	Jasa Pendidikan	6,31	6,28	6,46	6,67	6,85	7,07	7,1	6,79	6,29	6,33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,93	0,96	0,98	1,02	1,04	1,07	1,2	1,19	1,14	1,14
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,77	1,73	1,79	1,85	1,88	1,93	1,92	1,88	1,89	1,95
PDRB		100,00	100,00	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Wonogiri, 2023

Dari tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa terdapat beberapa sektor ekonomi yang berpengaruh besar terhadap komposisi nilai PDRB Kabupaten Wonogiri berdasarkan komponen harga berlaku.

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan maih menjadi *leading sector* artinya masih menjadi sektor ekonomi yang paling berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wonogiri yakni memiliki kontribusi terbesar diantara sektor-sektor lain yakni sebesar 29,10%.

Sektor yang memiliki kontribusi terbesar setelah Sektor Pertanian adalah Sektor Industri Pengolahan yakni memiliki kontribusi sebesar 18,61%. Kemudian diikuti oleh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,92%. Ketiga sektor ini masih mendominasi komposisi PDRB dan menjadi sektor basis unggulan di Kabupaten Wonogiri.

Laju pertumbuhan tiap sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Wonogiri Tahun 2014-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 6 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Wonogiri Tahun 2014-2023

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.88	3.87	3.23	1.75	0,79	-0,36	4,31	2,27	3,72	-0.27
B	Pertambangan dan Penggalian	3.58	1.39	1.54	1.42	2,87	0,9	-2,19	4,23	-4,81	4,48
C	Industri Pengolahan	8.08	6.17	6.80	7.02	7,13	6,82	2,32	4,83	4,22	7,46
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5.91	4.81	8.60	6.29	4,55	4,45	5,25	4,11	2,34	4,84
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.56	2.18	1.94	6.83	4,36	6,15	3,23	5,19	-1,12	5,71

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
F	Konstruksi	5.15	7.13	6.99	9.91	8,67	8,09	-2,78	5,37	-0,93	7,53
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.06	5.34	5.42	5.35	7,35	7,6	-1,59	4,64	3,35	4,43
H	Transportasi dan Pergudangan	10.91	8.04	5.95	9.68	10,13	10,58	-34	5,08	50,48	10,91
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.00	5.65	7.27	6.49	6,08	8,75	-2,29	2,88	12,11	15,59
J	Informasi dan Komunikasi	17.69	9.41	8.67	18.26	14,49	11,97	17,63	8,77	2,46	11,74
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.94	6.45	9.87	5.27	5,47	4,88	1,42	1,76	1,51	2,49
L	Real Estate	8.45	8.03	6.80	6.49	4,29	3,4	-0,19	2,46	2,22	5,69
M,N	Jasa Perusahaan	11.70	8.58	10.13	8.73	6,35	9,64	-4,02	4,55	5,27	8,49
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.23	6.09	2.62	2.84	2,63	4,44	-1,12	-0,94	1,94	4,26
P	Jasa Pendidikan	12.46	7.55	7.55	8.56	8,5	7,85	-0,14	-1,35	1,37	7,44
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12.54	7.82	7.72	9.65	8,9	8,51	8,33	2,97	3,59	6,18
R,S,T, U	Jasa lainnya	9.85	4.06	6.63	7.17	8,95	8,41	-1,4	1,41	7,34	8,97
PERTUMBUHAN PDRB		4.78	5.26	5.40	5.25	5.32	5,14	-1,41	3,35	5,63	4,98

Sumber: BPS Kabupaten Wonogiri, 2023

Berdasarkan tabel laju pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dari laju pertumbuhan PDRB per tahun dari tahun 2013-2022, dapat diketahui sektor-sektor mana saja yang mengalami tren pertumbuhan positif tiap tahun. Terdapat 3 sektor ekonomi yang mengalami tren pertumbuhan PDRB terbesar yaitu : 1). Sektor Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 50,48%, 2). Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 12,11%, dan 3). Sektor Jasa Lainnya sebesar 7,34%. Sektor yang tumbuh cukup signifikan adalah sektor Transportasi dan Pergudangan yang sangat terdampak serius akibat pandemi COVID-19, dimana pada tahun 2020 sektor ini mengalami kontraksi atau minus sebesar -34 persen, namun dapat bangkit dengan pertumbuhan tercatat sebesar 50,48% pada tahun 2022.

Tabel 2. 7 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Wonogiri 2014-2023

Sektor PDRB Lapangan Usaha	PDRB Harga Berlaku (juta)									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.249.761,54	5.783.282,77	6.320.637,12	6.732.283,94	8.196.256	8.299.460	8.783.588	8.984.233	9.806.520	10.401.874,60
Pertambangan dan Penggalian	464.842,62	498.621,37	551.517,47	637.906,91	897.237	913.739	913.089	960.654	941.984	1.010.090
Industri Pengolahan	2.104.378,22	2.326.856,51	2.539.161,46	2.992.863,89	4.498.232	4.894.700	5.118.929	5.545.598	6.091.576	6.876.494
Pengadaan Listrik dan Gas	10.217,77	10.983,58	11.362,22	12.074,76	19.057	19.965	20.994	21.823	22.465	23.917
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	11.382,72	11.772,77	12.078,04	13.311,82	16.899	18.088	18.770	19.956	19.763	21.482
Konstruksi	881.603,86	1.002.301,26	1.100.419,54	1.258.557,11	1.961.284	2.208.360	2.154.733	2.344.742	2.484.639	2.760.737
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	2.445.114,26	2.618.003,95	2.849.141,75	3.107.736,69	4.318.625	4.754.486	4.719.223	5.011.710	5.441.725	5.880.610
Transportasi dan Pergudangan	824.394,80	884.502,34	968.261,34	1.148.078,95	1.705.892	1.911.934	1.307.554	1.414.623	2.245.286	2.667.387
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	347.866,58	366.930,13	400.881,05	445.559,13	635.595	702.394	696.699	733.065	854.237	975844.88
Informasi dan Komunikasi	114.905,43	122.926,09	129.789,62	146.792,90	240.315	272.095	321.995	351.349	360.323	403.621
Jasa Keuangan dan Asuransi	406.504,36	470.192,05	520.230,13	584.851,34	879.163	936.213	942.852	988.084	1.057.950	1.1127.793
Real Estate	111.120,04	114.568,64	125.783,03	143.588,27	202.678	213.993	215.667	223.506	231.047	247.029
Jasa Perusahaan	48.452,20	52.856,06	62.746,79	72.275,04	118.339	132.791	130.472	138.336	152.267	170.527
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	447.003,86	496.954,11	542.299,82	598.746,09	795.438	841.516	841.233	828.898	851.460	910.443
Jasa Pendidikan	663.113,00	866.867,91	1.053.508,35	1.241.626,95	1.857.748	2.053.530	2.069.721	2.075.963	2.118.034	2.338.054
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	114.789,34	135.170,39	156.450,62	183.675,56	282.520	311.932	350.591	364.480	384.152	420.905
Jasa Lainnya	261.049,60	261.278,15	296.722,15	348.307,26	511.339	559.721	559.441	573.873	636.006	720.858
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	14.506.500,21	16.024.068,09	17.640.990,52	19.668.236,61	27.136.617	29.044.917	29.165.551	30.580.893	33.699.434	36.942.649

Sumber : BPS Kabupaten Wonogiri 2023

Nilai PDRB terbesar masih didominasi oleh Sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan sehingga tumbuh cukup positif di tahun 2023. Nilai PDRB berdasarkan Harga Berlaku tercatat sebesar 10,4 Triliyun Rupiah. Diikuti oleh Sektor Industri Pengolahan sebesar 6,8 Triliyun Rupiah, dan kemudian diikuti oleh Sektor Perdagangan Besar, Eceran sebesar 5,8 Triliyun Rupiah, ketiganya ini menjadi sektor basis unggulan Kabupaten Wonogiri.

Tabel 2. 8 Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Wonogiri
Tahun 2014-2023

JENIS PENGELUAR AN PDRB	Distribusi PDRB Pengeluaran									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	72.89	71.67	70.87	70.98	70.26	70.34	70.66	70.83	70,80	71,24
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta	2.16	2.09	2.08	2.08	2.07	2.18	2.13	2.20	2,22	2,29
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8.90	8.88	8.50	8.37	8.04	7.89	7.63	7.38	6,88	6,64

JENIS PENGELUARAN PDRB	Distribusi PDRB Pengeluaran									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pembentukan Modal Tetap Bruto	20.73	20.75	20.79	20.99	21.18	21.97	20.97	21.40	20,68	20,51
Perubahan Inventori	3.59	-0.88	-0.21	0.22	0.39	0.42	0.63	0.47	0,50	0,50
Net Ekspor Antar Daerah	-8.27	-2.50	-2.04	-2.63	-1.93	-2.82	-2.01	-2.29	-1,08	-1,18
PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kab.Wonogiri 2023

Distribusi nilai PDRB Menurut Pengeluaran Jenis Pengeluaran pada tahun 2023 komposisi tertinggi adalah Pengeluaran Kosumsi Rumah Tangga yang memiliki nilai distribusi PDRB sebesar 71,23 persen. Kemudian diikuti jenis Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 20,51 persen dan diikuti Pengeluaran Kosumsi Pemerintah sebesar 6,64 persen.

Tabel 2. 9 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Wonogiri 2014-2023

JENIS PENGELUARAN PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB Pengeluaran (Persen)											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4.79	3.98	4.72	4.45	4.35	5.12	4.99	4.98	-0.90	3.43	5,89	6,18
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	5.52	4.50	8.10	-2.01	3.83	4.07	5.24	10.59	-3.57	5.03	5,87	8,74
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4.86	6.08	3.44	1.97	0.47	2.16	2.00	4.13	-4.32	-0.62	0,89	2,92
Pembentukan Modal Tetap Bruto	14.21	4.38	0.63	3.88	4.46	7.26	5.27	4.51	-4.61	6.01	0,72	6,40
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
Net Ekspor Antar Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
PDRB	5.94	4.78	5.26	5.40	5.25	5.32	5.41	5.14	-1.41	3.35	5,63	4,98

Sumber : BPS Kab.Wonogiri 2023

Berdasarkan data rentang tahun 2014 hingga 2023 terdapat trend mengenai pertumbuhan PDRB berdasarkan pengeluaran dimana Pengeluaran Kosumsi Rumah Tangga mengalami laju pertumbuhan terbesar dalam PDRB Pengeluaran dengan angka pertumbuhan pada tahun 2023 sebesar 6,18 persen melampaui pertumbuhan sebelum pandemi tahun 2019 yaitu sebesar 4,98 persen, kemudian diikuti oleh Pengeluaran Kosumsi Lembaga Swasta dan Nirlaba yang tumbuh sebesar 5,87 persen.

B. Pangan

Kabupaten Wonogiri berusaha menjadi kabupaten swasembada pangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri mengupayakan peningkatan produktivitas pangan utama. Pangan utama di Kabupaten Wonogiri terdiri dari beras, jagung, kedelai, kacang tanah, dan ubi kayu.

1) Beras

Ketersediaan beras di Kabupaten Wonogiri dari tahun 2018-2022 sudah mampu memenuhi kebutuhan. Dari tahun 2016-2022 ketersediaan beras cenderung fluktuatif. Data 5 tahun terakhir ini menunjukkan bahwa ketersediaan beras tertinggi di Kabupaten Wonogiri terjadi pada tahun 2020 sebesar 258.447 Ton dan kebutuhan beras tertinggi pada tahun 2022, yaitu sebesar 99.603 Ton.

Adapun Ketersediaan dan Kebutuhan Beras di Kabupaten Wonogiri Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 10 Ketersediaan dan Kebutuhan Beras di Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2023

No	Tahun	Luasan (Ha)	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	2016	N/A	238.791	84.083	N/A
2	2017	N/A	247.222	83.083	N/A
3	2018	75.814	221.822	84.587	2,93
4	2019	71.210	219.060	96.707	3,08
5	2020	73.515	258.447	96.707	3,52
6	2021	74.123	240.881	92.321	3,25
7	2022	80.874	250.383	99.603	3,10
8	2023	78.903	264.515	99.858	5,9

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri, 2023

Perbandingan produksi beras tahun 2031 (267.098,1938 ton) dengan proyeksi kebutuhan penduduk akan beras pada tahun 2031 sebesar 125.061,316 ton didapatkan nilai DDPb sebesar 2,14. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka diketahui bahwa DDPb Kabupaten Wonogiri pada tahun 2031 adalah 2,14 (nilai lebih besar dari satu), maka daya dukung pangan beras dinyatakan surplus. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Wonogiri pada tahun 2031 masih mampu menyediakan kebutuhan pangan akan beras untuk memenuhi kebutuhan penduduknya secara mandiri.

2) Jagung

Ketersediaan jagung di Kabupaten Wonogiri cenderung fluktuatif, dimana ketersediaan jagung menurun pada tahun 2020, akan tetapi ketersediaan jagung meningkat kembali pada tahun 2021-2022. Dalam kurun waktu 6 tahun (tahun 2016-2023) ketersediaan jagung tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 294.982 Ton. Ketersediaan jagung yang fluktuatif ini berbanding terbalik dengan kebutuhan jagan yang dari tahun 2018-2022 mengalami peningkatan dan pada tahun 2022 kebutuhan jagung menurun menjadi 139 Ton. Walaupun demikian ketersediaan jagung di Kabupaten Wonogiri sudah mampu memenuhi kebutuhan jagung setiap tahunnya.

Adapun Ketersediaan dan Kebutuhan Jagung di Kabupaten Wonogiri Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 11 Ketersediaan dan Kebutuhan Jagung di Kabupaten Wonogiri
Tahun 2016-2022

No	Tahun	Luasan (Ha)	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	2016	N/A	309.261	569	N/A
2	2017	N/A	221.822	569	N/A
3	2018	49.300	244.332	573	4,96
4	2019	49.968	262.027	655	5,24
5	2020	46.786	258.447	655	5,52
6	2021	49.820	276.065	939	5,54
7	2022	46.502	294.982	139	6,34
8	2023	46.897	265.417	140	6,34

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri, 2023

3) Kedelai

Ketersediaan kedelai di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2018-2022 cenderung mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2022 ketersediaan kedelai meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 (dari 1.347 Ton menjadi 1.963 Ton). Dari data ketersediaan dan kebutuhan kedelai di Kabupaten Wonogiri tahun 2018-2022, dapat dilihat bahwa ketersediaan kedelai di Kabupaten Wonogiri belum mampu memenuhi kebutuhan.nAdapun Ketersediaan dan Kebutuhan Kedelai di Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 12 Ketersediaan dan Kebutuhan Kedelai di Kabupaten Wonogiri
Tahun 2016 – 2023

No	Tahun	Luasan (Ha)	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	2016	N/A	11.748	18.791	N/A
2	2017	N/A	7.662	18.791	N/A
3	2018	5.439	6.824	18.903	1,25
4	2019	1.933	2.282	21.612	1,18
5	2020	980	1.230	21.612	1,26
6	2021	1.024	1.347	9.702	1,32
7	2022	1.817	1.963	10.460	1,08
8	2023	2.161	2.742	10.498	1,34

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri, 2023

4) Kacang Tanah

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, ketersediaan kacang tanah di Kabupaten Wonogiri fluktuatif. Ketersediaan kacang tanah terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 25.754 Ton. Akan tetapi, angka kebutuhan kacang tanah selalu meningkat dari tahun 2018-2022 (kecuali tahun 2019 dan 2020 dengan angka kebutuhan sama). Untuk kebutuhan tertinggi kacang tanah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2023 sebesar 226. Secara keseluruhan, ketersediaan kacang tanah di Kabupaten Wonogiri sudah mampu memenuhi kebutuhan.

Adapun Ketersediaan dan Kebutuhan Kedelai di Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 13 Ketersediaan dan Kebutuhan Kacang Tanah di Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 – 2023

No	Tahun	Luasan (Ha)	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	2016	N/A	35.855	114	N/A
2	2017	N/A	33.390	114	N/A
3	2018	26.730	30.113	115	1,13
4	2019	24.441	26.213	131	1,07
5	2020	22.573	26.365	131	1,17
6	2021	21.536	25.246	209	1,17
7	2022	22.075	25.754	225	1,17
8	2023	21.022	25.438	226	1,39

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri, 2022

5) Ubi Kayu

Ketersediaan ubi kayu cenderung menurun dari tahun 2018-2022 (kecuali pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan ketersediaan ubi kayu pada tahun 2019). Tetapi secara keseluruhan dalam kurun waktu lima tahun terakhir angka kebutuhan ubi kayu selalu meningkat dari tahun 2018-2023. Walaupun angka ketersedian menurun dan kebutuhan meningkat, ketersediaan ubi kayu di Kabupaten Wonogiri mampu memenuhi angka kebutuhan.

Adapun Ketersediaan dan Kebutuhan Ubi Kayu di Kabupaten Wonogiri Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 14 Ketersediaan dan Kebutuhan Ubi Kayu di Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 – 2023

No	Tahun	Luasan (Ha)	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	2018	47.187	869.402	5.957	18,42
2	2019	46.945	813.171	6.811	17,32
3	2020	45.563	822.020	6.811	18,04
4	2021	40.192	709.414	9.180	17,65
5	2022	36.617	668.547	9.893	18,26
6	2023	37.264	571.936	9.928	16

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri, 2022

Terjadinya perubahan harga yang tidak menentu akan berpengaruh pada besarandata tingkat akses pangan masyarakat Kabupaten Wonogiri. Fluktuasi (kenaikan atau penurunan) harga dapat diukur dengan besarnya nilai koefisien variasi (CV). Semakin kecil nilai CV, maka harga semakin stabil. Perkembangan stabilitas harga pangan di Kabupaten Wonogiri selama tahun 2016-2023 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2. 15 Perkembangan Stabilitas Harga Pangan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2023

No	Komoditas	Tahun								Rata-Rata
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Tepung Terigu	6.800	6.800	6.700	6.600	7.000	7.000	9.250	10.000	7.519
2	Minyak Goreng	12.200	9.300	12.200	12.000	12.500	13.900	16.350	17.750	13.275
3	Daging Sapi	111.000	111.500	111.400	110.000	118.000	117.500	129.500	130.650	117.444

No	Komoditas	Tahun								Rata-Rata
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
4	Telur Ayam Ras	21.500	20.500	20.500	25.000	23.000	22.100	25.750	27.388	23.217
5	Daging Ayam Ras	33.000	33.000	33.000	34.000	33.700	33.900	36.250	35.202	34.007
6	Cabai Merah Keriting	29.600	29.600	26.500	35.300	30.100	30.000	47.000	39.621	33.465
7	Bawang Merah	29.500	29.500	27.600	26.900	31.000	28.100	34.000	30.250	29.606
8	Gula Pasir Lokal	12.600	12.300	12.300	12.400	14.550	14.400	13.700	14.850	13.388
9	Kedelai	7.500	7.500	7.500	8.000	7.500	9.300	13.700	12.950	9.244
10	Jagung	4.600	4.600	4.700	4.500	5.400	5.500	7.500	7.950	5.594
11	Beras Termurah	8.400	8.400	8.500	9.500	9.775	9.775	9.550	10.300	9.275
12	Beras Medium	9.200	9.300	10.500	11.000	11.000	11.000	11.100	12.350	10.681
13	Beras Premium	12.000	12.000	12.000	12.000	11.800	11.800	12.500	13.675	12.222

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri, 2022
Keterangan : * Rata- rata dalam 1 tahun

Berdasarkan tabel diatas, perkembangan stabilitas harga pangan di Kabupaten Wonogiri dari tahun 2016-2023 dapat dilihat dari 13 komoditas antara lain tepung terigu, minyak goreng, daging sapi, telur ayam ras, daging ayam ras, cabai merah keriting, bawang merah, gula pasir lokal, kedelai, jagung, beras termurah, beras medium, dan beras premium. Perkembangan Stabilitas Harga Pangan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2023 memiliki nilai koefisien variasi komoditas yang berbeda di setiap tahunnya. Ada beberapa komoditas yang memiliki nilai koefisien variasi mengalami peningkatan, namun ada juga komoditas yang memiliki nilai koefisien variasi mengalami penurunan. Tabel tersebut juga menjelaskan bahwa harga sejumlah komoditas pangan strategis di Kabupaten Wonogiri selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuatif. Selain itu terdapat harga rata – rata setiap komoditas dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Pada tahun 2023 harga komoditas pangan di Kabupaten Wonogiri seluruhnya mengalami peningkatan dibandingkan dengan harga tahun 2021 (kecuali harga beras termurah, yang mengalami penurunan harga sebesar 225).

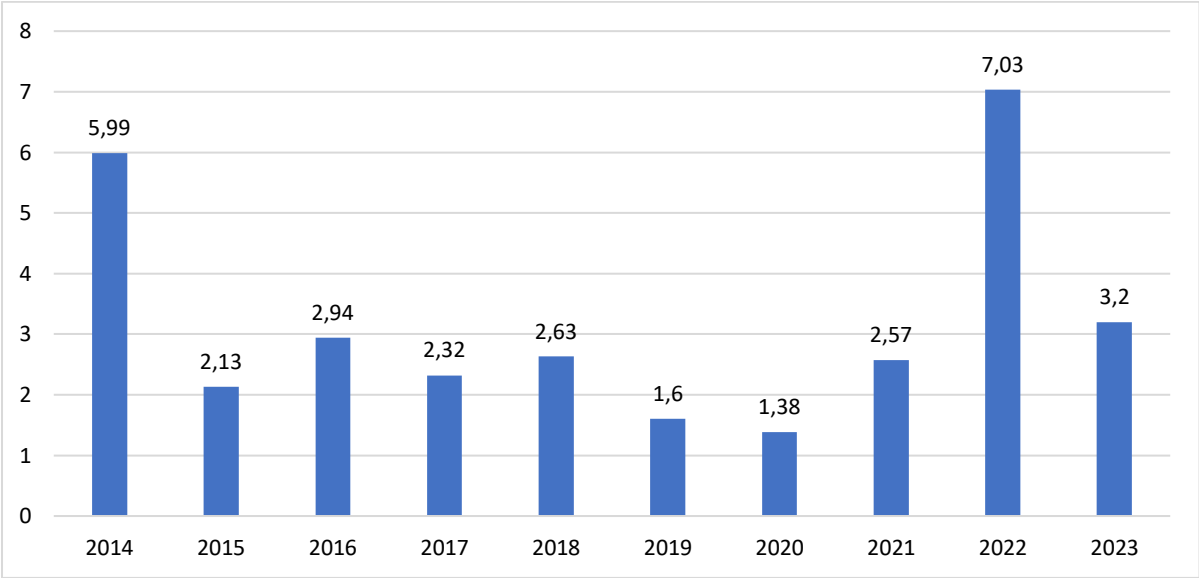
C. Laju Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga barang secara keseluruhan, peningkatan harga barang satu atau dua saja belum bisa dikatakan sebagai inflasi. BPS Kabupaten Wonogiri selama ini belum melakukan perhitungan inflasi yang terjadi di Wonogiri, maka untuk Laju inflasi Kabupaten Wonogiri masih mengikuti laju inflasi daerah terdekat. Untuk Kabupaten Wonogiri

menggunakan angka laju inflasi kota Surakarta sebagai pedoman laju inflasi

Inflasi Kabupaten Wonogiri berdasarkan daerah terdekat yaitu Surakarta selama tahun 2014 sampai 2023 mengalami fluktuatif. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2013 mencapai 8,6 %. Kemudian turun signifikan pada tahun 2015 mencapai 2,13 %. Kenaikan tinggi terjadi tahun 2021 sampai 2022, Dimana terjadi wabah covid-19 dan terjadi peningkatan harga barang barang kebutuhan masyarakat. Terjadi kenaikan pada 11 kelompok pengeluaran Masyarakat.

Dari 11 kelompok pengeluaran konsumsi yang dihitung IHK-nya, 9 kelompok pengeluaran mengalami kenaikan yaitu : kelompok makanan, minuman dan tembakau naik 1,95 persen, kelompok pakaian dan alas kaki naik 0,05 persen, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga naik 0,11 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga naik 0,02 persen, kelompok kesehatan naik 0,11 persen, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan naik 0,04 persen, kelompok rekreasi, olah raga dan budaya naik 0,04 persen, kelompok penyediaan makanan, minuman/restoran naik 0,12 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya naik 0,58 persen. Sebaliknya kelompok transportasi turun 0,47 persen. Sedangkan kelompok pendidikan relatif stabil.



Sumber: BPS Kota Surakarta,2023 data diolah

Gambar 2. 5 Data Inflasi Kabupaten Wonogiri Tahun 2014-2023 berdasarkan Data Inflasi Kota Surakarta

D. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap pasar kerja. TPT dapat dilihat dari jumlah pengangguran pada

tiap tahunnya terhadap jumlah angkatan kerja. Berikut adalah tabel jumlah pengangguran tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2014-2023.

Tabel 2. 16 Jumlah Penganggur dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Wonogiri Tahun 2014-2023

No	Tahun	TPT (%)
1	2014	3,45
2	2015	3,07
3	2016	2,64
4	2017	2,38
5	2018	2,28
6	2019	2,54
7	2020	4,24
8	2021	2,43
9	2022	1,95
10	2023	1,92

Sumber: Badan Pusat Statistik , 2023

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa TPT di Kabupaten Wonogiri tahun 2013-2023 mengalami tren yang fluktuatif dimana pada tahun 2013 TPT di Kabupaten Wonogiri sebesar 3,61% dan selama lima tahun berikutnya selalu turun dimana pada tahun 2018 sebesar 2,28% namu di tahun 2019 sedikit naik menjadi 2,54% dan di tahun 2020 karena adanya pandemi coivd 19 kembali naik menjadi 4,24% dan pada tahun 2021 kembali turun menjadi 2,43% dan di tahun 2022 kembali turun menjadi 1,95%, dan di tahun 2023 kembali sedikit turun menjadi 1,92%. hal ini di karenakan mulai pulihnya perekonomian pasca adanya pandemi covid 19.

Apabila dibandingkan dengan perubahan TPT nasional, TPT Propinsi dan TPT rata-rata wilayah kabupaten/kota se-eks karisidenan Surakarta (Sobosukowonosraten), Perubahan TPT Kabupaten Wonogiri di tahun 2023 masih lebih baik, sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 17 Perbandingan TPT (%) Kabupaten Wonogiri terhadap TPT Nasional, Propinsi Jawa Tengah dan Rata-Rata TPT Eks Karesidenan Surakarta Tahun 2016-2023

Tahun	Nasional		Prop. Jateng		Rata-Rata Eks Karesidenan Surakarta		Kab. Wonogiri	
	Realisasi TPT	Perubahan TPT	Realisasi TPT	Perubaha n TPT	Realisasi TPT	Perubaha n TPT	Realisas i TPT	Perubaha n TPT
2016	5,61	-0,57	4,63	-0,36	3,49	-0,23	2,64	-0,43
2017	5,5	-0,11	4,57	-0,06	3,68	0,19	2,38	-0,26

Tahun	Nasional		Prop. Jateng		Rata-Rata Eks Karesidenan Surakarta		Kab. Wonogiri	
	Realisasi TPT	Perubahan TPT	Realisasi TPT	Perubahan TPT	Realisasi TPT	Perubahan TPT	Realisasi TPT	Perubahan TPT
2018	5,3	-0,2	4,51	-0,06	3,28625	-0,39	2,28	-0,1
2019	5,23	-0,07	4,49	-0,02	3,45625	0,17	2,54	0,26
2020	7,07	1,84	6,48	1,99	5,8775	2,42	4,24	1,7
2021	6,49	0,58	5,95	0,53	5,09625	-0,78	2,43	-1,81
2022	5,86	0,63	5,57	0,38	4,43	-0,66	1,95	-0,48
2023	5,32	-0,54	5,13	-0,44	3,9375	-0,49	1,92	-0,03

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) kab. Wonogiri, 2023 terolah

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa TPT Kabupaten Wonogiri dalam kurun waktu 2013-2023 apabila dibandingkan dengan TPT Eks Karisidenan Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional selalu berada di bawah atau lebih baik daripada angka TPT Eks Karisidenan Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional, pada tahun 2016 angka TPT Kabupaten Wonogiri berada di angka 2,64% sedangkan rata-rata eksKarisidenan Surakarta sebesar 4,43%, Provinsi Jawa Tengah 3,49% dan Nasional 5,61% sedangkan pada tahun 2018 angka TPT Kabupaten Wonogiri berada di angka 2,28% sedangkan rata-rata eksKarisidenan Surakarta sebesar 4,43%, Provinsi Jawa Tengah 4,51% dan Nasional 5,30%. Pada tahun 2020 angka TPT di Kabupaten Wonogiri meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya hal ini juga relevan dengan angka TPT Eks karisidenan Surakarta, Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional hal ini tidak lepas dari adanya pandemi covid 19. Sampai di tahun 2022 hingga tahun 2023 angka TPT Kabupaten Wonogiri masih paling rendah atau paling baik jika di bandingkan dengan angka TPT eks Karisidenan Surakarta, Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional dimana angka TPT Tahun 2022 Kabupaten Wonogiri sebesar 1,95%, eks Karisidenan Surakarta 4,43%, Provinsi Jawa Tengah 5,57% dan Nasional 5,86% dan pada tahun 2023 Kabupaten Wonogiri sebesar 1,92%, eks Karisidenan Surakarta 3,93%, Provinsi Jawa Tengah 5,13% dan Nasional 5,32%

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ini tidak terlepas dari jumlah pengangguran di Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan Jumlah pengangguran sebagaimana tersaji pada tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah penganggur hampir dua kali lipat dari pada tahun sebelumnya dengan pertumbuhan penganggur pada tahun 2020 mencapai 11.068 orang menjadi orang akibat dampak covid-19 pada sektor ekonomi dan ketenagakerjaan namun pada tahun 2021 jumlah penganggur turun 10.936

orang menjadi 13.932 yang di tahun sebelumnya 24.868 orang sedangkan pada tahun 2022 jumlah penganggur sebanyak 11.492 orang dan pada tahun 2023 sebanyak 13.730 orang, sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2. 18 Perbandingan Jumlah Dan Pertumbuhan Penganggur Antar Kab Wonogiri Dengan Nasional, Propinsi Jateng Dan Kab/Kota Se Eks Karisidenan Surakarta Tahun 2016-2023

Th	Nasional		Prov.Jateng		Rata-Rata Kab/Kota Se Eks Karisidenan Surakarta		Wonogiri	
	Jumlah Penganggur	Pertumbuhan Penganggur	Jumlah Penganggur	Pertumbuhan Penganggur	Jumlah Penganggur	Pertumbuhan Penganggur	Jumlah Penganggur	Pertumbuhan Penganggur
2016	7.031.775	-529.047	816.111	-47.672	115.695	-6.589	13.791	-2.224
2017	7.005.262	-26.513	823.938	7.827	117.825	2.130	12.987	-804
2018	7.073.385	68.123	815.083	-8.855	114.781	-3.043	13.207	-804
2019	7.104.424	31.039	818.276	3.193	116.421	1.639	13.800	220
2020	9.767.754	2.663.330	1.214.342	396.066	176.898	60.476	24.868	593
2021	9.102.052	-665.702	1.128.223	-86.119	162.496	-14.402	13.932	11.068
2022	8.425.930	-676.122	1.084.475	-43.748	154.252	-8.243	11.492	10.936
2023	7.855.075	-570,856	1.080.260	-4.215			13.730	2.238

Sumber: Badan Pusat Statistik , 2023 (terolah)

Dari Tabel diatas diketahui bahwa walaupun jumlah penganggur di kabupaten wonogiri pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup banyak akan tetapi jumlah penganguran tersebut masih dibawah dari tingkat nasional, provinsi jawa tengah maupun dari rata-rata se eks karesidenan Surakarta. Hal ini menurut Dinas tenaga kerja di kabupaten Wonogiri, pada tahun 2020 tidak banyak perusahaan swasta yang “merumahkan” karyawannya walaupun terdampak Covid 19 namun di tahun 2021 hingga 2023 pertumbuhan jumlah pengangur kembali menurun secara signifikan hal ini dikarenakan banyak pencari kerja yang di tempatkan.

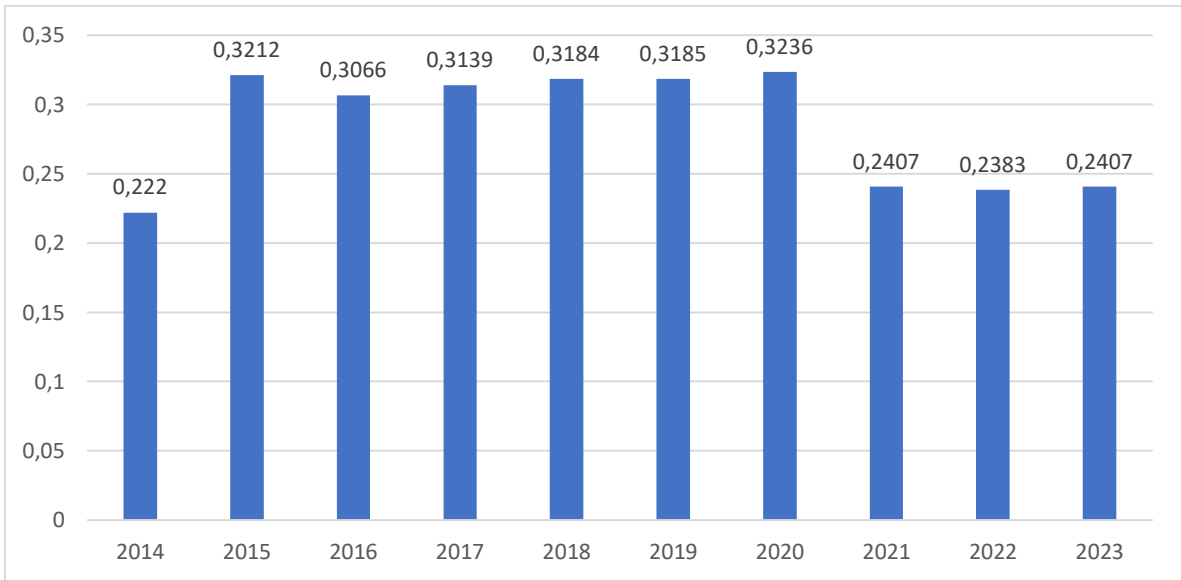
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan jumlah dan pertumbuhan penganggur antara kabupaten Wonogiri dengan Nasional, Provinsi Jawa tengah dan Kabupaten/ Kota se eks karisidenan Surakarta Tahun 2013-2023 mengalami tren yang sangat fluktuatif dimana pada tahun 2017 jumlah penganggur di Kabupaten Wonogiri dan Nasional mengalami tren penurunan namun Provinsi Jawa Tengah maupun rata-rata kabupaten/kota se eks karisidenan Surakarta mengalami kenaikan namun di tahun 2018 terjadi sebaliknya Kabupaten wonogiri dan Nasional mengalami kenaikan namun Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota eks Karisidenan Surakarta mengalami penurunan, namun di tahun 2020 pertumbuhan penganggur

Kabupaten Wonogiri, Nasional, Provinsi Jawa tengah dan Kabupaten/ Kota eks Karisidenan Surakarta sama-sama mengalami kenaikan hal ini tidak lepas karena adanya pandemi covid 19 namun pada tahun 2021 hingga 2023 pertumbuhan penganggur Kabupaten Wonogiri, Nasional, Provinsi Jawa tengah dan Kabupaten/ Kota eks Karisidenan Surakarta sama –sama mengalami penurunan hal ini dikarenakan mulai pulihnya ekonomi pasca adanya pandemi covid 19.

E. Indeks Williamson

Perhitungan komponen pendapatan per kapita juga akan menganalisis kondisi tiap-tiap wilayah kecamatan di Wonogiri yaitu 25 kecamatan. Analisis ketimpangan regional akan dapat mengetahui daerah-daerah mana saja yang memiliki pertumbuhan ekonomi secara maju progresif, stagnan, maupun yang relatif tertinggal. Hasil perhitungan Indeks Williamson Kabupaten Wonogiri pada tahun 2023 yaitu sebesar 0,2407.

Berikut, perkembangan Indeks Williamson di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2014-2023 :



Sumber :Bappeda Litbang Kab.Wonogiri data diolah 2023

Gambar 2. 6 Indeks Williamson Kabupaten Wonogiri Tahun 2014-2023

Adapun ketimpangan pendapatan antar wilayah di Kabupaten Wonogiri ini terutama disebabkan oleh tingginya perbedaan PDRB perkapita terutama di 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Wonogiri, Selogiri dan Ngadirojo yang memiliki perbedaan sangat tinggi atau melebihi rata-rata PDRB perkapita kecamatan se-Kabupaten Wonogiri. Sedangkan, di sisi lain masih terdapat beberapa kecamatan yang memiliki PDRB perkapita di bawah rata-rata PDRB kecamatan se-Kabupaten Wonogiri, yaitu diantaranya Kecamatan Jatiroto,

Kismantoro, dan Bulukerto. Diperlukan strategi dan upaya khusus untuk meningkatkan pendapatan per kapita wilayah yang tertinggal, sehingga tercapai pemerataan yang baik.

Tabel 2. 19 Indeks Williamson Kabupaten Wonogiri dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2023

Tahun	Indeks Williamson	
	Wonogiri	Jawa Tengah
2014	0,222	N/A
2015	0,3212	N/A
2016	0,3066	0,357
2017	0,3139	0,622
2018	0,3184	0,620
2019	0,3185	0,619
2020	0,3236	0,650
2021	0,2407	0,649
2022	0,2383	0,6557
2023	0,2407	NA

Sumber : Bappeda Litbang Kab.Wonogiri, RKPD Provinsi Jawa Tengah 2023

Apabila dilihat pada perbandingan angka tabel Indeks Williamson 2016-2022 menunjukkan bahwa angka Indeks Williamson di Kabupaten Wonogiri cenderung lebih baik dari angka provinsi, hal ini dapat memberikan arti bahwa ketimpangan yang terjadi di Wonogiri cenderung menurun, dan pemerataan ekonomi meningkat.

F. Rasio Gini

Rasio Gini mengukur pola pengeluaran masyarakat dan menggolongkannya dalam kondisi ketimpangan bertaraf rendah, sedang, dan tinggi. Rasio Gini mengukur ketimpangan ekonomi dalam pendapatan distribusi yang ditunjukan dengan angka *koefisien gini ratio* yang berada dalam rentang 0-1 ($0 < \text{koefisien gini} < 1$).

Tabel 2. 20 Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Wonogiri dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah 2014-2023

Tahun	Rasio Gini		
	Wonogiri	Jawa Tengah	Nasional
2014	0,33	0,388	0,414
2015	0,31	0,382	0,402
2016	0,30	0,357	0,394
2017	0,29	0,365	0,391
2018	0,330	0,357	0,384

Tahun	Rasio Gini		
	Wonogiri	Jawa Tengah	Nasional
2019	0,337	0,358	0,380
2020	0,364	0,359	0,358
2021	0,356	0,372	0,384
2022	0,348	0,374	0,384
2023	0,351	0,369	0,351

Sumber : Bappeda Litbang Kab.Wonogiri, RKPD Provinsi Jawa Tengah 2023

Tren Rasio Gini 6 tahun terakhir dimulai dari tahun 2018 sebesar 0,330 naik pada tahun 2019 menjadi 0,337 dan karena adanya pandemi covid-19 rasio gini kembali naik pada tahun 2020 menjadi 0,364 dan tahun 2021 turun menjadi 0,356 dan pada tahun 2023 menjadi 0,351, setelah adanya pemulihan pasca covid-19 dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional.

Perubahan Rasio Gini kabupaten Wonogiri lebih baik dari capaian nasional dengan perubahan Rasio gini dari 0,364 pada tahun 2020 menjadi 0,356, pada tahun 2021 dan tahun 2022 menjadi 0,348. angka Rasio gini berubah lebih kecil <1 menunjukkan tren penurunan ketimpangan yang baik, dan pemerataan wilayah juga semakin baik.

G. Penduduk Miskin

Kemiskinan di Kabupaten Wonogiri selama kurun waktu 2018 sampai 2019 mengalami penurunan akan tetapi pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar 0,69% dan kemudian di tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami penurunan kembali, untuk tahun 2021, persentase kemiskinannya sebesar 11,55% (110.460 jiwa), tahun 2022 sebesar 10,99% (105.190 jiwa) kemudian di tahun 2023 persentase kemiskinan kembali mengalami penurunan menjadi 10,94 % (104.820 jiwa). Jika disandingkan dengan dengan RPJMD tahun 2021-2026 Persentase Penduduk miskin di tahun 2023 meleset dari target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Wonogiri, yang mana di RPJMD Tahun 2023 di targetkan 9,18 % (98.637 jiwa).

Berikut ini di tampilkan table jumlah penduduk miskin (jiwa) dan persentase penduduk di Kabupaten Wonogiri tahun 2013 sampai 2022.

Tabel 2. 21 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Wonogiri Tahun 2014-2023

No.	Tahun	Jumlah Penduduk BPS (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
1	2014	945,817	123.850	13.09
2	2015	949,017	122.980	12.98
3	2016	951.975	124.830	13.12
4	2017	954.706	123.000	12.90
5	2018	957.106	102.840	10.75
6	2019	959.510	98.280	10,25
7	2020	904.972	104.370	10,86
8	2021	1.049.292	110.460	11,55
9	2022	1.057.087	105.190	10,99
10	2023	1.074.474	104.820	10,94

Sumber : BPS Kabupaten Wonogiri, 2023

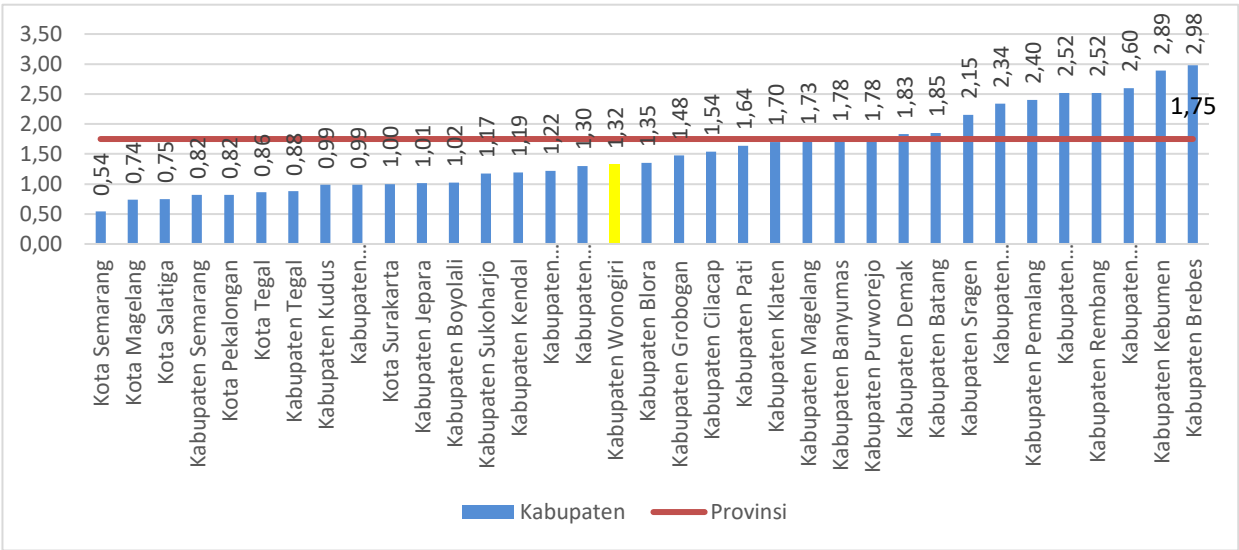
Dari tabel di atas dapat dilihat, bahwasannya untuk tahun 2018-2019 (Sebelum Pandemi Covid 19) kemiskinan di Kabupaten Wonogiri mengalami penurunan jumlah penduduk miskin, dan untuk tahun 2020-2021 (Setelah Covid 19) jumlah penduduk miskin di Kabupaten Wonogiri mengalami kenaikan. Kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali. Dimana pada tahun 2018 persentase kemiskinan sebesar 10,75% dan tahun 2019 sebesar 10,25 atau (98.280 jiwa). Dan Kemudian pada tahun 2020-2021 dikarenakan adanya Pandemi Covid 19, menyebabkan kemiskinan di Kabupaten Wonogiri mengalami kenaikan, dimana tahun 2020 sebesar 10,86 atau (104.370 jiwa) kemudian naik sebesar 0,69% pada tahun 2021 sebesar 11,55% atau (110.460 jiwa) dan kemudian tahun 2022 mengalami penurunan 0,56% atau (105.190 jiwa) dan mengalami penurunan kembali di tahun 2023 sebesar 10,94% atau 104.820.

Jika dibandingkan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, tingkat kemiskinan di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2023 memiliki trend menurun, sejalan dengan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Dimana di Provinsi Jawa Tengah sebesar 10,77% (3.791.500 jiwa) dan Nasional sebesar 9,36% (25.900.000 jiwa) dan Kabupaten Wonogiri, untuk tahun 2023, berada di urutan ke-19 di antara 35 Kabupaten yang ada di Jawa Tengah.

H. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2023 sebesar 1,32%, Jika dibandingkan dengan tahun 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2023 lebih rendah, dimana tahun 2022 sebesar 1,33 % dan pada tahun 2023 sebesar 1,32%. Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2023 tergolong rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Dimana di Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,75% dan Nasional sebesar 1,53 %.

Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Wonogiri jika dibandingkan dengan 35 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah, semuanya mengalami trend penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Wonogiri memiliki kecenderungan menurun selama kurun tahun 2018–2019. Pada tahun 2018 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Wonogiri 1,71%. Kemudian di tahun 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Wonogiri turun lagi menjadi 0,82%, sedangkan di tahun 2020 dan 2021 dikarenakan adanya Pandemi Covid 19 menyebabkan Indeks Kedalaman Kemiskinan mengalami kenaikan. Dimana pada tahun 2020 sebesar 1,08% dan tahun 2021 sebesar 1,58%, dan kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 1,33% dan turun lagi di tahun 2023 sebesar 1,32%.

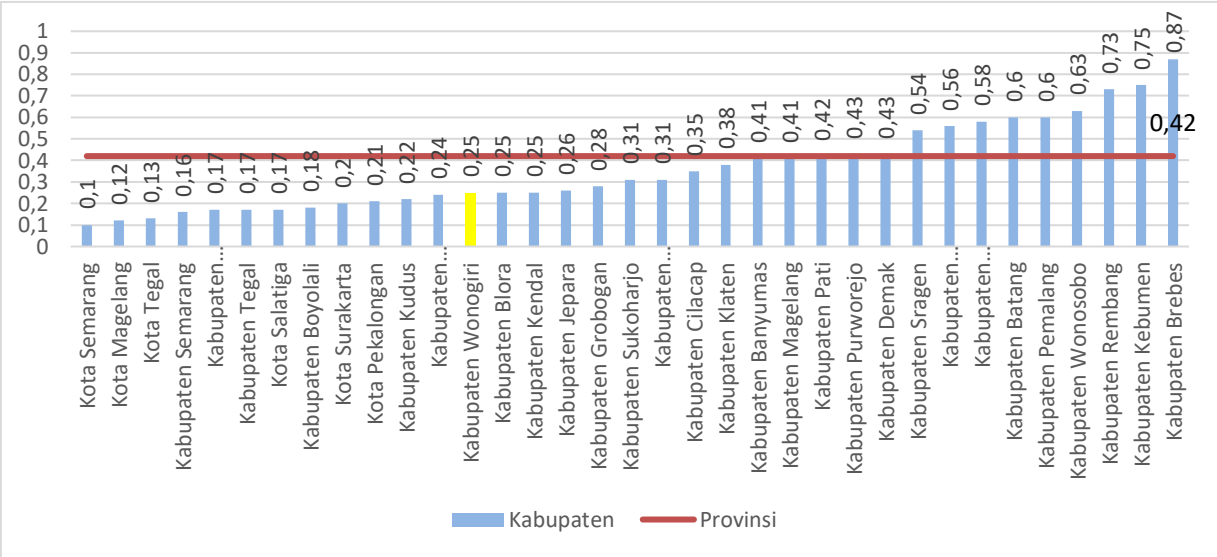


Sumber : BPS Jateng, 2023

Gambar 2. 7 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks) Kabupaten/Kota se Jawa Tengah Tahun 2023

I. Indeks Keparahahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahahan Kemiskinan (P2) merupakan ukuran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin besar ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada tahun 2023 Indeks Keparahahan Kemiskinan di Kabupaten Wonogiri adalah 0,25%, sedikit berada dibawah Indeks Keparahahan Provinsi Jawa Tengah (0,42%). Hal tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS, diolah

Gambar 2. 8 Posisi Relatif Indeks Keparahahan Kemiskinan (Indeks P2) Kabupaten Wonogiri dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Pada tahun 2019, Indeks Keparahahan Kemiskinan di sebesar 0,11, dan di tahun 2020 dan 2021 Indeks Keparahahan Kemiskinan mengalami kenaikan, dimana tahun 2020 indeks keparahan kemiskinan menjadi 0,18, ditahun 2021 mengalami kenaikan lagi sebesar 0,34%, kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,29% dan kemudian turun lagi di tahun 2023 sebesar 0,25%.

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

A. Indeks Pembangunan Manusia

Titik berat pembangunan manusia adalah upaya untuk memberdayakan penduduk sehingga memiliki pilihan yang lebih luas dalam menjalani kehidupan. Upaya tersebut dijabarkan melalui akses yang lebih luas untuk meningkatkan derajat kesehatan, memperoleh pengetahuan dan keterampilan, serta berpeluang untuk meningkatkan taraf ekonomi yang pada akhirnya mendorong partisipasi dalam melaksanakan pembangunan. Semakin besar nilai tersebut berarti kualitas pembangunan manusia semakin baik. Tingkat keberhasilan pembangunan manusia pada suatu wilayah menurut kriteria

UNDP, dikelompokkan menjadi tiga tingkatan sebagai berikut :

- Tingkat pembangunan manusia klasifikasi rendah Capaian IPM berkisar 0 sampai dengan 49
- Tingkat pembangunan manusia klasifikasi menengah Capaian IPM berkisar 50 sampai dengan 79
- Tingkat pembangunan manusia klasifikasi tinggi Capaian IPM berkisar 80 sampai dengan 100

Dalam perencanaan Kabupaten Wonogiri tahun 2013-2022 IPM ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah. Untuk itu keberhasilan capaian tiap tahunnya hingga akhir tahun 2023 terhadap target-target yang telah ditentukan selanjutnya akan dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan ke depan, sehingga keberlanjutan pembangunan IPM di Kabupaten Wonogiri terus menjadi prioritas pembangunan.

Tabel 2. 22 Perkembangan IPM Kabupaten Wonogiri Tahun 2013-2022

No	Variabel	Tahun									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA		66,77	67,76	68,23	68,66	69,37	69,98	70,25	70,49	71,04	71,97
1	Angka Harapan Hidup / AHH	75,84	75,86	75,88	76,05	76,05	76,07	76,16	76,28	76,41	76,56
2	Harapan Lama Sekolah/ HLS	11,94	12,42	12,43	12,45	12,45	12,48	12,49	12,50	12,51	12,52
3	Rata-rata Lama Sekolah /RLS	6,23	6,39	6,57	6,88	6,88	7,04	7,33	7,34	7,42	7,67
4	Pengeluaran Riil per Kapita	8,249	8,417	8,589 9	8,765	9.117	9.426	9,286	9,429	9.780	10.283

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2022

Status pencapaian IPM dikategorikan: (a) sangat tinggi, apabila IPM ≥ 80 ; (b) Tinggi, apabila IPM antara 70-80; (c) Sedang, apabila IPM antara 60-70; dan (d) Rendah, apabila IPM < 60 .

Perkembangan IPM Kabupaten Wonogiri selama 10 Tahun dari tahun 2014-2023 mengalami kenaikan dan juga penurunan. Dimana pada tahun 2013 IPM Kabupaten Wonogiri sebesar 73,90, kemudian di tahun berikutnya sempat mengalami penurunan, tetapi kemudian di tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan menjadi 70,25 tahun 2020 dan 70,49 di tahun 2021 kemudian kembali mengalami kenaikan di tahun 2023 sebesar 71,97.

Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 2023 sebesar 76,56 merupakan Angka Harapan Hidup (AHH) tertinggi selama 10 tahun periode 2013-2022 sedangkan capaian terendahnya terjadi pada Tahun 2013 sebesar 72,83. Harapan Lama Sekolah (HLS) periode 2014-2023 capaian tertinggi pada Tahun 2023 12,52 , sedangkan Tahun 2018 sebesar 12,45 merupakan capaian terendahnya.

Harapan Lama Sekolah (HLS) periode 2014-2023 capaian tertinggi pada Tahun 2023 12,512, sedangkan Tahun 2014 sebesar 11,94 merupakan capaian terendahnya. Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tertinggi antara Tahun 2018-2022 yaitu pada Tahun 2022 sebesar 7,67 , capaian terendahnya pada Tahun 2018 6,88.

Capaian IPM beserta komponen pembentuknya yaitu AHH, HLS, RLS, dan Pengeluaran per Kapita pada Tahun 2023 merupakan tertinggi dibandingkan tahun-tahun pada periode 2014-2023. Hal ini menunjukkan peningkatan pembangunan Kabupaten Wonogiri di bidang pendidikan, dan kesehatan, dan ekonomi setelah terjadi Pandemi Covid-19. Sesuai tingkatan perkembangan pembangunan manusia, IPM Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 termasuk dalam tingkatan sedang.

Untuk mengetahui kinerja IPM beserta komponen pembentuknya maka dilakukan dengan membandingkan antara capaian daerah dengan target daerah, serta membandingkan pertumbuhan capaiannya dengan pertumbuhan capaian wilayah setara (Subosukawonosraten), capaian wilayah regional (Provinsi Jawa Tengah), dan capaian nasional.

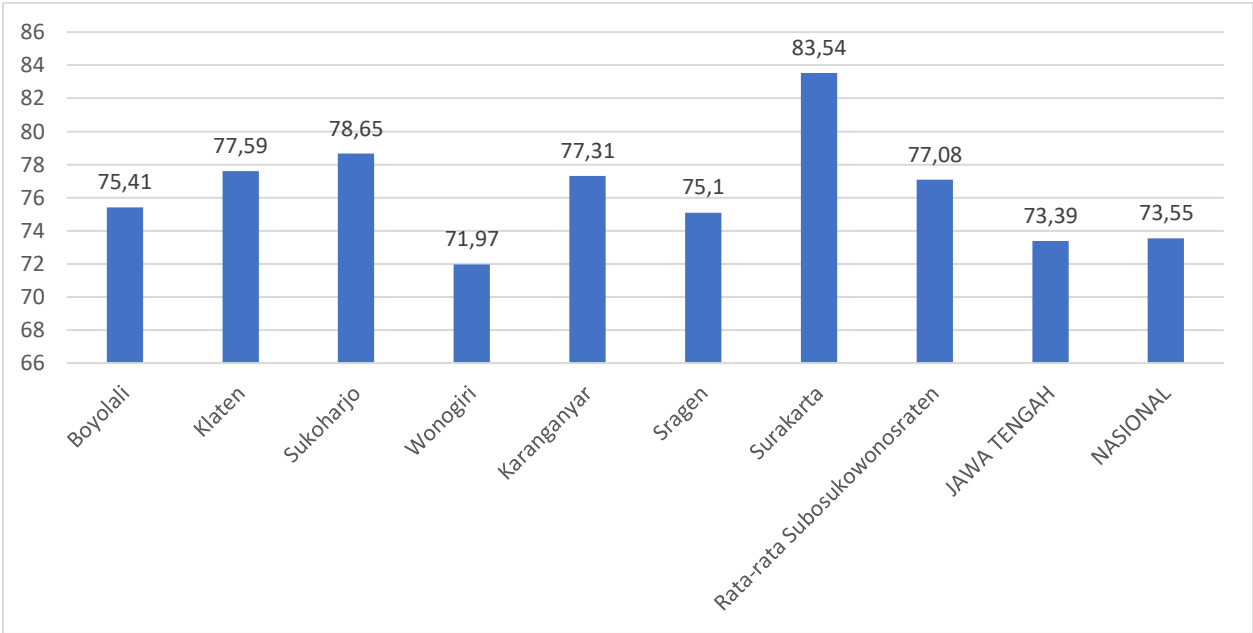
Berikut ini adalah perbandingan pertumbuhan IPM beserta komponen pembentuknya tersebut. Dalam perencanaan daerah Kabupaten Wonogiri IPM beserta komponen pembentuknya Tahun 2023 ditargetkan 71,51 dan terealisasi 71,97, sehingga capaiannya adalah 100,64%.

Tabel 2. 23 Perbandingan IPM dan Pertumbuhan IPM Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten / Kota Sewilayah Subosukowonosraten, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2014-2023

Kab / Kota	IPM											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Boyolali	69,51	69,81	70,34	71,7	72,18	72,64	73,2	73,8	74,25	74,4	74,97	75,41
Klaten	71,71	72,42	73,19	73,8	73,97	74,25	74,8	75,3	75,56	76,1	76,96	77,59
Sukoharjo	72,81	73,22	73,76	74,5	75,06	75,56	76,1	76,8	76,98	77,1	77,94	78,65
Wonogiri	65,75	66,4	66,77	67,8	68,23	68,66	69,4	70	70,25	70,5	71,04	71,97
Karanganyar	72,26	73,33	73,89	74,3	74,9	75,22	75,5	75,9	75,86	76	76,58	77,31
Sragen	68,91	69,95	70,52	71,1	71,43	72,4	73	73,4	73,95	74,1	74,65	75,10
Surakarta	78,44	78,89	79,34	80,1	80,76	80,85	81,5	81,9	82,21	82,6	83,08	83,54

Kab / Kota	IPM											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rata-rata Subosukowonosraten	71,34	72,00	72,54	73,33	73,79	74,23	73,7	74,2	75,58	75,8	76,46	77,08
JAWA TENGAH	67,21	68,02	68,78	69,5	69,98	70,52	71,1	71,7	71,87	72,2	72,799	73,39
NASIONAL	67,7	68,31	68,9	69,6	70,18	70,81	71,4	71,9	71,94	72,3	72,91	73,55

Sumber : BPS 2023

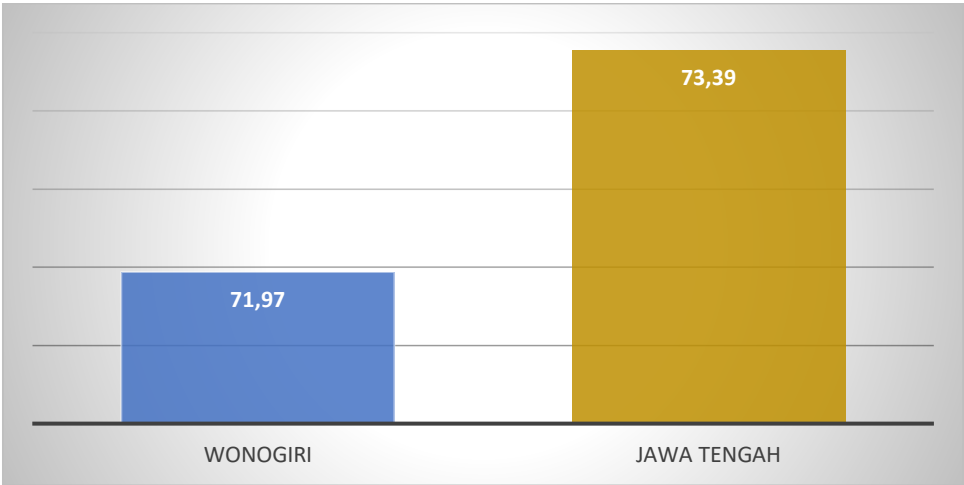


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2023

Gambar 2. 9 Perbandingan IPM Kabupaten Wonogiri dengan Subosukawonosraten Tahun 2023

Realisasi IPM Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 masih berada di bawah rata-rata kabupaten/kota se wilayah Subosukowonosraten serta berada di paling bawah dari 7 kabupaten / kota se wilayah Subosukowonosraten.

Sedangkakn realisasi IPM kabupaten Wonogiri dibandingkan dengan provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sebagai berikut :

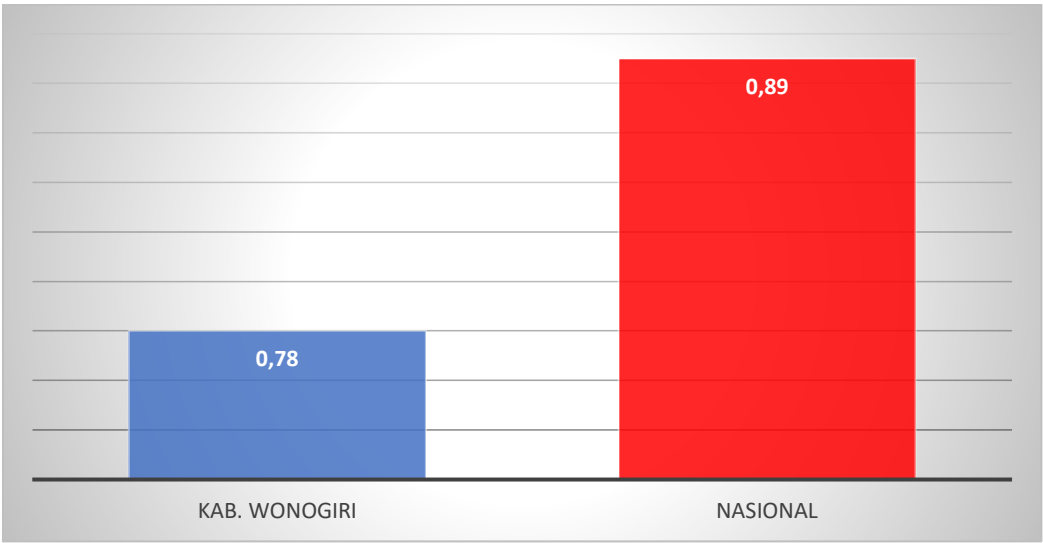


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2023

Gambar 2. 10 Perbandingan Pertumbuhan IPM Kabupaten Wonogiri dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Capaian IPM Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 masih berada di bawah Provinsi Jawa Tengah yang pada tahun 2023 mencapai 73,39.

Berikut Perbandingan pertumbuhan IPM kabupaten Wonogiri terhadap pertumbuhan IPM Nasional pada tahun 2023



Sumber : BPS Kabupaten Wonogiri, 2023

Gambar 2. 11 Perbandingan Pertumbuhan IPM Kabupaten Wonogiri dengan Nasional Tahun 2023

Pertumbuhan IPM Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 juga masih berada di bawah Nasional. Ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Wonogiri masih berada di bawah kemajuan pembangunan se wilayah Subosukowonosraten, Provinsi Jawa Tengah, dan bahkan Nasional pada umumnya.

B. Angka Harapan Hidup (AHH)

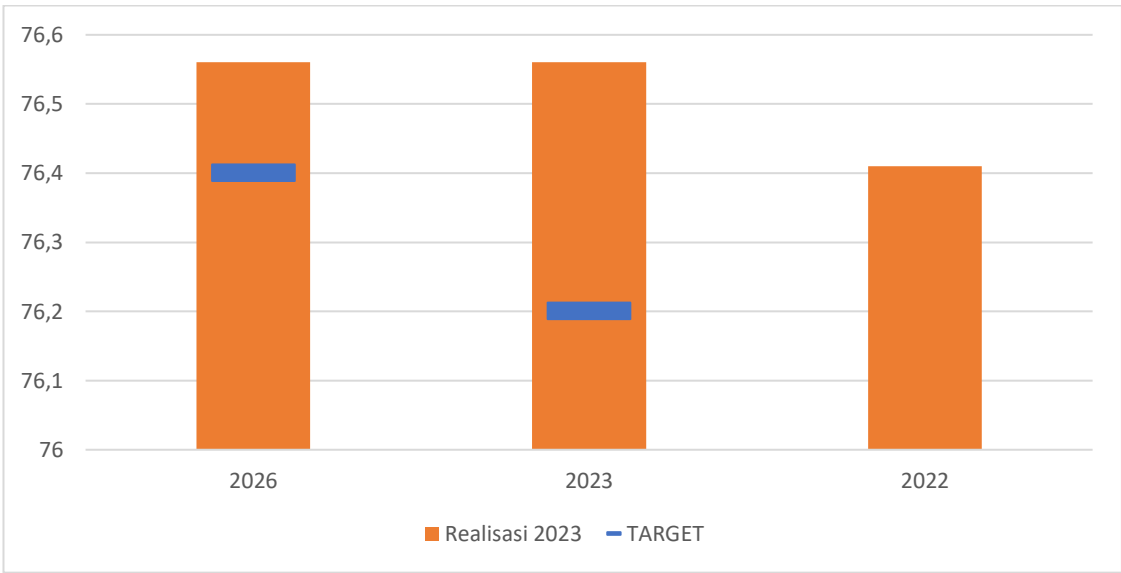
Angka Harapan Hidup didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan umur yang dapat ditempuh oleh masyarakat sejak lahir yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat. Kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Wonogiri secara umum semakin membaik berdasarkan rata-rata usia harapan hidup yang semakin panjang.

Dalam perencanaan daerah RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 AHH ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Daerah dengan target 76,20 di tahun 2023, sedangkan pada akhir RPJMD 2026 ditargetkan sebesar 76,40.

Tabel 2. 24 Pembandingan AHH dengan target daerah Tahun 2023 dan akhir RPJMD 2021-2026 Kabupaten Wonogiri

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi 2022	2023			Realisasi 2022 terhadap Akhir RPJMD 2021-2026	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
Angka Harapan Hidup (AHH)	tahun	76,41	76,20	76,56	100,38	76,40	100,21

Sumber : RPJMD Kabupaten Wonogiri 2021-2026 dan BPS Provinsi Jawa Tengah 2022



Sumber : Bapperida Wonogiri, 2024

Gambar 2. 12 Pembandingan AHH dengan target daerah Tahun 2022 dan akhir RPJMD 2021-2026 Kabupaten Wonogiri

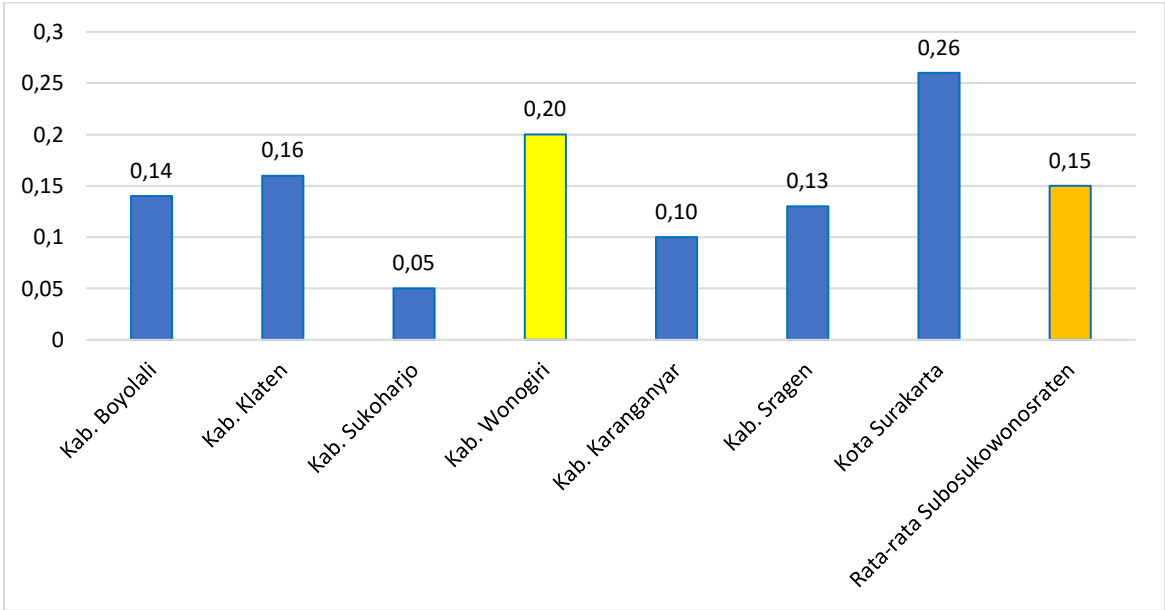
Untuk AHH dari target yang ditetapkan 76,20 terealisasi 76,56 dan capaiannya 100,38% artinya telah melebihi target.

Tabel 2. 25 Perbandingan AHH dan Pertumbuhan AHH Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten / Kota Sewilayah Subosukowonosraten, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2013-2022

Kab / Kota	TAHUN										Pertumbuhan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Boyolali	75,61	75,63	75,67	75,7	75,8	75,8	76	76	76,1	76,23	0,14
Klaten	76,54	76,55	76,59	76,6	76,7	76,7	76,8	76,9	77	77,07	0,16
Sukoharjo	77,45	77,46	77,46	77,5	77,5	77,6	77,7	77,7	77,8	77,86	0,05
Wonogiri	75,84	75,86	75,88	76,00	76,1	76,1	76,2	76,3	76,4	76,56	0,20
Karanganyar	76,71	77,11	77,11	77,3	77,4	77,4	77,5	77,6	77,6	77,72	0,10
Sragen	75,31	75,41	75,43	75,6	75,6	75,6	75,7	75,8	75,9	75,97	0,13
Surakarta	76,99	77	77,03	77,1	77,1	77,1	77,2	77,3	77,4	77,63	0,26
Rata-rata Subosukowonosraten	76,35	76,43	76,45	76,54	76,6	76,6	76,7	76,8	76,9	77,01	0,15

Kab / Kota	TAHUN										Pertumbuhan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
JAWA TENGAH	73,88	73,96	74,02	74,1	74,2	74,2	74,4	74,5	74,6	74,69	0,16
NASIONAL	70,59	70,78	70,9	71,1	71,2	71,3	71,5	71,6	71,9	72,13	0,39

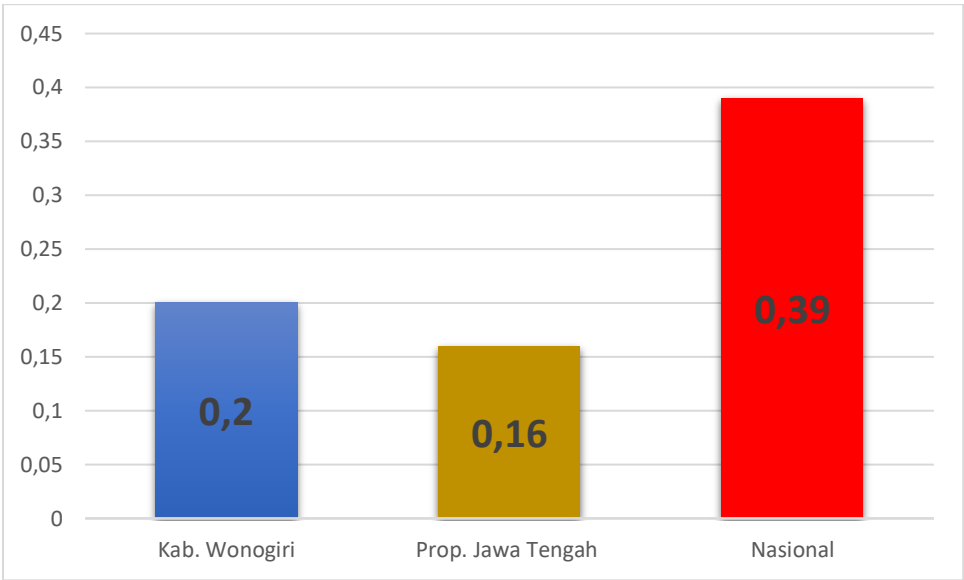
Sumber : BPS 2023



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2023

Gambar 2. 13 Perbandingan Pertumbuhan AHH Kabupaten Wonogiri dengan Subosukawonosraten Tahun 2023

Pertumbuhan AHH Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 berada di atas rata-rata kabupaten/kota se wilayah Subosukowonosraten serta berada di urutan ke-2 dari 7 kabupaten / kota se wilayah Subosukowonosraten.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2023

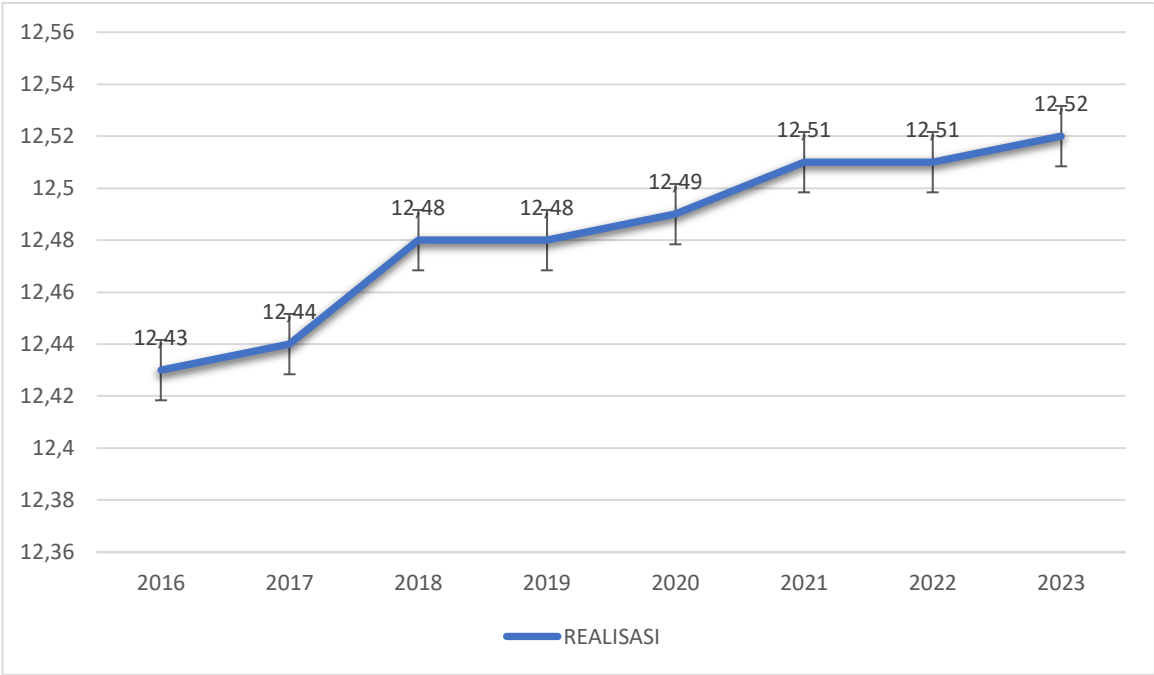
Gambar 2. 14 Perbandingan Pertumbuhan AHH Kabupaten Wonogiri dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023

Pertumbuhan AHH Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 berada di atas Provinsi Jawa Tengah. Akan tetapi Pertumbuhan AHH Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 juga berada di bawah Nasional. Ini menunjukkan bahwa pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Wonogiri mulai menunjukkan kemajuan dibandingkan dengan wilayah Subosukowonosraten dan Provinsi Jawa Tengah, walaupun masih tertinggal dibandingkan Nasional

C. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Dalam periode tahun 2016-2023 HLS Kabupaten Wonogiri selalu mengalami trend naik atau membaik, hanya pada tahun 2021 dan 2022 realisasi pada angka yang sama. Berikut gambar perkembangan HLS Kabupaten Wonogiri:



Sumber : RPJMD Kabupaten Wonogiri 2021-2026 dan BPS Provinsi Jawa Tengah 2023

Gambar 2. 15 Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 s.d. 2023

HLS Tahun 2023 sebesar 12,52 dari yang ditargetkan 12,66 dengan capaian 97,66%, walaupun capaiannya tinggi tapi belum mencapai target yang ditetapkan.

Dan data berikut adalah capaian HLS wilayah se-Subosukawonosraten, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional

Tabel 2. 26 HLS Kabupaten / Kota wilayah Subosukowonosraten, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2013-2023

Kab / Kota	HLS										2023
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Boyolali	11,33	11,65	12,13	12,14	12,15	12,16	12,4	12,56	12,6	12,6	12,66
Klaten	12,27	12,74	12,84	12,85	12,97	13,13	13,2	13,25	13,4	13,4	13,41
Sukoharjo	12,66	12,96	13,42	13,79	13,8	13,81	13,8	13,83	13,8	13,9	13,91
Wonogiri	11,77	11,94	12,42	12,43	12,44	12,45	12,48	12,49	12,5	12,5	12,52
Karanganyar	12,86	13,26	13,27	13,64	13,65	13,66	13,7	13,68	13,7	13,7	13,71
Sragen	11,92	12,19	12,21	12,3	12,64	12,65	12,7	12,83	12,8	12,9	12,92
Surakarta	13,64	13,92	14,14	14,5	14,51	14,52	14,6	14,87	14,9	14,9	14,90
Rata-rata Subosukowonosraten	12,35	12,67	12,92	13,09	13,17	13,20	13,3	13,36	13,4	13,4	13,43
JAWA TENGAH	11,89	12,17	12,4	12,5	74,1	12,63	12,7	12,7	12,8	12,8	12,85
NASIONAL	12,1	12,39	12,55	12,72	12,85	12,91	13	12,98	13,1	13,1	13,15

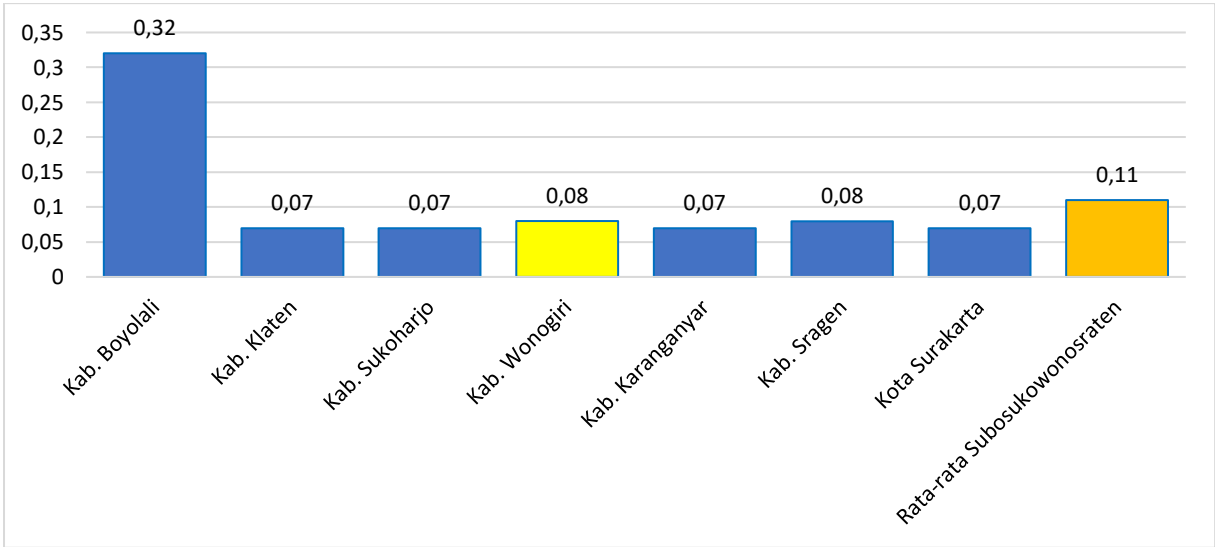
Sumber : BPS 2023

Dari data pada tabel diatas, dapat dihitung pertumbuhan HLS Kabupaten/Kota Subosukawonosraten, Prov. Jawa Tengah, dan Nasional sebagai berikut :

Tabel 2. 27 Pertumbuhan HLS Kabupaten / Kota Wilayah
Subosukowonosraten, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2014-2023

Kab / Kota	Pertumbuhan HLS									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Boyolali	2,82	4,12	0,08	0,08	0,08	2,22	1,05	0,08	0,4	0,32
Klaten	3,83	0,78	0,08	0,93	1,23	0,84	0,08	1,06	0,07	0,07
Sukoharjo	2,37	3,55	2,76	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,43	0,07
Wonogiri	1,44	4,02	0,08	0,08	0,08	0,24	0,08	0,08	0,08	0,08
Karanganyar	3,11	0,08	2,79	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Sragen	2,27	0,16	0,74	2,76	0,08	0,32	1,1	0,08	0,55	0,08
Surakarta	2,05	1,58	2,55	0,07	0,07	0,21	2,2	0,07	0,07	0,07
Rata-rata Subosukowonosraten	2,56	2,00	1,35	0,56	0,24	0,57	0,66	0,22	0,24	0,11
JAWA TENGAH	2,35	1,73	0,57	495,02	0,48	0,4	0,16	0,55	0,31	0,31
NASIONAL	2,40	1,29	1,35	1,02	0,47	0,31	0,23	0,27	0,25	0,38

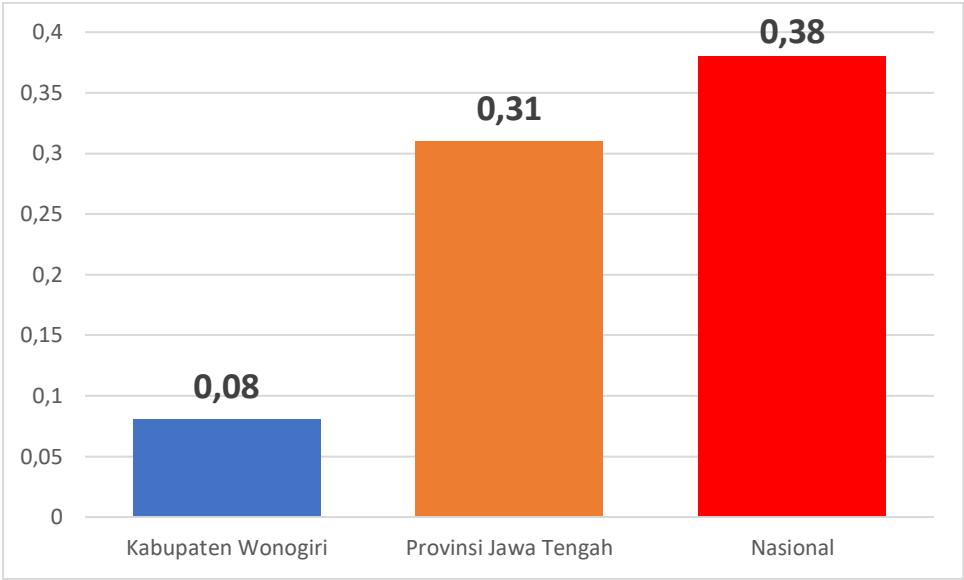
Sumber : BPS 2023



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2023

Gambar 2. 16 Perbandingan Pertumbuhan HLS Kabupaten Wonogiri dengan
Subosukawonosraten Tahun 2023

Pertumbuhan HLS Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 berada di bawah rata-rata kabupaten/kota se wilayah Subosukowonosraten serta berada di urutan ke-2 dari 7 kabupaten / kota se wilayah Subosukowonosraten.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2023

Gambar 2. 17 Perbandingan Pertumbuhan HLS Kabupaten Wonogiri dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023

Pertumbuhan HLS Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 berada di bawah Propinsi Jawa Tengah dan Nasional. Ini menunjukkan bahwa pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Wonogiri masih berada di bawah kemajuan pembangunan dengan rata-rata se wilayah Subosukowonosraten, Provinsi Jawa Tengah, dan bahkan Nasional pada umumnya.

D. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

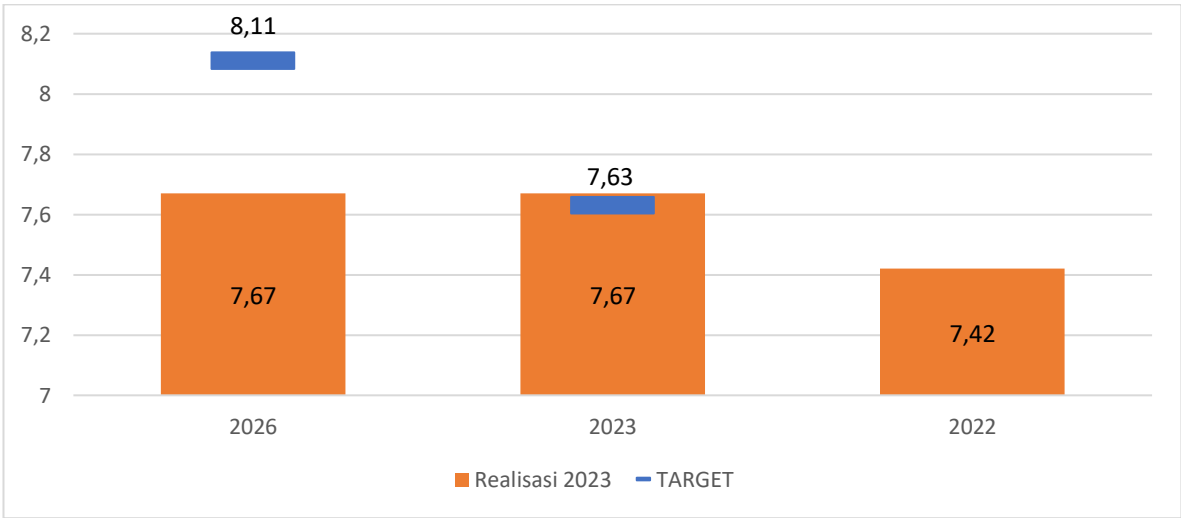
Rata-rata Lama Sekolah diartikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung dalam perhitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Peningkatan kualitas pendidikan menjadi syarat keberhasilan capaian RLS.

Dalam perencanaan daerah RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 RLS ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Daerah dimana tahun 2023 ditargetkan 7,63 tahun sedangkan pada akhir RPJMD 2026 ditargetkan 8,11 tahun.

Tabel 2. 28 Perbandingan RLS dengan target daerah Tahun 2022 dan akhir RPJMD 2021-2026 Kabupaten Wonogiri

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi 2022	2023			Realisasi 2022 terhadap Akhir RPJMD 2021-2026	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	tahun	7,42	7,63	7,67	100,53	8,11	94,57

Sumber : RPJMD Kabupaten Wonogiri 2021-2026 dan BPS Provinsi Jawa Tengah 2023



Gambar 2. 18 Perbandingan RLS dengan target daerah Tahun 2023 dan akhir RPJMD 2021-2026 Kabupaten Wonogiri

Capaian RLS Tahun 2023 sebesar 100,53% dari target 7,63 realisasi 7,67. Capaian tersebut belum sesuai target yang ditetapkan.

Tabel 2. 29 Capaian RLS Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten / Kota se-Subosukowonosraten, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2014-2023

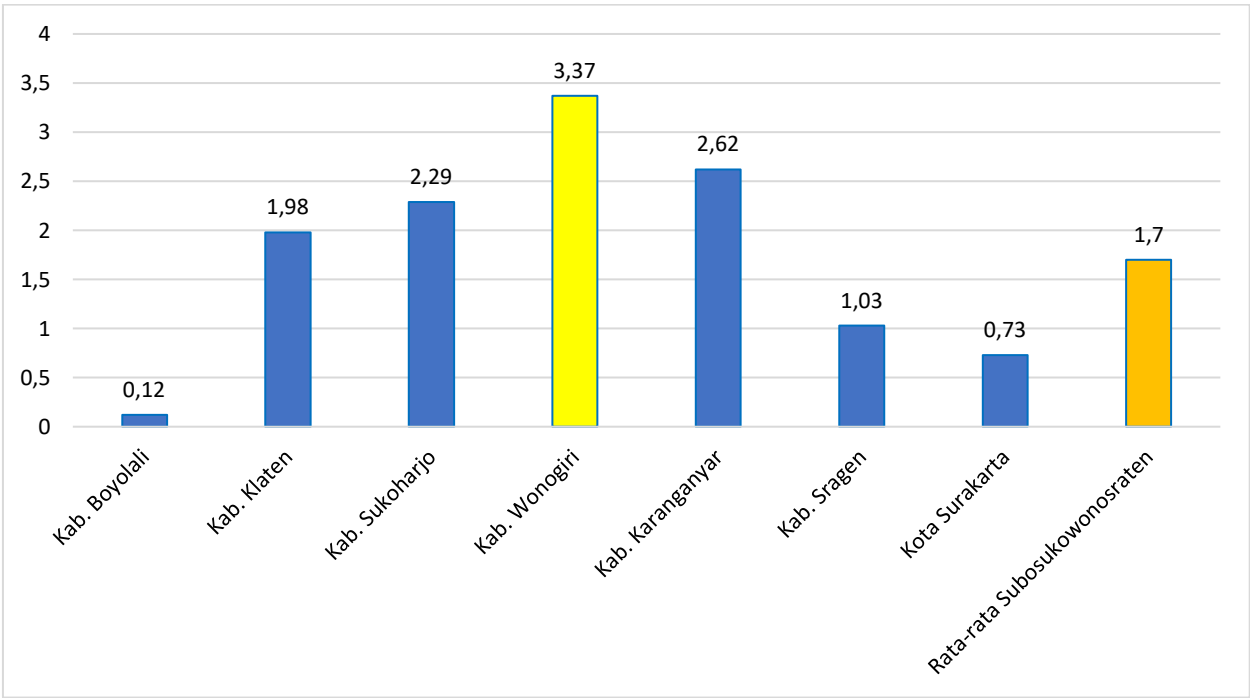
Kab / Kota	RLS									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Boyolali	6,69	7,1	7,17	7,44	7,55	7,56	7,84	7,85	8,08	8,09
Klaten	7,92	8,16	8,22	8,23	8,24	8,31	8,58	8,81	9,09	9,27
Sukoharjo	8,41	8,5	8,58	8,71	8,84	9,10	9,34	9,35	9,62	9,84
Wonogiri	6,23	6,39	6,57	6,68	6,88	7,04	7,33	7,34	7,42	7,67
Karanganyar	8,47	8,48	8,49	8,50	8,51	8,52	8,56	8,57	8,79	9,02
Sragen	6,85	6,86	6,87	7,04	7,22	7,34	7,65	7,66	7,79	7,87
Surakarta	10,33	10,4	10,4	10,38	10,53	10,54	10,69	10,90	10,92	11,00
Rata-rata Subosukowonosraten	7,84	7,98	8,04	8,14	8,25	8,34	8,57	8,64	8,82	8,97
JAWA TENGAH	6,93	7,03	7,15	7,27	7,35	7,53	7,69	7,75	7,93	8,01
NASIONAL	7,73	7,84	7,95	8,1	8,17	8,34	8,48	8,54	8,69	8,77

Sumber : BPS 2023

Tabel 2. 30 Pertumbuhan RLS Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten / Kota se wilayah Subosukowonosraten, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2014-2023

Kab / Kota	Pertumbuhan RLS									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Boyolali	1,21	6,13	0,99	3,77	1,48	0,13	3,70	0,13	2,93	0,12
Klaten	2,33	3,03	0,74	0,12	0,12	0,85	3,25	2,68	3,18	1,98
Sukoharjo	1,94	1,07	0,94	1,52	1,49	2,94	2,64	0,11	2,89	2,29
Wonogiri	1,80	2,57	2,82	1,67	2,99	2,33	4,12	0,14	1,09	3,37
Karanganyar	1,07	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,47	0,12	2,57	2,62
Sragen	2,39	0,15	0,15	2,47	2,56	1,66	4,22	0,13	1,70	1,03
Surakarta	0,78	0,29	0,10	0,10	1,45	0,09	1,42	1,96	0,18	0,73
Rata-rata Subosukowonosraten	1,59	1,73	0,75	1,26	1,46	1,16	2,83	0,75	2,08	1,7
JAWA TENGAH	1,91	1,44	1,71	1,68	1,10	2,45	2,12	0,78	2,32	1,01
NASIONAL	1,58	1,42	1,40	1,89	0,86	2,08	1,68	0,62	2,30	0,92

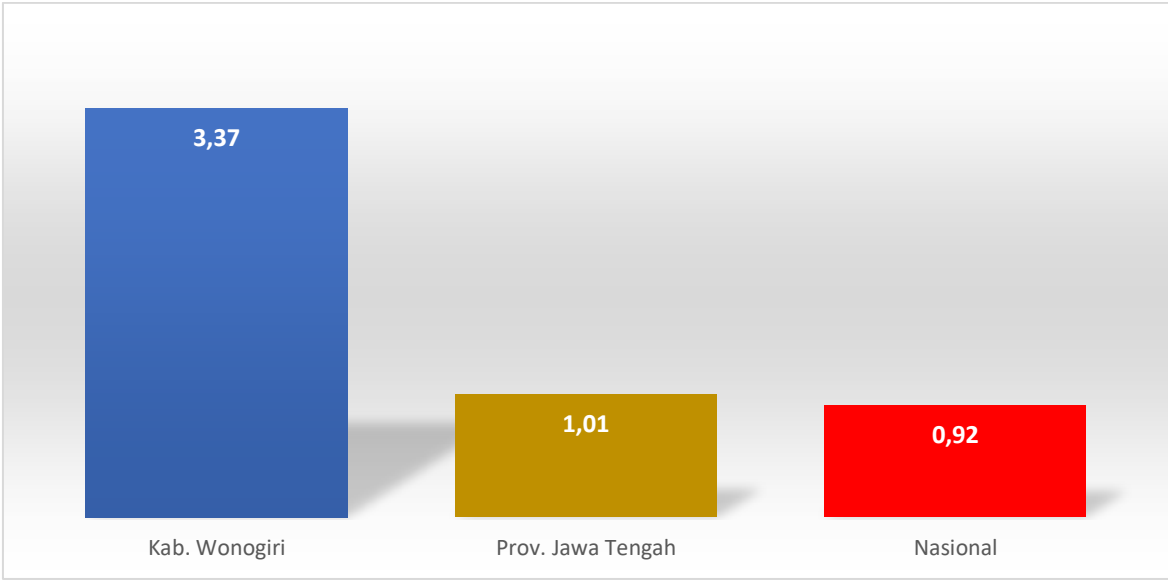
Sumber : BPS 2022



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2023

Gambar 2. 19 Perbandingan Pertumbuhan RLS Kabupaten Wonogiri dengan Subosukawonosraten Tahun 2023

Pertumbuhan RLS Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 berada di bawah RLS rata-rata kabupaten/kota se wilayah Subosukowonosraten serta berada di urutan ke-1 dari 7 kabupaten / kota se wilayah Subosukowonosraten.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2023

Gambar 2. 20 Perbandingan Pertumbuhan RLS Kabupaten Wonogiri dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023

Pertumbuhan RLS Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 masih berada di bawah Jawa Tengah dan Nasional. Ini menunjukkan bahwa pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Wonogiri masih berada di bawah kemajuan pembangunan dengan rata-rata se wilayah Subosukowonosraten, Provinsi Jawa Tengah, dan bahkan Nasional pada umumnya.

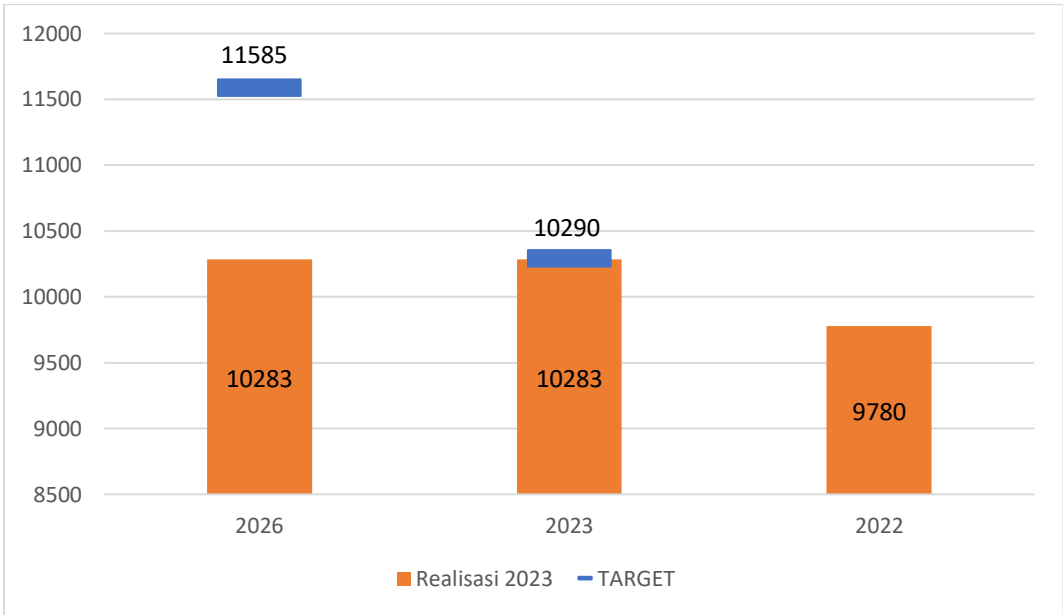
E. Pengeluaran Per Kapita Yang Disesuaikan

Pengeluaran perkapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity/PPP). Rata-rata pengeluaran perkapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Perhitungan paritas daya beli pada metode lama menggunakan 27 komoditas, pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. Apabila Indeks Pengeluaran meningkat akan mendorong meningkatnya dua indeks lainnya yaitu Indeks Kesehatan dan Indeks Pendidikan. Dalam perencanaan daerah RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 Pengeluaran per Kapita disesuaikan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Daerah dengan target di tahun 2023 sebesar Rp. 10.290,33 sedangkan pada akhir RPJMD 2026 ditargetkan sebesar Rp. 11.585.

Tabel 2. 31 Perbandingan Pengeluaran per Kapita (d disesuaikan) dengan target daerah Tahun 2023 dan akhir RPJMD 2021-2026 Kabupaten Wonogiri

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi 2022	2023			Realisasi 2023 terhadap Akhir RPJMD 2021-2026	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
Pengeluaran per Kapita (d disesuaikan)	tahun	9.780	10.290,33	10.283	99,93	11.585	88,76

Sumber : RPJMD Kabupaten Wonogiri 2021-2026 dan BPS Kabupaten Wonogiri 2023



Sumber : RPJMD Kabupaten Wonogiri 2021-2026 dan BPS Kabupaten Wonogiri 2023

Gambar 2. 21 Perbandingan Pengeluaran per Kapita (d disesuaikan) dengan target daerah Tahun 2023 dan akhir RPJMD 2021-2026 Kabupaten Wonogiri

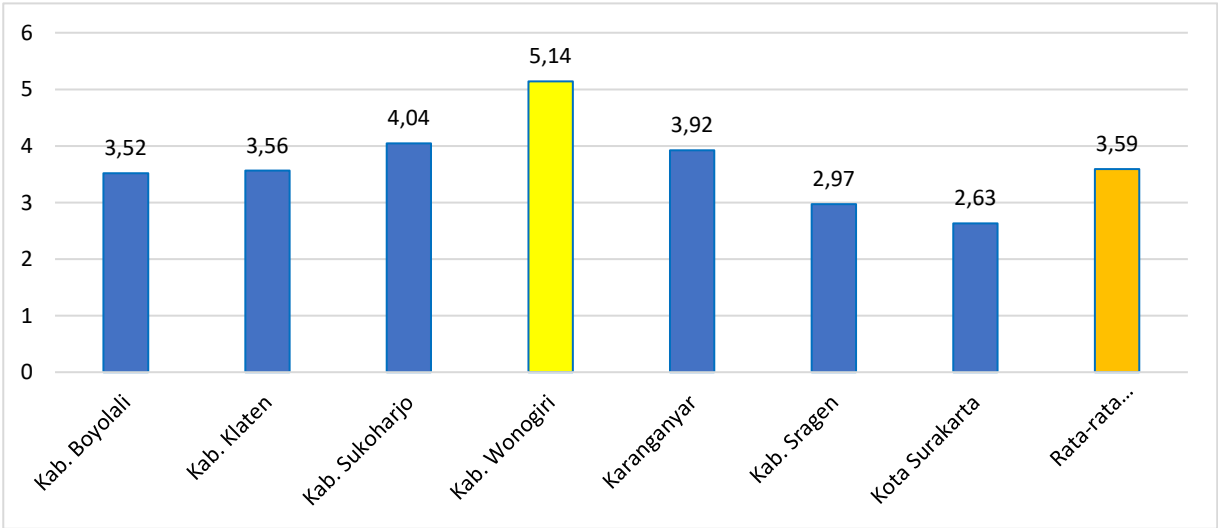
Pengeluaran per Kapita Tahun 2023 sebesar Rp. 10.283,00, capaiannya terhadap target 2023 adalah 99,93%, artinya tidak mencapai target yang ditetapkan Rp. 10.290,33.

Tabel 2. 32 Perbandingan PPP Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten / Kota Sewilayah Subosukowonosraten, Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2014-2023

Kab / Kota	PPP										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Boyolali	11490.12	11503.79	11806.00	12192.00	12262.00	12758.00	13079	12910	13031	13250	13716
Klaten	10961.90	10965.40	11178.00	11227.00	11369.00	11738.00	12074	11921	12017	12522	12968
Sukoharjo	10247.40	10264.48	10416.00	10452.00	10765.00	11100.00	11557	11325	11428	11841	12319
Wonogiri	8234.95	8248.68	8417.00	8589.00	8765.00	9117.00	9426	9286	9429	9780	10283
Karanganyar	10285.65	10313.38	10486.00	10722.00	10933.00	11223.00	11569	11428	11509	11798	12260

Kab / Kota	PPP										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sragen	10856.62	10876.04	11434.00	11688.00	12041.00	12391.00	12720	12589	12679	13052	13439
Surakarta	12819.73	12907.29	13604.00	13900.00	13986.00	14528.00	15049	14761	14911	15463	15870
Rata-rata Subosukowonosraten	10699,48	10725,58	11048,71	11252,86	11445,86	11836,43	11737,50	11576,50	12143,43	12529,43	12979,29
JAWA TENGAH	9497.15	9617.92	9930.00	10153.00	10377.00	10777.00	11102	10930	11034	11377	11835
NASIONAL							11299	11013	11156	11479	11899

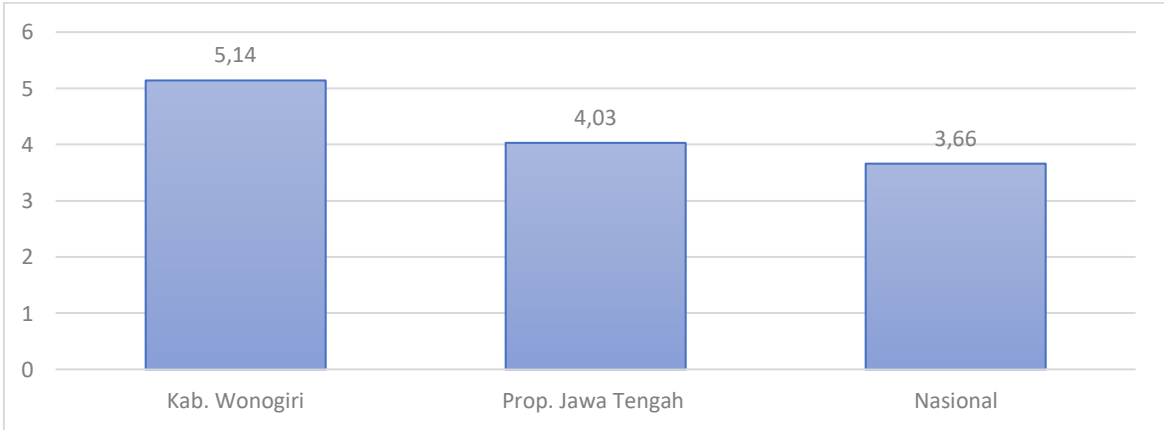
Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2023

Gambar 2. 22 Perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan Kabupaten Wonogiri dengan Subosukawonosraten Tahun 2023

Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 berada di atas rata-rata kabupaten/kota se wilayah Subosukowonosraten serta berada di urutan ke-1 dari 7 kabupaten / kota se wilayah Subosukowonosraten



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah 2023

Gambar 2. 23 Perbandingan Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan Kabupaten Wonogiri dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023

Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 berada di atas propinsi Jawa tengah dan Nasional. Ini menunjukkan bahwa pembangunan bidang ekonomi di Kabupaten Wonogiri menunjukkan kemajuan dibandingkan dengan rata-rata se wilayah Subosukowonosraten, Provinsi Jawa Tengah, dan bahkan Nasional pada umumnya

Capaian IPM beserta komponen pembentuknya yaitu AHH, HLS, RLS, dan Pengeluaran per Kapita pada Tahun 2023 merupakan tertinggi dibandingkan tahun-tahun pada periode 2018-2022. Hal ini menunjukkan peningkatan pembangunan Kabupaten Wonogiri di bidang pendidikan, dan kesehatan, dan ekonomi setelah terjadi Pandemi Covid-19. Sesuai tingkatan perkembangan pembangunan manusia, IPM Kabupaten Wonogiri Tahun 2023 termasuk dalam tingkatan menengah.

Untuk mengetahui kinerja IPM beserta komponen pembentuknya maka dilakukan dengan membandingkan antara capaian daerah dengan target daerah, serta membandingkan pertumbuhan capaiannya dengan pertumbuhan capaian wilayah setara (Subosukawonosraten), capaian wilayah regional (Provinsi Jawa Tengah), dan capaian nasional.

Berikut ini adalah perbandingan pertumbuhan IPM beserta komponen pembentuknya tersebut. Dalam perencanaan daerah Kabupaten Wonogiri IPM beserta komponen pembentuknya Tahun 2023 ditargetkan 72,45 dan terealisasi 71,97, sehingga capaiannya adalah 99,34%.

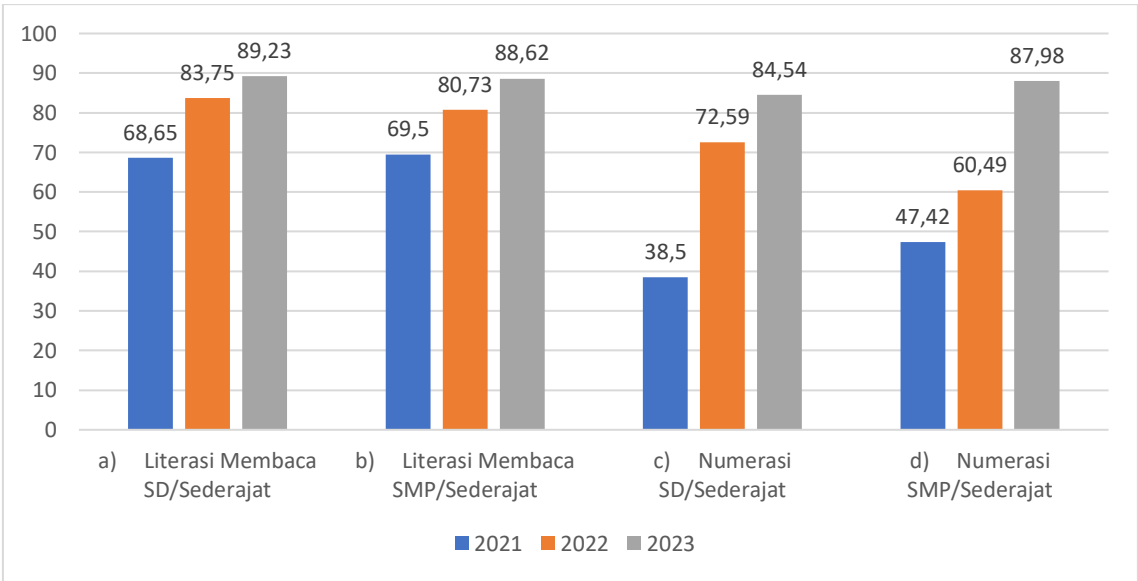
Salah satu indikator adalah Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang) kabupaten Wonogiri yang mulai dihitung pada tahun 2021sampai tahun 2023 dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2. 33 Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang) kabupaten Wonogiri tahun 2021 sampai 2023

NO	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	SATUAN	REALISASI 2014-2023		
			2021	2022	2023
1	Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):	%			
	a) Literasi Membaca SD/Sederajat	%	68,65	83,75	89,23
	b) Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	69,5	80,73	88,62
	c) Numerasi SD/Sederajat	%	38,5	72,59	84,54
	d) Numerasi SMP/Sederajat	%	47,42	60,49	87,98

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wonogiri, 2023

Berdasarkan tabel tersebut terkait dengan persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang), penilaian dilakukan mulai tahun 2021 sampai 2023. Pada table diatas capaian mengalami kenaikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah, data tersebut dimulai pada tahun 2021. Perkembangan bisa dlilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wonogiri, 2023

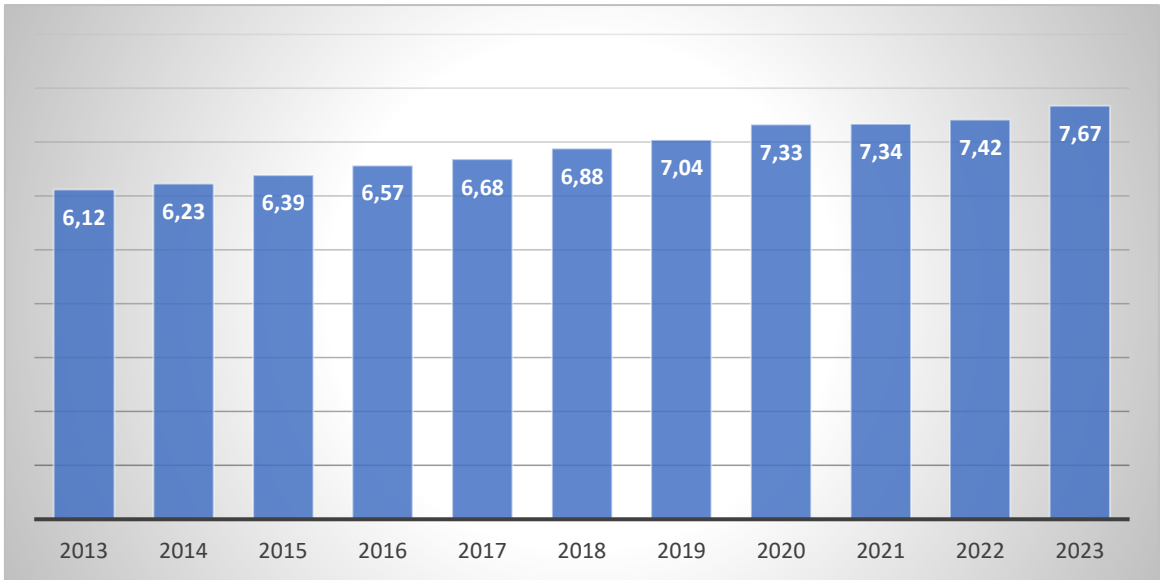
Gambar 2. 24 Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang) kabupaten Wonogiri tahun 2021 sampai 2023

Selain indikator terebut, Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan tinggi juga menjadi indikator penting dalam pembentukan IPM, dan Kabupaten Wonogiri dari tahun 2014 sampai 2023 terus mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2019 ke 2020. Kenaikan terjadi sebesar 0,29 point. Pada akhir tahun 2023, nilai proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi menjadi 7,67

Tabel 2. 34 Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi tahun 2014-2023

NO	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	SATUAN	REALISASI 2014-2023									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	6,23	6,39	6,57	6,68	6,88	7,04	7,33	7,34	7,42	7,67

Sumber: BPS Kab. Wonogiri 2023



Sumber: BPS Kab. Wonogiri 2023

Gambar 2. 25 Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi tahun 2013-2023

Dari gambar tersebut di atas menunjukkan kenaikan yang berarti penduduk berusia 15 tahun keatas berkualifikasi Pendidikan Tinggi di Kabupaten Wonogiri semakin meningkat.

Selanjutnya Indikator Angka Partisipasi sekolah 5-6 tahun yang perhitungannya dimulai sejak tahun 2021. Pada kurun waktu 2021 sampai 2023, mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 nilai sebesar 60,65 mengalami kenaikan tahun 2022 menjadi 75,26. Akhir Tahun 2023 menjadi 78,34.

Tabel 2. 35 Angka Partisipasi Sekolah 5-6 tahun Kabupaten Wonogiri
Tahun 2014-2023

NO	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	SATUAN	REALISASI 2014-2023									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	60,65	75,26	78,34

Sumber : BPS Wonogiri, 2023

Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan mulai pada tahun 2021 sampai 2023. Tahun 2021 nilai nya sebesar 83,33, pada tahun 2022 naik menjadi 89,74 dan akhir tahun 2023 nilai nya menjadi 93,58.

Tabel 2. 36 Persentase Satuan Pendidikan Yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya Dan Mengarusutamakan Kebudayaan
Tahun 2014-2023

NO	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	SATUAN	REALISASI 2014-2023									
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	83,33	89,74	93,58

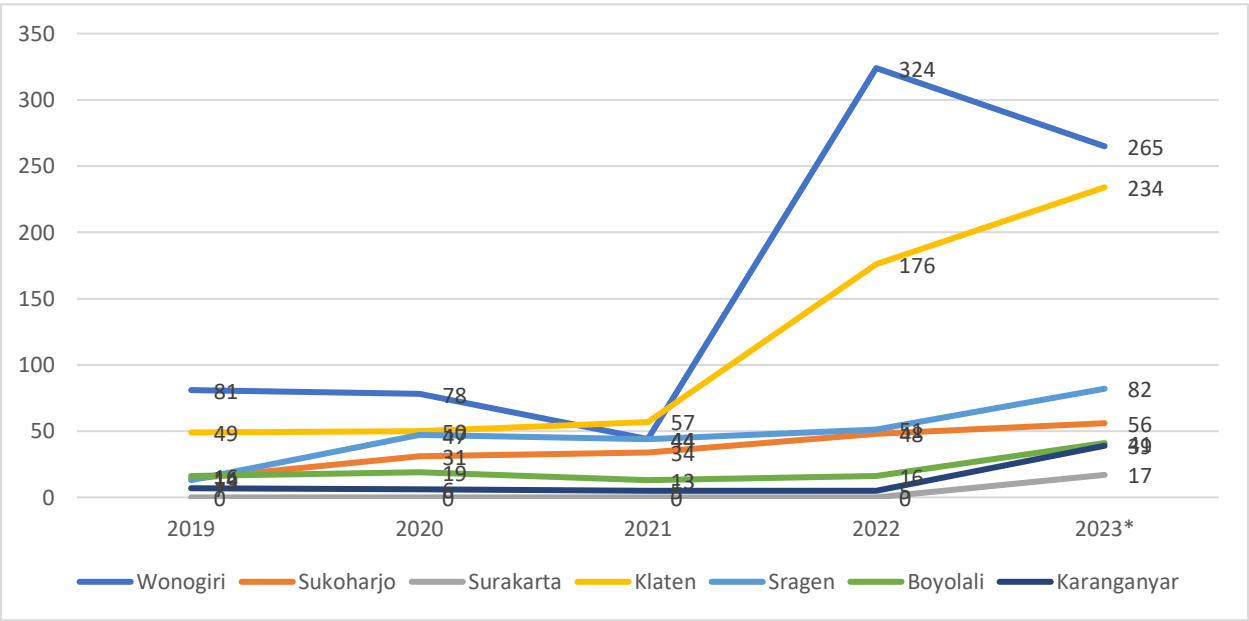
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wonogiri, 2023

F. Kasus Gizi Buruk dan Stunting

Kasus Gizi Buruk di Kabupaten Wonogiri mengalami trend kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2013-2023. Prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2020 sebesar 1,16% dari 452 balita, hal ini mengalami kenaikan, dimana tahun 2019 sebesar 0,18%. Hal ini mengalami kenaikan sebesar 0,05% dibandingkan tahun 2018 sebesar 0,13%. Angka gizi buruk pada balita merupakan rasio total balita yang mengalami kekurangan gizi terhadap jumlah total balita. Jumlah balita gizi buruk pada tahun 2019 sebesar 81 balita, dari 45.489 balita yang dilakukan penimbangan. Dengan jumlah kasus tersebut, maka angka gizi buruk pada balita tahun 2019 sebesar 0,18%, Angka gizi buruk pada balita tahun 2019 tersebut meningkat 0,05% jika dibandingkan Tahun 2018 sebesar 0,13%. Akan tetapi pada tahun 2022 mulai

mengalami penurunan sebanyak 316 balita mengalami kasus gizi buruk dan kembali menurun pada tahun 2023 sebanyak 265 balita. Penurunan ini diindikasikan karena adanya perbaikan upaya pemenuhan dan pengawasan kecukupan gizi seimbang pada balita baik secara kuantitas maupun kualitas.

Jika dibandingkan dengan kasus di wilayah Subosukawonosraten, kasus gizi buruk di Kabupaten Wonogiri tercatat paling tinggi disetiap tahunnya. Kasus gizi buruk ini disebabkan karena beberapa faktor seperti penyakit penyerta pada anak, pola asuh dan pola makan yang belum sesuai untuk tumbuh kembang balita. Sehingga Hal ini menandakan bahwa masih perlu adanya peningkatan program kesehatan dalam menangani kasus gizi buruk, seperti pemberian makanan tambahan (PMT) melalui Posyandu setiap desa dan pemantauan pertumbuhan balita secara intensif.



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2. 26 Kasus Gizi Buruk di Subosukawonosraten Tahun 2019-2023

Berikut Tabel jumlah balita dan penderita gizi buruk Kabupaten Wonogiri tahun 2018-2023 :

Tabel 2. 37 Balita dan penderita gizi buruk Kabupaten Wonogiri tahun 2018-2023

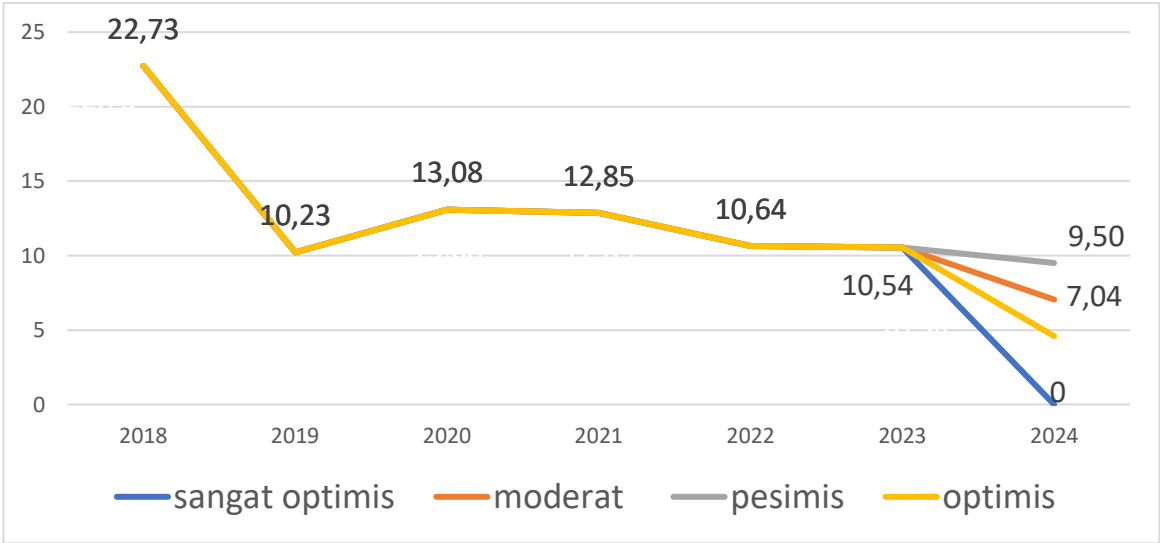
No	Tahun	Jumlah Balita	Jumlah Balita Gizi Buruk
1	2018	38.467	61
2	2019	45.489	81
3	2020	54.949	78
4	2021	35.549	449
5	2022	43.102	316
6	2023	43.559	265

Sumber : DKK, 2024

Selain gizi buruk, permasalahan lain yang masih dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri adalah adanya Stunting. Stunting adalah Kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak lebih pendek untuk usianya. (kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal kehidupan setelah lahir, tetapi baru nampak setelah anak berusia 2 tahun). Pada tahun 2019 menurut data Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) terdapat 4.522 balita stunting dengan prevalensi 10,23% dan meningkat menjadi 5.135 balita stunting pada tahun 2020 dengan prevalensi 13,08% dan pada tahun 2021 kembali berhasil diturunkan menjadi 4917 balita dengan prevalensi 12,85% dan kembali menurun pada tahun 2022 dengan jumlah balita stunting sebesar 4.643 balita atau dengan prevalensi 10,64 %. Sedangkan menurut hasil Survey Status Gizi Indonesia pada tahun 2021 prevalensi Stunting Kabupaten Wonogiri mencapai 14 % akan tetapi Kembali meningkat pada tahun 2022 sebesar 18% dan pada tahun 2023 sebesar 19,5%. Apabila dibandingkan dengan standar WHO sebesar 20%, nasional sebesar 24,4% pada tahun 2021 dan sebesar 21,6 % pada tahun 2022, provinsi Jawa Tengah sebesar 20,9% pada tahun 2021 dan sebesar 20,8 % pada tahun 2022, maka angka stunting tahun 2022 di Kabupaten Wonogiri sudah memenuhi masih lebih baik dari pada nasional maupun propinsi Jawa Tengah, penyebab stunting disebabkan karena asupan gizi pada balita belum sesuai dengan kebutuhan balita untuk pertumbuhan selain itu karena kelahiran prematur, adanya penyakit penyerta, kondisi ibu saat kehamilan dan lain-lain.

Intervensi atas kondisi stunting terdiri dari intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik, memiliki kelompok sasaran 1.000 HPK (ibu hamil, ibu menyusui, dan anak 0-23 bulan) dan kelompok sasaran usia lainnya (remaja dan WUS serta anak 24 s/d 59 bulan). Sedangkan intervensi sensitif lebih ke arah : (1) penyediaan air minum dan sanitasi; (2) peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; (3) peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak; (4) peningkatan akses pangan bergizi.

Dengan melalui intervensi terhadap kasus stunting sebagaimana tersebut diatas maka diharapkan kabupaten Wonogiri dapat mencapai target new zero stunting ditahun 2024 sehingga dapat mencapai target penurunan prevalensi stunting yang lebih cepat guna mendukung target penurunan prevalensi stunting di Indonesia. Adapun target percepatan penurunan stunting setiap tahunnya tersaji pada gambar berikut:



Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2024 (diolah)

Gambar 2. 27 Target Capaian penurunan Prevalensi Stunting 2018-2024

Dari gambar diatas juga menunjukkan tren menurun terhadap prevalensi stunting dari tahun ke tahun sehingga hal menjadi modal utama bagi 7.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri mendukung pencapaian target nasional dan daerah tahun 2024 melalui aktivitas yang konkrit berdasarkan 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting, utamanya hal-hal sebagai berikut:

- a. Menurunkan kasus kematian ibu, bayi, dan balita melalui. :
 - Meningkatkan pemeriksaan Ibu Hamil;
 - Meningkatkan persalinan ditangani dengan pelayanan Kesehatan;
 - Meningkatkan pemeriksaan perkembangan Bayi, Balita;
 - Kepastian peserta BPJS dengan menerima Peserta Bantuan Iuran (PBI);
 - Meningkatkan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh berbagai kelompok umur;
- b. Memperkuat peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat desa hingga kabupaten dalam mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara konvergen hingga tingkat desa/kelurahan untuk mencapai target prevalensi stunting se-Jawa Tengah menjadi 14%.

Tabel 2. 38 Kasus Kematian Ibu dan Tuberkulosis Kabupaten Wonogiri
Tahun 2014 s.d. 2023

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	SATUAN	REALISASI 2014-2023									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	10	15	10	9	3	8	12	35	15	11
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	%	Na	28,04	54	57,39	64,32	61,8	36,73	33	61,11	101,2
Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	%	90,57	87,46	91,2	87,46	89,34	91,96	92,52	91,91	89	88,8
Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	Na	Na	Na	35,75	44,65	42,65	71,67	71,14	81,08	83,55

Pada periode tahun 2014 sampai 2023, jumlah kasus kematian ibu mengalami fluktuatif pada table diatas. Kenaiukan tertinggi terjadi pada tahun 2021 mencapai 35 kasus, bsisa terjadi karena dampak covid 2019 juga. Tahun 2022 sampai 2023 mengalami penurunan, tahun 2022 menjadi 15 kasus dan 2023 menjadi 11 kasus.

Tahun 2014 belum dilakukan perhitungan terkait data diatas, dimulai pada tahun 2015. Berdasarkan data diatas, tren mengalami fluktuatif dari tahun 2015 sampai 2023. Tahun 2015 sampai 2019 mengalami kenaikan, namun tahun 2020 cenderung turun menjadi 36,73. Dati darta dibawah ini, kenaikan terjadi tahunj 2021 sampai 2023, dari nilai 33 sampai 101,2.

Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) dari tahun 2014 sampai 2023 menunjukkan angka yang cukup baik. Data terkait angka keberhasilan tuberculosi dapat dilihat pada table diatas.

Cakupan kepesertaan Kesehatan nasional dihitung muali tahun 2017. Dari tahun 2017 sampai 2020 mengalami kenaikan dari 35,75 sampaoi dengan 71,67. Namun data menunjukkan penurunan pada tahun 2021 menjadi 71,14. Dari tahun 2022 sampai 2023 mengalami kenaikan dari 81,08 menjadi 85,55.

Ibangga adalah IPKK mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta peranannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. Berikut data Ibangga Kabupaten Wonogiri

Tabel 2. 39 Indeks Pembangunan Keluarga 2014-2023

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	SATUAN	REALISASI 2014-2023									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	56,43	57,57	63,77

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri, 2024

Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA) perhitungan mulai tahun 2021. Tahun 2021 IBANGGA Kabupaten Wonogiri pada nilai 56,43 kemudian tahun 2022 naik menjadi 57,57. Akhir tahun 2023, IBANGGA Kabupaten Wonogiri sebesar 63,77.

Tabel 2. 40 Indeks Ketimpangan Gender 2014-2023

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	SATUAN	REALISASI 2014-2023									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	%	Na	Na	Na	Na	0,422	0,403	0,448	0,372	0,383	0,198

Sumber : Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri, 2024

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dimulai perhitungan pada tahun 2018. IKG tertinggi pada tahun 2020 sebesar 0,448. Tahun 2021 menhgalami penurunan sebesar 0,372. Namun tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 0,383. .akhir tahunn 2023, IKG Kabupaten Wonogiri menjadi 0,198.

G. Persentase Desa Mandiri

Peningkatan persentase Desa Mandiri pada tahun 2019 s.d 2023 di Kabupaten Wonogiri, menunjukkan tingkat perkembangan Desa yang semakin baik. Pada tahun 2019, Desa Mandiri sejumlah 8 Desa, Desa Maju 67 Desa, Desa Berkembang 173 Desa dan masih ada 3 Desa Tertinggal di Kabupaten Wonogiri. Pada tahun 2020, tidak ada Desa Tertinggal di Kabupaten Wonogiri, sedangkan status Desa Maju, Desa Berkembang dan Desa Mandiri menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, Jumlah Desa Mandiri bertambah 1 Desa, dari 13 Desa Mandiri di tahun 2020 menjadi 14 Desa Mandiri di tahun 2021. Kondisi dipengaruhi oleh penggunaan Dana Desa yang masih difokuskan untuk pemulihan kondisi sosial masyarakat pasca Covid-19. Kemudian pada tahun 2022 dan 2023 Jumlah Desa Mandiri meningkat cukup signifikan dan melampaui target yang ditentukan, seiring dengan pemanfaatan APBDesa yang berimbang untuk kegiatan di bidang

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Berikut adalah Jumlah Desa Mandiri, Maju, Berkembang dan Tertinggal di Kabupaten Wonogiri di Tahun 2019 s.d 2023 :

Tabel 2. 41 Jumlah Desa Mandiri, Maju, Berkembang dan Tertinggal di Kabupaten Wonogiri di Tahun 2019 s.d 2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Desa Mandiri	8	13	14	37	53
2.	Desa Maju	67	76	96	152	166
3.	Desa Berkembang	173	162	141	62	32
4.	Desa Tertinggal	3	0	0	0	0

Sumber : Dinas PMD Kab. Wonogiri, 2024

Pendampingan dan Fasilitasi kepada Pemerintah Desa, fokus kepada upaya mendorong Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Desa Maju menjadi Desa Mandiri sesuai dengan hasil pendataan dan rekomendasi IDM di tahun sebelumnya.

H. Sosial Budaya

Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan, perilaku, dan karya cipta manusia yang dapat menuntun kehidupan manusia agar lebih bermartabat. Pembangunan kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya baru di era globalisasi, namun harus tetap berpijak pada nilai leluhur yang terkandung dalam Pancasila, sehingga terwujud karya – karya seni budaya yang memiliki kepribadian. Adapun penjelasan lainnya mengenai kesenian merupakan hasil karya yang mengacu pada nilai keindahan dan mewujud dari proses pengendapan makna relasi antar manusia dan manusia dengan lingkungan hidupnya.

Tabel 2. 42 Perkembangan Seni dan Budaya Kabupaten Wonogiri Tahun 2013-2023

No	Uraian	TAHUN										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penyelenggaraa n festival seni dan budaya	N/A	N/A	N/A	13	20	17	14	-	7	11	12
2	Jumlah sarana penyelenggaraa n seni dan budaya	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	
3	Jumlah seniman	N/A	N/A	N/A	21.208	21.208	7680	7750	7845	7845	7949	7873
4	Jumlah kelompok kesenian	N/A	N/A	N/A	906	906	238	253	260	260	263	267

No	Uraian	TAHUN										
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5	Jumlah cagar budaya (candi,situs)	N/A	N/A	N/A	81	81	81	81	81	81	81	81
6	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan (candi,situs)	N/A	N/A	N/A	3	3	3	3	3	3	3	3
7	Jumlah Museum	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	1	1	1	1
8	Jumlah Pengunjung Museum	N/A	N/A	N/A	2.881	1987	2779	2785	906	2048	4342	4109

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, 2022

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan seni dan budaya Kabupaten Wonogiri dapat dilihat dari jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya, jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya, jumlah seniman, jumlah kelompok kesenian, jumlah cagar budaya candi, situs), jumlah cagar budaya yang dilestarikan (candi, situs), jumlah museum, dan jumlah pengunjung museum. Dapat dilihat bahwa jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya mulai tahun 2016-2018 mengalami kenaikan sedangkan pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan bahkan di tahun 2020 tidak ada penyelenggaraan festival karena adanya pandemi covid 19 namun di tahun 2021 sudah ada penyelenggaraan festival seni sebanyak 7 penyelenggaraan seni dan budaya dan di tahun 2022 ada penyelenggaraan festival seni sebanyak 11 kali penyelenggaraan.

Pada kurun waktu 2016-2017 seniman dan jumlah kelompok kesenian jumlahnya stagnan, sedangkan tahun 2018-2022 jumlah seniman dan jumlah kelompok kesenian jumlahnya mengalami peningkatan, untuk jumlah seniman di tahun 2018 sebanyak 7680 seniman dan di tahun 2022 menjadi 7949 seniman sedangkan untuk kelompok kesenian di tahun 2018 ada 238 kelompok kesenian dan ditahun 2022 meningkat menjadi 263 kelompok seniman.

Jumlah cagar budaya dan jumlah cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2016-2022 tidak mengalami penurunan atau peningkatan. Jumlah museum dari tahun 2016-2022 masih tetap yaitu sebanyak 1 museum. Jumlah pengunjung museum pada tahun 2016-2019 mengalami peningkatan, dan karena adanya pandemi covid 19 maka pada tahun 2020 mengalami penurunan lagi sampai dengan angka pengunjung sebanyak 906 orang, dan di tahun 2021 mengalami kenaikan lagi sebanyak 2048 pengunjung dan bahkan di tahun 2022 meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 4342 orang pengunjung.

2.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

1. Pengeluaran Rata – Rata Per Kapita

Data pengeluaran dapat mengungkapkan pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan penduduk. Kemampuan daya beli masyarakat memberikan gambaran kondisi ekonomi masyarakat. Pengeluaran rata-rata per kapita tiap bulan penduduk Wonogiri selama kurun waktu 7 tahun (2016-2022) dominan peruntukannya pada pengeluaran untuk kebutuhan bahan makanan, kecuali di tahun 2021 rata-rata per kapita tiap bulan penduduk Wonogiri diperuntukkan lebih besar pada pengeluaran dari kebutuhan non makanan. Masyarakat dengan pendapatan yang rendah, tentunya mempersempit pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga pada kelompok masyarakat dengan penghasilan terbatas, pemenuhan konsumsi yang bersifat primer (makanan) menjadi pilihan alternatif yang utama. Sulit bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan non-makanan yang paling esensial terdiri atas perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi dan aneka barang dan jasa lainnya. Namun data menunjukkan bahwa pada tahun 2021 rata-rata per kapita tiap bulan penduduk Wonogiri diperuntukkan lebih besar pada pengeluaran dari kebutuhan non makanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya perubahan pola konsumsi penduduk Kabupaten Wonogiri, dari komoditi makanan ke komoditi non-makanan, dan ini menjadi indikasi adanya peningkatan kesejahteraan penduduk. Secara keseluruhan rata-rata pengeluaran perkapita tiap bulan penduduk Wonogiri fluktuatif namun cenderung meningkat. Adapun perkembangan rata-rata pengeluaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 43 Pengeluaran Rata – Rata Per Kapit Tiap Bulan Penduduk Wonogiri Tahun 2016-2022

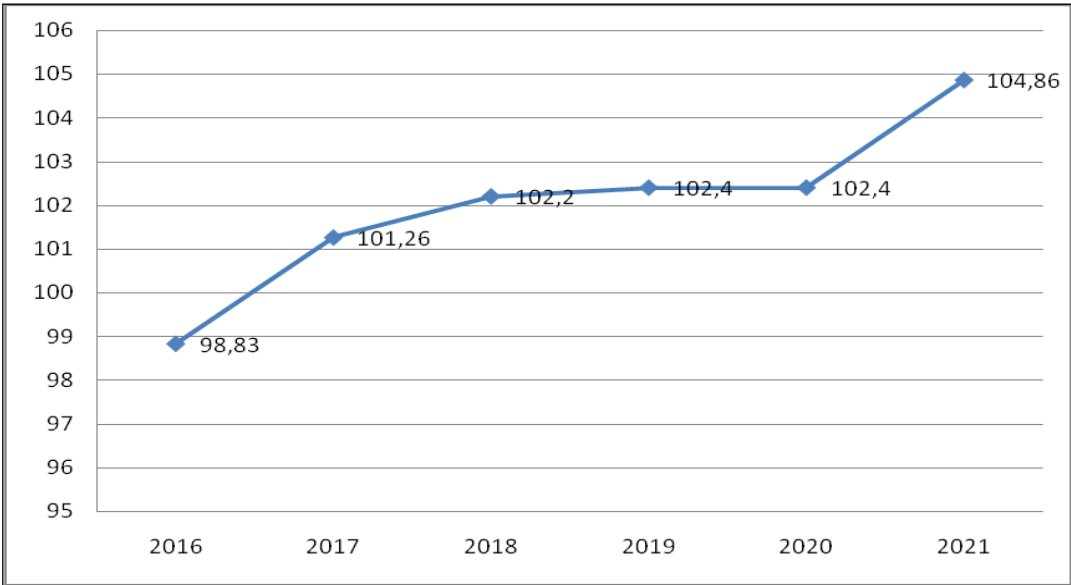
Tahun	Rata-Rata Pengeluaran per-Kapita Sebulan	Persentase	
		Makanan	Non Makanan
2016	641.048	50.08	49.92
2017	655.429	54.38	45,62
2018	901.970	51,04	48,96
2019	794.646	52,70	47,30
2020	837.733	50,48	49,52
2021	953.678	49,90	51,10
2022	929.969	55,19	44,81
2023	1.139.084	50,16	49,84

Sumber: BPS Kabupaten Wonogiri

2. Nilai Tukar Petani

Struktur ekonomi Kabupaten Wonogiri paling besar berasal dari sektor pertanian. Berdasarkan data PDRB Kabupaten Wonogiri tahun 2022 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menyumbangkan 29,10% dari total sektor keseluruhan penyumbang PDRB. Secara mikro pembangunan sektor pertanian juga harus memberikan dampak terhadap pelakunya. Petani merupakan pelaku utama sektor pertanian. Sehingga pembangunan di sektor pertanian selain memberikan dampak terhadap perekonomian secara umum juga harus memberikan jaminan kesejahteraan terhadap petani itu sendiri. Petani yang sebagian besar berada di wilayah pedesaan perlu dilihat tingkat kesejahterannya dari waktu ke waktu. Perkembangan kesejahteran petani diukur berdasarkan beberapa indikator yang salah satunya adalah Nilai Tukar Petani.

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan/rasio antara Indeks Harga Yang Diterima Petani (I) dengan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/ daya beli petani di pedesaan. NTP merupakan nilai tukar (term of trade) antara barang/produk pertanian dengan barang-barang konsumsi dan faktor produksi yang dibutuhkan petani yang dinyatakan dalam persen. NTP berfluktuasi dari waktu ke waktu tergantung dari perkembangan harga barang yang dijual petani (I) dan barang dan jasa yang dikonsumsi petani (Ib). Apabila harga produk pertanian yang dihasilkan petani naik dengan persentase lebih besar dari persentase kenaikan barang dan jasa yang dibayar petani, dengan asumsi volume produksi tidak berkurang, maka NTP naik dan dengan sendirinya pendapatan petani naik relatif lebih besar dari kenaikan pengeluaran atau terjadi surplus. Dengan demikian secara konseptual, hubungan antara NTP dan penambahan pendapatan petani sangat erat. Karena pendapatan petani sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteran, maka NTP merupakan indikator yang relevan untuk menunjukkan perkembangan tingkat kesejahteran petani. Berdasarkan Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Wonogiri Tahun 2013-2021 senantiasa mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Semakin tinggi nilai NTP mengindikasikan adanya kenaikan kesejahteran petani yang berdampak pada daya beli petani yang meningkat, sebaliknya apabila NTP menurun mengindikasikan adanya penurunan kesejahteran petani yang berdampak pada penurunan daya beli petani. Ini artinya semakin baik profit yang diterima petani. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Gambar berikut ini:



Sumber: BPS Kabupaten Wonogiri, 2022

Gambar 2. 28 Perkembangan Nilai Tukar Petani Kabupaten Wonogiri

3. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan rata-rata pendapatan yang diterima setiap penduduk selama satu tahun dalam suatu daerah. PDRB per kapita diperoleh dari hasil PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Pada tahun 2022, PDRB Perkapita Kabupaten Wonogiri atas dasar harga Konstan (ADHK) sebesar Rp 21,177 juta naik dibandingkan PDRB per kapita tahun 2021 sebesar Rp 20,181 juta. Atau sebesar 31,791 juta (ADHB). Berikut Data PDRB tahun 2016 sampai 2022:



Sumber: BPS Wonogiri, dan Bappeda Litbang Kab. Wonogiri Data diolah, 2022.

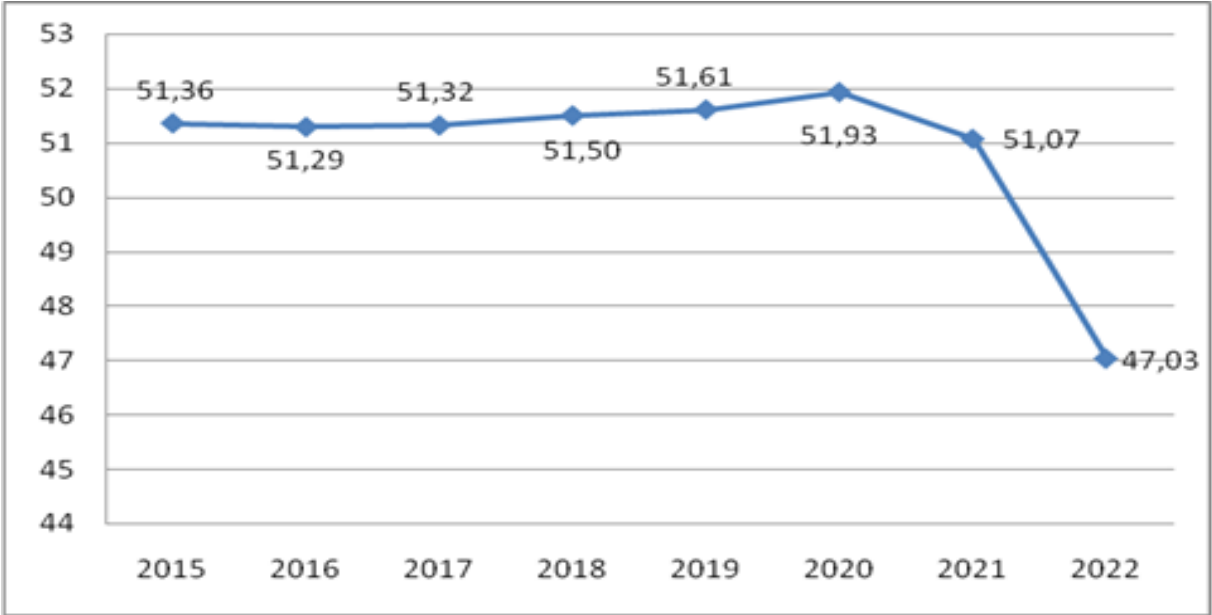
Gambar 2. 29 Pertumbuhan PDRB per Kapita Harga Berlaku dan Harga Konstan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2022

Meningkatnya Pendapatan per kapita menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang baik. Capaian PDRB Per Kapita baik ADHK dan ADHB adalah lebih baik dari target daerah dengan angka ketercapaian diatas 100 persen, yaitu ADHK 21.177.104 dengan capaian dari target 103%, ADHB per Kapita 31.791.906 dengan capaian 104% dan capaian tersebut lebih baik dari capaian wilayah setara, hal ini patut diapresiasi karena mencerminkan pendapatan per kapita penduduk terus naik, sehingga mendukung progam pemerataan dan penurunan ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Wonogiri.

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Rasio Ketergantungan

Dependency ratio atau rasio ketergantungan adalah perbandingan antara penduduk produktif dengan penduduk non produktif. Dependency ratio merupakan perbandingan populasi umur 0-14 tahun di tambah populasi umur 65 tahun keatas, dibandingkan dengan populasi umur 15 tahun - 64 tahun. Dependency ratio akan menunjukkan beban penduduk produktif yang menanggung penduduk tidak produktif. Penduduk produktif menghasilkan barang dan jasa dari kegiatan ekonomi untuk penduduk non produktif. Semakin tinggi dependency ratio menunjukkan bahwa semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai keperluan hidup penduduk non produktif. Apabila dependency ratio semakin rendah menunjukkan bahwa semakin rendah beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai keperluan hidup penduduk non produktif. Berikut ini perkembangan rasio ketergantungan di Kabupaten Wonogiri tahun 2015 sampai 2022.



Sumber: BPS Kabupaten Wonogiri, 2022

Gambar 2. 30 Perkembangan Rasio Ketergantungan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2015-2022

Selama kurun waktu 2015-2020 rasio ketergantungan Kabupaten Wonogiri relatif mengalami peningkatan yaitu dari 51.36 (2015) meningkat menjadi 51.93 (2020). Peningkatan ini menandakan bahwa komposisi penduduk non produktif di Wonogiri cenderung terus meningkat sedangkan penduduk produktif menurun. Selain itu, peningkatan rasio ketergantungan ini juga berarti bahwa beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai keperluan hidup penduduk non produktif terus meningkat. Namun pada tahun 2 tahun setelahnya senantiasa mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni tahun 2021 menjadi 51.07 dan menurun cukup drastis sebesar 4.04 point menjadi 47.03. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk produktif di Kabupaten Wonogiri cenderung terus meningkat sedangkan penduduk non produktif menurun. Peningkatan rasio ketergantungan tersebut berarti bahwa beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai keperluan hidup penduduk non produktif terus menurun.

2. Rasio Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan

Penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja menurut pendidikan yang ditamatkan paling banyak didominasi oleh tamatan Sekolah Dasar. Sementara itu, selama tahun 2018 hingga 2022 trend perkembangan penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan yang ditamatkan bersifat fluktuatif. Secara lebih rinci, berikut perkembangan yang dimaksud.

Tabel 2. 44 Rasio Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang bekerja Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan (orang)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Educational Attainment	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sekolah Dasar/Primary School	211.616	197.054	385.981	381.346	407.208	316.033
Sekolah Menengah Pertama/Junior High School	97.888	98.293	174.059	174.129	178.854	161.154
Sekolah Menengah Atas/Senior High School	122.816	115.671	173.452	179.818	158.161	177.464
Diploma I/II/III/Akademi Diploma I/II/III/Academy	10.497	18.790	46.685	487	43.265	44.871
Jumlah/Total	563.887	525.718	780.177	735.780	787.488	699.522

Sumber : BPS Kabupaten Wonogiri, 2023

3. Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dari tahun 2017-2022 yang paling tinggi adalah lapangan pekerjaan dengan berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar. Selanjutnya status pekerjaan utama dengan jumlah terbanyak kedua adalah Buruh. Sementara itu, selama tahun 2018 hingga 2022 trend perkembangan penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama bersifat fluktuatif. Data terkait Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama lebih rinci ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2. 45 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Status Pekerjaan Utama/Jumlah	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Berusaha Sendiri	90.206	83.051	102.294	71.988	99.475	111.001	126.037
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar	135.688	168.151	119.006	176.581	146.774	152.472	174.517
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	12.696	11.182	14.284	11.781	13.115	9.791	12.317
Buruh/Karyawan/Pegawai	147.570	134.361	148.535	128.612	139.975	133.447	168.841
Pekerja Bebas	36.701	45.565	44.668	49.410	41.930	44.794	68.622
Pekerja keluarga/tak dibayar	108.709	121.577	96.931	119.493	117.824	126.584	149.188

Sumber: BPS Kabupaten Wonogiri, 2023

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

A. Jalan Dan Jembatan

Panjang jalan di Kabupaten Wonogiri yang termasuk dalam kewenangan pengelolaan Kabupaten berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 195 Tahun 2012 adalah sepanjang 1.038,47 Km atau 89,68% dari total panjang jalan di Kabupaten Wonogiri. Sedangkan 7,22% sisanya merupakan kewenangan Provinsi Jawa Tengah dan 3,10% lainnya merupakan kewenangan Nasional. Pada tahun 2019, setelah dilakukan penyesuaian panjang jalan di Kabupaten Wonogiri bertambah sepanjang 1.277,093 Km karena adanya alih status jalan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 222 Tahun 2016 sepanjang 2,950 Km, Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 166 Tahun 2017 sepanjang 96,170 Km dan Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 158 Tahun 2019 sepanjang 82,336 Km serta 57,172 Km yang dikerjakan ditahun 2019.

Pada Tahun 2020, terbit SK Bupati Wonogiri Nomor 620/320/HK/2020 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Wonogiri, dengan total panjang menjadi 1.375,883 km.

Pada tahun 2023 terbit SK Bupati Wonogiri Nomor 620/354/HK/2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 620/320/HK/2020 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten di Wilayah Kabupaten Wonogiri, dengan total panjang jalan kewenangan Kabupaten Wonogiri menjadi 1471,193 km.

Tabel 2. 46 Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota tahun 2014-2023

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	SATUAN	REALISASI 2014-2023									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	Na	Na	Na	Na	74,03	86,76	87,35	88,15	88,54	88,82

Sumber : DPU Wonogiri 2023

Berdasarkan data diatas, persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten/kota menunjukkan angka yang cukup baik.

Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	SATUAN	REALISASI 2014-2023									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	24

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Wonogiri, 2023

Indikator Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota merupakan indikator baru yang mulai dihitung dan muncul setelah adanya SE penyelarasan IUP dari Provinsi Jawa Tengah mulai tahun 2023.

Infrastruktur perhubungan mempunyai peran cukup penting dan dapat menunjang pengembangan wilayah di Kabupaten Wonogiri. Pelayanan umum pada urusan perhubungan meliputi darat (angkutan darat dan ASDP),

perhubungan laut, perhubungan udara, dan perkeretaapian (Bhatara Kresna). Namun pemerintah Kabupaten Wonogiri hanya memiliki kewenangan pada perhubungan darat.

Peluncuran Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng Koridor Solo-Wonogiri oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per Agustus 2023 lalu sangat diminati oleh masyarakat. Tarif normal dan tarif pelajar/buruh/veteran yang juga merupakan tarif yang berlaku di seluruh koridor Trans Jateng sangat membantu masyarakat dalam konektifitas maupun pengurangan pengeluaran masyarakat dan tentunya juga sangat bermanfaat dalam pengurangan emisi karbon. Tarif normal, yakni Rp 4.000 dan tarif pelajar/buruh/veteran Rp 2.000. Koridor Solo-Wonogiri memiliki 60 pemberhentian dengan 121 halte. Rute Trans Jateng Solo-Wonogiri dimulai dari Terminal Tirtonadi, Solo mengakhiri perjalanan di Terminal Tipe C Wonogiri.

Pelayanan terminal di Kabupaten Wonogiri meliputi tempat menaikkan dan menurunkan penumpang, tempat bongkar muat barang, tempat parkir menunggu keberangkatan, dan tempat peristirahatan sementara angkutan umum. Jumlah terminal penumpang di Kabupaten Wonogiri. Pada tahun 2023 Kabupaten Wonogiri memiliki terminal penumpang sebanyak 26 terminal dengan perincian terminal tipe A 1 unit, terminal tipe B 4 unit dan terminal tipe C 21 unit. Kondisi terminal tipe C yang merupakan kewenangan Kabupaten Wonogiri secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2. 47 Kondisi Terminal Tipe C di Kabupaten Wonogiri Tahun 2023

No.	Kecamatan	Nama Terminal	Kendaraan Keluar/Masuk (2023)	Pemenuhan 31 standart Pelayanan Terminal (Standart)*	Kondisi	Status Aset
1	Pracimantoro	Terminal Non Bus Pracimantoro	2.849	18	Rusak	SK Bupati 590/95/HK/2022
2	Giritontro	Terminal Giritontro	854	13	Baik	SK Bupati 590/95/HK/2022
3	Batuwarno	Terminal Batuwarno	1.065	13	Baik	SK Bupati 590/95/HK/2022
4	Tirtomoyo	Terminal Bus Tirtomoyo	1.940	14	Rusak	SK Bupati 590/95/HK/2022
5	Baturetno	Terminal Baturetno	4.364	19	Rusak	SK Bupati 590/95/HK/2022
6	Eromoko	Terminal Bus Eromoko	2.406	14	Baik	SK Bupati 590/95/HK/2022
7	Wuryantoro	Terminal Non Bus Wuryantoro	2.195	15	Rusak	SK Bupati 590/95/HK/2022
8	Manyaran	Terminal Non Bus Manyaran	1.899	13	Rusak	SK Bupati 590/95/HK/2022
9	Wonogiri	Terminal Angkot Wonogiri	15.048	24	Baik	SK Bupati 590/95/HK/2022
10	Ngadirojo	Terminal Ngadirojo	4.916	20	Rusak	SK Bupati 590/95/HK/2022
11	Sidoharjo	Terminal Bus Sidoharjo	4.911	20	Sedang	SK Bupati 590/95/HK/2022
12	Jatiroto	Terminal Non Bus Jatiroto	773	13	Rusak	SK Bupati

No.	Kecamatan	Nama Terminal	Kendaraan Keluar/Masuk (2023)	Pemenuhan 31 standart Pelayanan Terminal (Standart)*	Kondisi	Status Aset
						590/95/HK/2022
13	Purwantoro	Terminal Purwantoro	5.739	17	Rusak	SK Bupati 590/95/HK/2022
14	Bulukerto	Terminal Non Bus Bulukerto	806	12	Baik	SK Bupati 590/95/HK/2022
15	Slogohimo	Terminal Non Bus Slogohimo	2.372	12	Sedang	SK Bupati 590/95/HK/2022
16	Jatisrono	Terminal Non Bus Jatisrono	6.555	16	Sedang	SK Bupati 590/95/HK/2022
17	Giriwoyo	Belum ditetapkan	452	4	Rusak	Belum ada
18	Kismantoro	Belum ditetapkan	762	11	Baik	Belum ada
19	Jatipurno	Belum ditetapkan	2.336	15	Baik	Belum ada
20	Girimarto	Terminal Girimarto	1.022	10	Rusak	SK Bupati 590/95/HK/2022
21	Puhpelem	Terminal Puhpelem	1.047	10	Rusak	SK Bupati 590/95/HK/2022

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri, 2024

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Rencana Induk Jaringan LLAJ), yang salah satu rekomendasinya adalah pembangunan simpul daerah, dan Tataran Transportasi Lokal sesuai amanah Perda No. 2 Kabupaten Wonogiri tahun 2018 perlu untuk segera disusun.

Perlu penambahan fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Wonogiri antara lain rambu jalan, RPPJ, APILL, Guardrail, marka jalan, LPJU. LPJU Tenaga Surya telah sangat membantu dalam penerangan jalan, tetapi untuk pemeliharaan pada tahun-tahun mendatang perlu dana pemeliharaan yang cukup besar. Berikut data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri, terkait indeks keselamatan dan Layanan Angkutan Darat tahun 2021 sampai 2023

Tabel 2. 48 Indeks Keselamatan dan Layanan Angkutan Darat tahun 2021-2023

Tahun	2021	2022	2023
Indeks Keselamatan	-377 %	5,96 %	12,76 %
Layanan Angkutan Darat	-	41 %	83,7 %

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri, 2024

Berdasarkan data diatas, Indeks keselamatan Kabupaten Wonogiri pada tahun 2021 nilai sangat baik dengan penurunan sebesar -377%, pada tahun 2022 dan 2023 menggunakan metode penilaian yang berbeda. Nilai indeks keselamatan mengalami kenaikan 5,96 % menjadi 12,76 %. Hal ini menunjukkan suatu yang baik.

Terkait Layanan Angkutan Darat, pada tahun 2022 menuju 2023, mengalami kenaikana yang positif. Layanan Angkutan darat kabupaten wonogiri mengalami kenaikan pada nilai 41 % menjadi 83,7 % dari tahun sebelumnya.

B. Sumber Daya Air

Kebutuhan akan penyediaan air yang meliputi kapasitas daya dukung, serta tingkat perkembangan kebutuhan air di Kabupaten Wonogiri terus mengalami peningkatan, baik dari penyediaan untuk kebutuhan domestik, pertanian, industri, permukiman maupun sektor lainnya. Berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini, Kabupaten Wonogiri menghadapi tantangan yang cukup besar kaitannya dalam pengelolaan sumber daya air.

Salah satu sumber penyediaan air baku adalah waduk. Adapun dalam hal ini, Kabupaten Wonogiri memiliki satu waduk besar, yaitu Waduk Gajah Mungkur yang juga merupakan salah satu waduk besar (>10 juta m³) di Jawa Tengah, dan tujuh waduk kecil. Secara lebih rinci, berikut adalah tabel ketersediaan air di waduk tersebut.

Tabel 2. 49 Ketersediaan Air Waduk Tahun 2023

No	Nama Waduk	Areal (Ha)	Kapasitas (juta m ³)	Elevasi		Volume (juta m ³)		Persentase
1	Waduk Serba Guna Wonogiri	28.109	440,00	130,34	133,07	130,77	233,49	178,55
2	Waduk Krisak atau Tandon	874	3,74	109,10	112,48	1,80	3,28	182,39
3	Waduk Song Putri	517	0,60	219,53	220,54	0,25	0,32	125,98
4	Waduk Ngancar	637	2,12	242,52	246,10	0,39	1,25	320,72
5	Waduk Nawangan	319	0,81	224,80	216,00	0,42	-	0,00
6	Waduk Parangjoho	522	1,58	193,94	195,99	1,24	1,62	130,43
7	Waduk Baran	392	1,20	223,78	222,80	0,14	0,21	150,71
8	Waduk Kedunguling	87	0,48	172,72	167,00	0,11	-	0,00

Sumber : Dinas Pusdataru Provinsi Jateng, 2022

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2022 ketersediaan air di waduk tersebut relatif mencukupi, kecuali di Waduk Nawangan dan Kedunguling. Tetapi pada saat musim kemarau sebagian waduk terlihat sangat kering.

Adapun untuk Waduk Gajah Mungkur yang juga merupakan salah satu waduk besar di Jawa Tengah. Secara lebih rinci, ketersediaan air di Waduk Gajah Mungkur adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 50 Volume Ketersediaan Air Waduk Gajah Mungkur Tahun 2017-2020

Bulan	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Januari	133.736	238.264	286.692	119.494
Februari	290.235	297.396	307.380	203.616
Maret	330.257	343.718	346.150	352.098
April	363.940	364.435	363.436	330.500
Mei	355.477	337.434	310.599	280.040
Juni	344.688	286.350	264.209	209.461
Juli	284.927	266.754	210.357	191.196
Agustus	160.463	134.902	136.374	89.761
September	135.197	68.653	64.787	55.100
Oktober	167.658	72.597	53.749	42.188
November	209.609	113.170	64.600	28.933
Desember	161.434	201.834	79.033	36.281

Sumber : Dinas Pusdataru Provinsi Jateng, 2022

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa selama empat tahun terakhir ketersediaan air di waduk gajah mungkur relatif terus mengalami penurunan volume. Kondisi ini disebabkan oleh pendangkalan waduk yang disebabkan oleh erosi dari sub daerah aliran sungai yang mengalir ke waduk. sehingga volume waduk lebih kecil.

Sementara itu, di Kabupaten Wonogiri total luas area Daerah Irigasi (DI) adalah 30.199 Ha, dimana 439 Ha (1,45 %) wewenang pusat, 976 Ha (3,23 %) wewenang Provinsi dan 28.784 Ha (95,31 %) merupakan wewenang Kabupaten, sehingga kebutuhan anggaran untuk upaya-upaya pemeliharaan dan rehabilitasi sebagian besar pada Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten Wonogiri. Daerah Irigasi berdasar kewenangannya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 51 Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi di Kabupaten Wonogiri

No.	Kewenangan Daerah Irigasi	Luas Area (ha)	% Dari Total Luas	Jumlah Daerah Irigasi
1.	Pusat	439	1,45	1
2.	Provinsi	976	3,23	6
3.	Kab/Kota	28.784	95,31	403
Total Wonogiri		30.199	100	410

Sumber : DPU Kabupaten Wonogiri, 2021

Terkait dengan upaya dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian, Pemerintah Kabupaten Wonogiri terus mengupayakan pengelolaan irigasi sebagai sarana pendukungnya. Namun demikian, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir masih dijumpai jaringan irigasi dalam kondisi rusak berat (15,98%) hingga rusak sedang (4,10%). Adapun irigasi dalam kondisi rusak ini memiliki jumlah yang cukup besar (untuk mengairi 5.779 Ha), sehingga kabupaten perlu untuk melakukan upaya-upaya pemeliharaan dan rehabilitasi. Lebih lanjut, jika dilihat dari perkembangannya, persentase jaringan irigasi dengan kondisi baik di Kabupaten Wonogiri sedikit mengalami kenaikan, yaitu sebesar 0,2%, dari 72,67% (2021) menjadi 72,87% (2022). Secara rinci, berikut perkembangan kondisi jaringan irigasi di Kabupaten Wonogiri.

Tabel 2. 52 Kondisi Fisik Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten di Wonogiri

Tahun	Baik		Rusak Ringan		Rusak Sedang		Rusak Berat		Total Luas (Ha)
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	
2018	20.950	72,78	1.845	6,41	2.104	7,31	3.885	13,5	28.784
2019	21.346	74,16	1.767	6,14	2.030	7,05	3.641	12,65	28.784
2020	21.530	74,80	1.750	6,08	1.993	6,92	3.511	12,20	28.784
2021	20.918	72,67	1.826	6,34	1.958	6,80	4.081	14,18	28.784
2022	20.973	72,87	2.031	7,06	1.179	4,10	4.600	15,98	28.784
2023	20.985	72,90	2.031	7,06	1.184	4,11	4.585	13,93	28.784

Sumber : DPU Kabupaten Wonogiri, 2023

Kedepan, dengan selesai dibangunnya Waduk Pidekso, akan dibangun dan ditingkatkan jaringan irigasi di Kecamatan Giriwoyo sampai dengan Kecamatan Baturetno lebih kurang 1.500 Ha.

C. Air Minum dan Sanitasi

Akses air minum dan sanitasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terutama terkait Angka Harapan Hidup (AHH). Selain itu, akses air minum dan sanitasi juga berpengaruh dan memberikan dampak besar bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta produktivitas penduduk. Adapun kondisi cakupan air minum perpipaan mengalami kenaikan dari 31,91% (2018) menjadi 42,13% (2022). Kondisi cakupan pelayanan akses air minum layak selama lima tahun (2018-2022) di Kabupaten Wonogiri juga mengalami kenaikan, yaitu dari 81,15%

(2018) menjadi 89,82% (2022). Sedangkan untuk air minum aman pada tahun 2022 menjadi 27,91%. Sementara itu, untuk sanitasi cakupan pelayanannya mengalami peningkatan yaitu dari 93,74% (2018) menjadi 99,86% (2022).

Tabel 2. 53 Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Wonogiri tahun 2016-2022

Uraian	Tahun							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Air Minum Perpipaan (%)	31,71	31,77	31,91	28,46	48,00	38,13	42,13	43,07
Air Minum Layak (%)	83,03	83,82	81,15	83,38	85,80	88,23	89,82	92,67
Air Minum Aman (%)	23,69	24,95	24,53	28,46	22,00	25,94	27,91	26,67
Sanitasi(%)	79,24*	95,99	93,74	98,80	99,18	99,31	99,86	99,86

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri, 2023
DPU Kabupaten Wonogiri, 2022

Lebih lanjut, dalam rangka pengelolaan layanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, maka dilakukan pendampingan terhadap institusi dan kelompok masyarakat pengelolanya. Hal ini diperlukan sebagai salah satu upaya untuk menjaga kondisi air minum dan sanitasi tetap optimal guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Guna mendukung percepatan pencapaian akses menyeluruh layanan air minum di Jawa Tengah, maka berdasarkan MoU bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait pada tahun 2011 telah direncanakan Pembangunan 8 (delapan) SPAM Regional yang berperan sebagai penyedia air curah bagi PDAM kabupaten/kota. Salah satu diantaranya adalah SPAM Regional Wososukas, dengan mengambil air baku dari Waduk Gajah Mungkur. Debit yang direncanakan sebesar 1.450 lt/det, yang akan dialirkan ke Wonogiri, Sukoharjo, Kanganyar, Surakarta dan Sragen.

Berikut persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Wonogiri dari Tahun 2014 s.d. 2023 :

Tabel 2. 54 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Tahun 2014-2023

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	SATUAN	REALISASI 2014-2023									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,79%

Sumber: Dinas LH Kab. Wonogiri, 2024

Berdasarkan tabel data diatas, Data Rumah tangga dengan akses sanitasi aman baru tersedia pada tahun 2023.

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

Dalam upaya pembangunan jangka panjang kabupaten Wonogiri, maka diperlukan kegiatan investasi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru, dan mengurangi pengangguran serta ketimpangan wilayah. Kinerja pembangunan urusan penanaman modal diukur melalui 2 (dua) indikator yakni Jumlah Investor dan Nilai Investasi

Tabel 2. 55. Jumlah Investor di Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2023

No	Skala Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
1	Mikro	138	68	40	154	4.260	6.260	24.891	30.085	65.896
2	Kecil	790	408	271	585	1.238	963	398	567	5.220
3	Menengah	289	144	130	223	517	181	32	23	1.539
4	Besar	5	9	22	10	10	8	182	105	351
Akumulasi		1.222	629	463	972	6.025	7.412	25.503	30.780	73.006

Ket : *) Data Sementara
Sumber: Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri, 2022

Berdasarkan Berdasarkan tabel, jumlah investor di Kabupaten Wonogiri tahun 2016 sebesar 1.222 Investor dengan jumlah investor untuk usaha skala mikro sebanyak 138, kecil 790, menengah 289 dan 5 investor skala besar. Pada tahun 2020 walaupun bersamaan dengan adanya musibah pandemi Covid19 kinerja penambahan usaha mikro tumbuh secara signifikan dan lebih pesat jika dibandingkan dengan skala kecil, menengah dan besar, yakni bertambah 4.122 investor untuk usaha mikro baru sehingga menjadi berjumlah 4.260 investor Usaha Mikro. Adapaun pada 2020 jumlah investor Usaha Kecil sebesar 1.238 investor usaha, investor Usaha Menengah sebesar 517 investor usaha, dan Usaha Besar sebanyak 10 investor usaha.

Selain itu setelah gejolak perekonomian akibat dampak pandemi Covid-19 berakhir, serta berjalannya progam upaya pemulihan ekonomi dengan baik. Angka investasi naik secara signifikan, terutama pada sektor Usaha Mikro tercatat sampai pada tahun 2023 saat ini, angka jumlah Usaha Mikro mencapai 30.085 investor usaha mikro. Sehingga total jumlah Usaha Mikro menjadi berjumlah 65.896 investor usaha.



Sumber: Dinas DPMPSTP dan Bappeda Litbang Wonogiri (data diolah)

Gambar 2. 31 Jumlah Investor tahun 2016-2022

Jumlah investor yang menginvestasikan dana untuk usaha UMKM di kabupaten Wonogiri terus meningkat, hal ini memberikan potensi untuk mendukung percepatan laju pertumbuhan ekonomi dan kegiatan pembangunan wilayah. Sampai pada tahun 2023 jumlah investor di kabupaten Wonogiri mencapai 73.006 investor, adapun jumlah investor yang paling mendominasi adalah investor pada usaha mikro yang mencapai 65.896 investor, kemudian diikuti investor pada usaha kecil yakni 5.220.

Usaha mikro sangat berdampak dalam menciptakan dan menyerap lapangan pekerjaan sektor UMKM mendominasi sekitar 60% dari total PDB Nasional, dan menyerap 90% tenaga kerja nasional. Peranan dari para investor sangat diperlukan dalam mendukung rencana pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang dan mendukung industri strategis di Wonogiri.

Pada tahun 2023 pertumbuhan angka investor mencapai 244 persen, atau naik dua kali lipat yakni bertambah sekitar 18 ribu investor baru meliputi semua jenis usaha. Jumlah investor yang paling mendominasi adalah sektor usaha mikro sehingga pada tahun 2022 jumlah investor mencapai 24.891 investor.

Tabel 2. 56. Pertumbuhan Nilai Investasi di Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2023

No	Skala Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Investasi (Juta)	Investasi (Juta)	Investasi (Juta)	Investasi (Juta)	Investasi (Juta)	Investasi (Juta)	Investasi (Juta)	Investasi
1	Mikro	4.892,30	2.148,00	1.426,50	2.893,74	47.327,02	89.882,47	489.905,37	521.344,13
2	Kecil	187.713,10	87.474,40	61.202,42	141.448,46	75.813,08	172.913,10	296.229,58	220.981,30
3	Menengah	447.083,50	220.860,30	224.948,83	339.817,91	59.850,20	265.305,88	115.521,99	25.492,00
4	Besar	347.046	6.496.003,00	1.695.527,25	1.766.148,73	22.370,20	115.450,00	1.095.884,30	1.650.828,66
Jumlah Baru		987.046	6.806.486	1.983.105,00	2.250.308,84	205.360,50	643.551,45	1.997.541,24	2.418.646,09
Akumulasi			7.793.532	9.776.637,00	12.026.946,00	12.232.306,44	12.875.857,89	14.873.399,03	17.292.045,12
Pertumbuhan			689,58%	125,45%	123,02%	101,71%	105,26%	115,51%	116,26%

Sumber: Dinas PMPTSP Kabupaten Wonogiri, 2022

Nilai Investasi di Kabupaten Wonogiri tahun 2016 sebesar 987,046 Milyar didominasi inventasi untuk usaha skala menengah yakni 447,083 Milyar dan paling kecil dari usaha skala mikro yakni 4,892 Milyar. Pada tahun 2020 penambahan nilai investasi mengalami pelambatan. Sampai dengan tahun 2020 penambahan nilai investasi baru mencapai 110 Milyar . Dan untuk tahun 2020 Pertumbuhan Nilai Investasi menurun signifikan diakibatkan dampak pandemi Covid19. Akan tetapi masih berhasil mencatatkan jumlah nilai investasi baru senilai 205 milyar rupiah, dan secara akumulasi masih tumbuh sebesar 101,70%

Pada tahun 2023 nilai investasi secara keseluruhan mencapai 2.418,6 milyar rupiah, dengan perkembangan akumulasi total sebesar 115,51 %. Dengan nilai investasi terbesar pada sektor usaha besar yang mencapai nilai investasi 1.650,8 milyar, dan terkecil pada sektor usaha menengah dengan nilai investasi baru 25,49 milyar. Sehingga akumulasi total nilai investasi dari tahun 2016-2023 adalah sebesar 14,8 triliun rupiah. Pada tahun 2023, nilai investasi naik signifikan menjadi 17,2 Triliun Rupian.

Angka nilai investasi diharapkan terus bertambah dalam upaya untuk mendukung rencana jangka panjang daerah kabupaten Wonogiri. Khususnya mendukung proyek strategis daerah seperti pembangunan kawasan ekonomi khusus dan pusat industri baru di bagian selatan Wonogiri, yang tentu membutuhkan nilai investasi besar.

Dalam upaya menyerap para investor maka kemudahan dalam hal administrasi perizinan terus didorong, selain daripada itu perlu disusun upaya sistematis dan preventif dalam hal rencana penyerapan investasi jangka panjang agar meminimalkan gejolak dari berbagai dampak yang terjadi seperti persoalan keadilan invetasi, ketimpangan, dampak lingkungan. Kesehatan dan sebagainya, maka pemerintah daerah melalui instansi terkait untuk

meminimalisir dampak investasi.

Penelitian, pengembangan dan pengkajian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan. Perencanaan yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila dilandasi oleh hasil penelitian yang berkualitas pula. Mengingat pentingnya kedudukan penelitian dalam proses perencanaan pembangunan, maka penelitian menjadi kebutuhan yang mendasar dalam perencanaan pembangunan. Kegiatan penelitian /pengembangan/pengkajian didasari pada isu strategis daerah.

Berdasarkan data dari tahun 2020-2023 jumlahnya relatif fluktuatif, ditahun 2021 kajian yang diangkat yakni terkait Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah. Lebih lanjut berikut capaian Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Wonogiri dari Tahun 2020 s.d. 2023

Tabel 2. 57 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 - 2023

No	Tahun	Nilai	Kategori
1	2020	3,9179	Sangat Tinggi
2	2021	3,8561	Sangat Tinggi
3	2022	3,9370	Sangat Tinggi
4	2023	4,0010	Sangat Tinggi

Sumber : Bapperida Kab. Wonogiri, 2024

2.3.5 Indeks Desa Membangun (IDM)

Peningkatan persentase Desa Mandiri pada tahun 2019 s.d 2023 di Kabupaten Wonogiri, menunjukkan tingkat perkembangan Desa yang semakin baik. Pada tahun 2019, Desa Mandiri sejumlah 8 Desa, Desa Maju 67 Desa, Desa Berkembang 173 Desa dan masih ada 3 Desa Tertinggal di Kabupaten Wonogiri. Pada tahun 2020, tidak ada Desa Tertinggal di Kabupaten Wonogiri, sedangkan status Desa Maju, Desa Berkembang dan Desa Mandiri menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, Jumlah Desa Mandiri bertambah 1 Desa, dari 13 Desa Mandiri di tahun 2020 menjadi 14 Desa Mandiri di tahun 2021. Kondisi dipengaruhi oleh penggunaan Dana Desa yang masih difokuskan untuk pemulihan kondisi sosial masyarakat pasca Covid-19. Kemudian pada tahun 2022 dan 2023 Jumlah Desa Mandiri meningkat cukup signifikan dan melampaui target yang ditentukan, seiring

dengan pemanfaatan APBDesa yang berimbang untuk kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Peningkatan Desa Mandiri dan Desa Maju terjadi tahun 2024 dengan jumlah 114 dan 129

Berikut adalah Jumlah Desa Mandiri, Maju, Berkembang dan Tertinggal di Kabupaten Wonogiri di Tahun 2019 s.d 2024 :

Tabel 2. 58 Jumlah Desa Mandiri, Maju, Berkembang dan Tertinggal di Kabupaten Wonogiri di Tahun 2019 s.d 2024

No.	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Desa Mandiri	8	13	14	37	53	114
2.	Desa Maju	67	76	96	152	166	129
3.	Desa Berkembang	173	162	141	62	32	8
4.	Desa Tertinggal	3	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas PMD Wonogiri, 2024

Pendampingan dan Fasilitasi kepada Pemerintah Desa, fokus kepada upaya mendorong Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Desa Maju menjadi Desa Mandiri sesuai dengan hasil pendataan dan rekomendasi IDM di tahun sebelumnya. Transformasi Indikator Desa Membangun (IDM) menjadi Indeks Desa (ID) baru akan dilakukan pada tahun 2024.

2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan umum tidak lepas dari besarnya peranan sektor sektor pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Kabupaten Wonogiri, adapapun capain dari sektor pelayanan publik di ukur dengan adanya Indeks Pelayanan Publik. Capaian Indek Pelayanan Publik dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2018 Kabupaten Wonogiri memiliki capaian IPP sebesar 4,21. Tahun 2019 capaian meningkat menjadi 4,39, dan ditahun berikutnya yaitu tahun 2020, walaupun terjadi pandemi Covid 19 tapi capaian IPP masih mengalami peningkatan dengan capaian 4,42. Dan di tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 4,49 dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 sebesar 4,42. Berikut capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Wonogiri.

Tabel 2. 59 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 - 2022

No	Tahun	Nilai
1	2018	4,21
2	2019	4,29
3	2020	4,42
4	2021	4,42
5	2022	4,45

Sumber : Bappeda dan Litbang Wonogiri, 2023

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari pelaksanaan *good governance* menjadi konsekuensi bagi badan publik untuk membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Dalam menjalankan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk dapat memberikan dan menyediakan layanan informasi secara cepat, tepat, murah dan mudah.

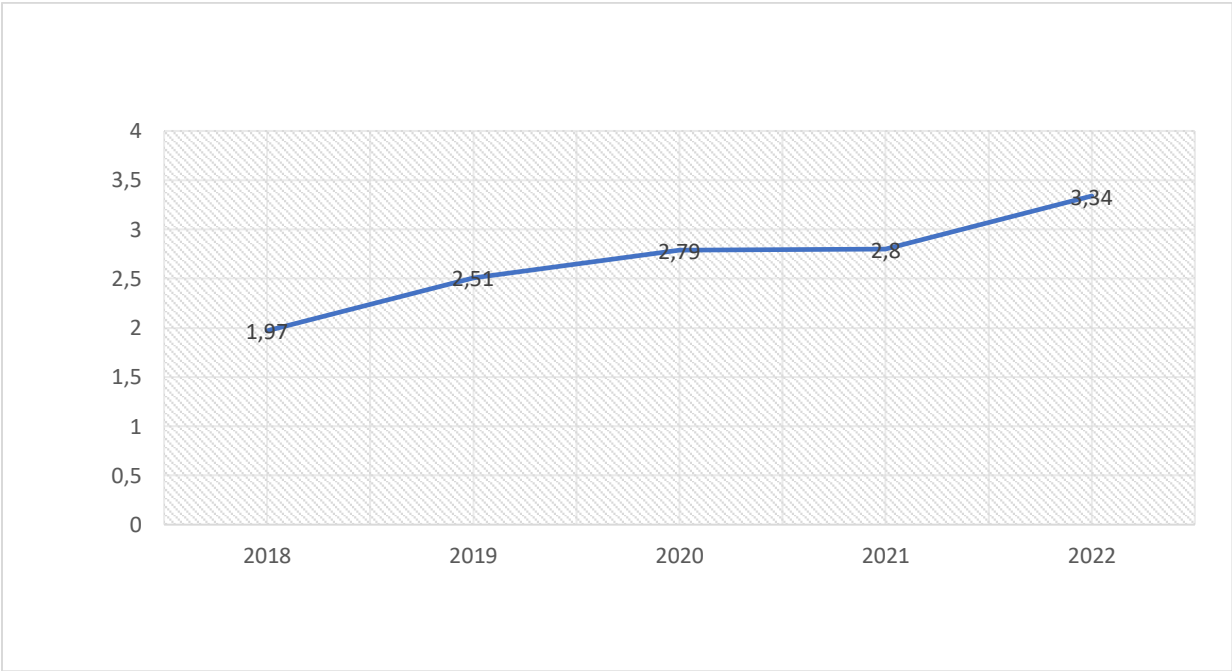
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya perlu adanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPBE dapat berjalan mencapai tujuannya, seiring dengan semangat reformasi birokrasi, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pemerintah. Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu: kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE dan layanan SPBE. Evaluasi SPBE telah dilakukan mulai dari tahun 2018. Hasil dari penilaian SPBE Kabupaten Wonogiri dari tahun ke tahun semakin meningkat, berikut capaian Indeks SPBE hasil Evaluasi dari Kemeterian PANRB tahun 2018-2022.

**Tabel 2. 60 Indeks Sistem Pembangunan Berbasis Elektronik (SPBE)
Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 - 2023**

No	Tahun	Nilai	Perdikat
1	2014	N/A	N/A
2	2015	N/A	N/A
3	2016	N/A	N/A
4	2017	N/A	N/A
5	2018	1,97	Cukup
6	2019	2,51	Cukup
7	2020	2,79	Baik
8	2021	2,80	Baik
9	2022	3,34	Baik
10	2023	3,94	Sangat Baik

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Wonogiri, 2023

Namun demikian masih perlu upaya lebih keras dalam rangka meningkatkan kinerja pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menuju predikat baik bahkan sangat baik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Gambar perkembangan SPBE dari tahun 2018 sampai 2022 adalah sebagai berikut:



Sumber: Diskominfo Kab. Wonogiri, 2022

Gambar 2. 32 Perkembangan SPBE dari tahun 2018 - 2022

Berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor B/1026/AA.05/2022 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 tanggal 6

Desember 2022, pemerintah Kabupaten Wonogiri berhasil mempertahankan predikat BB dengan nilai mengalami peningkatan dari tahun 2021. Pada tahun 2021 hasil evaluasi AKIP meraih kategori BB dengan nilai 73,17 sedangkan pada tahun 2022 nilainya meningkat menjadi 73,88. Lebih lanjut, perkembangan nilai AKIP pemerintah Kabupaten Wonogiri tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 61 Perkembangan Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018-2022

Tahun	Nilai AKIP	
	Nilai	Kategori
2018	70,43	B
2019	73,07	BB
2020	73,43	BB
2021	73,17	BB
2022	73,88	BB

Sumber: Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021

Dalam hal ini diperlukan dukungan semua pihak mulai dari segi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja.

Indeks Reformasi Birokrasi, merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat kesimpulan hasil evaluasi adalah Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Wonogiri tahun 2023 adalah 77,81 dengan kategori "B"

Berikut ini adalah Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Wonogiri mulai Tahun 2018-2022.

Tabel 2. 62 Perkembangan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018-2023

Tahun	Indeks RB	
	Nilai	Kategori
2018	62,45	B
2019	64,16	B
2020	64,75	B
2021	65,06	B
2022	66,58	B
2023	77,81	A

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Wonogiri

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa Indeks Reformasi Birokrasi menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Indeks Integritas Nasional merupakan merupakan pemetaan risiko korupsi dan capaian upaya pencegahan korupsi yang dilakukan seluruh K/L/PD. Berdasarkan hasil ukuran tersebut menjadi dasar untuk menyusun perbaikan sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi. SPI (Survey Penilaian Integritas) dilaksanakan oleh KPK ke Kabupaten Wonogiri di mulai tahun 2021 dengan responden berasal dari Internal (Pegawai), Eksternal (Pengguna Layanan), dan Eksper (Pemangku Kepentingan Lain / responden ahli). Survey bertujuan untuk mengukur tingkat risiko korupsi pada KLPD, sehingga dapat memetakan resiko korupsi yang ada dan kemudian mampu melakukan upaya - upaya pencegahan korupsi pada instansinya. Semakin tinggi nilai Indeks Integritas maka tingkat / risiko korupsi semakin rendah. Berikut tabel nilai Indeks Integritas Nasional :

Tabel 2. 63 Indeks Integritas Nasional Tahun 2018 s.d. 2023

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	SATUAN	REALISASI 2014-2023		
		2021	2022	2023
Indeks Integritas Nasional	Angka	84,25	80,04	81,2

Sumber : Inspektorat Wonogiri, 2024

Berdasarkan tabel diatas, nilai Indeks Integritas Nasional Kabupaten Wonogiri menunjukkan cukup baik dari tahun 2021 sampai 2023.

Kepegawaian, Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Wonogiri salah satunya didukung oleh kinerja Pegawai Negeri Sipil yang dalam hal ini dapat ditunjukkan dengan ketersediaan sumber daya yang ada di dalamnya. Adapun dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2013-2023) jumlah PNS di Kabupaten Wonogiri cenderung terus mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan jumlah pegawai yang memasuki masa pensiun lebih besar dibanding jumlah pengadaan pegawai baru. Secara lebih rinci, perkembangan jumlah PNS Kabupaten Wonogiri selama 10 tahun terakhir seperti tabel berikut :

Tabel 2. 64 Jumlah ASN Kabupaten Wonogiri Tahun 2014-2023

No	Tahun	Jumlah PNS	Jumlah PPPK	Total
1	2014	12.536	-	12.536
2	2015	12.333	-	12.333
3	2016	10.977	-	10.977
4	2017	10.602	-	10.602
5	2018	9.923	-	9.923
6	2019	9.665	-	9.665
7	2020	9.485	-	9.485
8	2021	8.802	212	9.014
9	2022	8.339	2.988	11.327
10	2023	7.612	3.620	11.232

Sumber: BKD Kabupaten Wonogiri, 2023

Penurunan jumlah ASN Kabupaten Wonogiri yang cukup tajam yaitu sejumlah 683 dari jumlah 9.485 pada tahun 2020 dan menjadi 8.802 pada tahun 2021, diakibatkan oleh adanya kebijakan Pemerintah terhadap moratorium dan pembatasan pengadaan Aparatur Sipil Negara, sementara jumlah Aparatur Sipil Negara yang memasuki masa purna tugas dalam jangka waktu yang sama relatif tinggi. Sehingga terjadi ketimpangan antara jumlah antara jumlah penambahan pegawai dengan jumlah pegawai yang purna tugas maupun pindah tugas. Tetapi dimulai di tahun 2021 Kabupaten Wonogiri mempunyai formasi PPPK sebanyak 212 orang, sehingga jumlah total ASN di tahun 2021 sejumlah 9.014.

Berdasarkan Keputusan KASN Nomor : 73/KEP.KASN/C/XI/2022 tanggal 30 November 2022 tentang Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Pemkab Wonogiri, Pemerintah Kabupaten Wonogiri ditetapkan pada kategori III (Baik) dengan nilai 300 dan indeks 0,73 (yang terbaru Keputusan KASN No. 57/KEP.KASN.C/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 tentang Penetapan Kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN di Lingkungan Pemkab Wonogiri pada Kategori III (Baik) dengan nilai 312,5 dan Indeks 0,76).

Dalam hal perkembangan inovasi daerah, Kabupaten Wonogiri, melakukan terobosan dalam peningkatan Inovasi daerah, ini dapat dilakukan melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Adapun dalam hal ini, telah diterbitkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 98 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah Tahun 2023 sebagai payung hukum pelaksanaan inovasi daerah di Kabupaten Wonogiri dalam wadah WIA (Wonogiri Innovation Awards) bagi perangkat daerah dan KRENOVA (Kreatifitas dan Inovasi) bagi masyarakat.

Kegiatan WIA dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut dari PERMENDAGRI Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pengukuran, Penilaian, dan Pemberian Penghargaan dan atau Insentif Inovasi Daerah, yang mana output yang dihasilkan akan diteruskan menjadi data untuk penyelenggaraan Indeks Inovasi Daerah (IGA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri setiap tahun. Lebih lanjut, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir pelaksanaan inovasi daerah di Kabupaten Wonogiri mengalami perkembangan dalam segi kuantitas dari tahun ke tahun.

Berikut perkembangan serta capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Wonogiri.

Tabel 2. 65 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020-2023

Tahun	Nilai	Kategori
2020	19.843	Sangat Inovatif/Terinovtif
2021	75,51	Sangat Inovatif/Terinovtif
2022	81,63	Sangat Inovatif/Terinovtif
2023	91,72	Sangat Inovatif/Terinovtif

Kabupaten Wonogiri, 2023

Dari tabel diatas dapat menunjukkan bahwa tingkat capaian inovasi di Kabupaten Wonogiri mengalami peningkatan setiap tahun, sehingga perlu diberikan wadah agar inovasi tersebut dapat tersalurkan dan diimplementasikan sehingga memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Wonogiri.

2.5 HASIL EVALUASI RPJPD TAHUN 2005 – 2025

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ Tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025. Maka RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025 telah dilakukan evaluasi oleh Provinsi Jawa Tengah dengan hasil rekomendasi Rekomendasi yang telah di

sesuaikan dan dinyatakan telah memenuhi syarat penilaian kinerja berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 050/28 Tahun 2023 Tentang Rekomendasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kab/Kota di Jawa Tengah Tahun 2005-2025.

Berikut Hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005 s.d. 2025

A. Kesimpulan hasil capaian Pembangunan

Pada evaluasi RPJPD Kabupaten Wonogiri tahun 2005-2025 yang telah dilakukan, diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja sebesar 89,56%. Nilai tersebut mendapat predikat penilaian rata-rata realisasi kinerja **"Tinggi"**. Pencapaian ini bermakna bahwa capaian kinerja RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025 telah **memenuhi target persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja**.

Dokumen RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025 merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan telah berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Juga sebagai sebuah dokumen perencanaan jangka panjang yang dapat mengarahkan rencana pembangunan jangka menengahnya yaitu RPJMD selama 4 periode.

Namun demikian dokumen RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025 yang disusun secara kualitatif, membuat proses evaluasi yang dilakukan sangat kompleks, dan multi tafsir sehingga harus menggali data dan informasi yang multisource, multiyears dan multistakeholders. Penyajian data dan target di dalam dokumen RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025 kurang memperhatikan asas sistematis, terarah dan terukur.

Terdapat 5 (lima) aspek yang dapat diidentifikasi dalam pencapaian target kinerja pembangunan jangka panjang. Aspek pemerintahan mencakup kapasitas aparatur, dukungan regulasi dan juga pembiayaan bersumber dari pemerintah. Aspek sosial budaya meliputi partisipasi masyarakat, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan sebagainya. Aspek Infrastruktur terkait dengan sarana prasarana yang dibutuhkan, dan juga kondisi fisik serta lingkungan yang ada. Aspek ekonomi terkait dengan peran serta sektor non pemerintah dalam mendukung pembiayaan berbagai kegiatan. Yang terakhir adalah aspek waktu yaitu keterbatasan waktu yang tersedia untuk penyelesaian sebuah kegiatan dan pelaporannya.

Aspek-aspek pendorong yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025 adalah aspek pemerintah, aspek ekonomi, aspek infrastruktur dan aspek sosial budaya. Aspek yang mendominasi adalah aspek pemerintahan.

Aspek-aspek penghambat yang dominan menjadi kendala pencapaian target kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025 adalah aspek pemerintahan, aspek ekonomi, aspek infrastruktur dan aspek sosial budaya dan juga aspek waktu.

Kedua kondisi ini bermakna bahwa dalam pencapaian kinerja sebagian sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025 telah diupayakan secara maksimal dengan dukungan faktor pendorong yang ada, meski pada sebagian sasaran pokok pembangunan jangka panjang Kabupaten Wonogiri berbagai aspek tersebut muncul menjadi faktor penghambatnya. Sementara, diantara aspek-aspek penghambat sendiri saling berkaitan. Demikian juga diantara aspek-aspek pendorong yang ada saling berkaitan dalam mendukung pencapaian target kinerja sasaran pokok RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025.

B. Rekomendasi hasil capaian Pembangunan

Dalam penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045 harus sepenuhnya mengacu pada regulasi yang berlaku. Orientasi, *overview* dan bimtek kepada seluruh tim penyusun tentang dokumen perencanaan daerah sangat diperlukan dalam rangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional demi tercapainya satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Di samping itu untuk tercapainya tujuan mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah maupun antar Pusat dan Daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Sesuai dengan asas SPPN, penyusunan RPJPD dalam rangka pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan memenuhi prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan

serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.

Penyusunan rancangan awal RPJPD paling lambat dilaksanakan 1 tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir. Adapun kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN.

Penyusunan dokumen RPJPD yang andal membutuhkan data dan informasi yang lengkap, akurat dan akuntabel. Untuk itu sangat penting dilakukan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam sebuah perencanaan ditunjukkan dengan keberadaan data awal yang menjadi *baseline* sehingga akan memudahkan menentukan target capaian sasaran pokok yang terukur dengan memperhatikan dukungan kapasitas SDM dan juga keuangan daerah.

Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045 ditetapkan oleh kepala daerah dan disampaikan kepada seluruh *stakeholders*, khususnya bagi calon kepala daerah sebelum tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah dimulai.

Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Untuk itu dokumen RPJPD nantinya harus terus adaptif dengan memperhatikan dinamika yang ada sehingga perlu dilakukan evaluasi minimal 5 tahun sekali, sehingga dokumen RPJPD selalu akomodatif terhadap situasi dan kondisi yang ada

Terkait aspek pendorong dan penghambat, perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah di semua bidang melalui berbagai pelatihan dan bimtek. Di samping itu penting untuk menempatkan SDM sesuai kompetensinya. Kinerja SDM yang sesuai kompetensinya dan kapasitasnya sangat berpengaruh terhadap pencapaian target bidang terkait. Penggalan pembiayaan dari sektor private dengan melakukan *Public Private Partnership* dalam berbagai sektor pembangunan terkait dengan pemenuhan sarana prasarana serta pelayanan publik, sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya di luar pemerintah demi tercapainya kesejahteraan bersama. Peningkatan peran CSR dalam banyak bidang juga sangat mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat. Gotong royong sebagai karakteristik bangsa Indonesia dapat menjadi instrumen dalam mencapai keadilan sosial.

Pemberdayaan masyarakat demi meningkatkan peran serta masyarakat dalam berbagai aspek, sehingga masyarakat mempunyai *sense of belonging* terhadap program-program pemerintah dan mempunyai kepedulian terhadap keberlangsungan dan pemeliharaan hasil program dan kegiatan yang telah berjalan termasuk perlunya peningkatan kesadaran masyarakat akan dokumen kependudukan dan kecerdasan dalam berpolitik. Mendorong kewirausahaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan sehingga tercapai kemandirian, keswadayaan dan kestabilan ekonomi masyarakat secara umum. Pada akhirnya perencanaan yang baik dapat menyediakan alokasi waktu pelaksanaan program kegiatan yang cukup, tepat, dan efisien sehingga diperoleh hasil yang optimal.

Rekomendasi terhadap 7 (tujuh) sasaran pokok yang ada, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran pertama yaitu “Terwujudnya peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian dalam arti luas, pendayagunaan potensi pertanian (agrobisnis) secara optimal, dan peningkatan nilai tambah hasil pertanian melalui pengembangan industri, perdagangan, dan jasa”.
 - a. Pada sasaran pertama ini jika dibandingkan dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPN, kedepannya agar meningkatkan sistem pembangunan yang sesuai dengan keseimbangan ekosistem dan industri-industri dari sektor pertanian dengan mengembangkan sarana dan prasarana irigasi, penampungan air yang memanfaatkan waduk, embung, dan danau yang memadai. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyediaan air dan mengendalikan degradasi serta tidak menimbulkan dampak yang merusak lingkungan.
 - b. Pemanfaatan dari sektor pertanian sebagai sektor basis untuk menunjang kegiatan perekonomian juga harus memperhatikan kualitas lingkungan yang berkelanjutan sesuai dengan salah satu indikator pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah yaitu pengembangan perekonomian daerah yang berorientasi dan berdaya saing global dengan memanfaatkan sebesar-besarnya potensi lokal yang memperhatikan sumber daya alam secara berkelanjutan dan membangun keterkaitan sistem produksi dan distribusi yang kokoh dimana pada pelaksanaannya menyesuaikan dengan kondisi Kabupaten Wonogiri sehingga

nantinya dalam pemanfaatan sektor pertanian sebagai sektor basis atau unggulan dalam perekonomian, dapat memperhatikan keberlanjutan lingkungan untuk kelestarian alam agar dapat dinikmati generasi mendatang dan kualitas lingkungan dapat terjaga.

2. Sasaran kedua yaitu “Terwujudnya iklim yang kondusif untuk menarik investor dan mewujudkan industri, jasa, dan infrastruktur melalui upaya transformasi teknologi dan kelembagaan guna mendorong kemajuan daerah”.
 - a. Kedepannya, untuk mencapai sasaran tersebut sangat diperlukan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dan utilitas penunjang perekonomian dalam arti luas. Jika ditinjau dari RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPN, aspek sarana dan prasarana sangat berpengaruh dalam menarik investor guna menunjang pertumbuhan perekonomian daerah. Adanya investasi juga berguna untuk menunjang keberhasilan pembangunan guna menciptakan sarana serta prasarana di daerah agar lebih baik.
 - b. Pengembangan teknologi dalam mewujudkan Wonogiri *Smart City* dengan memberdayakan masyarakat semua lini, baik para pimpinan/pengambil kebijakan, aparatur pemerintah maupun masyarakat di sektor digital.
 - c. Peningkatan ekosistem digital yang melibatkan *quadrupelheix* maupun *pentahelix* yaitu sektor publik, dunia pendidikan, dunia usaha dan industri, masyarakat dan media.
3. Sasaran ketiga yaitu “Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah yang optimal guna mendukung pembangunan”.
 - a. Penggalan dan pengembangan sumber pendapatan daerah dalam peningkatan pelayanan publik dan kemudahan berusaha.
 - b. Peningkatan *public private partnership* dalam pembangunan dan pelayanan publik.
 - c. Pemberdayaan masyarakat desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyiapan institusi masyarakat untuk memperkuat dan memberdayakan masyarakat yang berbasis komunitas desa untuk mengatasi masalah yang ada dengan melaksanakan kegiatan yang dikelola secara demokratis, transparan, dan akuntabel.

- d. Peningkatan kinerja dalam pengelolaan keuangan agar lebih maksimal. Serta pembangunan daerah harus berlandaskan *Sustainable Development Goals*/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
4. Sasaran keempat yaitu “Terwujudnya aparatur dan pemerintahan yang profesional, amanah, bersih, bebas dari KKN dan demokratis dengan mengutamakan penegakan hukum, jaminan keamanan, dan ketertiban umum, didukung oleh adanya partisipasi masyarakat dan swasta yang tinggi”
 - a. Indikator dari sasaran ini bisa lebih dikembangkan lagi antara lain peningkatan penegakan hukum yang dilandasi prinsip-prinsip keadilan terutama dalam menciptakan pemerintahan yang profesional dan bersih
 - b. Peningkatan kualitas produk hukum daerah sesuai kewenangan yang dimiliki serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan produk hukum yang dikeluarkan kabupaten atau kota.
 - c. Pembangunan aparatur pemerintah melalui upaya membentuk profil dan kinerja aparatur pemerintah yang profesional dan berkarakter. Dalam indikator persentase aparat yang memiliki kualitas sesuai standar belum mencapai ketercapaian yang maksimal, hal ini kedepannya perlu diperhatikan agar kinerjanya dapat lebih ditingkatkan.
 - d. Integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja
5. Sasaran kelima yaitu “Terwujudnya masyarakat yang memiliki tingkat penghormatan tinggi pada agamanya, berkepribadian, berakhlak mulia, produktif, berpendidikan, dan memiliki kompetensi dengan pertumbuhan penduduk yang terkendali”. Sasaran ini dapat dikembangkan melalui:
 - a. Pengembangan sarana prasarana penunjang peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia baik melalui pendidikan, dan kesehatan bagi seluruh masyarakat (inklusif) yang berkualitas sehingga mempunyai daya saing yang unggul di pasar kerja.
 - b. Memberikan dukungan infrastruktur termasuk regulasi dan anggaran bagi perkembangan *entrepreneurship* dan ekonomi kerakyatan.

- c. Menciptakan iklim yang kondusif dalam mengembangkan toleransi dan kegiatan keagamaan
- 6. Sasaran keenam yaitu “Tewujudnya kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa yang berkualitas dengan menjaga kelestarian budaya, SDA dan lingkungan hidup guna mendukung pengembangan pariwisata dan pembangunan berkelanjutan”.
 - a. Sasaran ini dapat dikembangkan lagi melalui pengembangan/diversifikasi destinasi wisata alam yang dapat menjadi pengayaan destinasi wisata yang ada saat ini.
 - b. Meningkatkan upaya pengelolaan ekosistem lautan dan daratan yang berkelanjutan.
 - c. Diperlukan perluasan cakupan pelayanan risiko bencana alam, melalui upaya-upaya penguatan mitigasi bencana yang berkesinambungan dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
 - d. Memastikan perencanaan yang terintegrasi dengan upaya-upaya pembangunan berkelanjutan dan akomodatif terhadap perubahan yang dinamis.
- 7. Sasaran ketujuh yaitu “Terwujudnya masyarakat yang sehat, sejahtera lahir dan batin, berpenghidupan layak, dengan penghayatan yang tinggi terhadap agama dan ideologi Pancasila, perlindungan HAM, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak”.
 - a. Sasaran ini dapat dikembangkan melalui penerapan konsep sejahtera yang menunjukkan kondisi kemakmuran yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spiritual). Dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi sejahtera adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, menurunnya jumlah penduduk miskin; terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif; meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai oleh terpenuhinya hak sosial masyarakat yang mencakupi akses pada pelayanan

dasar, sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga, serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama; terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender pada seluruh bidang pembangunan, kesejahteraan dan perlindungan anak; tersedianya infrastruktur yang memadai; meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab yang mampu mendukung pembangunan daerah.

- b. Peningkatan partisipasi/keterlibatan seluruh masyarakat termasuk perempuan dalam kegiatan pembangunan sampai pada tahap pengambilan keputusan. Untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) serta perlindungan anak dan remaja, melalui pembentukan dan penguatan kelembagaan, seperti Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Remaja (TKP2AR), Forum Komunikasi Pengarusutamaan Gender, Forum Kajian Gender, dan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA). Terjaminnya keadilan gender dalam berbagai perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik untuk memberikan peran lebih besar bagi perempuan di berbagai bidang pembangunan serta menurunkan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan.
- c. Upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dilaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat afirmatif. Selain hal tersebut ditempuh pula langkah strategis yaitu dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam dokumen-dokumen perencanaan.
- d. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) secara holistik dan berkesinambungan.
- e. Kesadaran masyarakat akan hukum dan HAM dengan penegakan hukum yang dilandasi prinsip-prinsip keadilan, meningkatkan kualitas produk hukum daerah sesuai kewenangan yang dimiliki serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum yang dikeluarkan suatu kabupaten/kota.

2.6 TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA
PELAYANAN PUBLIK

2.6.1. Trend Demografi

Data kependudukan memiliki peran yang sangat penting. Data tersebut dapat menjadi acuan utama pemerintah dalam merencanakan dan mengevaluasi pembangunan. Data kependudukan, seperti jumlah penduduk, persebaran penduduk, dan penduduk menurut kelompok umur dibutuhkan oleh pengguna data, khususnya para perencana dan pengambil kebijakan dalam menyusun program pembangunan.

Data yang komprehensif dan berkesinambungan sangat diperlukan untuk membuat kebijakan dan merancang program yang relevan dengan kebutuhan, permasalahan dan dinamika waktu. Namun, saat ini sumber data penduduk yang tersedia secara periodik hanya Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) untuk digunakan dalam perhitungan proyeksi penduduk.

Proyeksi penduduk merupakan perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan (migrasi). Ketiga komponen tersebut akan menentukan jumlah dan struktur umur penduduk di masa depan.

Tabel 2. 66 Proyeksi Penduduk Wonogiri Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2025-2045

No	Kelompok Umur	Penduduk tahun 2023 (Jiwa)			Proyeksi Penduduk (Jiwa)														
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	2025			2030			2035			2040			2045		
					Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4	30.019	28.709	58.728	29.960	30.117	60.077	31.060	31.335	62.395	32.194	32.609	64.802	33.389	33.914	67.303	34.656	35.243	69.899
2.	5-9	30.910	29.819	60.729	30.981	31.143	62.124	32.119	32.402	64.521	33.291	33.720	67.010	34.526	35.069	69.596	35.837	36.444	72.281
3.	10-14	34.642	33.118	67.760	34.568	34.748	69.317	35.837	36.154	71.991	37.145	37.624	74.769	38.524	39.130	77.653	39.986	40.663	80.649
4.	15-19	39.462	36.359	75.821	38.681	38.882	77.563	40.100	40.455	80.555	41.564	42.099	83.663	43.107	43.785	86.891	44.743	45.501	90.244
5.	20-24	38.634	35.430	74.064	37.784	37.981	75.766	39.171	39.517	78.689	40.601	41.124	81.725	42.108	42.770	84.878	43.706	44.447	88.153
6.	25-29	36.388	33.833	70.221	35.824	36.011	71.834	37.139	37.467	74.606	38.494	38.990	77.484	39.923	40.551	80.474	41.438	42.140	83.579
7.	30-34	33.802	32.943	66.745	34.050	34.228	68.278	35.300	35.612	70.913	36.589	37.060	73.649	37.947	38.543	76.490	39.387	40.054	79.441
8.	35-39	34.774	34.250	69.024	35.213	35.397	70.610	36.506	36.828	73.334	37.838	38.325	76.163	39.242	39.859	79.102	40.732	41.422	82.154
9.	40-44	35.537	34.646	70.183	35.804	35.991	71.795	37.119	37.447	74.565	38.473	38.969	77.442	39.901	40.529	80.430	41.416	42.117	83.533
10.	45-49	37.445	37.997	75.442	38.487	38.688	77.175	39.900	40.253	80.153	41.356	41.889	83.245	42.891	43.566	86.457	44.519	45.273	89.793
11.	50-54	38.209	38.997	77.206	39.387	39.593	78.980	40.833	41.194	82.027	42.323	42.868	85.192	43.894	44.584	88.479	45.560	46.332	91.892
12.	55-59	34.710	37.258	71.968	36.715	36.906	73.621	38.063	38.399	76.462	39.452	39.960	79.412	40.916	41.560	82.476	42.469	43.189	85.658
13.	60-64	32.151	34.980	67.131	34.247	34.426	68.673	35.504	35.818	71.323	36.800	37.274	74.075	38.166	38.766	76.933	39.615	40.286	79.901
14.	65-69	27.841	29.030	56.871	29.013	29.164	58.178	30.078	30.344	60.422	31.176	31.577	62.753	32.333	32.841	65.175	33.560	34.129	67.689
15.	70-74	21.328	22.876	44.204	22.551	22.669	45.220	23.379	23.585	46.964	24.232	24.544	48.776	25.131	25.527	50.658	26.085	26.527	52.613
16.	>75	21.799	29.191	50.990	26.013	26.149	52.161	26.968	27.206	54.174	27.952	28.312	56.264	28.990	29.445	58.435	30.090	30.600	60.689
Total		524.500	526.585	1.051.085	539.284	542.096	1.081.380	559.076	564.018	1.123.094	579.480	586.945	1.166.425	600.989	610.439	1.211.428	623.799	634.368	1.258.167

Sumber : BPS Wonogiri, 2024, data diolah

Berdasarkan proyeksi penduduk tersebut maka dapat dihitung proyeksi kebutuhan sarana prasarana selama 20 tahun yang akan datang.

2.6.2. Kebutuhan Saran dan Prasarana

a. Proyeksi Kebutuhan Rumah

Data Rumah Tangga dengan akses Hunian Layak Terjangkau dan berkelanjutan tahun 2014-2023 sebagai berikut :

Tabel 2. 67 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Tahun 2014-2023

INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN (IUP)	SATUAN	REALISASI 2014-2023									
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	N/A	82,76	82,98	83,2	83,76	90,37	90,58	90,80	91,01	91,22

Sumber : Dispera Kab. Wonogiri, 2024

Berdasarkan data diatas, selama tahun 2015 sampai 2023 mengalami kenaikan, tahun 2023 dengan nilai 91,22.

Kabupaten Wonogiri memiliki rata-rata laju pertumbuhan penduduk Tahun 2021-2022 sebesar 0,74% (WDA, 2023), yang sekaligus dapat dimaknai bahwa juga terjadi pertumbuhan jumlah keluarga baru yang pada akhirnya akan meningkatkan kebutuhan rumah bagi keluarganya. Kebutuhan rumah di Kabupaten Wonogiri berdasarkan proyeksi penduduk sampai dengan tahun 2045 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2. 68 Proyeksi Kebutuhan Rumah di Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1.051.085	1.081.380	1.123.094	1.166.425	1.211.428	1.258.167
Proyeksi Kebutuhan Rumah	264.272	270.345	280.773	291.606	302.857	314.542

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Wonogiri, 2024

b. Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Sumber daya alam terpenting yang harus menjadi fokus Kabupaten Wonogiri adalah sumber daya air. Sebagai wilayah Wonogiri merupakan hulu dari DAS Solo, sehingga penataan lingkungan perlu dikolaborasikan dengan peningkatan keberdayaan masyarakat yang tinggal di hulu DAS, sehingga mampu mengurangi kegiatan ekonomi yang eksploitatif terhadap hutan, sehingga upaya upaya penataan dan revitalisasi DAS dan waduk bisa berjalan optimal. Pendayagunaan sumberdaya di kawasan karst juga termatan penting sebagai daerah yang senantiasa dilanda kekeringan. Proyeksi kebutuhan sarana dan

prasana dalam memenuhi sumberdaya air sampai tahun 2045 untuk memenuhi kebutuhan hidup Masyarakat

Kebutuhan air minum di Kabupaten Wonogiri berdasarkan proyeksi penduduk sampai dengan tahun 2045 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2. 69 Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Kabupaten Wonogiri 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2050
Jumlah Penduduk	1.057.087	1.081.380	1.123.094	1.166.425	1.211.428	1.258.167
Proyeksi Kebutuhan Rumah	264.272	270.345	280.773	291.606	302.857	314.542
Proyeksi Kebutuhan Air Minum (Liter/detik)	18.352	18.773	19.498	20.250	21.031	21.843

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Wonogiri, 2024

c. Proyeksi Kebutuhan Energi/Listrik

Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting bagi perkembangan Kabupaten Wonogiri. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan energi listrik masyarakat di Kabupaten Wonogiri semakin meningkat karena kemajuan teknologi yang cukup pesat, peningkatan taraf hidup masyarakat, dan kebutuhan kawasan peruntukan industri yang telah direncanakan. Proyeksi kebutuhan energi listrik di kabupaten Wonogiri dihitung dari data historis penjualan tenaga listrik dan mempertimbangkan kecenderungan pertumbuhan ekonomi, pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan rasio elektrifikasi di masa datang. Proyeksi kebutuhan listrik Kabupaten Wonogiri tahun 2025–2045 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2. 70 Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1.051.085	1.081.380	1.123.094	1.166.425	1.211.428	1.258.167
Proyeksi Kebutuhan Listrik RT (MWh)	302.324	368.185	602.631	986.363	1.614.441	2.642.454
Proyeksi Kebutuhan Listrik Bisnis (MWh)	66.151	91.931	209.307	476.544	1.084.981	2.470.253
Proyeksi Kebutuhan Listrik Publik (MWh)	36.557	44.343	71.856	116.438	188.681	305.746

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Proyeksi Kebutuhan Listrik Industri (MWh)	87.632	117.332	243.387	504.869	1.047.271	2.172.400
Total Proyeksi Kebutuhan Listrik (HWh)	492.665	621.792	1.127.181	2.084.214	3.935.374	7.590.853

Sumber : Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Wonogiri, 2024

Mempertimbangkan kebutuhan suatu proyek pembangkit di masa yang akan datang. Di samping itu prakiraan kebutuhan listrik diatas juga dapat memberikan informasi kepada PT. PLN (Persero) UID Jawa Tengah dan DIY selaku penyedia kebutuhan listrik di Jawa Tengah, mengingat Kabupaten Wonogiri berbatasan langsung dengan Provinsi DIY, untuk mengurangi risiko dalam pengembangan usaha. Bila prakiraan yang dihasilkan lebih tinggi dari realisasi (over estimation) maka akan menyebabkan adanya kelebihan pasokan (idle capacity) yang menyebabkan over investment. Demikian pula sebaliknya, apabila prakiraan yang dihasilkan lebih kecil dari realisasi (under estimation) maka akan terjadi kekurangan daya/berisiko terjadi pemadaman.

Konservasi DTA Waduk Gajah Mungkur Wonogiri menjadi penting karena air yang tertampung di Waduk mampu membangkitkan listrik melalui PLTA berkapasitas 12,4 MW. Optimalisasi bisa dilakukan dengan inovasi PLTS Apung dengan memanfaatkan lahan genangan di Waduk Gajah Mungkur. Penyediaan kebutuhan daya Listrik untuk sarana lingkungan perumahan sebesar 40% dari total kebutuhan rumah tangga, Dimana standar minimal pelayanan daya Listrik per unit rumah tangga adalah 450 VA.

d. Proyeksi Persampahan

Pengelolaan sampah di Kabupaten Wonogiri berupa sampah rumah tangga maupun sampah hasil kegiatan industri, usaha, dan jasa lainnya. Perkiraan timbulan sampah pada tahun 2023 yang dihasilkan di Kabupaten Wonogiri secara keseluruhan berjumlah 127.99 ton dari total jumlah penduduk sebesar 1.051.085 jiwa (penduduk murni). Pengelolaan sampah kedepannya dibutuhkan pengembangan sarana seperti bank sampah, TPST dan lain - lain.

Proyeksi Timbunan Sampah di Kabupaten Wonogiri berdasarkan proyeksi penduduk sampai dengan tahun 2045 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. 71 Proyeksi Timbulan Sampah di Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi	Tahun				
	Tahun 2023	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1.051.085	1.081.380	1.123.094	1.166.425	1.211.428	1.258.167
Proyeksi Timbulan Sampah (Ton)	127.999	131.688	136.768	142.045	147.525	153.217

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Wonogiri, 2024

e. **Proyeksi Fasilitas Kesehatan**

Kesehatan merupakan salah satu pelayanan dasar bagi Masyarakat. Dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan, peran puskesmas, poliklinik, apotek, dan rumah sakit berjalan maksimal untuk kesehatan masyarakat. Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan perorangan dan kelompok di Tingkat pertama dengan menguataman Upaya preventif dan promotive di Kabupaten Wonogiri.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem rujukan berjenjang BPJS, maka pelayanan Puskesmas perlu untuk terus ditingkatkan utamanya dalam pemenuhan sarana dan prasarana

Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Wonogiri berdasarkan proyeksi penduduk sampai dengan tahun 2045 dapat dilihat sebagai berikut

Tabel 2. 72 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi	Tahun				
	Tahun 2023	2025	2030	2035	2040	2050
Jumlah Penduduk	1.051.085	1.081.380	1.123.094	1.166.425	1.211.428	1.258.167
Proyeksi Fasilitas Kesehatan Puskesmas	34	36	37	38	40	41

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Wonogiri, 2024

f. **Proyeksi Fasilitas Pendidikan**

Penyediaan fasilitas pendidikan merupakan faktor penting untuk menunjang proses belajar mengajar di sekolah, mengingat fasilitas pendidikan sebagai instrumen pendukung dalam pendidikan. Jenis, tipe dan standar nasional fasilitas pendidikan diatur oleh Kemendikbud dan Kementerian PUPR. Namun dalam perkembangannya terdapat pembaharuan terkait standar nasional pendidikan yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor

51 Tahun 2021. PP tersebut didalamnya memuat 8 standar pendidikan, salah satunya standar sarana prasarana pendidikan yang secara rinci diatur dengan Permendikbud.

Seiring berlakunya PP tersebut, maka Permendikbud Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA dinyatakan tidak berlaku lagi, diganti dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2023. Terdapat beberapa syarat ketentuan teknis standar sarana prasarana yang dihilangkan, antara lain: 1) minimal rombongan belajar (rombel) untuk SD/MI sebanyak 6, SMP/MTs dan SMA/MA sebanyak 3 dan maksimum rombel SD/MI sebanyak 24, SMP/MTs dan SMA/MA sebanyak 27, serta 2) satu kecamatan minimal menyediakan satu SMP/MTs dan satu SMA/MA, sedangkan SD/MI dengan 6 rombongan belajar disediakan untuk 2.000 penduduk.

Disisi lain terdapat Peraturan Menteri PU Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya juga mengatur mengenai kebutuhan sarana prasarana pendidikan pada kawasan peruntukan permukiman.

Secara detail, dituangkan dalam SNI 03-173-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 73 Pembakuan Tipe SD/MI, SLTP/MTs, SMU

Tingkat Pendidikan	Tipe Sekolah	Rombongan Belajar	Peserta Didik (Siswa)	Lokasi
SD/MI	Tipe A	12	480	Dekat dengan lokasi ruang terbuka lingkungan
	Tipe B	9	360	
	Tipe C	6	240	
SLTP/MTs	Tipe A	27	1080	
	Tipe B	18	720	
	Tipe C	9	360	
SMU	Tipe A	27	1080	
	Tipe B	18	720	
	Tipe C	9	360	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Wonogiri, 2024

Kebutuhan Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Wonogiri berdasarkan proyeksi penduduk sampai dengan tahun 2045 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. 74 Proyeksi Kebutuhan Sekolah di Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2050
Jumlah Penduduk						
7-12 Tahun	46.923	48.436	50.337	52.316	54.362	56.472
13-15 Tahun	35.514	36.764	38.215	39.727	41.287	42.892
16-18 Tahun	45.492	46.537	48.333	50.198	52.134	54.146
Proyeksi Fasilitas Pendidikan						
SD	660	675	701	729	757	786
SMP	220	225	233	243	252	262
SMA/SMK	220	225	233	243	252	262

Sumber: Hasil Analisis Bapperida Kabupaten Wonogiri, 2024

2.7 PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

2.7.1. Pusat Pertumbuhan Wilayah

Kabupaten Wonogiri telah memiliki Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonogiri tahun 2020-2040. Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaten sebagai pusat pertumbuhan pariwisata dan industri dengan didukung sektor pertanian yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta mengedepankan sumber daya lokal dan berdaya saing.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Wonogiri tahun 2020-2040 untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang wilayah maka ditetapkan kebijakan Penataan Ruang wilayah Kabupaten Wonogiri meliputi: a. pemantapan fungsi dan kedudukan Kabupaten dalam Kawasan andalan; b. pengembangan Kawasan Pariwisata; c. pengembangan dan optimalisasi pertumbuhan industri yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; d. perlindungan dan optimalisasi Kawasan Pertanian; e. pemantapan fungsi Kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup; f. pengembangan dan pemantapan pusat kegiatan terpadu; g. pengembangan dan optimalisasi Kawasan strategis; h. peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

Strategi untuk menjawab kebijakan Penataan Ruang wilayah Kabupaten Wonogiri meliputi:

1. Strategi pemantapan fungsi dan kedudukan Kabupaten dalam Kawasan Andalan meliputi: a. memantapkan kedudukan Kabupaten sebagai Kawasan Andalan; b. memantapkan fungsi Kabupaten sebagai pusat pengembangan pariwisata dan industri dengan didukung sektor pertanian; c. meningkatkan sarana dan prasarana jaringan Jalan dari produsen ke

- daerah pemasaran, perkotaan ke perdesaan serta antar kota dan antar desa; d. menetapkan lokasi pusat pengembangan kegiatan; e. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kegiatan; f. meningkatkan dan pemerataan fasilitas pelayanan di seluruh wilayah.
2. Strategi pengembangan Kawasan Pariwisata meliputi: a. mengembangkan wisata religi, budaya, alam, desa, agro, memorial, ekowisata, olahraga, dan petualangan; b. mengembangkan kegiatan pariwisata dengan memberdayakan Masyarakat lokal melalui pembentukan organisasi-organisasi ekonomi desa; c. meningkatkan promosi pariwisata melalui media cetak maupun *online*; d. mengembangkan desa wisata dengan produk utama berupa hasil industri skala rumah tangga dan mikro kecil; dan e. mengembangkan sarana prasarana pariwisata.
 3. Strategi pengembangan dan optimalisasi pertumbuhan industri yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan meliputi: a. mengembangkan kegiatan industri dengan memberdayakan sumber daya lokal; b. mengembangkan pusat kegiatan industri/sentra industri; c. mengendalikan perkembangan kegiatan industri; d. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri; e. menyediakan sarana dan prasarana pendukung Kawasan peruntukan industri; f. mengembangkan sistem pengelolaan limbah secara terpadu; g. menyediakan Kawasan peruntukan industri serta zona penyangga; h. mengembangkan Kawasan Permukiman terintegrasi dengan Kawasan Peruntukan Industri; i. mengembangkan industri yang ramah lingkungan.
 4. Strategi perlindungan dan optimalisasi Kawasan Pertanian meliputi: a. Mempertahankan LP2B; b. meningkatkan produktivitas khususnya komoditas unggulan, diversifikasi, dan pengolahan hasil pertanian; c. mengembangkan sistem pemasaran hasil pertanian; d. mengembangkan lumbung desa; e. mengembangkan Kawasan Agropolitan; f. meningkatkan sarana prasarana penunjang aktivitas pertanian.
 5. Strategi pemantapan fungsi Kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi: a. mengembalikan dan meningkatkan fungsi Kawasan lindung; b. melestarikan fungsi lingkungan hidup terpadu; c. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari dampak negatif yang timbul; d. mengendalikan secara ketat Pemanfaatan Ruang Kawasan lindung; e. memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman sumber daya alam; f. mengoptimalkan dan mempertahankan ekosistem pada Kawasan yang memberikan

perlindungan terhadap Kawasan bawahannya; g. mengelola Kawasan suaka alam dan Cagar Budaya secara berkelanjutan; h. mempertahankan dan melestarikan Kawasan lindung geologi; i. mempertahankan dan melestarikan DAS; j. pengembangan dan perluasan RTH Kawasan Perkotaan; k. menata kembali dan meningkatkan kualitas Kawasan resapan air atau imbuhan air; l. memperhatikan Kawasan rawan bencana alam dan rawan bencana geologi.

Fungsi dan kedudukan Kabupaten dalam kawasan andalan adalah pengembangan wilayah kerja sama antarkabupaten dan antarprovinsi meliputi:

- a. pengembangan antarkabupaten wilayah yaitu kerja sama Kawasan Subosukawonosraten yang terdiri dari Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi, dan Nasional;
 - b. pengembangan wilayah kerja sama antarprovinsi yaitu Kawasan Pawonsari yang terdiri dari Kabupaten Pacitan, Wonogiri dan Wonosari antara Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi, dan Nasional; dan
 - c. pengembangan wilayah kerja sama antarprovinsi yaitu Kawasan Karismapawirogo yang terdiri dari Kabupaten Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Magetan, Pacitan, Ngawi dan Ponorogo, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi dan Nasional.
6. Strategi pengembangan dan pemantapan pusat kegiatan terpadu meliputi: a. menetapkan fungsi pusat kegiatan; b. mewujudkan pusat koleksi dan distribusi kegiatan pertanian; c. menciptakan pusat pertumbuhan industri dan Kawasan sekitarnya; d. mengembangkan pusat – pusat perdagangan rakyat pada kawasan permukiman; e. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pusat kegiatan dan perdagangan; f. mengembangkan jaringan penghubung antar pusat kegiatan; g. mendorong dan mengendalikan pertumbuhan perkotaan danperdesaan.
 7. Strategi pengembangan dan optimalisasi Kawasan strategis meliputi: a. menetapkan dan mengembangkan Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi; b. menetapkan dan

mengembangkan Kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.

8. Strategi peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan meliputi: a. mendukung penetapan Kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan strategis dengan fungsi pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; c. mengembangkan Kawasan lindung dan/atau Kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar Kawasan strategis dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan Kawasan tersebut dengan Kawasan budidaya terbangun; d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan/atau Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Menindaklanjuti amanat Undang Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Wonogiri sudah menyusun dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan kawasan Permukiman (RP3KP) sebagai acuan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang pembangunan dan permukiman pada tahun 2019. Saat ini pada tahun 2024, Kabupaten Wonogiri sedang melakukan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan kawasan Permukiman (RP3KP). Memperhatikan perencanaan Kawasan Permukiman yang diharapkan mampu merespon isu aktual seperti perubahan iklim dan lain sebagainya, seperti contoh kawasan permukiman tidak hanya menyangkut masalah rumah tetapi juga mengatur taman, ruang terbuka hijau untuk merespon isu aktual perubahan iklim.

2.7.2. Pengembangan Wilayah Kota

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan sedangkan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa kecamatan. Terdapat satu 1 Pusat Kegiatan Lingkungan berupa Kawasan perkotaan Kecamatan Wonogiri sedangkan terdapat lima (5) Pusat Pelayanan Kawasan yaitu PPK pada perkotaan Kecamatan Pracimantoro, Baturetno, Purwantoro, Jatisrono, dan Wuryantoro.

Dalam hal penyediaan aksesibilitas (konektivitas desa kota dan aksesibilitas jalan) dengan adanya upaya penambahan dan peningkatan kualitas jalan dapat meningkatkan kondisi kemantapan jalan di Kabupaten

Wonogiri, sehingga konektivitas antar PKL dan PPK akan semakin berkualitas. Perkembangan jumlah penduduk akan terus meningkat yang membutuhkan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan kebutuhan dasar perkotaan di Kabupaten Wonogiri.

Sebagai turunan dari Perda RTRW direncanakan akan disusun beberapa Rencana Detail Tata Ruang. Rencana Detail Tata Ruang merupakan manifestasi dari penyelenggaraan penataan ruang yang mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, lintas pemangku kepentingan, dan penyelarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan guna mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor. RDTR kemudian menjadi peraturan bupati sebagai pedoman dalam kegiatan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang pada wilayah perencanaan.

Dalam rangka menjawab perkembangan kawasan perkotaan Wonogiri sebagai ibukota Kabupaten Wonogiri yang berdampak terhadap aktivitas ekonomi, sosial dan perubahan penggunaan lahan, pada tahun 2022 telah terbit Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 63 tahun 2022 tentang RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Kawasan Perkotaan Wonogiri Tahun 2022-2042. Adapun penyusunan RDTR untuk kawasan yang lain juga menjadi penting untuk diperhatikan di agenda selanjutnya, karena tanpa adanya RDTR pemerintah sulit untuk mengetahui penggunaan spesifik lahan tertentu dan kebijakan tata ruang yang dapat menjadi pijakan. Pada tahun 2023 telah disusun RDTR Wilayah Perencanaan Gunung Sewu Segmen Wonogiri, RDTR Wilayah Perkotaan Pracimantoro dan RDTR Wilayah Perkotaan Ngadirojo. Pada awal tahun 2024 telah ditandatangani Peraturan Bupati Wonogiri terkait RDTR yaitu:

- a. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor I Tahun 2024 tentang RDTR Wilayah Perencanaan Gunung Sewu Segmen Wonogiri pada tanggal 11 Januari 2024.
- b. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 9 Tahun 2024 tentang RDTR Wilayah Perencanaan Perkotaan Kecamatan Ngadirojo pada tanggal 4 April 2024.

Dari sisi tema dan tujuan yang diharapkan dalam pengembangan Wilayah Perkotaan yang telah dibuat adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Perkotaan Wonogiri sebagai simpul transportasi, pusat perdagangan jasa dan distribusi, pariwisata, serta pelayanan infrastruktur skala kota yang mendukung industri dan daya saing Kabupaten Wonogiri.
2. Wilayah Perencanaan Gunung Sewu Segmen Wonogiri sebagai wilayah produktif berbasis sektor pariwisata dan pertanian yang berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan.

3. Wilayah perencanaan perkotaan Kecamatan Ngadirojo sebagai pusat pengembangan industri serta perdagangan dan jasa didukung sektor pertanian dan penataan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.



Gambar 2. 33 Peta Rencana Pengembangan Wilayah Perkotaan

2.7.3. Pengembangan Kawasan Strategis

Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat provinsi. Penetapan Kawasan strategis terdiri atas Kawasan Strategis Provinsi; dan Kawasan Strategis Kabupaten.

Kawasan Strategis Provinsi terdiri atas: Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi meliputi:

- a. kawasan Perkotaan Subosukawonosraten (Surakarta – Boyolali – Sukoharjo – Karanganyar – Wonogiri – Sragen – Klaten); dan
- b. kawasan agropolitan GIRISUKA (Wonogiri Sukoharjo Karanganyar).
Wilayah Kabupaten yang dikembangkan sebagai Kawasan agropolitan GIRISUKA yang meliputi:
 - 1) Kecamatan Ngadirojo;
 - 2) Kecamatan Girimarto;

- 3) Kecamatan Jatipurno;
- 4) Kecamatan Slogohimo;
- 5) Kecamatan Bulukerto;
- 6) Kecamatan Puhpelem.

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup berupa Kawasan Gunung Lawu yang meliputi:

- a. Kecamatan Girimarto;
- b. Kecamatan Jatipurno;
- c. Kecamatan Slogohimo;
- d. Kecamatan Bulukerto; dan
- e. Kecamatan Puhpelem.

Kawasan Strategis Kabupaten terdiri atas: a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi meliputi:

- a. Kawasan Koridor Perbatasan Pawonsari (Pacitan – Wonogiri – Wonosari); Kawasan Koridor Perbatasan Subosukawonosraten (Surakarta - Boyolali - Sukoharjo - Karanganyar - Wonogiri – Sragen – Klaten);
- b. Kawasan Koridor Perbatasan Karismapawirogo (Karanganyar - Wonogiri - Sragen - Magetan - Pacitan - Ngawi – Ponorogo); dan
- c. Kawasan koridor Samudera Hindia.

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi berupa Waduk Serba Guna Wonogiri. Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi diwujudkan dengan indikasi program meliputi:

- a. meningkatkan koordinasi dan sinergisitas pengembangan Kawasan perbatasan dengan kabupaten berbatasan;
- b. peningkatan sistem utilitas Kawasan perbatasan;
- c. pengembangan kerjasama berbasis sektor penunjang perekonomian;
- d. pengembangan kerjasama bidang sosial, pendidikan, budaya, dan keamanan; dan
- e. pengembangan Kawasan koridor Samudera Hindia.

Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi diwujudkan dengan indikasi program meliputi:

- a. penyelamatan dan pelestarian waduk;
- b. konservasi daerah tangkapan air waduk.

BAB III

SALAHAN DAN ISU STRATEGIS





PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan merupakan kesenjangan atau gap yang terjadi antara kinerja yang dicapai saat ini dengan rencana atau standar yang ada, serta apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang dengan kondisi riil yang terjadi saat ini. Gap yang terjadi dipengaruhi faktor penyebab, baik faktor yang mendorong keberhasilan maupun kegagalan, yang harus dilakukan analisis dalam rangka menyusun perencanaan selanjutnya.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan permasalahan pembangunan daerah makro yang sifatnya lintas sektor dan yang akan diintervensi melalui *cross cutting strategy*. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan hasil analisis gambaran umum daerah Kabupaten Wonogiri yang mencakup aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum, serta berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja RPJPD Tahun 2005-2025. Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri yang masih relevan dalam dua puluh tahun ke depan dapat diuraikan sebagai berikut.

3.1.1. Aspek Geografis dan Demografi

Berdasarkan kondisi geografis, setiap wilayah memiliki karakteristik yang ditentukan oleh letak geografis, kondisi topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, penggunaan lahan hingga tingkat kerawanan terhadap bencana. Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap karakteristik potensi sumber daya alam yang menjadi salah satu modal dalam kegiatan perekonomian masyarakat.

Permasalahan pembangunan daerah pada aspek geografi yaitu menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, hal itu disebabkan ketersediaan sumber daya alam yang semakin berkurang akibat meningkatnya aktifitas eksploitasi alam dan lambatnya rehabilitasi.

Penyebab lainnya adalah tekanan lingkungan di Wonogiri antara lain seperti perubahan tata guna lahan yang menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati, peningkatan produksi sampah, keterbatasan kapasitas pengelolaan sampah, dan pencemaran lingkungan, masih rendahnya sarana dan prasarana pengelolaan limbah, serta masih rendahnya edukasi

masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup.

Kabupaten Wonogiri memiliki kondisi geografis berupa perbukitan dan kawasan karts di sebelah selatan yang berbatasan dengan pantai. Kondisi tersebut menimbulkan masalah kekeringan yang harus segera tertangani, serta penanganan bencana yang belum maksimal.

Dampak perubahan iklim juga semakin dirasakan di Kabupaten Wonogiri, terutama ditunjukkan dari semakin meningkatnya suhu udara dan anomali cuaca yang tidak dapat diprediksi. Perubahan iklim terjadi sebagai dampak dari meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) akibat aktivitas ekonomi dan penduduk yang belum diimbangi dengan upaya untuk menurunkan emisi GRK. Salah satunya adalah belum optimalnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi.

Permasalahan lain terkait dengan kualitas lingkungan hidup adalah masih rendahnya luasan tutupan lahan di Kabupaten Wonogiri yang dipengaruhi oleh masih adanya lahan kritis yang perlu direhabilitasi serta masih rendahnya penambahan industri pengolah hasil hutan yang memperoleh sertifikasi verifikasi legalitas kayu. Rendahnya luasan tutupan lahan juga mempengaruhi ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Salah satu sumber daya alam vital adalah sumber daya air. Sebagian wilayah Wonogiri merupakan hulu dari DAS Solo, sehingga penataan lingkungan perlu dilakukan dan bekerja sama dengan masyarakat setempat seperti mengurangi kegiatan yang eksploitatif terhadap hutan. Pendayagunaan sumberdaya di kawasan karst juga penting sebagai daerah yang senantiasa dilanda kekeringan. Isu lainnya adalah penurunan kualitas air baku/air bersih di Kabupaten Wonogiri yang disebabkan oleh terganggunya kawasan badan air oleh kegiatan manusia.

Penurunan kualitas air akibat adanya pencemaran air akibat kegiatan masyarakat seperti kegiatan industri, kegiatan domestik dan pertanian sehingga kandungan bahan-bahan pencemar mudah untuk masuk dan mencemari badan air tersebut. Sedangkan penurunan kuantitas air yang terjadi diakibatkan oleh keadaan geografis berupa karakteristik hidrologi pada kawasan karst dan minimnya curah hujan serta kegiatan masyarakat di daerah hulu DAS yang eksploitatif terhadap hutan.

Permasalahan sumber daya air tidak hanya terkait ketersediaan air, namun lebih luas permasalahannya adalah belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. Belum optimalnya

pemanfaatan sumber daya air disebabkan kurangnya sarana tampungan air baku dan rusaknya jaringan irigasi untuk pertanian.

Selain permasalahan sumber daya air permukaan sebagaimana digambarkan sebelumnya, di Kabupaten Wonogiri juga terjadi peningkatan pemanfaatan air tanah yang berpotensi menyebabkan terjadinya amblesan lahan. Untuk itu pengendalian dan pengawasan harus tetap dilaksanakan untuk semakin menurunkan laju pengambilan air tanah utamanya pada wilayah cekungan air tanah (CAT) kritis.

Penurunan kualitas lahan juga terjadi di Kabupaten Wonogiri sebagai akibat belum optimalnya produktivitas pertambangan dan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan. Potensi pertambangan di Kabupaten Wonogiri memiliki sebaran komoditas yang beragam dan cukup melimpah. Potensi mineral bukan logam dan batuan harus dipetakan dengan detail berdasarkan depositnya dan perlu mendasari aspek tata ruang karena rangkaian aktivitas pertambangan sering bersinggungan dengan lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan, antara lain, berkurangnya vegetasi hutan, tumbuhan, dan lapisan tanah. Hal ini sudah terlihat wilayah sub DAS Wiroko yang ditandai dengan banjir Apabila terjadi hujan yang lebat. Perlu dorongan untuk melaksanakan pertambangan dengan baik (*good mining practice*) agar dapat mewujudkan keseimbangan antara nilai ekonomis dan nilai lingkungan.

Kondisi tersebut akhirnya berdampak pada terjadinya bencana yang juga tidak dapat diprediksi, apalagi Kabupaten Wonogiri sebagai daerah dengan tingkat risiko bencana sedang. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, masih terbatasnya jumlah pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system/EWS*) di wilayah rawan bencana, masih kurangnya edukasi pada masyarakat tentang penanggulangan bencana, masih kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan kedaruratan bencana, serta dalam perhitungan kebutuhan pascabencana dan rehabilitasi rekonstruksi bencana. Semua permasalahan terkait penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta penyelenggaraan penanggulangan bencana dipengaruhi oleh kebijakan dan penerapan tata ruang. Namun, permasalahan yang terjadi justru adalah belum optimalnya ketersediaan rencana tata ruang serta implementasi pemanfaatan ruang dan tertib ruang yang juga belum optimal.

3.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran dari kualitas hidup masyarakat dan dapat dilihat dari kondisi sosial, dan daya saing sumber daya manusia. Kondisi kesejahteraan masyarakat dapat diindikasikan dengan angka kemiskinan. Cukup tingginya kemiskinan di Kabupaten Wonogiri masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan daerah. Kondisi ini ditunjukkan dari persentase penduduk miskin Kabupaten Wonogiri masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka kemiskinan propinsi dan angka nasional. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan periode 5 tahun sebelumnya, akan tetapi belum memenuhi target RPJMD saat ini.

Di sisi lain, rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin cukup besar. Kondisi ini menggambarkan bahwa bukan hanya jumlah absolut penduduk miskin yang menjadi permasalahan utama di Kabupaten Wonogiri, tetapi juga ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk miskin.

Selain melihat karakteristik umum, kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensi, tidak hanya menggambarkan ketidakberdayaan ekonomi, tetapi juga dari permasalahan sumber daya manusia seperti rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan penduduk miskin yang disebabkan belum optimalnya akses layanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, kondisi kemiskinan juga ditandai dengan permasalahan penyediaan rumah yang layak huni, layanan air minum, dan sanitasi layak termasuk di dalamnya aman serta masih adanya kawasan permukiman kumuh yang sebagian besar merupakan kawasan tempat tinggal penduduk miskin.

Permasalahan infrastruktur dasar serta permasalahan aksesibilitas di daerah dengan tingkat kesulitan geografis yang tinggi masih menjadi tantangan dalam pengentasan kemiskinan. Berdasarkan kondisi geografis, setiap wilayah memiliki karakteristik yang ditentukan oleh letak geografis, kondisi topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, penggunaan lahan hingga tingkat kerawanan terhadap bencana. Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap karakteristik potensi sumber daya alam yang menjadi salah satu modal dalam kegiatan perekonomian masyarakat

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan mengingat peran sumber daya manusia sebagai motor penggerak serta bagian dari proses dan tujuan pembangunan, Pembangunan sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri selama ini dilakukan dengan menjamin

tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat dan kecukupan ekonomi masyarakat sehingga tercapai manusia Kabupaten Wonogiri yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, berdaya saing, dan semakin sejahtera. Namun demikian kualitas hidup sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri masih belum optimal yang disebabkan karena belum optimalnya penyediaan layanan kebutuhan dasar masyarakat secara merata dan inklusif, terutama kualitas akses pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pangan.

Keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia (SDM) salah satunya diukur dari nilai IPM. Isu yang terkait dalam keberhasilan pembangunan SDM adalah peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan dan ketrampilan, menciptakan manusia yang sehat dan produktif serta menciptakan peluang kerja dan usaha untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan IPM Kabupaten Wonogiri selama 10 Tahun dari tahun 2013-2022 mengalami kenaikan, walaupun dalam rentang waktu 10 tahun tersebut juga mengalami penurunan. Meskipun mengalami kenaikan, dibandingkan dengan SUBOSUKAWONOSRATEN, Wonogiri menempati IPM terendah

IPM Kabupaten Wonogiri berada dibawah nilai IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Hal ini menunjukkan daya saing SDM Kabupaten Wonogiri masih relatif lebih rendah. Kualitas sumberdaya manusia terbagi menjadi 3 faktor yaitu Pengetahuan, Ketrampilan, dan Kemampuan. Kurangnya sarana dan prasarana pelatihan, program pelatihan, pendapatan masyarakat yang rendah, angka harapan lama sekolah masih memerlukan peningkatan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya serta dan derajat kesehatan menjadi permasalahan dalam pengembangan kualitas SDM.

Harapan lama sekolah di kabupaten Wonogiri masih berada dibawah propinsi dan masih di bawah nasional disebabkan masih belum optimalnya perluasan akses dan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Wonogiri, yang ditandai, antara lain, masih rendahnya tingkat partisipasi pendidikan, adanya kesenjangan layanan pendidikan, serta masih kurangnya mutu pendidikan.

Kualitas sumber daya manusia juga terkait dengan derajat kesehatan masyarakat yang diukur dengan angka harapan hidup. Untuk angka harapan hidup Wonogiri menempati posisi lebih tinggi dibandingkan propinsi dan Nasional. Namun demikian, kualitas angka harapan hidup Kabupaten Wonogiri ini dipengaruhi kualitas kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan penguatan sistem kesehatan. Kabupaten

Wonogiri masih menghadapi beberapa permasalahan sekaligus tantangan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, yaitu masih tingginya penemuan penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan jiwa, masih ditemukannya kasus kematian ibu, bayi, dan anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang juga berkaitan dengan masih rendahnya kualitas kesehatan reproduksi, kepesertaan program keluarga berencana (KB), dan masih tingginya perkawinan usia anak, masih rendahnya aksesibilitas pelayanan kesehatan warga lanjut usia (lansia), masih tingginya angka *stunting* dan gizi buruk, belum semua fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan melayani sembilan prioritas layanan unggulan, dan keterbatasan prasarana dan sarana di rumah sakit.

Jaminan perlindungan sosial yang merata dan inklusif saat ini juga masih belum optimal. Hal ini disebabkan antara lain belum optimalnya sistem jaminan sosial dengan efektif dan tepat sasaran, penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial secara inklusif baik secara sosial dan ekonomi terutama untuk kelompok anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya, kapasitas sumber daya manusia untuk memiliki kemampuan menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat usaha kesejahteraan sosial, serta tata kelola dan kelembagaan data untuk penentuan sasaran penerima manfaat, termasuk tata kelola perencanaan dan pembiayaan untuk perlindungan sosial.

Salah satu kondisi yang menggambarkan kualitas hidup masyarakat adalah akses pangan secara mandiri untuk seluruh masyarakat. Namun saat ini akses pangan untuk masyarakat masih belum optimal yang disebabkan antara lain belum optimalnya pemenuhan hak dasar atas pangan secara berkelanjutan bagi seluruh masyarakat, pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang cukup, beragam, seimbang, dan aman, diversifikasi dan hilirisasi pangan lokal, penjaminan akses pangan dan gizi untuk seluruh masyarakat, sistem rantai pasok pangan, dan jaminan kualitas produk pangan, riset dan inovasi serta teknologi pangan, pengendalian harga bahan pangan, serta peran serta masyarakat untuk penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan.

3.1.3. Aspek Daya Saing

1. Produktivitas perekonomian daerah belum maksimal dan berdaya saing

Perekonomian Kabupaten Wonogiri sebagai komponen daya saing akan terus menjadi fokus dalam proses pembangunan selanjutnya. Karena masih harus didorong untuk tetap terjaga dan stabil dalam pertumbuhan yang positif, karena tantangan perekonomian yang akan terus berkembang dan bersaing baik secara regional, nasional maupun global. Kondisi perekonomian Wonogiri selama sepuluh tahun terakhir mengalami fluktuatif (naik turun) yang terjadi pada tahun 2013 – 2022, pertumbuhan ekonomi terendah pada tahun 2020 pada masa covid 19 namun demikian lebih tinggi dibanding Jawa Tengah dan Nasional. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional, akan tetapi bila dibandingkan dengan SUBOSUKAWONOSRATEN berada diposisi terendah setelah kabupaten Sukoharjo, sehingga perlu adanya upaya peningkatan. Secara detail laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonogiri menunjukkan trend meningkat pada tahun 2017-2018, terus mengalami kenaikan hingga tahun 2018, bahkan lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi dari pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Namun pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonogiri mengalami penurunan dari 5,41 menjadi 5,14, sementara pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan sebesar 5,36%. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi -1,41%, lebih baik dibanding pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar -2,65%. Pertumbuhan minus tahun 2020 disebabkan karena melemahnya seluruh kegiatan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2021 terjadi pertumbuhan ekonomi yang naik signifikan yakni sebesar 3,35 % angka ini lebih tinggi dari angka Provinsi Jawa Tengah.

Perekonomian Kabupaten Wonogiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, pertumbuhan sektor-sektor unggulan (pertanian dalam arti luas termasuk pangan, industri pengolahan, perdagangan, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pariwisata), kemudahan investasi, infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan distribusi barang jasa, serta keadaan wilayah yang kondusif.

Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan perekonomian daerah masih dijumpai berbagai permasalahan yang perlu ditangani, terutama terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi perekonomian daerah. Permasalahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pertumbuhan sektor-sektor unggulan ekonomi belum optimal

Pertumbuhan sektor-sektor unggulan perekonomian di kabupaten Wonogiri dipengaruhi 3 sektor yaitu:

1. Sektor Pertanian
2. Sektor Industri Pengolahan;
3. Sektor Perdagangan;
4. Sektor Pariwisata.

Sehingga permasalahan yang terjadi dalam upaya peningkatan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan di Kabupaten Wonogiri sebagai berikut:

1) Sektor Pertanian

Salah satu sektor yang menjadi unggulan perekonomian Kabupaten Wonogiri adalah sektor pertanian. Pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian dinilai belum optimal yang disebabkan belum optimalnya produktivitas sektor pertanian sehingga belum memberikan nilai tambah tinggi.

Hal ini memberikan dampak pada tingkat kesejahteraan petani yang dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir kondisinya fluktuatif. Beberapa hal yang menjadi penyebab permasalahan tersebut antara lain belum optimalnya modernisasi dalam pembangunan sektor pertanian berbasis riset, teknologi, dan inovasi baik di sisi hulu maupun hilir, pengembangan pertanian terintegrasi (hulu hilir) dan berkelanjutan, pengelolaan pertanian mandiri, regenerasi pelaku pertanian, upaya menjamin biaya produksi pertanian tidak lebih besar dari pendapatan yang diterima oleh para petani, pengembangan pertanian berbasis korporasi, penguatan sistem distribusi produk pertanian, peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku sektor pertanian, dan regenerasi pelaku sektor pertanian.

2) Sektor industri pengolahan

Dalam usaha peningkatan perekonomian di wilayah kabupaten Wonogiri adalah dengan di optimalkannya sektor industri pengolahan, walaupun dalam kenyataannya sektor ini masih menghadapi permasalahan dan tantangan yang tidak mudah. Beberapa permasalahan dan tantangan yang memengaruhi kinerja sektor industri pengolahan antara lain belum banyaknya sektor industri pengolahan di wilayah kabupaten Wonogiri, dan hal itu perlu adanya peningkatan kemudahan akses pembukaan perijinan dan pendirian.

Selain itu belum optimalnya produksi dan produktivitas industri, terutama industri kecil dan menengah, rendahnya nilai tambah produk industri, serta masih rendahnya kapasitas pelaku industri, terutama industri kecil dan menengah. Faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut antara lain belum masih optimalnya kapasitas industri kecil dan menengah, pengembangan industri berbasis teknologi, riset dan inovasi, serta ramah lingkungan masih belum dikelola dengan maksimal, kapasitas industri berbahan baku lokal, belum optimalnya kompetensi pelaku usaha industri pengolahan agar lebih produktif, dan inovatif, serta digitalisasi industri pengolahan.

Hal tersebut juga dipengaruhi karena belum optimalnya dukungan infrastruktur sebagai sarana konektivitas dalam distribusi kebutuhan pendukung industri pengolahan, jaminan iklim industri yang sehat dan kondusif, serta pengembangan kawasan industri baru untuk perkembangan industri.

3) Sektor perdagangan

Sektor utama lain yang berkontribusi pada perekonomian Kabupaten Wonogiri adalah sektor perdagangan, Namun sektor perdagangan ini juga masih menghadapi permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan antara lain adalah belum optimalnya standarisasi produk unggulan daerah; kapasitas dan kompetensi pelaku usaha perdagangan agar dapat mengikuti perkembangan jaman; sistem perdagangan yang berbasis riset, dan *digital marketing*, distribusi produk perdagangan, pengendalian harga dalam antisipasi inflasi.

4) Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan yang masih dioptimalkan untuk menghasilkan pendapatan daerah, mengurangi pengangguran, dan menumbuhkan UMKM. Tapi di sektor pariwisata ini masih menghadapi banyak sekali kendala yang akhirnya belum dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Kondisi belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah maupun PDRB disebabkan beberapa permasalahan, antara lain, kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara masih belum optimal, masih rendahnya pengeluaran wisatawan, dan belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain belum

optimalnya promosi pariwisata, kondisi destinasi wisata termasuk kondisi sarana prasarana destinasi wisata, diversifikasi daya tarik pariwisata, infrastruktur konektivitas antardestinas wisata, integrasi antardestinas wisata, kapasitas SDM pelaku pariwisata termasuk pelaku UMKM pariwisata, serta kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata

b. Daya saing tenaga kerja yang masih rendah

Peningkatan sumberdaya manusia adalah kunci pengentasan dan atau penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Wonogiri. Penguatan kesehatan masyarakat diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan akan menjadikan angkatan kerja memiliki daya saing tinggi, baik untuk membuka peluang kerja dan usaha di Kabupaten Wonogiri maupun menjadi pelaku migran ke luar daerah.

Kemiskinan di perkotaan umumnya lebih diakibatkannya tidak seimbangannya antara pendapatan yang diperoleh melalui upah kerja dengan standar hidup dan garis kemiskinan. Selain itu, ketiadaan pemilikan aset, upah kerja dan jaringan modal sosial rendah menjadi penyebab, disamping masih adanya penduduk yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran). Sedangkan untuk kemiskinan di pedesaan lebih banyak ditentukan oleh terbatasnya sumberdaya dan aset yang dimiliki serta hasil nilai produksi yang rendah (hasil pertanian), yang menyebabkan pendapatan rendah. Peluang usaha dan kesempatan kerja di Kabupaten Wonogiri relatif rendah, menyebabkan masyarakat memilih untuk menjadi pelaku migran untuk mengurangi tekanan penduduk dan perangkap kemiskinan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami naik turun dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Di tahun 2013 mengalami kenaikan, di 2 tahun terakhir mengalami penurunan sehingga di tahun 2022 Wonogiri menempati TPT terendah se Jawa Tengah. Namun demikian dengan TPT terendah tidak menjadikan kemiskinan di kabupaten Wonogiri rendah dan pendapatan perkapita menjadi tinggi.

Pembangunan ketenagakerjaan yang berdaya saing mencakup kualitas tenaga kerja yang unggul, tingkat produktivitas tenaga kerja yang tinggi, kesempatan kerja yang terbuka luas, hingga adanya perlindungan tenaga kerja. Beberapa faktor penyebab rendahnya daya saing tenaga kerja antara lain belum optimalnya pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, yang disertai dengan penguatan regulasi tentang vokasi, keahlian dan kompetensi digital, riset dan inovasi, sistem

perlindungan tenaga kerja, iklim ketenagakerjaan yang mendukung pasar kerja yang inklusif termasuk penerapan upah minimum yang berkeadilan, serta informasi pasar kerja dalam jangkauan luas berbasis digital yang terintegrasi dengan dunia usaha dunia industri.

c. Strategi Riset dan Inovasi yang belum optimal

Strategi riset dan Inovasi khususnya dalam peningkatan perekonomian di Kabupaten Wonogiri masih menjadi masalah dan isu strategis, padahal faktor ini secara langsung dapat menjadi pendukung dalam meningkatkan produktifitas sektor-sektor perekonomian dan dapat dijadikan pondasi dalam memperkuat perekonomian jangka panjang.

Beberapa penyebab antara lain belum optimalnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia riset dan inovasi di sektor perekonomian; kerjasama antara riset dan inovasi dengan pelaku usaha, swasta dan pemerintah; fasilitasi riset dan inovasi khususnya untuk sektor perekonomian.

2. Belum optimalnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan, Pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Wonogiri selama ini dilakukan dengan menjamin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat dan kecukupan ekonomi masyarakat sehingga tercapai manusia Wonogiri yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, berdaya saing, dan semakin sejahtera.

Namun demikian kualitas hidup sumber daya manusia Kabupaten Wonogiri masih belum optimal yang disebabkan karena belum optimalnya penyediaan layanan kebutuhan dasar masyarakat secara merata dan inklusif, terutama kualitas akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Kualitas pendidikan masyarakat ditunjukkan dengan rata-rata lama sekolah dan harapan sekolah yang capaiannya masih di bawah Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Rata-rata lama bersekolah Kabupaten Wonogiri yang masih rendah disebabkan masih belum optimalnya perluasan akses dan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Wonogiri, yang ditandai, antara lain, masih rendahnya tingkat partisipasi pendidikan, adanya kesenjangan layanan pendidikan, serta masih kurangnya mutu pendidikan.

Kualitas sumber daya manusia juga terkait dengan derajat kesehatan masyarakat yang diukur dengan usia harapan hidup. Kualitas usia harapan hidup di Kabupaten Wonogiri ini dipengaruhi kualitas kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan penguatan sistem kesehatan.

Meskipun demikian, Kabupaten Wonogiri masih menghadapi beberapa permasalahan sekaligus tantangan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, yaitu masih tingginya penemuan penyakit menular dan tidak menular serta kesehatan jiwa, masih ditemukannya kasus kematian ibu, bayi, dan anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang juga berkaitan dengan masih rendahnya kualitas kesehatan reproduksi, kepesertaan program keluarga berencana (KB), dan masih tingginya perkawinan usia anak, masih rendahnya aksesibilitas pelayanan kesehatan warga lanjut usia (lansia), masih tingginya angka stunting dan gizi buruk, belum semua fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan melayani sembilan prioritas layanan unggulan, dan keterbatasan prasarana dan sarana di rumah sakit. Jaminan perlindungan sosial yang merata dan inklusif saat ini juga masih belum optimal.

Hal ini disebabkan antara lain belum optimalnya sistem jaminan sosial dengan efektif dan tepat sasaran, penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial secara inklusif baik secara sosial dan ekonomi terutama untuk kelompok anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya, kapasitas sumber daya manusia untuk memiliki kemampuan menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat usaha kesejahteraan sosial, serta tata kelola dan kelembagaan data untuk penentuan sasaran penerima manfaat, termasuk tata kelola perencanaan dan pembiayaan untuk perlindungan sosial.

3. Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pendukung perekonomian daerah

Sarana transportasi merupakan salah satu hal yang penting dalam mendukung perekonomian daerah. Transportasi di Kabupaten Wonogiri masih menjadi permasalahan yang harus segera ditangani. Kondisi jalan kabupaten yang belum standart, dan masih banyaknya jalan Kabupaten dan jalan Provinsi yang ada di Kabupaten Wonogiri dalam kondisi rusak.

Selain itu kualitas pelayanan transportasi juga masih perlu ditingkatkan terutama dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan

konektivitas antarwilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan keselamatan dan kelancaran perjalanan transportasi, peningkatan kualitas layanan angkutan umum, dan peningkatan pelayanan di simpul transportasi serta integrasi antarmoda. Salah satu akar masalah sektor transportasi adalah pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Wonogiri yang perlu dikendalikan.

Hal lain yang masih perlu dikembangkan terkait peningkatan kelembagaan pengelolaan transportasi dan sistem logistik yang lebih efisien. Permasalahan lainnya dalam penyediaan prasarana dan sarana pendukung perekonomian daerah adalah belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air yang disebabkan masih kurangnya sarana Rancangan tampungan air baku. Air baku selain dimanfaatkan untuk penyediaan air minum, juga dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi utamanya kebutuhan industri dan kebutuhan kawasan prioritas (pengembangan pariwisata).

Pemenuhan sarana prasarana yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat juga masih perlu didorong untuk ditingkatkan seperti pemenuhan dan pemerataan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, serta penyediaan sarana air minum dan sanitasi aman bagi masyarakat.

3.1.4. Aspek Pelayanan Umum

Reformasi birokrasi ditujukan untuk memampukan pemerintah dalam berkeaja dengan kerangka yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat memperbaiki kualitas kebijakan dan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik termasuk memenuhi harapan dari masyarakat. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Wonogiri dinilai cukup baik, meningkat dari tahun ke tahun, namun masih dijumpai tantangan dan permasalahan yang harus diselesaikan ke depan. Hal tersebut antara lain kelembagaan instansi publik yang masih terfragmentasi sehingga muncul ego sektoral, belum optimalnya transformasi digital tata kelola pemerintahan, penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, dan dinamis, serta kapasitas sumber daya aparatur. Permasalahan lainnya terkait dengan pola kolaborasi dimana pemerintah belum mampu menjadi kolaborator bagi seluruh pihak dalam mencapai tujuan bersama, yang artinya pemerintah belum mampu mengoptimalkan kerja sama antardaerah untuk menciptakan kesejahteraan seluruh daerah dengan merata.

3.2. TANTANGAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.2.1. Megatren

Pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri dalam dua puluh tahun ke depan dipengaruhi oleh berbagai macam tren perubahan global yang saat ini terjadi dan melanda global, nasional, dan regional. Perubahan global ini menjadi tantangan yang perlu diantisipasi karena berskala besar, berjangka waktu panjang, dan bersifat masif, yang dapat berdampak pada proses pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri jangka panjang. Perubahan global ini yang disebut megatren.

Megatren adalah suatu perubahan besar bahkan sangat besar dalam banyak aspek, bisa saja dalam masalah sosial, ekonomi, industri, politik, lingkungan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang lambat terbentuk, tetapi begitu terjadi akan memberikan pengaruh terhadap berbagai aktivitas, proses, dan persepsi, yang mungkin saja akan terjadi selama beberapa dekade. Megatren adalah kekuatan mendasar yang mendorong terjadinya perubahan besar pada ekosistem global dan kehidupan. Megatren juga merupakan rambu-rambu yang sangat berharga, berwawasan, dan memberikan peranan penting untuk masa depan. Megatren global yang akan dihadapi dalam dua puluh tahun ke depan sebagai berikut:

a. Demografi

Kondisi demografi Kabupaten Wonogiri Selain tingkat pertumbuhan penduduk, ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pembangunan dan kependudukan yang dilakukan oleh pemerintah perlu didukung oleh sistem informasi kependudukan yang handal, sehingga upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat dapat lebih ditingkatkan.

Jumlah penduduk Wonogiri berdasarkan Hasil olah Data Proyeksi Penduduk Jawa Tengah Tahun 2020-2045, terus meningkat sampai pada tahun 2035 dan menurun pada tahun 2045. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk perempuan sedikit lebih banyak dibanding persentase penduduk laki-laki di tahun 2020. Kondisi tersebut diproyeksikan juga terjadi pada tahun-tahun berikutnya sampai tahun 2045. Namun, persentase penduduk perempuan akan diperkirakan terus meningkat sampai tahun 2045 sebesar 50,42 persen. Sedangkan persentase jumlah penduduk laki-laki diperkirakan mengalami penurunan mencapai 49,58 persen pada tahun 2045. Distribusi penduduk tahun 2020 menurut umur menunjukkan bahwa 18,30 persen penduduk Kabupaten Wonogiri yang berusia muda,

68,62 persen berusia produktif, dan hanya 13,08 persen yang berusia tua. Sedangkan Tahun 2045 diproyeksi penduduk usia muda 16,69 persen, berusia produktif 62,97 persen dan 20,35 persen berusia tua. Kondisi ini Kabupaten Wonogiri perlu untuk mempercepat memanfaatkan kondisi bonus demografi sekaligus mengantisipasi transisi demografi menuju penduduk tua dengan kebijakan pro lansia.

b. Pergeseran kekuatan ekonomi

Pergeseran kekuatan ekonomi dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk perubahan teknologi, kebijakan pemerintah, dan dinamika pasar global. Hal ini dapat mempengaruhi dominasi ekonomi suatu negara atau kawasan secara signifikan. Pertumbuhan penduduk menjadi parameter utama dari pergeseran kekuatan ekonomi, di mana negara-negara berkembang sekarang akan menjadi pasar pertumbuhan. Dalam kurun waktu kurang dari satu generasi, ekonomi negara berkembang telah beralih dari produsen barang untuk negara maju, menjadi tujuan penting bagi barang dan jasa konsumen. Munculnya prediksi bahwa Cina akan menjadi negara adikuasa global yang baru dan perubahan demografi global di Asia yang diperkirakan mencapai populasi lebih dari 5 miliar orang pada tahun 2050 tentunya akan menjadi salah satu poros utama pertumbuhan ekonomi dunia di masa depan.

c. Terobosan Teknologi

Teknologi terus berkembang dengan pesat, membawa berbagai terobosan yang mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Salah satu terobosan menonjol adalah kecerdasan buatan (AI), yang memberikan kemampuan komputer untuk belajar dan mengambil keputusan seperti manusia. Selain itu, teknologi blockchain telah mengubah paradigma transaksi keuangan dan keamanan data dengan memperkenalkan sistem desentralisasi. Internet of Things (IoT) juga menjadi pusat perhatian, menghubungkan perangkat dari berbagai sektor untuk berkomunikasi dan berbagi data. Ini menciptakan ekosistem yang cerdas dan terintegrasi, memfasilitasi kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari.

Energi terbarukan menjadi fokus utama dalam upaya mengatasi perubahan iklim, dengan terobosan teknologi seperti sel surya yang semakin efisien dan penyimpanan energi yang inovatif. Dalam sektor transportasi, mobil otonom dan pengembangan kendaraan listrik mengubah paradigma

mobilitas, mengarah pada perubahan signifikan dalam infrastruktur dan keamanan jalan.

Terobosan teknologi ini menandai pergeseran menuju masa depan yang lebih pintar dan berkelanjutan. Dengan terus munculnya inovasi, kita dapat mengantisipasi perubahan yang lebih mendalam dalam berbagai aspek kehidupan.

Namun, terdapat juga tantangan dan risiko dalam kemajuan teknologi, terutama seputar keamanan siber dan privasi data. Bagaimana negara-negara dan masyarakat secara keseluruhan menangani perkembangan ini akan menjadi faktor penting dalam menentukan arah perubahan pada masa depan.

d. Perubahan Sosial

Salah satu pendorong utama perubahan sosial saat ini adalah perubahan dalam struktur demografis. Peningkatan harapan hidup dan penurunan tingkat kelahiran membentuk masyarakat yang lebih tua, dengan dampak signifikan pada berbagai sektor.

Serangkaian perubahan besar yang meliputi demografi global, (populasi dunia, kepadatan, etnis, tingkat pendidikan, dan aspek lain dari populasi manusia) dan Urbanisasi global sehingga akan membawa pergeseran tatanan dan perubahan sosial yang signifikan dan pastinya akan menjadi tantangan dan peluang untuk kehidupan dan masa depan yang lebih baik. Megatren ini mendasari terjadinya pergeseran struktural lainnya seperti perkembangan teknologi dan pergeseran kekuatan ekonomi. Sementara perubahan yang terjadi akan berbeda di setiap wilayah, perubahan tersebut akan memberikan dampak besar terhadap pasar, juga masyarakat lokal dan global. Masyarakat menghadapi tantangan baru terkait dukungan sosial dan ekonomi, memunculkan kebutuhan untuk inovasi dalam kebijakan keluarga dan layanan kesejahteraan. Perubahan sosial yang terjadi karena demografi dan digitalisasi menciptakan tantangan dan peluang baru. Diperlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif untuk mengelola perubahan ini, memastikan keadilan sosial, dan membentuk masyarakat yang adaptif di era modern ini.

3.2.2. Perubahan Iklim, Daya Dukung dan Daya Tampung

Tantangan pembangunan daerah di Kabupaten Wonogiri selain fenomena Megatren juga disebabkan adanya perubahan iklim, daya dukung dan daya

tampung Lingkungan. Perubahan iklim menjadi fenomena pemanasan global dimana terjadi peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer dan berlangsung untuk jangka waktu tertentu. Perubahan iklim disebabkan oleh berbagai faktor dan menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia.

Tren kenaikan suhu dalam kurun waktu panjang menjadi indikasi adanya perubahan iklim. Berdasarkan pengamatan data historis suhu udara rata-rata yang dimiliki yaitu selama periode 1901-2022 menunjukkan suhu udara rata-rata di Kabupaten Wonogiri telah mengalami peningkatan dengan laju sekitar 0,01°C/tahun selama periode historis. Dengan kata lain di Kabupaten Wonogiri telah terjadi peningkatan suhu udara rata-rata lebih kurang sebesar 1°C selama pengamatan 120 tahun terakhir.

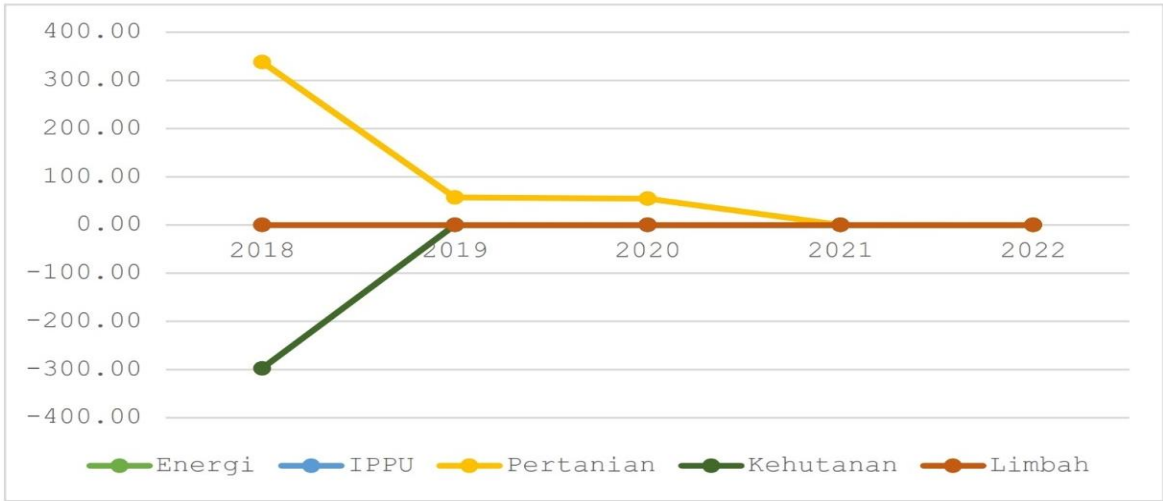
Terjadinya perubahan iklim berkaitan dengan emisi gas rumah kaca (GRK). Emisi Gas Rumah Kaca dapat berasal dari penggunaan energi (listrik), kegiatan industri, kegiatan pertanian dan peternakan serta limbah seperti salah satu contoh potensi gas rumah kaca (GRK) dari total timbunan sampah Kabupaten Wonogiri pada tahun 2020 sebanyak 159.663,85 ton/tahun, dengan menggunakan metode IPCC 2006 (2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Inventories Chapter 3; Solid Waste Disposal), maka diperoleh data potensi carbon (C) terdegradasi sebesar 32.992,24 Giga Gram/tahun serta methan (CH₄) sebesar 21.994,84 Giga Gram /tahun. Jumlah emisi Gas Rumah Kaca akan terus bertambah apabila tidak ada penanganan secara serius, oleh karena hal tersebut perlu adanya upaya keberlanjutan untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca seperti dengan memperbesar luasan hutan, mengurangi pemakaian energi berlebih dan kebijakan lainnya.

Perkembangan kuantitas/jumlah emisi (CO₂) yang berpotensi meningkatkan kadar gas rumah kaca di Kabupaten Wonogiri diinventarisasi berdasarkan 5 (lima) sektor, meliputi energi, IPPU (Industrial Process and Production Use), pertanian, kehutanan dan limbah. Secara keseluruhan perkembangan jumlah emisi mengalami penurunan, utamanya pada sektor pertanian yang mengalami penurunan yang signifikan. Berikut perkembangan dan proyeksi jumlah emisi CO₂ (TonCO₂e) yang berpotensi meningkatkan gas rumah kaya berdasarkan sektor Kabupaten Wonogiri

Tabel 2. 75 Perkembangan Jumlah Emisi CO2 (TonCO2e) Berdasarkan Sektor Kabupaten Wonogiri

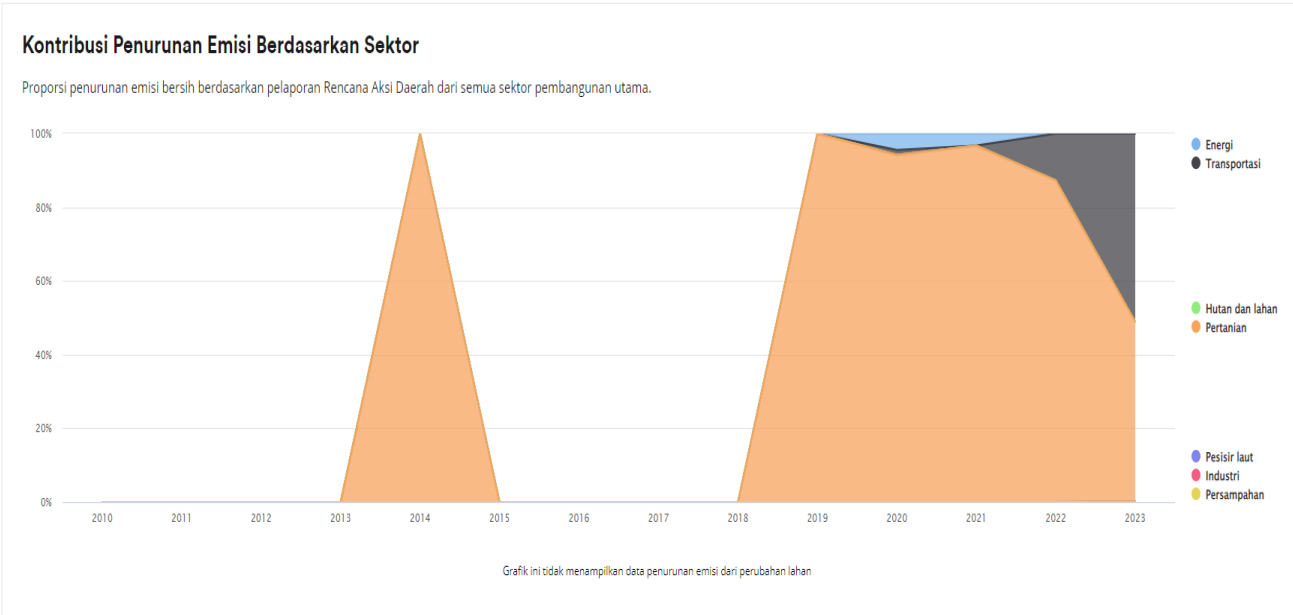
No	Sektor	Jumlah Emisi CO2 (Gg)					Proyeksi GRK			
		2018	2019	2020	2021	2022	2025	2030	2040	2045
1	Energi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IPPU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pertanian	338340	57490	54490	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kehutanan	-297540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Limbah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		40800	57490	54490	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045



Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045

Gambar 3. 1 Perkembangan Jumlah Emisi CO2 (TonCO2e) Berdasarkan Sektor Kabupaten Wonogiri



Sumber: Aksara Kabupaten Wonogiri, 2023

Gambar 3. 2 Kontribusi Penurunan Emisi Berdasarkan Sektor di Kabupaten Wonogiri

Perubahan iklim berdampak pada terjadinya bencana. Risiko bencana yang terjadi di Kabupaten Wonogiri juga disebabkan oleh adanya perubahan iklim seperti curah hujan yang tinggi, kenaikan muka air laut di wilayah Pantai, dan cuaca ekstrem. Dampak lain adanya perubahan iklim yang terjadi di Kabupaten Wonogiri meliputi:

- Ekosistem laut, pesisir dan pantai memburuk
- Intensitas cuaca, memanasnya cuaca yang menyebabkan terjadinya kekeringan berkepanjangan, banjir, longsor, gagal panen, dan gelombang tinggi, serta meningkatnya penyakit DBD dan malaria
- Pemanasan global mempengaruhi keanekaragaman hayati, perubahan distribusi, jumlah populasi, kepadatan populasi dan kebiasaan flora dan fauna

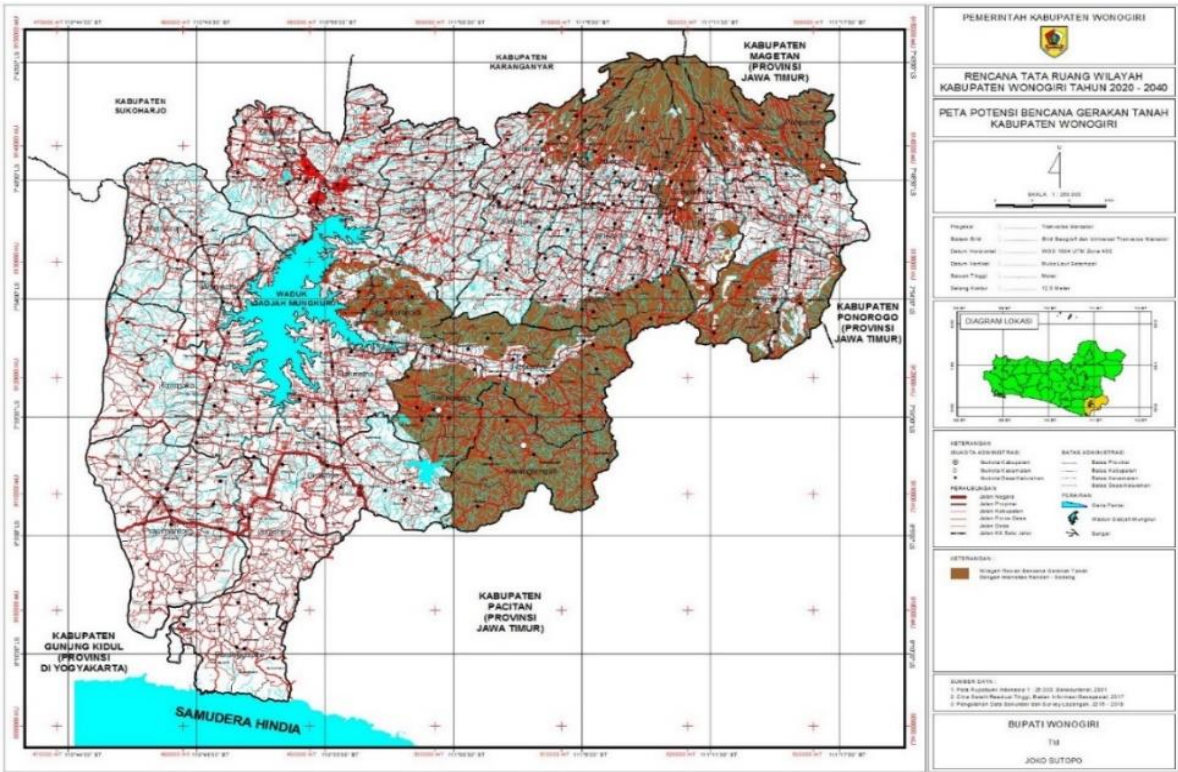
Isu bencana hidrometeorologis merupakan ancaman serius bagi keamanan dan kesejahteraan manusia serta lingkungan. Bencana seperti banjir, badai, topan, dan kekeringan sering kali disebabkan oleh faktor-faktor cuaca dan iklim yang ekstrem. Perubahan iklim semakin memperparah situasi ini dengan meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologis. Dampaknya dapat mengakibatkan kerugian besar dalam hal kerusakan infrastruktur, hilangnya nyawa manusia, pengungsian, dan kerugian ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, mitigasi, adaptasi, dan perencanaan yang baik dalam menghadapi bencana hidrometeorologis menjadi sangat penting. Diperlukan tindakan kolaboratif, pemantauan yang cermat terhadap perubahan iklim, serta perbaikan infrastruktur dan sistem peringatan dini untuk mengurangi risiko dan melindungi masyarakat dari ancaman ini.

Kondisi fisik wilayah yang dipengaruhi oleh aspek topografis, geologis, hidrologis, dan geografis, menyebabkan Kabupaten Wonogiri memiliki potensi risiko bencana hidrometeorologis. Berdasarkan data dari Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2022, Kabupaten Wonogiri memiliki ancaman bencana alam (multi hazard) dengan kategori sedang. Berdasarkan hasil review pada dokumen IKPLHD Kabupaten Wonogiri tahun 2022. Beberapa kawasan rawan bencana di Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut:

1. Kawasan rawan bencana Gerakan Tanah

Desa/Kelurahan di Kabupaten Wonogiri yang mengalami bencana tanah longsor pada tahun 2018 sebanyak 40 desa, pada tahun 2019 sebanyak 37 desa, tahun 2020 sebanyak 33 desa, tahun 2021 sebanyak 41 desa, dan tahun 2022 sebanyak 48 desa.

Peta Potensi Rawan Bencana Gerakan Tanah di Kabupaten Wonogiri dapat dilihat pada Gambar berikut:



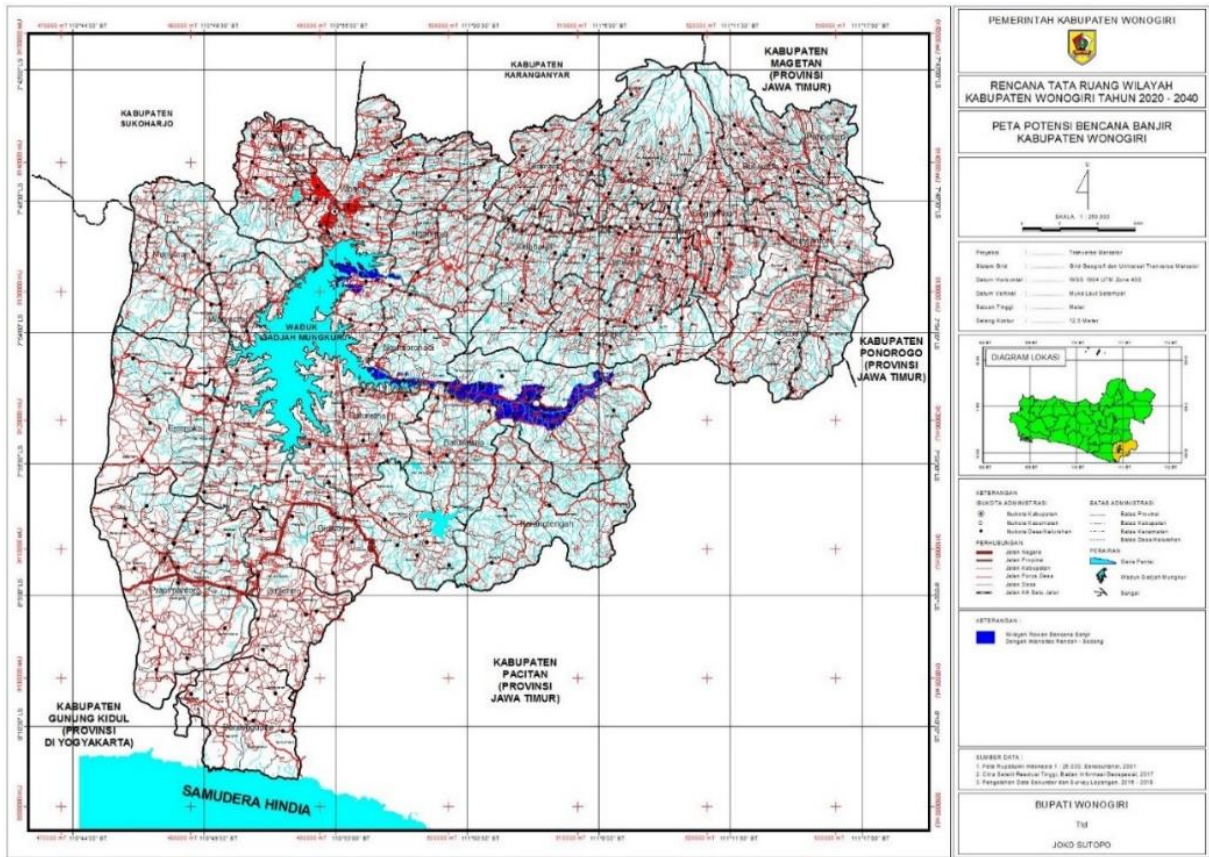
Sumber: RTRW Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 – 2040

Gambar 3. 3 Peta Potensi Bencana Gerakan Tanah

2. Kawasan Rawan Bencana Banjir

Desa/Kelurahan di Kabupaten Wonogiri yang mengalami bencana banjir pada tahun 2018 sebanyak 7 desa, tahun 2019 sebanyak 7 Desa, pada Tahun 2020 sebanyak 15 desa, dan Tahun 2021 sebanyak 24 desa, dan tahun 2022 sebanyak 14 desa.

Peta Potensi Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Wonogiri dapat dilihat pada Gambar berikut:



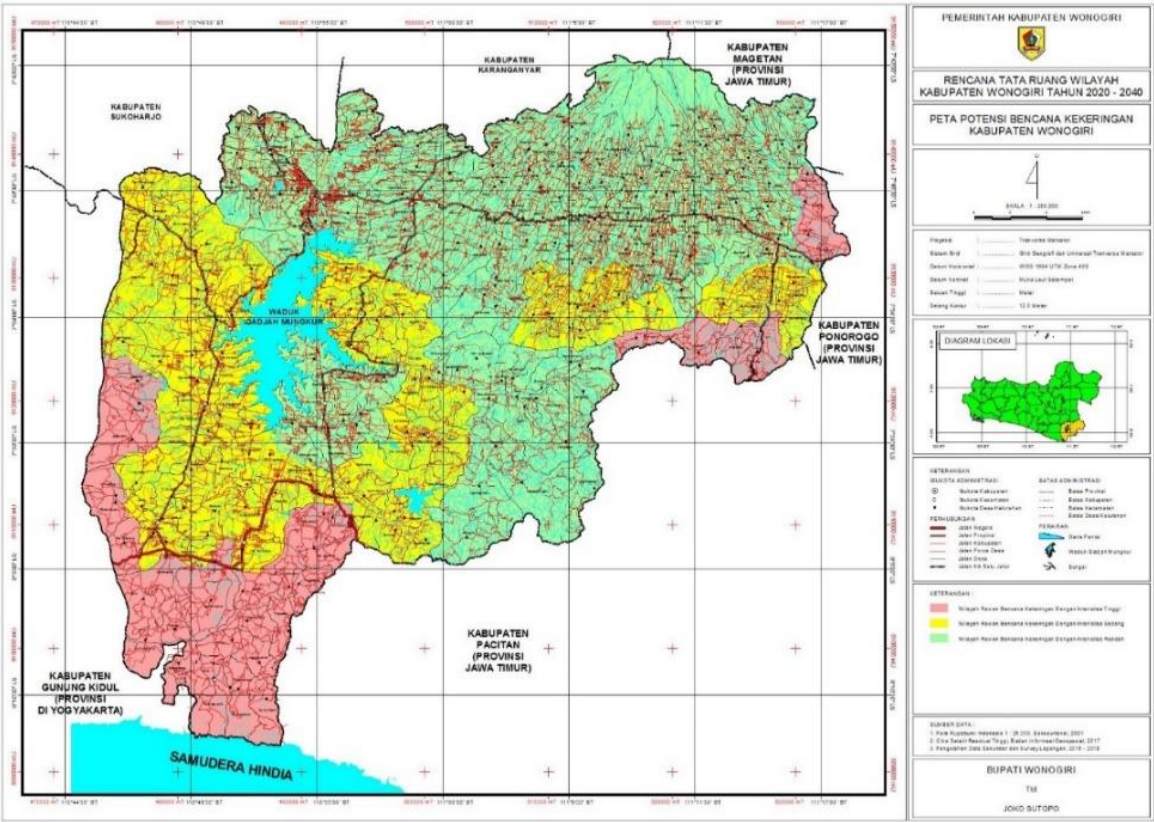
Sumber: RTRW Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 – 2040

Gambar 3. 4 Peta Potensi Bencana Banjir

3. Kawasan Rawan Bencana Kekeringan

Kawasan rawan bencana kekeringan meliputi wilayah yang memiliki lahan pertanian, meliputi Kecamatan Wuryantoro, Manyaran, Eromoko, Pracimantoro, Paranggupito, Giritontro, Giriwoyo, Batuwarno, Nguntoronadi, Ngadirojo, Sidoharjo, Jatiroto, dan Kismantoro. Sedangkan untuk wilayah dengan kekurangan pemenuhan kebutuhan air minum meliputi Kecamatan Wuryantoro, Manyaran Eromoko. Pracimantoro, Paranggupito, Giritontro, Giriwoyo, Batuwarno, dan Nguntoronadi.

Peta Potensi Rawan Bencana Kekeringan di Kabupaten Wonogiri dapat dilihat pada Gambar berikut:



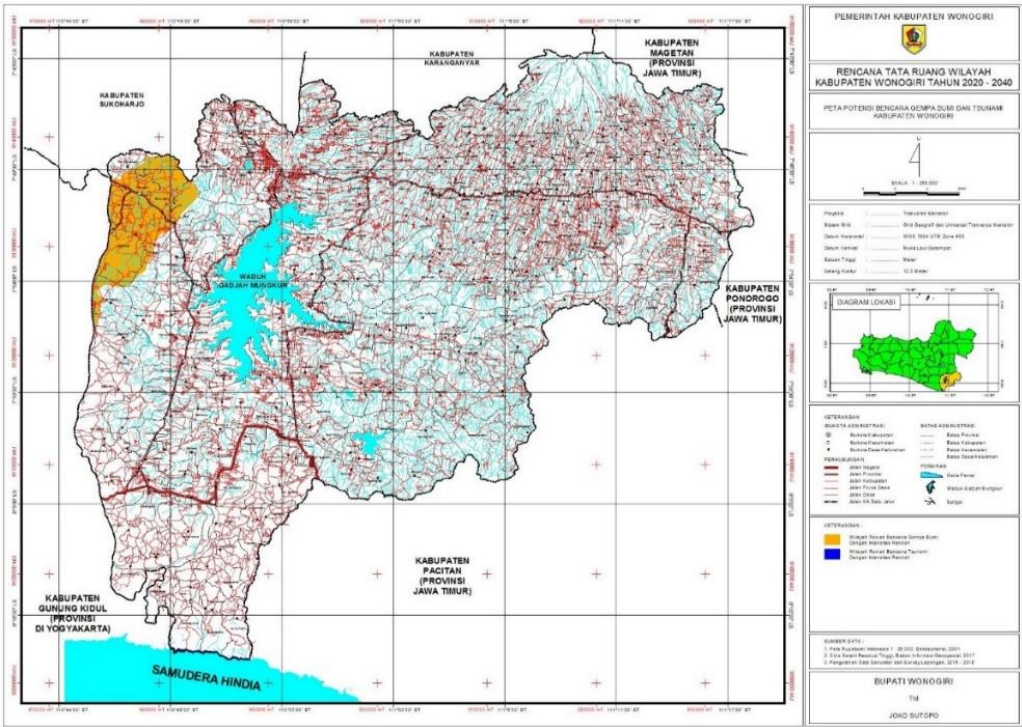
Sumber: RTRW Kabupaten Wonogiri

Gambar 3. 5 Peta Potensi Bencana Kekeringan

4. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami

Jumlah desa/kelurahan yang mengalami bencana gempa Bumi pada Tahun 2019 ada 2 di Kecamatan Jatiroto dan Eromoko, Pada Tahun 2020 terjadi pada 7 Desa dan pada tahun 2021 terjadi pada 31 desa. Tahun 2022 tidak ada kejadian Gempa Bumi yang berpusat disekitar Wilayah Kabupaten Wonogiri dan tidak ada dampak yang ditimbulkan

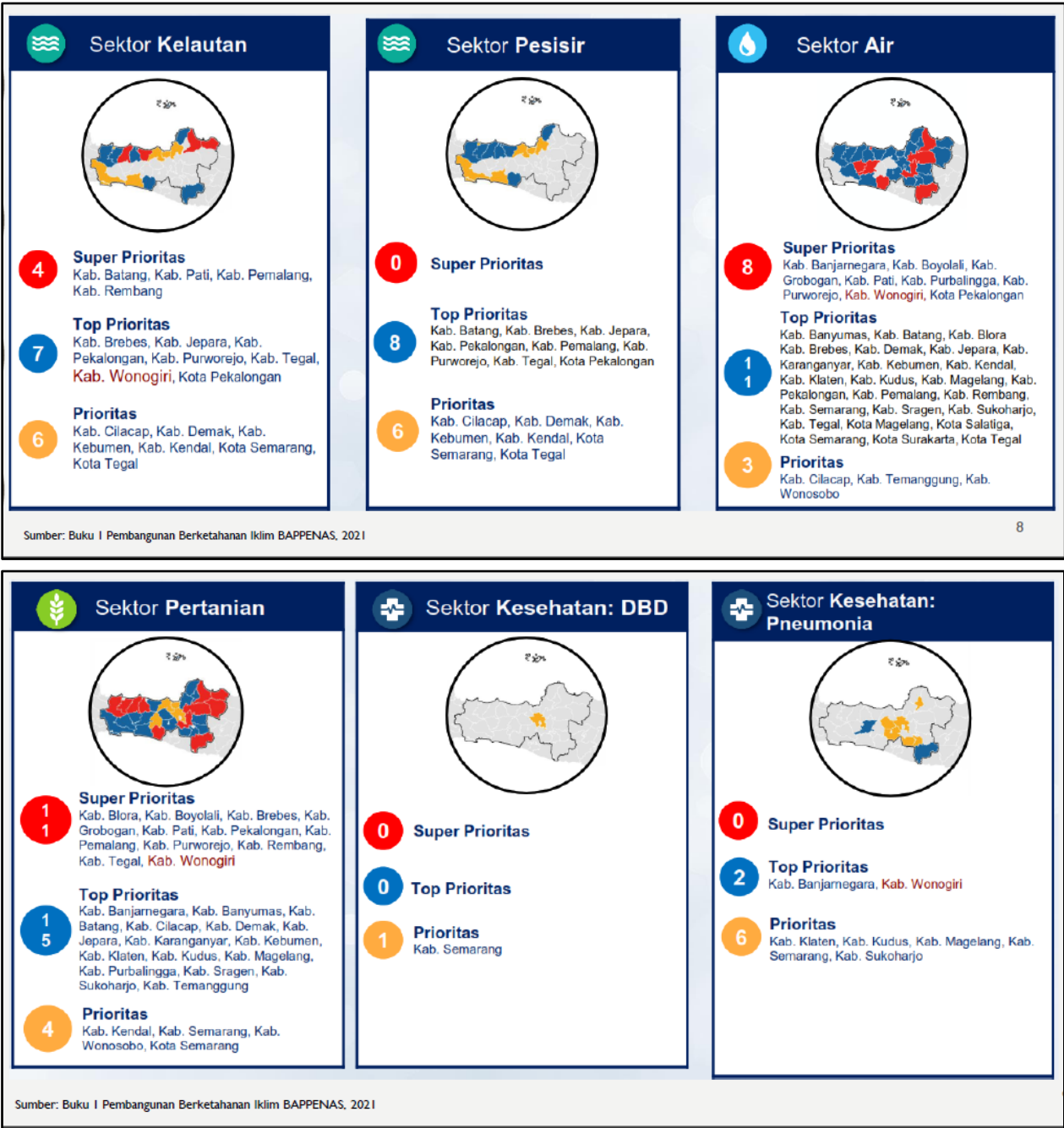
Peta Potensi Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Wonogiri dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: RTRW Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 – 2040

Gambar 3. 6 Peta Potensi Bencana Gempa Bumi Kabupaten Wonogiri

Berdasarkan Buku I Pembangunan Berketahanan Iklim BAPPENAS, 2021 Kabupaten Wonogiri masuk ke dalam Lokasi Prioritas Aksi Ketahanan Iklim Jawa Tengah dengan skala super prioritas pada Sektor Pertanian dan sektor Air, sedangkan untuk Sektor kelautan dan Kesehatan masuk skala Top Prioritas.



Sumber: Dokumen RAD API Jawa Tengah, 2023

Gambar 3. 7 Lokasi Prioritas Aksi Ketahanan Iklim Jawa Tengah

Selain perubahan iklim, kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (SDA) (energi, air, dan pangan) diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Kelangkaan ini disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk dunia, meningkatnya kualitas hidup manusia, dan berkembangnya industri yang memanfaatkan lahan produktif. Berkurangnya lahan pertanian sebagai akibat pertumbuhan dan kebutuhan penduduk yang pesat serta berkurangnya sumber daya manusia pengelola pertanian, merupakan faktor penting penyebab berkurangnya ketahanan pangan.

Selain itu krisis air bersih menjadi fenomena yang disebabkan penanganan lingkungan dan aset alam yang tidak terkendali. Pengelolaan sumber-sumber

air bersih yang tidak terkendali menyebabkan terjadinya penurunan kualitas dan ketersediaan sumber air bersih.

Secara agregat, DDDT Air di Kabupaten Wonogiri diindikasikan belum terlampaui. Kebutuhan air total di Kabupaten Wonogiri adalah 1.487.020.040,04 m³/tahun dengan rincian 1.395.668.196,84 m³/ tahun untuk kebutuhan ekonomi berbasis lahan dan 91.351.843,20 m³/tahun untuk kebutuhan domestik. Sementara itu, ketersediaan total di Kabupaten Wonogiri adalah 5.054.872.255,59 m³/tahun sehingga selisih supply-demand DDDT Air adalah 3.567.852.215,55 m³/tahun.

Dari 25 kecamatan yang ada di Kabupaten Wonogiri hanya Kecamatan Paranggupito yang secara agregat memiliki kondisi telah **“terlampaui”**. Sesuai dengan kinerja Jasa lingkungan pengaturan air mengalami kecenderungan **menurun** sebesar 0,79%, **meningkat** sebesar 0,36%, dan **tetap** sebesar 98,85%. Pada tahun 2015 hingga tahun 2020 terjadi penurunan luas hutan sebesar 312,13 Ha. Hal tersebut salah satu indikasi yang menyebabkan penurunan jasa lingkungan pengaturan air sebesar 0,79 %. Sehingga diperlukan upaya konservasi terhadap keberadaan hutan sebagai pegatur air di Kabupaten Wonogiri yang merupakan hulu dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo dan perlu dilakukan rehabilitasi terhadap proses, fungsi, dan produktivitas lingkungan hidup dan/ atau pembatasan pemanfaatan sumberdaya. Dalam kaitannya dengan sumberdaya air, rehabilitasi lingkungan hidup antara lain dapat dilakukan dengan reboisasi. Pembatasan pemanfaatan sumberdaya untuk memperbaiki kinerja jasa lingkungan sumberdaya air dapat dilakukan dengan pembatasan alih fungsi lahan dari hutan/ non terbangun menjadi kawasan terbangun.

3.3. ISU STRATEGIS DAERAH

Isu strategis daerah Kabupaten Wonogiri diidentifikasi dengan mempertimbangkan pada permasalahan, lingkungan strategis (global, nasional, dan daerah), dan potensi yang dimiliki Kabupaten Wonogiri yang relevan dan menjadi tantangan dalam pembangunan daerah dua puluh tahun ke depan. Isu strategis daerah Kabupaten Wonogiri sebagai berikut:

3.3.1. Kualitas Hidup Masyarakat yang berdaya saing

Kualitas hidup masyarakat salah satunya dapat dinilai dari kualitas sumber daya manusianya. Kualitas SDM mencakup pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan kesejahteraan individu, yang semuanya berkontribusi pada kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dan

sosial. Meningkatkan kualitas SDM memerlukan investasi dalam pendidikan yang berkualitas, akses yang merata ke layanan kesehatan, pelatihan keterampilan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja, serta upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Kualitas SDM yang baik membantu menciptakan masyarakat yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, pemecahan isu-isu terkait kualitas SDM harus menjadi prioritas dalam perencanaan dan kebijakan pembangunan. Salah satu indikator untuk mengukur kualitas SDM yaitu dengan melihat Indeks Pembangunan Manusia beserta indikator penyusunnya.

Indeks Ketimpangan Gender 5 tahun terakhir mengalami penurunan namun. Akan tetapi jika dilihat dari tahun 2021 dan 2022 Indeks Ketimpangan Gender mengalami sedikit kenaikan sehingga perlu diperhatikan agar pada tahun – tahun berikutnya Indeks Ketimpangan Gender dapat semakin menurun

3.3.2. Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonogiri yang belum optimal salah satunya disebabkan oleh tingkat produktivitas sektor-sektor ekonomi yang belum optimal, serta belum memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam sebagai sumber produksi ekonomi daerah.

Oleh karena itu, faktor utama dalam peningkatan ekonomi daerah adalah bagaimana memperkuat perekonomian daerah Kabupaten Wonogiri. Peningkatan ekonomi daerah yang berdaya saing dilakukan dengan mendorong sektor-sektor ekonomi yang saat ini memiliki produktivitas rendah menjadi sektor-sektor ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi, terutama dengan menggerakkan sektor-sektor unggulan daerah antara lain sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan pariwisata.

Selain itu peningkatan daya saing ekonomi juga dilakukan dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja agar mampu menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas dan memiliki kualitas yang bersaing di pasar global. Selanjutnya peningkatan daya saing ekonomi juga dilakukan dengan menerapkan ekonomi hijau. Hal ini juga dilakukan mengingat posisi kabupaten Wonogiri yang berada di hulu Sungai Bengawan Solo. Ekonomi hijau adalah model pembangunan ekonomi yang menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi dan akumulasi modal yang lebih hijau (*green investment*), infrastruktur hijau, dan pekerjaan yang ramah lingkungan (*green jobs*) untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan.

Peningkatan daya saing ekonomi akan tercapai juga apabila didukung dengan kondisi lingkungan wilayah yang kondusif yang akan menjamin lancar dan amannya semua pihak dalam proses pembangunan ekonomi Kabupaten Wonogiri.

3.3.3. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

Penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi isu strategis yang sangat penting dalam peningkatan perekonomian daerah dalam hal kelancaran perjalanan, distribusi barang dan jasa, serta dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah.

Kondisi wilayah di Kabupaten Wonogiri yang masih pedesaan, dengan kondisi geografis yang berbukit-bukit masih dibutuhkan jaminan infrastruktur yang baik dan ramah lingkungan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Penyediaan infrastruktur juga diperuntukkan bagi masyarakat untuk mendukung aktivitas masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat

3.3.4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Aspek pelayanan dan kepegawaian merupakan salah satu pilar penting dalam bidang pemerintahan. Isu strategis yang tidak bisa diabaikan adalah isu pelayanan dan tata kelola pemerintahan dalam rangka mendorong pemerintah untuk menjalankan pemerintahan lebih bersih, efektif dan akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik sebaik-baiknya.

Pelayanan dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Wonogiri didorong untuk lebih yang dinamis dengan memperkuat pemerintahan yang Inovatif, adaptif, dan kolaboratif, serta dengan memanfaatkan teknologi dan informasi berbasis digital sebaik mungkin, peningkatan kapasitas dan integritas sumber daya aparatur yang semakin berintegritas. Peningkatan tata kelola pemerintahan akan menjadi motor utama dalam pengarusutamaan transformasi di Kabupaten Wonogiri.

3.3.5. Keberlanjutan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

Isu bencana hidrometeorologis merupakan ancaman serius bagi keamanan dan kesejahteraan manusia serta lingkungan. Bencana seperti banjir, badai, topan, dan kekeringan sering kali disebabkan oleh faktor-faktor

cuaca dan iklim yang ekstrem. Perubahan iklim semakin memperparah situasi ini dengan meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologis. Kondisi fisik wilayah yang dipengaruhi oleh aspek topografis, geologis, hidrologis, dan geografis, menyebabkan Kabupaten Wonogiri memiliki potensi risiko bencana hidrometeorologis. Berdasarkan data dari Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2022, Kabupaten Wonogiri memiliki acaman bencana alam (multi hazard) dengan kategori sedang.

Ketahanan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan bencana menjadi salah satu isu strategis pembangunan Kabupaten Wonogiri dua puluh tahun ke depan. Isu ini tidak terlepas dari kondisi daya dukung dan daya tampung yang saat ini mulai terlampau. Maka menjadi penting untuk menjaga kelestarian sumber daya alam untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri. Keberlanjutan proses pembangunan dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung yang dapat terwujud hanya apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dijaga, dipelihara, dan dilestarikan. Dengan terjaganya sumber daya alam dan lestarnya lingkungan hidup akan mengurangi potensi terjadinya bencana.

Karakter geografis Kabupaten Wonogiri memberikan potensi kerusakan lingkungan dan kerentanan bencana yang potensial, diantaranya adalah gempa dan tsunami di bagian selatan, banjir di daerah dataran rendah dan juga genangan di perkotaan dan ibukota kecamatan, tanah longsor diperbukitan, kebakaran, serta kekeringan yang hampir merata disemua wilayah.

Selain itu alih fungsi lahan dari hutan/non terbangun menjadi kawasan terbangun masih menjadi isu strategis karena masih banyaknya potensi alih fungsi lahan akan mengurangi fungsi alam dan lingkungan hidup, alih guna lahan yang menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati, dan peningkatan produksi sampah, keterbatasan kapasitas pengelolaan sampah, dan pencemaran lingkungan, masih rendahnya sarana dan prasarana pengelolaan limbah, serta masih rendahnya edukasi masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup

3.3.6. Pemerataan Pembangunan

Kondisi geografis dengan cakupan wilayah yang sangat luas serta sistem permukiman yang terpecah mengakibatkan Kabupaten Wonogiri memiliki kendala aksesibilitas (keterjangkauan) wilayah, khususnya desa dan perdesaan. Sedangkan aksesibilitas merupakan syarat penting dalam pembangunan.

Pembangunan infrastruktur wilayah seperti jalan dan jembatan serta

infrastruktur produksi lain, seperti drainase, bendungan, jaringan irigasi, air bersih, sarana ekonomi pasar, bahkan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan masih harus dilengkapi.

Peningkatan kualitas infrastruktur khususnya jalan lengkap dengan perlengkapan jalannya, serta jembatan sebagai penunjang pengembangan wilayah terus dimaskimalkan, masih banyak kondisi infrastruktur yang rusak dan butuh perbaikan.

Belum optimalnya pemanfaatan potensi desa, pengembangan pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi desa, dan kerjasama antar desa dalam peningkatan pembangunan.

Selain itu, dalam era telekomunikasi dan informasi, keberadaan sarana dan prasarana jaringan telepon dan internet adalah sangat penting, dan hal itu juga masih menjadi permasalahan Kabupaten Wonogiri, karena belum meratanya sarana dan prasarana tersebut, masih ada daerah yang belum terjangkau fasilitas internet, atau kalau ada kondisi masih belum maksimal.

RAB IV
VISI DAN MISI DAERAH

BAB
IV

VISI DAN MISI DAERAH

4.1 LOGFRAME PEMBANGUNAN KABUPATEN WONOGIRI 2025-2045

Logical framework pembangunan daerah diawali dari *megatrend* dunia 2045 dimana serangkaian perubahan besar yang diperkirakan akan terjadi di dunia dan akan berpengaruh terhadap Pembangunan Indonesia dan daerah dalam kurun waktu dua puluh tahun ke depan. Perubahan-perubahan ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan.

Ada 10 *megatrend* dunia 2045 yang diperkirakan akan memiliki dampak signifikan bagi bangsa Indonesia dan akan berpengaruh kepada daerah yaitu demografi global, urbanisasi global, perdagangan internasional, keuangan global, kelas pendapatan menengah, persaingan sumber daya alam, perubahan iklim, Kemajuan teknologi, perubahan geopolitik, perubahan geo ekonomi,

Indonesia perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh *megatrend* dunia 2045. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan Indonesia:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, agar dapat bersaing di era globalisasi. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan keterampilan yang dibutuhkan di era digital.
2. Mengembangkan infrastruktur, agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang perlu dikembangkan antara lain infrastruktur transportasi, energi, dan telekomunikasi.
3. Meningkatkan daya saing ekonomi, agar dapat menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Hal ini dapat dilakukan melalui reformasi ekonomi, peningkatan produktivitas, dan pengembangan sektor-sektor unggulan.
4. Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dan masa depan. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan prinsip-prinsip ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan.
5. Mendukung pembangunan berkelanjutan, agar dapat mengatasi tantangan perubahan iklim dan ketidaksetaraan. Hal ini dapat dilakukan melalui

penerapan kebijakan dan program yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Melihat tantangan dan peluang tersebut perlu disadari bersama bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata daerah dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini menunjukkan adanya harmonisasi dan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah. Pada prinsipnya pembangunan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Pembangunan daerah maupun nasional sama-sama bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai sebuah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi dan arah kebijakan pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu 20 tahun. Dokumen RPJPD merupakan kesepakatan/komitmen kebijakan yang mengikat namun fleksibel dalam tahapan pelaksanaannya. RPJPD menjadi tahap dasar bagi siapapun termasuk para calon pemimpin dalam membuat visi dan misi guna membangun suatu daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045 merupakan kelanjutan tahapan Rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005-2025 yang mempunyai tujuan untuk mendukung pencapaian cita-cita besar Bangsa Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan selaras dengan cita-cita Jawa Tengah yang maju, mandiri, sejahtera, berbudaya dan berkelanjutan.

Melalui pendekatan perencanaan yang disusun secara logis dengan menggunakan indikator yang jelas (*logical framework*), juga mempertimbangkan capaian pembangunan daerah periode sebelumnya maka dengan semangat *Go Nyawiji Sesarengan mbangun Wonogiri* dan dilhami ***Wonogiri The Inspiring of Java*** yang dijadikan *branding* Kabupaten Wonogiri dapat mewujudkan **“WONOGIRI SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BARU YANG SEJAHTERA, MAJU, DAN BERKELANJUTAN”** pada dua puluh tahun yang akan datang.

Cita-cita **Wonogiri Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Yang Sejahtera, Maju, Dan Berkelanjutan** dapat digambarkan dalam *logframe* pembangunan Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045 sebagai berikut.



Gambar 4. 1 Logframe Pembangunan Kabupaten Wonogiri 2025-2045

Logframe pembangunan Kabupaten Wonogiri tersebut menggambarkan bahwa cita-cita Kabupaten Wonogiri 2045 adalah Wonogiri Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Yang Sejahtera, Maju, Dan Berkelanjutan. Perwujudan cita-cita pembangunan Kabupaten Wonogiri dua puluh tahun kedepan ditopang dengan empat landasan sebagai kekuatan pembangunan daerah. Empat landasan tersebut meliputi:

1. Kualitas Hidup Masyarakat, Lingkungan Sosial dan Budaya Masyarakat Maju,
2. Produktivitas Daerah, Ekonomi berdaya saing dan Berkelanjutan,
3. Tata Kelola Pemerintahan dan
4. Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Bencana.

4.2 VISI DAERAH

Berdasarkan kerangka berpikir pembangunan jangka panjang yang tergambar dalam *logical frame work* tersebut dengan mempertimbangkan kondisi umum daerah, potensi daerah yang dimiliki, permasalahan dan isu strategis serta pencapaian pembangunan daerah periode sebelumnya maka ditetapkan **Visi Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045** yaitu:

“WONOGIRI SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BARU YANG
SEJAHTERA, MAJU, DAN BERKELANJUTAN”



Gambar 4. 2 Visi Pembangunan Kabupaten Wonogiri 2025-2045

Penjabaran visi pembangunan Kabupaten Wonogiri 2025-2045 sebagai berikut:

1. SEJAHTERA

Wonogiri sejahtera ditunjukkan dengan kualitas hidup yang baik dan tercukupinya semua kebutuhan hidup masyarakat. Wonogiri sejahtera dapat digambarkan rendahnya jumlah penduduk miskin dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat (sandang, pangan, perumahan layak, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, jaminan keamanan), memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya, mudahnya mengakses layanan sosial yang berkualitas, kemerdekaan dalam beragama, dan tertanamnya nilai-nilai luhur bangsa di dalam pola pikir dan perilaku masyarakat.

2. MAJU

Maju: Wonogiri Maju pada tahun 2045 mampu menjadi wilayah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, berprestasi, berdaya saing, dan modern berbasis riset dan inovasi, pemanfaatan teknologi, dan kreativitas dan Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, independen,

transparan, partisipatif dan koordinatif didukung kemampuan aparatur yang berakhlak, berintegritas, berkompeten, berprestasi, berdayasaing, dan siap menghadapi tantangan pembangunan melalui penguasaan ilmu pengetahuan teknologi, dan kreatifitas untuk melayani masyarakat

Daya Saing: Perekonomian Wonogiri tahun 2045 mampu tumbuh bersaing dengan daerah lain terutama di wilayah sekitar. Wonogiri berdaya saing untuk mengembangkan kemampuan ekonomi sosial guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat kurang mampu, yang diwujudkan melalui pengembangan potensi sektor-sektor unggulan daerah, ekonomi kreatif, dan hilirisasi berbasis riset dan teknologi, dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup menuju pada perwujudan ekonomi hijau. Pertumbuhan ekonomi diikuti dengan peningkatan kualitas manusia Wonogiri yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan daya saing. Kondisi ekonomi yang meningkat dan mampu bersaing dengan wilayah sekitar juga didukung dengan peningkatan kualitas, kapasitas dan pemerataan infrastruktur, konektivitas antar wilayah yang terpadu, handal, aman, nyaman, terjangkau, dan merata guna meningkatkan mobilitas warga, kelancaran distribusi barang dan jasa, mengurangi ketimpangan antar wilayah, serta mendukung perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Mandiri: Wonogiri mandiri ditunjukkan dengan kemampuan mengelola dan memanfaatkan potensi daerah, kemampuan memenuhi kebutuhannya sendiri, tidak tergantung pada daerah lainnya di semua sektor, berkontribusi kepada daerah lain, mampu menghadapi tantangan dan krisis, dan didukung kondisi lingkungan yang kondusif.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam mewujudkan daya saing, maju dan mandiri didukung dengan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Tangguh: Wonogiri tangguh ditujukan dengan kemampuan bertahan terhadap gangguan, permasalahan, dan ancaman baik dari dalam maupun luar kabupaten Wonogiri.

Aman: Wonogiri aman ditunjukkan dengan keadaan yang kondusif, jauh dari kejahatan, yang akhirnya membuat masyarakat merasa terlindungi dalam segala aspek kehidupan

3. BERKELANJUTAN

Pembangunan ekonomi akan berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan hidup, sehingga pembangunan yang dilaksanakan harus

menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup yang layak bagi kehidupan, dengan memperhatikan prinsip bahwa apa yang saat ini dinikmati oleh generasi sekarang akan dapat juga dinikmati oleh generasi yang akan datang, memperhatikan kearifan lokal, dan mempertimbangkan dampak kerusakan lingkungan yang akan terjadi serta dampak perubahan iklim.

Seiring dengan Wonogiri melaksanakan pembangunan berkelanjutan maka akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendapatkan lingkungan dan permukiman yang layak dan nyaman, bebas pencemaran dan polusi, serta kondisi alam yang semakin terjaga kelestariannya dengan baik. Pembangunan di Wonogiri yang berkelanjutan juga mempertimbangkan risiko bencana dan menyiapkan mitigasi dari dampak yang ditimbulkan mengingat Wonogiri memiliki potensi dan jenis bencana alam yang beragam karena kondisi *geografis*.

SASARAN UTAMA VISI

Pencapaian Kabupaten Wonogiri Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Yang Sejahtera, Maju, Dan Berkelanjutan tercermin dalam sasaran visi sebagai berikut :

Tabel 4. 1. Sasaran Utama Visi

VISI	SASARAN VISI	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET				
				2025	2029	2034	2039	2045	
WONOGIRI SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI BARU YANG SEJAHTERA, MAJU, DAN BERKELANJUTAN	1. Pendapatan Per Kapita	a. PDRB Per Kapita	Rp.Juta	41,45	72,45	111,2	149,95	196,44	
		b. Pertumbuhan Ekonomi	%	5,63	5,76	5,93	6,1	5,4 - 6,3	
		c. Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	19,32	20,16	21,22	22,27	23,54	
		d. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2,67	3,39	4,29	5,18	6,26	
	2. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan	%	9,51 - 9,93	7,61-8,05	5,23 - 5,71	2,85-3,36	0,00 - 0,55	
		b. Rasio Gini	%	0,348	0,339 - 0,399	0,329 - 0,327	0,318 - 0,315	0,305 - 0,301	
		c. Inflasi	%	7,03	6,12 ± 5,82	4,99 ± 4,32	3,86 ± 2,81	2,5 ± 1	
		d. Indeks Ketahanan Pangan	Angka	88,21	89,16	90,34	91,52	92,94	
	3. Pemerintahan yang berdaya saing, maju, dan mandiri	a. Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	68,33	71,66	75,83	80	85	
		b. Indeks Reformasi Hukum	Angka	37,75	48,2	61,26	74,33	90	

VISI	SASARAN VISI	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET				
				2025	2029	2034	2039	2045	
		c. Indeks Sistem Pemerintahan Yang Berbasis Elektronik	Angka	3,34	3,72	3,98	4,1	4,31	
		d. Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,08	4,26	4,49	4,72	5	
	4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	71,97	73,71	75,89	78,06	80,67	
	5. Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca Menurun Menuju <i>Net Zero Emission</i>	Penurunan Emisi GRK	TonCO2eq	6351,53	8942,7	10562,7	12181,7	13801,2	

4.3 MISI DAERAH

Visi pembangunan **Wonogiri Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Yang Sejahtera, Maju, Dan Berkelanjutan** pada tahun 2045 akan dapat terwujud melalui 4 (empat) misi pembangunan daerah.



Gambar 4. 3 Misi Pembangunan Wonogiri 2025-2045

Empat misi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Misi 1. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat didukung lingkungan sosial dan budaya masyarakat maju

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan ketahanan pangan, perumahan layak, kualitas dan asesibilitas pendidikan dan kesehatan, menyediakan jaminan sosial masyarakat dan jaminan keamanan, menciptakan kondisi lingkungan sosial yang kondusif, memberikan ruang yang cukup dalam penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kesejahteraan masyarakat.

Misi 2. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan

Pembangunan ekonomi yang berbasis riset dan Inovasi di tunjukkan dengan proses secara terus menerus untuk mendorong sektor-sektor ekonomi yang saat ini memiliki produktivitas rendah menjadi sektor-sektor ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi, terutama dengan menggerakkan sektor-sektor unggulan daerah yang didukung dengan pembangunan infrastruktur dalam hal distribusi barang dan jasa, serta upaya peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah, terutama dengan penyediaan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap dan sesuai dengan standar, peningkatan kelancaran serta keselamatan perjalanan dan transportasi, didukung juga dengan peningkatan kualitas, jaringan transportasi dan pelayanan transportasi umum. Infrastruktur lainnya yang menjadi penting untuk mendukung pembangunan ekonomi adalah infrastruktur komunikasi, informasi, dan pembangunan pasar tradisional sehingga terjadi pemerataan pembangunan sarana dan prasarana dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Pembangunan infrastruktur tersebut tetap berprinsip pada infrastruktur yang ramah lingkungan guna menjaga kelestarian lingkungan serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Untuk itu menjadi penting bahwa pembangunan infrastruktur harus berpedoman pada rencana tata ruang yang sudah ditetapkan agar kualitas ruang tetap terjaga dan lestari.

Misi 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, independen, transparan, partisipatif dan koordinatif didukung kemampuan aparatur yang berakhlak, berintegritas, berkompeten, berprestasi, berdayasaing, dan siap menghadapi tantangan pembangunan melalui penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreatifitas untuk melayani masyarakat.

Tata kelola pemerintahan menjadi penting dalam mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif dan akuntabel guna mendukung jalannya pembangunan, serta mampu memberikan pelayanan publik lebih optimal. Tata kelola pemerintahan ke depan yang dinamis, adaptif, dan kolaboratif yang didukung oleh birokrat yang semakin berintegritas, berkinerja tinggi, inovatif, serta adaptif terhadap perkembangan dan segala bentuk perubahan. Pemerintahan yang dinamis tercermin dari pelayanan publik yang semakin berkualitas, manajemen organisasi dan proses bisnis yang semakin adaptif dan berorientasi pada hasil, kelembagaan yang

efektif, meningkatnya pendapatan daerah dan sumber pembiayaan alternatif lainnya, digitalisasi tata kelola pemerintahan, manajemen sumber daya aparatur yang efektif dan efisien, regulasi, pengawasan yang independen dan berintegritas, pengembangan budaya kerja, pola pikir birokrasi, serta komitmen. Birokrasi kolaboratif juga menjadi hal penting untuk diwujudkan dalam konteks membangun tata kelola pemerintahan yang dinamis. Kolaborasi dalam proses pemerintahan untuk pembangunan daerah saat ini menjadi mutlak karena dependensi antar daerah pada akhirnya akan semakin besar. Tidak hanya kolaborasi antar daerah, namun daerah dengan pemangku kepentingan lainnya pun harus semakin diperkuat agar tujuan pembangunan daerah dapat dicapai.

Misi 4. Mewujudkan Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Bencana

Pembangunan tidak terlepas dari kebutuhan akan sumber daya alam sedangkan di sisi lain daya dukung dan daya tampung Wonogiri telah mulai terlampaui. Maka menjadi penting untuk menjaga kelestarian sumber daya alam demi menjaga keberlanjutan pembangunan daerah Wonogiri. Ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup fokus pada ketahanan sumber daya lahan, ketahanan air, kualitas lingkungan hidup (baik pada lingkup air, udara, tutupan lahan), penataan ruang, ketahanan perubahan iklim, dan ketangguhan bencana. Dengan terjaganya sumber daya alam dan lestarnya lingkungan hidup akan mengurangi potensi terjadinya bencana.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK





ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1. ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka berpikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2025-2045 yang dijabarkan dalam empat tahapan arah kebijakan dalam rangka pencapaian visi misi daerah. Arah kebijakan lima tahunan diarahkan guna penekanan prioritas pembangunan yang ditetapkan secara berkesinambungan antara satu periode dengan periode berikutnya. Arah kebijakan setiap tahapan lima tahunan dijabarkan sebagai berikut.

5.1.1 Arah Kebijakan Periode 2025-2029

Kebijakan periode pertama dari pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Wonogiri diarahkan pada kebijakan **“Penguatan landasan Wonogiri Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Yang Sejahtera, Maju, Dan Berkelanjutan”**. Pada tahap pertama ini dilakukan dengan penguatan landasan pengembangan kualitas hidup masyarakat didukung dengan penguatan landasan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan serta ketahanan sumber daya alam, lingkungan hidup, risiko bencana, lingkungan sosial dan budaya maju yang disertai dengan penguatan produktivitas daerah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdayasaing dan berkelanjutan. Kebijakan penguatan landasan tersebut dapat dicapai dengan dukungan tata kelola pemerintahan yang baik dan penguatan landasan terhadap ketahanan sumber daya alam, lingkungan hidup dan risiko bencana.

1. **Penguatan Landasan pengembangan kualitas hidup masyarakat didukung lingkungan sosial dan budaya maju** diarahkan pada Penguatan dan peningkatan perluasan layanan pendidikan berorientasi pada *demand-supply side* dan upaya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan berkualitas, peningkatan ketersediaan ruang belajar untuk penguasaan dan pemanfaatan iptek, jaminan kesehatan untuk semua dengan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan yang berkualitas pelayanan prima, penguatan promotive dan preventif, perlindungan sosial, perumahan yang

- layak, dan penguatan ketahanan pangan secara mandiri guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
2. **Penguatan landasan pengembangan produktivitas daerah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan**, difokuskan pada inisiasi penguatan produksi dan hilirisasi sektor-sektor unggulan di daerah, penguatan ekonomi kreatif, inisiasi penerapan ekonomi yang berdaya saing yang berbasis riset dan Inovasi.
 3. **Penguatan Landasan tata kelola pemerintahan** difokuskan pada penguatan reformasi birokrasi menuju birokrasi yang dinamis, serta memperkuat pemerintahan yang kolaboratif dengan penguatan penerapan kerja sama antar daerah.
 4. **Penguatan Landasan Ketahanan Sumber daya Alam Lingkungan Hidup dan Bencana** diarahkan pada upaya peningkatan sumber daya alam yang lestari, dan berkelanjutan, serta pengelolaan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, dan berdampak pada ketahanan daerah terhadap risiko bencana.
 5. **Penguatan Landasan Infrastruktur yang berkualitas dan Ramah Lingkungan** difokuskan pada peningkatan infrastruktur yang berkualitas sebagai sarana kelancaran di semua bidang dengan menjaga kualitas dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

5.1.2 Arah Kebijakan Periode 2030-2034

Periode kedua dari pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Wonogiri diarahkan pada kebijakan **“Akselerasi Penguatan Wonogiri Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Yang Sejahtera, Maju, Dan Berkelanjutan”**. Pada tahapan yang kedua ini dilakukan dengan akselerasi penguatan ekonomi yang didukung dengan akselerasi penguatan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan serta ketahanan sumber daya alam, lingkungan hidup dan risiko bencana. Akselerasi tersebut disertai dengan akselerasi penguatan sosial dalam rangka memperkuat kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tersebut dapat dicapai dengan dukungan akselerasi penguatan tata kelola pemerintahan.

1. **Akselerasi Penguatan pengembangan kualitas hidup masyarakat didukung lingkungan sosial dan budaya maju** diarahkan pada akselerasi penguatan dan peningkatan perluasan layanan pendidikan berorientasi pada *demand-supply side* dan upaya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan berkualitas, ketersediaan ruang belajar untuk penguasaan dan

pemanfaatan iptek, jaminan kesehatan untuk semua dengan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan yang berkualitas pelayanan prima, akselerasi penguatan promotive dan preventif, perlindungan sosial, perumahan yang layak, dan akselerasi penguatan ketahanan pangan secara mandiri guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

2. **Akselerasi Penguatan pengembangan produktivitas daerah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan**, Difokuskan pada, akselerasi penguatan produksi dan hilirisasi sektor-sektor unggulan di daerah, penguatan ekonomi kreatif, akselerasi penerapan ekonomi yang berdaya saing yang berbasis riset dan Inovasi.
3. **Akselerasi Penguatan tata kelola pemerintahan** difokuskan pada akselerasi reformasi birokrasi menuju birokrasi yang dinamis, serta memperkuat pemerintahan yang kolaboratif dengan penguatan penerapan kerja sama antar daerah.
4. **Akselerasi Penguatan Landasan Ketahanan Sumber daya Alam Lingkungan Hidup dan Bencana** diarahkan pada akselerasi peningkatan sumber daya alam yang lestari, dan berkelanjutan, serta pengelolaan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, dan berdampak pada ketahanan daerah terhadap risiko bencana.
5. **Akselerasi Penguatan Landasan Infrastruktur yang berkualitas dan Ramah Lingkungan** difokuskan pada akselerasi peningkatan infrastruktur yang berkualitas sebagai sarana kelancaran di semua bidang dengan menjaga kualitas dan tetap menjaga kelestarian lingkungan

5.1.3 Arah Kebijakan Periode 2035-2039

Periode ketiga dari pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Wonogiri diarahkan pada kebijakan **“Pemantapan Wonogiri Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Yang Sejahtera, Maju, Dan Berkelanjutan”**. Tahap ketiga ini dilakukan dengan pemantapan ekonomi yang didukung dengan pemantapan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan serta ketahanan sumber daya alam, lingkungan hidup dan risiko bencana. Pemantapan tersebut disertai dengan pemantapan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tersebut dapat dicapai dengan dukungan pemantapan tata kelola pemerintahan.

1. **Pemantapan kualitas hidup masyarakat didukung lingkungan sosial dan budaya maju** diarahkan pada pemantapan layanan pendidikan berorientasi

pada *demand-supply side* dan upaya pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan berkualitas, ruang belajar untuk penguasaan dan pemanfaatan iptek, jaminan kesehatan untuk semua dengan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan yang berkualitas pelayanan prima, penguatan promotive dan preventif, perlindungan sosial, perumahan yang layak, dan pemantapan ketahanan pangan secara mandiri guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

2. **Pemantapan produktivitas daerah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan**, difokuskan pada pemantapan penguatan produksi dan hilirisasi sektor-sektor unggulan di daerah, penguatan ekonomi kreatif, pemantapan penerapan ekonomi yang berdaya saing yang berbasis riset dan Inovasi.
3. **Pemantapan tata kelola pemerintahan** difokuskan pada pemantapan reformasi birokrasi menuju birokrasi yang dinamis, serta pemantapan pemerintahan yang kolaboratif dengan penguatan penerapan kerja sama antar daerah.
4. **Pemantapan Ketahanan Sumber daya Alam Lingkungan Hidup dan Bencana** diarahkan pada pemantapan sumber daya alam yang lestari, dan berkelanjutan, serta pengelolaan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, dan berdampak pada ketahanan daerah terhadap risiko bencana.
5. **Pemantapan Infrastruktur yang berkualitas dan Ramah Lingkungan** difokuskan pada pemantapan infrastruktur yang berkualitas sebagai sarana kelancaran di semua bidang dengan menjaga kualitas dan tetap menjaga kelestarian lingkungan

5.1.4 Arah Kebijakan Periode 2040-2045

Periode keempat dari pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Wonogiri diarahkan pada kebijakan **“Perwujudan Wonogiri Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Yang Sejahtera, Maju, Dan Berkelanjutan”**. Tahap keempat ini dilakukan dengan perwujudan transformasi ekonomi yang didukung dengan perwujudan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan serta ketahanan sumber daya alam, lingkungan hidup dan risiko bencana. Perwujudan tersebut disertai dengan perwujudan transformasi sosial dan ketahanan budaya dalam rangka mewujudkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tersebut dapat didukung dengan perwujudan transformasi tata kelola pemerintahan.

1. **Perwujudan kualitas hidup masyarakat didukung lingkungan sosial dan budaya maju** diarahkan pada perwujudan layanan pendidikan yang luas yang berorientasi pada *demand-supply side* dan upaya pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan berkualitas, perwujudan ketersediaan ruang belajar untuk penguasaan dan pemanfaatan iptek yang meningkat, jaminan kesehatan untuk semua dengan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan yang berkualitas pelayanan prima, perwujudan promotive dan preventif yang kuat, perlindungan sosial, perumahan yang layak, dan perwujudan ketahanan pangan secara mandiri guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
2. **Perwujudan produktivitas daerah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdayasaing dan berkelanjutan**, difokuskan pada **perwujudan** produksi dan hilirisasi sektor-sektor unggulan di daerah, perwujudan ekonomi kreatif yang berbasis riset dan Inovasi.
3. **Perwujudan tata kelola pemerintahan** difokuskan pada perwujudan **birokrasi** yang dinamis, serta perwujudan pemerintahan yang kolaboratif dengan perwujudan kerja sama antar daerah yang mantap.
4. **Perwujudan Ketahanan Sumber daya Alam Lingkungan Hidup dan Bencana**. diarahkan pada perwujudan sumber daya alam yang lestari, dan berkelanjutan, serta pengelolaan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, dan berdampak pada ketahanan daerah terhadap risiko bencana.
5. **Perwujudan Infrastruktur yang berkualitas dan Ramah Lingkungan** difokuskan pada peningkatan infrastruktur yang berkualitas sebagai sarana kelancaran di semua bidang dengan menjaga kualitas dan tetap menjaga kelestarian lingkungan



Gambar 5. 1 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Wonogiri 2025-2045

5.2. SASARAN POKOK

Sasaran Pokok adalah gambaran rincian kinerja daerah yang menggambarkan pencapaian pembangunan sebagai upaya perwujudan visi daerah. Sasaran pokok merupakan kinerja yang merefleksikan aspek kesejahteraan, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum pada setiap tahapan dengan menggunakan indikator-indikator yang bersifat progresif. Sasaran pokok 5 (lima) tahunan (per periode RPJMD) merupakan target berdasarkan arah kebijakan pembangunan pada setiap periode lima tahunan yang ditentukan berdasarkan pentahapan pembangunan.

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator pada level *impact* dan bersifat progresif.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri 2025-2045 ditetapkan 4 (empat) sasaran pokok, dengan 11 (sebelas) Arah Pembangunan daerah kabupaten Wonogiri (11/Wng), Pencapaian sasaran pokok diukur dengan indikator kinerja yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2045. Sasaran pokok dan indikator kerjanya dijelaskan sebagai berikut :

5.2.1 Sasaran 1. Terwujudnya Kualitas Hidup Masyarakat Didukung Lingkungan Sosial dan Berbudaya Maju

Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Didukung Lingkungan Sosial dan Berbudaya Maju dilakukan dengan memastikan penyediaan layanan dasar secara merata dan inklusif dalam rangka menjamin tercukupinya kebutuhan

dasar masyarakat dan kecukupan ekonomi masyarakat sehingga tercapai manusia di Kabupaten Wonogiri yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, berdaya saing, dan semakin sejahtera. Peningkatan kualitas dilakukan dengan memastikan penyediaan layanan dasar yang berkualitas secara merata dan inklusif, terutama penyediaan pangan secara mandiri, penyediaan akses pendidikan bermutu yang inklusif, kesehatan untuk semua, dan jaminan perlindungan sosial. Dan untuk mewujudkan sasaran pokok Terwujudnya Kualitas Hidup Masyarakat Didukung Lingkungan Sosial dan Berbudaya Maju maka difokuskan kepada beberapa arah pembangunan sebagai berikut :

Wng01. Ketahanan Pangan

Pengembangan kebijakan pangan ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan bagi masyarakat Kabupaten Wonogiri berbasis potensi sumber daya lokal dan dikelola berbasis kearifan lokal serta berkelanjutan. Arah kebijakan perwujudan ketahanan pangan diarahkan pada: 1) pemenuhan hak dasar atas pangan secara berkelanjutan bagi seluruh masyarakat; 2) pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup serta beragam, bergizi, seimbang, dan aman; 3) diversifikasi dan hilirisasi pangan; 4) pengembangan dan perluasan biofortifikasi dan fortifikasi pangan; 5) penjaminan akses pangan dan gizi untuk seluruh masyarakat; 6) penguatan sistem rantai pasok pangan, dan jaminan kualitas produk pangan; 7) penguatan riset dan inovasi serta teknologi pangan; 8) penguatan pengendalian harga bahan pangan, serta 9) pemberdayaan peran serta masyarakat untuk penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan; 10) penerapan *food loss and waste*.

Wng02. Pendidikan Inklusif dan berkualitas

Pendidikan menjadi hal penting yang berperan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menciptakan sumber daya manusia yang berakhlak, inovatif dan berdaya saing sehingga dapat terwujud masyarakat yang lebih sejahtera. Dalam mewujudkan kondisi tersebut, kebijakan pembangunan pendidikan Kabupaten Wonogiri dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada mewujudkan Pendidikan yang inklusif dan berkualitas.

Guna mewujudkan Pendidikan yang inklusif dan berkualitas ditempuh dengan arah kebijakan sebagai berikut ; 1) konsolidasi kelembagaan dengan lebih menekankan pada perbaikan pola koordinasi internal institusi pendidikan, melibatkan sektor lain, serta dengan memperkuat kerjasama lintas sektor; 2) solidasi stakeholder pendidikan lebih diarahkan pada peningkatan

peran serta stakeholder dalam penyelenggaraan pendidikan dalam upaya membangun aliansi antara pendidikan, bisnis, dan pemerintah; 3) penguatan sinergi penyelenggaraan Pendidikan; 4) perwujudan penyelenggaraan pendidikan berbasis tata kelola yang baik; 5) penguatan pendataan berbasis wilayah dan analisis kebutuhan yang dilakukan dengan menyusun data berbasis analisis situasi dan identifikasi pemetaan layanan pendidikan secara kewilayahan; 6) perluasan cakupan akses layanan pendidikan diarahkan pada penyediaan akses layanan pendidikan dengan penambahan prasarana sarana pendidikan sesuai standar nasional pendidikan maupun keterjangkauan pembiayaan Pendidikan; 7) pemerataan akses layanan pendidikan yang diarahkan untuk pencegahan putus sekolah dan penanganan anak tidak sekolah termasuk penguatan sekolah inklusi; 8) perwujudan pendidikan inklusif; 9) peningkatan digitalisasi pendidikan, dengan mendorong metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi; 10) pencapaian hasil pembelajaran semakin berkualitas dengan peningkatan kemampuan numerasi, literasi, dan pembinaan karakter.

Wng03. Kesehatan Untuk Semua

Hidup sehat adalah hak setiap individu masyarakat dan menjadi penting untuk dimiliki oleh setiap individu karena sehat menjadi salah satu prasyarat individu untuk mampu melakukan aktivitas baik aktivitas ekonomi, sosial, maupun budaya. Untuk itu, pembangunan kesehatan di Kabupaten Wonogiri ditujukan untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi setiap lapisan masyarakat, dengan melibatkan seluruh *stakeholder*.

Arah kebijakan pembangunan kesehatan Kabupaten Wonogiri jangka panjang meliputi; 1) perluasan upaya promotif dan preventif dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat antara lain dengan deteksi dini, penemuan kasus, peningkatan literasi kesehatan untuk masyarakat, pembudayaan perilaku hidup sehat, penyehatan lingkungan didukung dengan prasarana sarana antara lain konektivitas transportasi, ruang terbuka, fasilitas aktivitas fisik dan olahraga, akses air minum layak dan aman, sanitasi layak, serta permukiman sehat; 2) penanggulangan permasalahan gizi makro dan gizi mikro, percepatan penuntasan permasalahan stunting dan kelebihan gizi; 3) penguatan pelayanan kesehatan ibu, anak, lanjut usia, kesehatan mental, kesehatan kerja, kesehatan tradisional, pengendalian penyakit tidak menular dan penyakit menular; 4) pengembangan kebijakan keluarga berencana secara

komprehensif, termasuk kesehatan reproduksi; 5) pemerataan pelayanan dan prasarana sarana kesehatan, didukung dengan inovasi pelayanan Kesehatan; 6) pemenuhan dan perluasan cakupan jaminan kesehatan yang berkelanjutan; 7) peningkatan kualitas, kapasitas, kompetensi, dan ketersediaan tenaga Kesehatan; 8) peningkatan pembiayaan kesehatan berkelanjutan serta peningkatan efektivitas dan efiseinsi pembuatan berorientasi pada hasil, 9) penguatan sistem pengawasan obat dan makanan; 10) penguatan riset, data, dan informasi, serta penerapan inovasi dan teknologi di bidang kesehatan.

Wng04. Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Wonogiri tanpa terkecuali sesuai tingkat kerentanan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif. Perlindungan sosial ditujukan untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan.

Arah Kebijakan perlindungan sosial untuk masyarakat Kabupaten Wonogiri dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada: 1) penguatan sistem jaminan sosial dengan efektif dan tepat sasaran; 2) penguatan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial secara inklusif baik secara sosial dan ekonomi terutama untuk kelompok anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya; 3) penguatan kapasitas sumber daya manusia untuk memiliki kemampuan menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat usaha kesejahteraan sosial; 4) penguatan tata kelola dan kelembagaan data untuk penentuan sasaran penerima manfaat, termasuk tata kelola perencanaan dan pembiayaan untuk perlindungan sosial.

Wng 05. Pembangunan Desa.

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan pembangunan desa guna mencapai transformasi positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat desa, termasuk ekonomi, sosial, lingkungan, dan infrastruktur, yang dinilai dengan menggunakan presentase desa mandiri yang diukur melalui indeks desa.

Arah Pembangunan Desa meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan (Kesehatan dan pendidikan) yang meliputi fisik dan non fisik. Terwujudnya transformasi sosial Kabupaten Wonogiri tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut :

Tabel 5. 1 Sasaran Pokok, Arah Kebijakan, Indikator Utama Pembangunan dan Target Terwujudnya Kualitas Hidup Masyarakat Didukung Lingkungan Sosial dan Berbudaya Maju Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	2025 (Baseline)	Target Akhir Tahap I (2025 - 2029)	Target Akhir Tahap II (2030 - 2034)	Target Akhir Tahap III (2035 - 2039)	Target Akhir
TERWUJUDNYA KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DIDUKUNG LINGKUNGAN SOSIAL DAN BERBUDAYA MAJU	Wng01. Ketahanan Pangan	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	%	10,44	8,57	6,83	5,09	3,00
		Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Angka	88,21	89,16	90,34	91,52	92,94
	Wng02. Pendidikan Inklusif Dan Berkualitas	Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):						
		a) Literasi Membaca SD/Sederajat	%	67,29	70,61	74,76	78,91	83,89
		b) Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	62,40	68,31	75,7	83,09	91,95
		c) Numerasi SD/Sederajat	%	57,82	66,14	76,54	86,94	99,42
		d) Numerasi SMP/Sederajat	%	39,66	49,45	61,68	73,91	88,59
		Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	7,64	7,98	8,4	9,33	9,33
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,16	13,63	14,22	14,81	15,51
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	5,68	6,43	7,37	8,31	9,43
		Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	77,91	80,4	83,52	86,63	90,37
		Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	100	100	100	100	100
		Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	22,41	25,54	29,45	33,37	38,06
		Jumlah pengunjung tempat bersejarah	Orang	90.303	258.161	959.668	3.567.400	17.243.618
		Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	26,13	28,44	31,32	34,21	37,67
		Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	0,03	0,43	0,92	1,42	2,01
	Wng03. Kesehatan Untuk Semua	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	76,77	78,03	79,6	81,17	83,06
		Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	10,00	8,4	6,4	4,4	2,00
		Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	11,02	9,67	7,99	6,31	4,28

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	2025 (Baseline)	Target Akhir Tahap I (2025 - 2029)	Target Akhir Tahap II (2030 - 2034)	Target Akhir Tahap III (2035 - 2039)	Target Akhir
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	%	90,00	92	94,5	97	100
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	%	90,00	91	92,25	93,5	95,00
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	84,23	87,28	91,1	92,92	99,50
	Wng04. Perlindungan Sosial	Tingkat Kemiskinan	%	9,51-9,93	7,61-8,05	5,23 - 5,71	2,85-3,36	0,00-0,55
		Jumlah Kejadian Konflik SARA	Kali	0	0	0	0	0
		Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	Angka	63,95-65,57	65,95	67,04	68,13	79,19-81,18
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,36 - 0,35	0,33 - 0,31	0,28 - 0,25	0,24 - 0,2	0,19 - 0,13
	Wng05. Pembangunan Desa	Persentase Desa Mandiri	%	6,375	11,554	16,733	25,489	30,278

5.2.2 Sasaran 2. Terwujudnya Ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Terwujudnya ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan di Kabupaten Wonogiri 2045 dilakukan secara bertahap dan terus-menerus untuk mendorong sektor-sektor ekonomi yang saat ini memiliki produktivitas rendah menjadi sektor-sektor ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi,dan juga dilakukan dengan menggerakkan sumber daya manusia (SDM) agar lebih produktif dan inovatif agar mampu menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah dan bersaing di pasar global. Perwujudan ekonomi yang berdaya saing difokuskan pada peningkatan produktivitas di sektor-sektor unggulan daerah, penguatan riset dan inovasi, dan pembangunan infastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Untuk memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi sampai ke generasi berikutnya, maka diterapkan pembangunan ekonomi hijau. Penerapan ekonomi hijau akan menjamin ketersediaan sumber daya alam yang dimiliki dengan tetap dapat dimanfaatkan secara ekonomi.

Ekonomi Kabupaten Wonogiri yang berdaya saing 2045 dengan produktivitas yang semakin meningkat dan menerapkan prinsip ekonomi hijau, diharapkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang semakin merata.

Wng06. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Salah satu upaya mewujudkan ekonomi yang berdaya saing adalah meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan daerah Kabupaten Wonogiri dan memberikan nilai tambah produksi agar mampu lebih bersaing di pasar global maupun nasional. Peningkatan produktivitas difokuskan pada sektor unggulan yang mempunyai kontribusi besar terhadap perekonomian Kabupaten Wonogiri yaitu, pertanian, industri pengolahan, perdagangan, UMKM dan Koperasi, pariwisata, ekonomi kreatif, dan produktifitas tenaga kerja, kebi

Ekonomi yang berdaya saing 2045 juga akan tercapai apabila didukung dengan kondisi lingkungan wilayah yang kondusif yang akan menjamin lancar dan amannya semua pihak dalam proses pembangunan ekonomi Kabupaten Wonogiri.

a. Pertanian

Sektor pertanian (dalam arti luas) menjadi salah satu sektor unggulan daerah Kabupaten Wonogiri yang sampai dua puluh tahun ke depan masih akan menjadi unggulan untuk menopang perekonomian Kabupaten Wonogiri. Kondisi saat ini, sektor pertanian masih fokus pada sisi produksi yang belum optimal memberikan nilai tambah produk pertanian dan peningkatan kesejahteraan. Untuk itu peningkatan produktivitas sektor pertanian terutama hilirisasi sektor pertanian menjadi salah satu kebijakan penting untuk transformasi ekonomi Kabupaten Wonogiri. Kebijakan ini diharapkan juga akan berdampak pada kesejahteraan pelaku sektor pertanian terutama petani/nelayan.

Arah Kebijakan jangka panjang dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas, nilai tambah, serta peningkatan kesejahteraan pelaku usaha sektor pertanian diarahkan antara lain melalui: 1) modernisasi dalam pembangunan sektor pertanian berbasis riset, teknologi, dan inovasi baik di sisi hulu maupun hilir; 2) pengembangan pertanian terintegrasi (hulu hilir); 3) pengembangan pertanian berkelanjutan; 4) penguatan kemandirian pengelolaan pertanian; 5) perbaikan di sisi hulu atau produksi terutama dalam menjamin biaya produksi pertanian tidak lebih besar dari pendapatan yang diterima oleh para petani/nelayan; 6) regenerasi pelaku sektor pertanian; 7) perluasan diversifikasi produk pertanian; 8) pengembangan pertanian berbasis korporasi; 9) penguatan sistem distribusi produk pertanian; 10) peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha sektor pertanian; 11) penguatan perlindungan terhadap pelaku usaha sektor pertanian.

b. Industri pengolahan

Sektor industri pengolahan di Kabupaten Wonogiri menjadi salah satu sektor penyumbang terbesar pada perekonomian Kabupaten Wonogiri. Untuk itu, dalam dua puluh tahun ke depan kebijakan peningkatan produktivitas sektor ini menjadi penting dalam upaya akselerasi peningkatan perekonomian daerah yang memiliki daya saing global maupun nasional.

Arah kebijakan peningkatan produktivitas industri pengolahan di Kabupaten Wonogiri dalam dua puluh tahun ke depan antara lain meliputi: 1) penguatan industri kecil dan menengah agar memiliki nilai tambah tinggi; 2) pengembangan industri berbasis teknologi, riset dan inovasi, dan ramah lingkungan (*green investment*); 3) pengembangan industri bahan baku local; 4) penguatan integrasi rantai pasok antarindustri didukung dengan ketersediaan infrastruktur konektivitas dan logistik pendukung industri; 5) peningkatan penyediaan infrastruktur pendukung industri pengolahan ramah lingkungan; 6) penguatan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha industri pengolahan agar lebih produktif, inovatif, dan kreatif; 7) digitalisasi industri pengolahan; 8) penciptaan iklim usaha yang sehat dan iklim kemitraan yang mendorong produktivitas industri pengolahan; 9) peningkatan penumbuhan kawasan industri/kawasan peruntukan industri baru.

c. Perdagangan

Sektor perdagangan adalah salah satu sektor yang berkontribusi besar pada perekonomian daerah Kabupaten Wonogiri. Perlu adanya penguatan dan pengembangan sektor perdagangan.

Arah Kebijakan Kabupaten Wonogiri dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada: 1) penguatan ekspor produk unggulan daerah; 2) pengurangan ketergantungan import; 3) penguatan standarisasi produk-produk unggulan daerah sehingga mampu bersaing di pasar global dan nasional; 4) pengendalian harga dalam upaya mengendalikan tingkat inflasi yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat; 5) peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku sektor perdagangan untuk mampu menciptakan produk yang berdaya saing tinggi dan memasarkannya di pasar global maupun nasional; 6) penguatan iklim kemitraan pasar produk unggulan daerah; 7) penguatan sistem distribusi produk perdagangan; 8) penyederhanaan regulasi, penguatan kapasitas hukum, persaingan persaingan usaha, termasuk kelembagaan persaingan usaha.

d. UMKM dan Koperasi

Perekonomian Kabupaten Wonogiri mampu tumbuh dan berkembang salah satunya ditopang oleh sektor UMKM dan koperasi yang dinilai mampu menghadapi goncangan pasar global dan nasional maupun dinamika global lainnya. Sektor ini juga mampu banyak menyerap tenaga kerja yang baik yang berpendidikan rendah sampai berpendidikan tinggi. Untuk itu, agar sektor ini ke depan tetap mampu berkontribusi tinggi pada perekonomian daerah didorong untuk lebih meningkatkan produktivitas agar memiliki nilai tambah lebih dan mampu bersaing secara global dan nasional.

Arah Kebijakan yang diterapkan untuk penguatan sektor UMKM dan koperasi dalam jangka panjang antara lain meliputi: 1) peningkatan kualitas produk unggulan UMKM berbasis riset, inovasi, dan teknologi; 2) fasilitasi perluasan akses pasar, kemitraan, modal/pembiayaan inovatif, kemasan, standar produk, dan manajemen usaha; 3) akselerasi digitalisasi dan penggunaan teknologi bagi pelaku UMKM disertai dengan penyediaan akses internet dan teknologi yang memadai dan terjangkau; 4) peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku UMKM untuk mampu mengembangkan produk UMKM yang memiliki standar pasar, berbasis riset, inovasi, dan teknologi; 5) pengembangan wirausaha baru; 6) penguatan koperasi produksi sebagai konsolidator UMKM terutama bagi usaha mikro kecil; 7) perbaikan mekanisme pengawasan dan penjaminan koperasi simpan pinjam; 8) peningkatan kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia koperasi.

e. Pariwisata

Kabupaten Wonogiri memiliki potensi pariwisata yang cukup tinggi yang mampu menarik kunjungan wisatawan sehingga mampu memberikan dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan mendorong perekonomian daerah. Untuk itu, pembangunan pariwisata ke depan menjadi penting sebagai bentuk upaya mewujudkan ekonomi Kabupaten Wonogiri yang berdaya saing.

Arah kebijakan pembangunan pariwisata Kabupaten Wonogiri dalam dua puluh tahun ke depan antara lain meliputi: 1) pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan; 2) penguatan promosi pariwisata berbasis digital; 3) peningkatan kualitas destinasi wisata berbasis klaster dengan perbaikan sarana prasarana destinasi wisata; 4) penguatan diversifikasi daya tarik pariwisata sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah seperti pemanfaatan keragaman sumber daya alam, budaya, kreativitas, dan olahraga berbasis digital; 5) peningkatan infrastruktur konektivitas antardestinasi wisata;

6) penguatan integrasi antar destinasi wisata; 7) penguatan kapasitas SDM pelaku pariwisata termasuk pelaku UMKM pariwisata; 8) penguatan fasilitas kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata.

f. Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif saat ini menjadi salah satu sektor ekonomi yang mampu menjadi kekuatan baru untuk peningkatan perekonomian daerah Kabupaten Wonogiri. Sektor ekonomi kreatif mampu menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonogiri ditengah pelambatan pertumbuhan ekonomi secara global terutama pasca pandemi Covid-19. Pengembangan sektor ekonomi kreatif akan mampu menciptakan nilai tambah tinggi berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia dan berbasis ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi.

Arah kebijakan di sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Wonogiri dalam dua puluh tahun ke depan antara lain mencakup: 1) peningkatan kualitas sumber daya manusia ekonomi kreatif; 2) pengembangan dan penguatan sistem kelembagaan ekonomi kreatif dan jejaringnya sampai tingkat desa; 3) peningkatan pemasaran dan promosi produk ekonomi kreatif 4) pengembangan sistem pembiayaan dan pendanaan bagi pengembangan ekonomi kreatif; 5) penyediaan infrastruktur fisik dan nonfisik yang memadai dan terjangkau untuk mendukung pengembangan kreativitas; 6) peningkatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan warisan budaya lokal sebagai bahan baku usaha ekonomi kreatif; 7) pengembangan sistem regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif; 8) peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kreativitas dan perlindungan hak kekayaan intelektual; 9) pengembangan dan penguatan jejaring kabupaten/kota kreatif; 10) pengembangan dan penguatan desa kreatif terutama pada produk kreatif unggulan; 11) penguatan standarisasi produk dan praktek usaha ekonomi kreatif.

g. Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas semua sektor ekonomi daerah didukung dengan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan kompeten, adaptif, inovatif, dan mampu menguasai pasar kerja. Guna meningkatkan produktivitas tenaga kerja agar mampu berkontribusi dalam peningkatan produktivitas ekonomi daerah perlu adanya pengembangan dan penguatan sektor tenaga kerja.

Arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam dua puluh tahun ke depan

antara lain: 1) penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, disertai dengan penguatan regulasi tentang vokasi; 2) penguatan keahlian dan kompetensi digital, riset dan inovasi; 3) penguatan sistem perlindungan tenaga kerja; 4) penguatan iklim ketenagakerjaan yang mendukung pasar kerja yang inklusif termasuk penerapan upah minimum yang berkeadilan; 5) penyediaan informasi pasar kerja dalam jangkauan luas berbasis digital terintegrasi dengan dunia usaha dunia industri.

h. Peningkatan fiskal Daerah

Peningkatan fiskal daerah dengan optimalisasi sektor pajak masih menjadi fokus dalam dua puluh tahun kedepan, antara lain melalui: a. Intensifikasi melalui implementasi dasar hukum pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang baru; b. Ekstensifikasi obyek pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan baru; c. Kerjasama dengan stakeholder dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak; d. Peningkatan layanan pembayaran pajak dengan kemudahan berbasis teknologi informasi serta pengembangan titik layanan yang melibatkan partisipasi masyarakat di pedesaan;

i. Jasa Layanan Keuangan dan BUMD

Produktivitas jasa Layanan keuangan dan BUMD menjadi salah satu faktor dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Wonogiri dua puluh tahun kedepan. Adapaun arah kebijakan yang dilaksanakan adalah : 1. Meningkatkan jasa intermediasi perbankan; 2. Meningkatkan penyaluran kredit; 2. Meningkatkan kinerja BUMD

Wng07. Penguatan Riset dan Inovasi

Riset dan inovasi menjadi salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi jangka panjang. Penguatan riset dan inovasi akan terus didorong dalam dua puluh tahun ke depan agar memberikan perubahan dan kemajuan yang besar terhadap kemajuan diseluruh sektor.

Arah kebijakan dalam Penguatan Riset dan Inovasi antara lain: 1) penguatan peran dan kapasitas pusat riset dan inovasi di semua lembaga dan Perusahaan; 2) penguatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia riset dan inovasi di semua sektor; 3) penguatan tata kelola kelembagaan riset dan inovasi; 4) optimalisasi pemanfaatan hasil riset dan inovasi di semua sektor; 5)

penguatan kerjasama riset dan inovasi antar pelaku usaha, swasta, dan pemerintah; 6) penguatan inkubasi hasil riset dan inovasi, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hak paten atas hasil riset dan inovasi.

Wng08. Penerapan Ekonomi Hijau

Pembangunan ekonomi hijau (*green economy*) adalah pembangunan yang berpedoman terhadap kelestarian sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup. Perwujudan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Wonogiri dalam dua puluh tahun kedepan diarahkan dengan menerapkan prinsip ekonomi hijau yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Dengan menerapkan ekonomi hijau diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah tetap tinggi dan tetap sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung agar tetap lestari dan berkelanjutan.

Arah kebijakan penerapan *green economy* di Kabupaten Wonogiri dapat dikelompokkan menjadi enam kategori sesuai dengan kategori dalam program *UI Green City Metric* yang diikuti oleh Kabupaten Wonogiri yaitu : 1) Penataan Ruang dan Infrastruktur; 2) Energi dan Perubahan Iklim; 3) Tata Kelola Sampah dan Limbah; 4) Tata Kelola Air; 5) Akses dan Mobilitas; 6) Tata Pamong atau Governance

Wng09. Infrastruktur Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah dalam hal kelancaran dan keselamatan perjalanan serta distribusi barang dan jasa, meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah, dan infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi. Penyediaan infrastruktur bagi masyarakat (termasuk untuk kelompok rentan dan berkebutuhan khusus) juga menjadi salah satu prasyarat bagi mendukung aktivitas masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Arah Kebijakan untuk mewujudkan Pembangunan infrastruktur Kabupaten Wonogiri dalam jangka panjang adalah : 1) pemantapan jalan dan jembatan yang berkualitas sampai ke seluruh wilayah untuk meningkatkan distribusi barang dan jasa dalam mendukung peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Wonogiri ; 2) peningkatan sarana aksesibilitas dan konektivitas wilayah untuk memperlancar proses distribusi barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan dasar dalam meningkatkan perekonomian, perbaikan

sosial, dan kesejahteraan masyarakat Wonogiri; 3) penguatan penyediaan prasarana sarana sumber daya air untuk mendukung kegiatan perekonomian; 4) penyediaan jaringan listrik secara merata dan berkelanjutan; 5) peningkatan jaringan komunikasi digital untuk mendukung aksesibilitas pembangunan; 6) penguatan pemenuhan dan pemerataan perumahan dan kawasan permukiman yang layak; 7) penguatan implementasi penataan ruang terutama dalam perwujudan struktur ruang; 8) Peningkatan kualitas Irigasi.

Tabel 5. 2 Sasaran Pokok, Arah Kebijakan, Indikator Utama Pembangunan Dan Target Terwujudnya Ekonomi Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	2025 (Baseline)	Target Akhir Tahap I (2025 - 2029)	Target Akhir Tahap II (2030 - 2034)	Target Akhir Tahap III (2035 - 2039)	Target Akhir
TERWUJUDNYA EKONOMI YANG BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN	Wng06. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	19,32	20,16	21,22	22,27	26,44
		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2,67	3,39	4,29	5,18	6,26
		Rasio Kewirausahaan Daerah	%	2,28	3,41	4,83	6,24	9,13
		Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,61	4,92	5,77	6,61	8,98
		Return on Aset (ROA) BUMD	%	1,88	2,68	4,09	5,32	6,80
		Disparitas Harga	%	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	20,79	21,33	22	22,67	23,48
		Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27
		Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten per PDRB	%	19,94	20,27	20,7	21,14	21,68
		Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten per PDRB	%	28,31	30,48	33,44	36,68	40,98
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,82 - 1,52	1,65 - 1,35	1,44 - 1,14	1,23 - 0,93	0,97 - 0,67
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	68,27	71,44	75,40	79,37	84,12
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	3,58	4,33	5,08	5,83	6,58
		Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota	Juta Rupiah	39,07-39,34	72,45	111,2	149,94	196,45-230,73
		Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	19,48-19,68	21,87	21,78	21,7	24,48-25,68
		Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	130	140	150	160	170

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	2025 (Baseline)	Target Akhir Tahap I (2025 - 2029)	Target Akhir Tahap II (2030 - 2034)	Target Akhir Tahap III (2035 - 2039)	Target Akhir
	Wng07. Penguatan Riset Dan Inovasi	Kapabilitas Inovasi	Angka	2,5	2,7	2,95	3,2	3,5
	Wng08. Penerapan Ekonomi Hijau	Penurunan Emisi GRK	TonCO2eq	6351,53	8942,7	10562,7	12181,7	13801,2
		Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	36,96 (2022)	47,57	60,83	74,09	90,00
	Wng09. Infrastruktur Berkualitas Dan Ramah Lingkungan	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	89,6	91,2	93,2	95,2	97,6
		Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	%	7,25%	10,45%	13,30%	15,02%	17,25%
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	70,72	77,54	83,19	87,29	91,08
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	15	20	45	70	100
		Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	%	87,90	90,32	93,35	96,37	100
		Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Angka	62,91	65,63	69,03	72,43	76,51

5.2.3 Sasaran 3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Wng10. Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan yang baik mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif dan akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik lebih optimal. Tata kelola pemerintahan yang baik ke depan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang dinamis dengan memperkuat pemerintahan yang semakin adaptif dan kolaboratif, dengan integritas yang semakin kuat.

Arah Kebijakan transformasi tata kelola pemerintahan Kabupaten Wonogiri dalam dua puluh tahun ke depan meliputi: 1) penguatan pelayanan publik yang cepat, tepat, berbasis digital, serta keterbukaan pelayanan pengaduan masyarakat (*open government*); 2) penguatan manajemen organisasi dan proses bisnis yang semakin adaptif dan berorientasi pada hasil, berbasis riset, dan risiko; 3) penguatan kelembagaan yang efektif; 4) penguatan pendapatan asli daerah dan sumber-sumber pembiayaan alternatif lainnya; 5) digitalisasi tata

kelola pemerintahan; 6) penguatan manajemen sumber daya aparatur agar lebih efektif dan efisien, termasuk akselerasi peningkatan kualifikasi dan kompetensi ASN; 7) penyederhanaan regulasi dan penguatan penegakan hukum; 8) penguatan manajemen pengawasan yang independen dan berintegritas; 9) penguatan budaya kerja, pola pikir birokrasi, dan komitmen; 10) penguatan kolaborasi dan kerja sama antardaerah, antara daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka perwujudan cita-cita pembangunan daerah.

Terwujudnya tata kelola pemerintahan Kabupaten Wonogiri yang baik tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut:

Tabel 5. 3 Sasaran Pokok,Arah Kebijakan,Indikator Utama Pembangunan Dan Target Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	2025 (Baseline)	Target Akhir Tahap I (2025 - 2029)	Target Akhir Tahap II (2030 - 2034)	Target Akhir Tahap III (2035 - 2039)	Target Akhir
TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	Wng10. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	68,33	71,66	75,83	80	85,00
		Indeks Reformasi Hukum	Angka	37,75	48,2	61,26	74,33	90,00
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,34	3,72	3,98	4,1	4,31
		Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,08	4,26	4,49	4,72	5,00
		Indeks Integritas Nasional	Angka	82,83	86,09	90,16	94,23	99,12

5.2.4 Sasaran 4. Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Bencana Alam.

Wng11. Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Dan Bencana Alam

Keberlanjutan proses pembangunan dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung yang dapat terwujud hanya apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dijaga, dipelihara, dan dilestarikan. Dengan terjaganya sumber daya alam dan lestarnya lingkungan hidup akan mengurangi potensi terjadinya bencana.

Arah Kebijakan dalam upaya terwujudnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada: 1) Penguatan aksi pembangunan rendah karbon dan upaya adaptasi perubahan iklim; 2) penguatan pengelolaan sumber daya air; 3) penguatan keberlanjutan sumber daya pesisir dan laut; 4) pengendalian pencemaran, kerusakan

lingkungan hidup, dan pengelolaan sampah; 5) penguatan mitigasi dan adaptasi bencana. 6) penguatan penyediaan sarana air minum dan sanitasi aman bagi masyarakat;

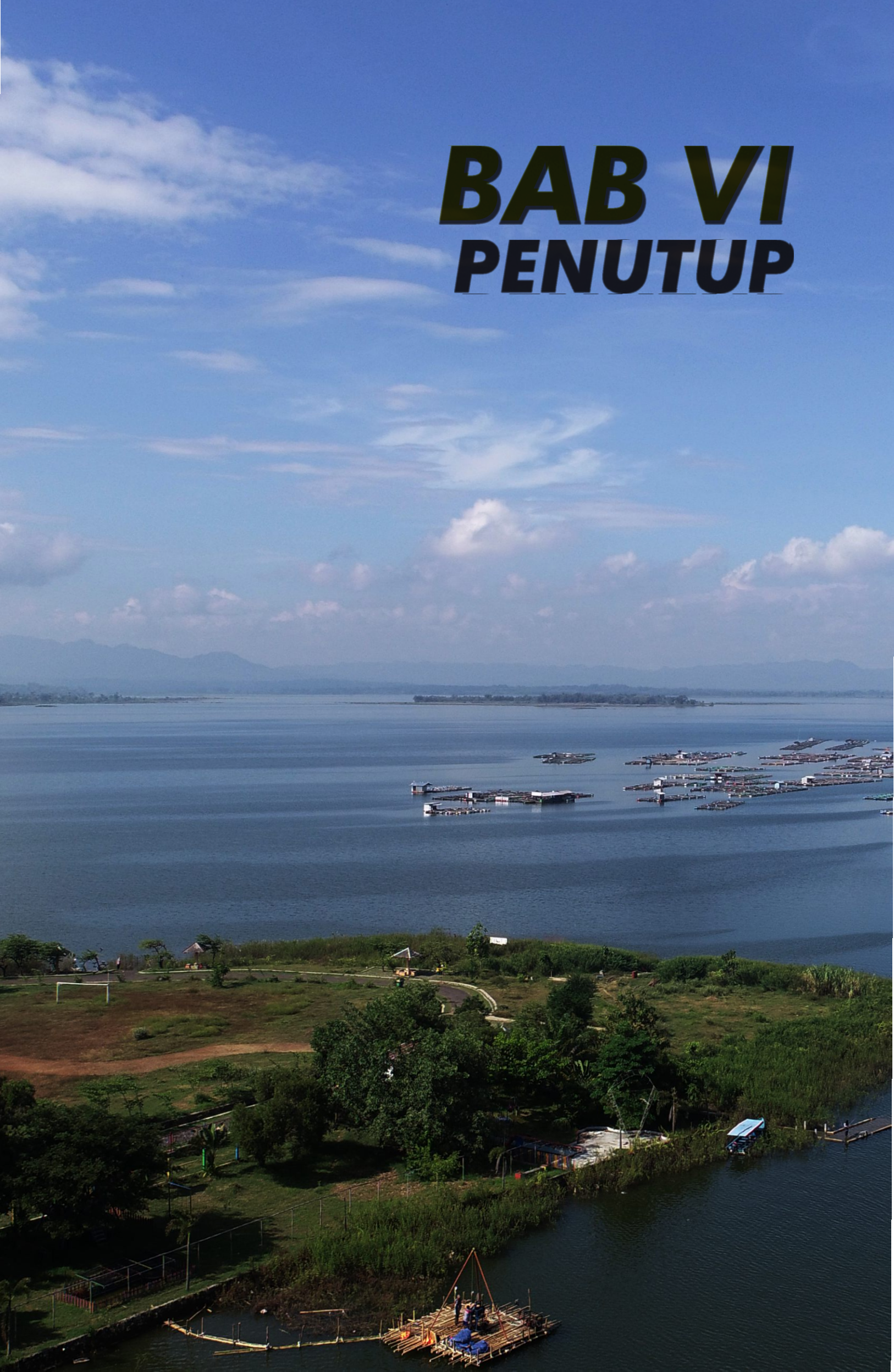
Terwujudnya ketahanan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan bencana Kabupaten Wonogiri tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut :

Tabel 5. 4 Sasaran Pokok, Arah Kebijakan, Indikator Utama Pembangunan Dan Target Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Bencana Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	Satuan	2025 (Baseline)	Target Akhir Tahap I (2025 - 2029)	Target Akhir Tahap II (2030 - 2034)	Target Akhir Tahap III (2035 - 2039)	Target Akhir
TERWUJUDNYA KETAHANAN SUMBER DAYA ALAM, LINGKUNGAN HIDUP, DAN BENCANA ALAM	Wng11. Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Bencana Alam	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	104,14 - 103,72	97,79 - 82,98	89,84 - 57,05	80,90 - 31,12	72,37 - 69,14
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	3,63	19,63	39,63	59,63	83,63
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	75,65	76,34	77,19	78,05	79,07

BAB VI

PENUTUP



BAB
VI

PENUTUP

Penyusunan RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, selain itu juga mengacu pada RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 sebagai wujud dari keterpaduan dalam perencanaan pembangunan daerah. RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kabupaten Wonogiri yang akan diwujudkan dalam waktu 20 tahun mendatang.

Perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam dokumen RPJPD ini dapat diwujudkan dengan baik dengan didukung komitmen yang tinggi para penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan program dan kegiatan, peran serta para pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan, kondusivitas nasional dan global yang menjamin stabilitas ekonomi dan pembangunan, kemampuan adaptasi terhadap situasi disruptif dan peran serta masyarakat.

6.1 Pedoman Transisi

Pedoman transisi diperlukan dalam rangka menjaga kesinambungan dan kontinuitas kebijakan pembangunan daerah. Dalam upaya mencegah kekosongan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah mendatang maka Penyusunan Ranwal RPJPD Kabupaten Wonogiri periode mendatang dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir. Kurun waktu RPJPD Kabupaten Wonogiri periode berikutnya adalah sesuai dengan kurun waktu RPJPN yang akan datang.

Perubahan RPJPD Kabupaten Wonogiri 2025 – 2045 ini dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan yang berlaku;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
3. Terjadi perubahan yang mendasar dalam kebijakan pembangunan nasional.

4. Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun;

6.2 Kaidah Pelaksanaan.

Penyusunan kaidah pelaksanaan bermakna sebagai pedoman dalam pelaksanaan dari RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025–2045. Tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga dapat mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pendanaan dan waktu pelaksanaan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kaidah pelaksanaan RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025–2045, adalah sebagai berikut :

1. Konsistensi perencanaan dan pendanaan, disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas
2. Kerangka pengendalian dan evaluasi yang kontinyu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan, dengan ruang lingkup meliputi: (a) pengendalian perencanaan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan, dan (b) pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko,
3. Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Wonogiri agar melaksanakan arah kebijakan yang terdapat dalam RPJPD sebaik-baiknya;
4. Semua perangkat daerah Kabupaten Wonogiri dalam menyusun dokumen perencanaan berkewajiban memedomani RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045 .
5. Penjabaran lebih lanjut RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025–2045 dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Penjabaran dalam RPJMD Kabupaten Wonogiri yang memuat visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih kedalam RPJMD.
6. RPJPD Kabupaten Wonogiri menjadi pedoman dalam penyusunan Visi dan Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati.
7. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJPD, maka Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida)

- Kabupaten Wonogiri berkewajiban menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi terhadap capaian kinerja RPJPD secara periodik;
8. Selanjutnya agar dapat menjamin pencapaian visi dan misi yang telah disusun, maka pelaksanaan RPJPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2045 ini menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri.

BUPATI WONOGIRI,

Ttd.

JOKO SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Frc. MEI DWI KUSWITANTI, S.H., M.Hum.
NIP. 19740519 199903 2 007